LAPORAN KINERJA PROVINSI PAPUA TAHUN 2022

Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Yang Berkeadilan

PAPUA

KARYA SWADAYA

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
MARET 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Papua ini dapat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pencapaian Kinerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 kepada seluruh stakeholders.

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua berisikan informasi mengenai Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2022 ini lebih diarahkan pada terselenggaranya *Good Governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan Realisasi Kinerja dalam Laporan Akuntabilitas SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Materi LKj mengandung analisis pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tahun yang bersangkutan.

indikator target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 adalahpredikat “Sangat Berhasil”. Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Papua.

Demikian Penyusunan LKj Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022 kami sampaikan, kiranya dapat menjadi bahan dalam rangka pengambilan kebijakan dan evaluasi terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Papua.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat.

Jayapura, 27 Maret 2023

PJ. GUBERNUR PAPUA

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

RINGKASAN EKSEKUTIF v

BAB I

PENDAHULUAN 1

1.1. GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA 1

1.1.1. Kondisi Geografis 1

1.1.2. Kondisi Demografis 2

1.1.3. Kondisi Pemerintahan 5

1.1.4. Kondisi Perekonomian 8

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 10

1.3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN 11

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 13

2.1. RENCANA STRATEGIS 13

2.1.1. Pernyataan Visi dan Misi 13

2.1.2. Tujuan dan Sasaran 23

2.1.3. Strategi Pembangunan Daerah 26

2.1.4. Strategi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2022 30

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 34

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 42

3.1. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA 42

3.2. CAPAIAN DAN ANALISA KINERJA 45

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN 148

BAB IV

PENUTUP 227

A. SIMPULAN 227

B. UPAYA PERBAIKAN 231

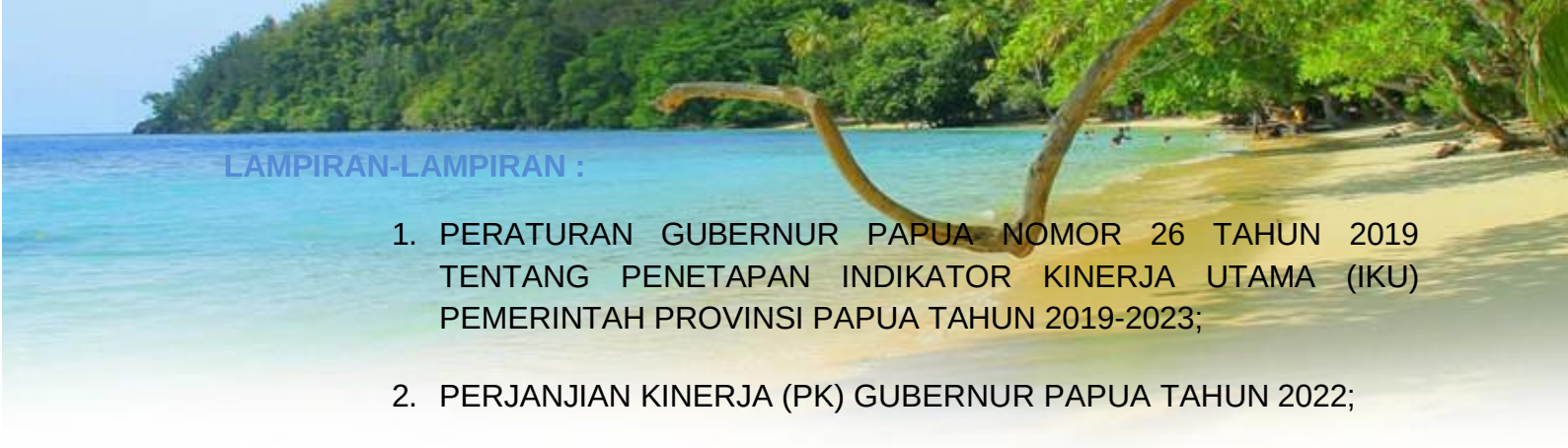

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023;

2. PERJANJIAN KINERJA (PK) GUBERNUR PAPUA TAHUN 2022;

3. REVIU LAPORAN KINERJA (LKj) PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 OLEH INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA;

4. TABEL PENGUKURAN KINERJA (TARGET, REALISASI, CAPAIAN KINERJA) PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2022 SESUAI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023;

5. PENGHARGAAN-PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DI TAHUN 2022.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022 menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Papua selama tahun 2022 Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2020 dapat dilihat dari keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran dari Target Indikator berdasarkan Rencana Kinerja 2022 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2019-2023.

Dari hasil pengukuran kinerja pada 26 (Dua Puluh Enam) Sasaran, dapat disimpulkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Papua "**Sangat Berhasil"**, hal ini dapat dilihat padacapaian kinerja pelaksanaan masing-masing Sasaran sebagai berikut :

- 16 Sasaran termasuk dalam kategori "Sangat Berhasil".
- 2 Sasaran termasuk dalam kategori "Berhasil".
- 1 Sasaran termasuk dalam kategori "Cukup Berhasil".
- 1 Sasaran termasuk dalam kategori "Kurang Berhasil".
- 6 Sasaran termasuk dalam kategori "Tidak Berhasil".

Secara umum masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi dalam pencapaian sasaran, yaitu:

1. Belum optimalnya Pemerintah Provinsi Papua dalam menentukan Target Kinerja, pengukuran dan evaluasi IKU yang belum dilaksanakan secara baik.
2. Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dilingkungan SKPD antara lain :
   1) Keterbatasan kualitas SDM dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2022.
   2) Kurangnya pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan.

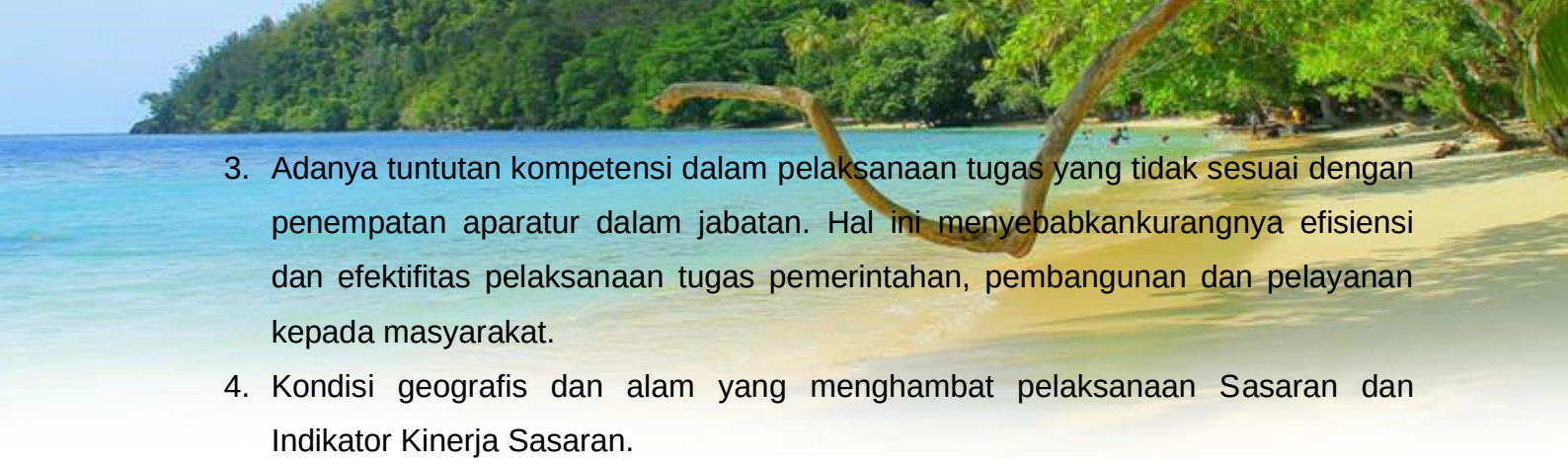

3. Adanya tuntutan kompetensi dalam pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan penempatan aparatur dalam jabatan. Hal ini menyebabkankurangnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Kondisi geografis dan alam yang menghambat pelaksanaan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.

Dari segi Akuntabilitas Keuangan, total anggaran Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022 adalah sebesar Rp7.079.992.700.354,00 dan anggaran yang diperuntukkan melaksanakan prioritas Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 26 Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Papua adalah sebesar Rp2.985.281.829.284,00 atau 42,17 persen. Realisasi belanja prioritas IKU adalah Rp2.512.800.224.180,59 atau 35,49 persen dari anggaran untuk melaksanakan prioritas Indikator Kinerja Utama (IKU).

Jumlah total anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun 2022 adalah Rp12.910.509.249.727 yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak langsung Rp5.830.516.549.373,00 dan Belanja Langsung Rp7.079.992.700.354,00. Dari anggaran belanja langsung tersebut, jumlah anggaran untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp2.985.281.829.284,00 atau 42,17 persen dari anggaran belanja langsung. Realisasi dari anggaran yang digunakan untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp2.512.800.224.180,59 dari realisasi belanja langsung atau 35,49 persen. Persentase realisasi anggaran untuk mencapai prioritas IKU dibandingkan dengan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU adalah 84,17 persen. Penyerapan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU sebesar 84,17 persen tersebut terjadi karena tidak semua anggaran yang disiapkan untuk melaksanakan program prioritas IKU dapat terserap seluruhnya.

BAB I

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA

1.1.1 Kondisi Geografis

Papua merupakan Provinsi terluas di Indonesia dengan luas 319.036,05 km^2.

Provinsi ini secara administratif berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Samudra Pasifik
- Sebelah Selatan : Laut Arafura
- Sebelah Barat : Papua Barat
- Sebelah Timur : Papua New Guinea

Provinsi Papua secara geografis terletak antara garis koordinat 01º00' LU - 09º10' LS dan 134º00' BT - 141º05' BT. Provinsi Papua hingga tahun 2019, terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota.

Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi Provinsi Papua

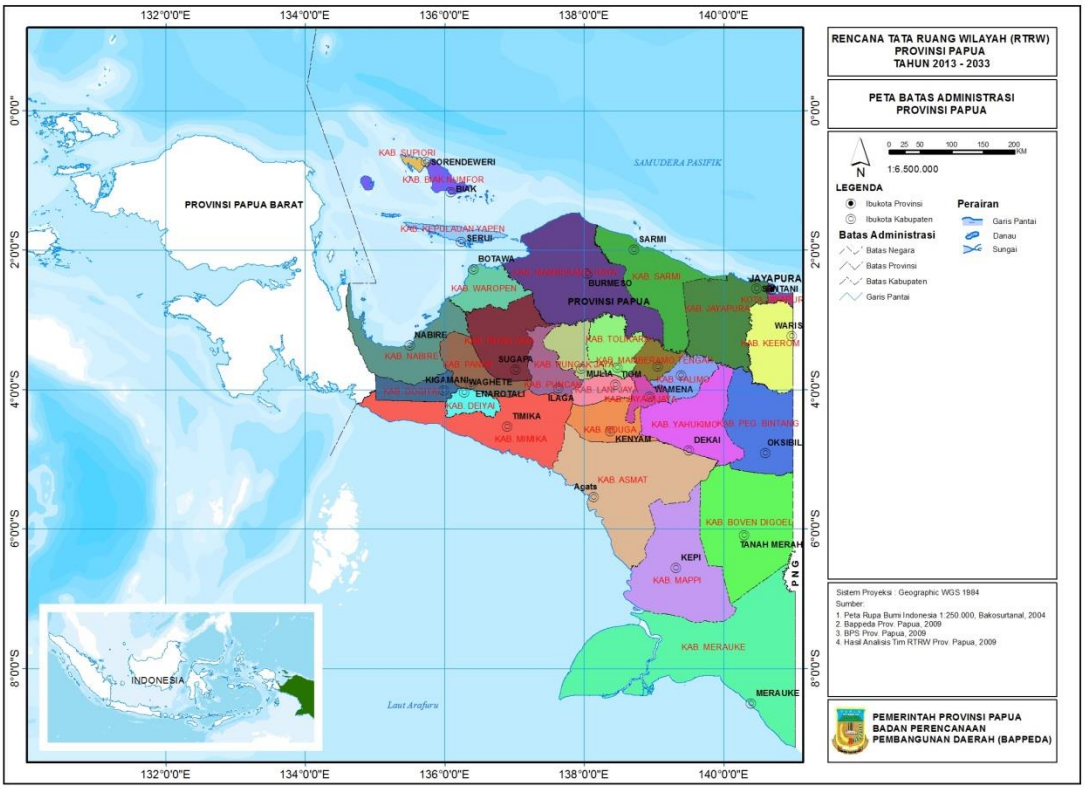

Topografi yang membentuk wilayah Provinsi Papua sangat bervariasi, mulai dari laut dangkal yaitu bagian dari Laut Arafura; dataran rendah hingga puncak gunung yang ditutupi oleh salju abadi di bagian tengah, perbukitan dan dataran di bagian utara, serta kepulauan di bagian utara.

Pada bagian tengah rangkaian pegunungan tinggi terdapat Pegunungan Jayawijaya yang terkenal karena terdapat 3 puncak tertinggi yang selalu diselimuti oleh salju abadi di Puncak Jayawijaya dengan ketinggian 5,030 m, Puncak Trikora 5,160 m dan Puncak Yamin 5,100 m.

Gambar. 1.2 Peta Ketinggian Provinsi Papua

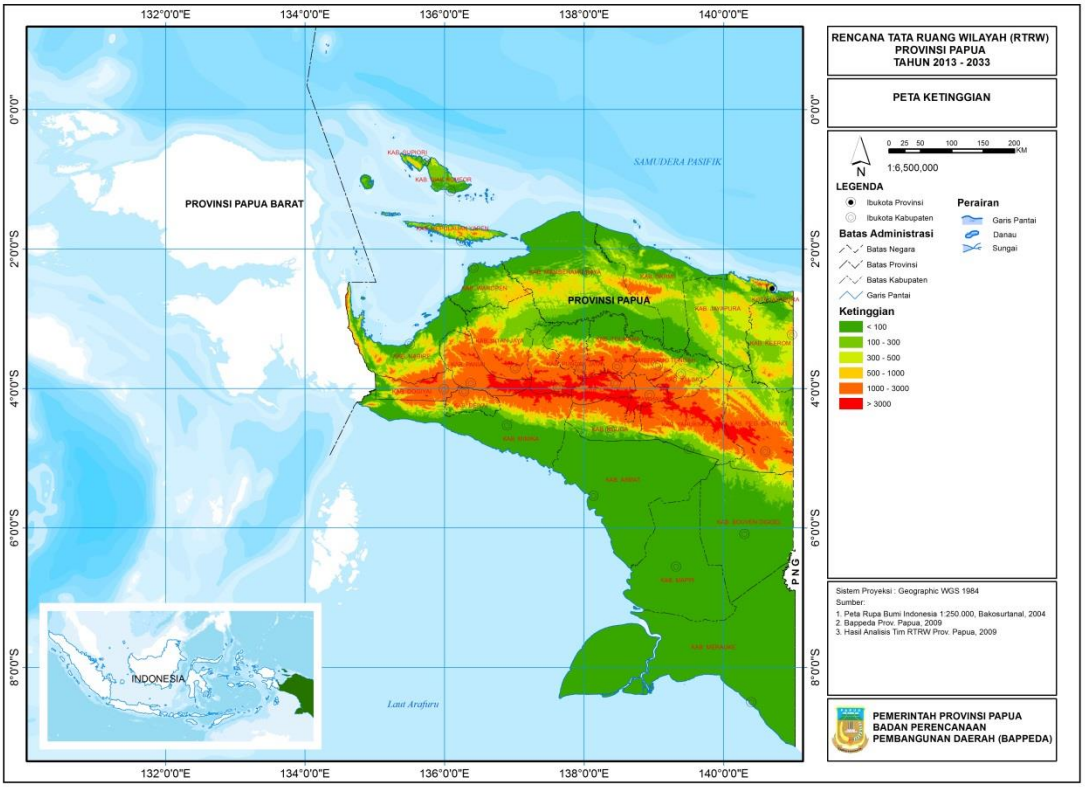

1.1.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Papua tahun 2022 adalah 4.418.571 juta jiwa yang tersebar di 29 kabupaten/kota.Jumlah penduduk terbesar mendiami Kota Jayapura sebesar 410.852 jiwa. Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan.Hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin sebesar 113.49 yang berarti terdapat 113 laki-laki setiap 100 Perempuan.

Grafik 1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi PapuaTahun 2016 – 2022

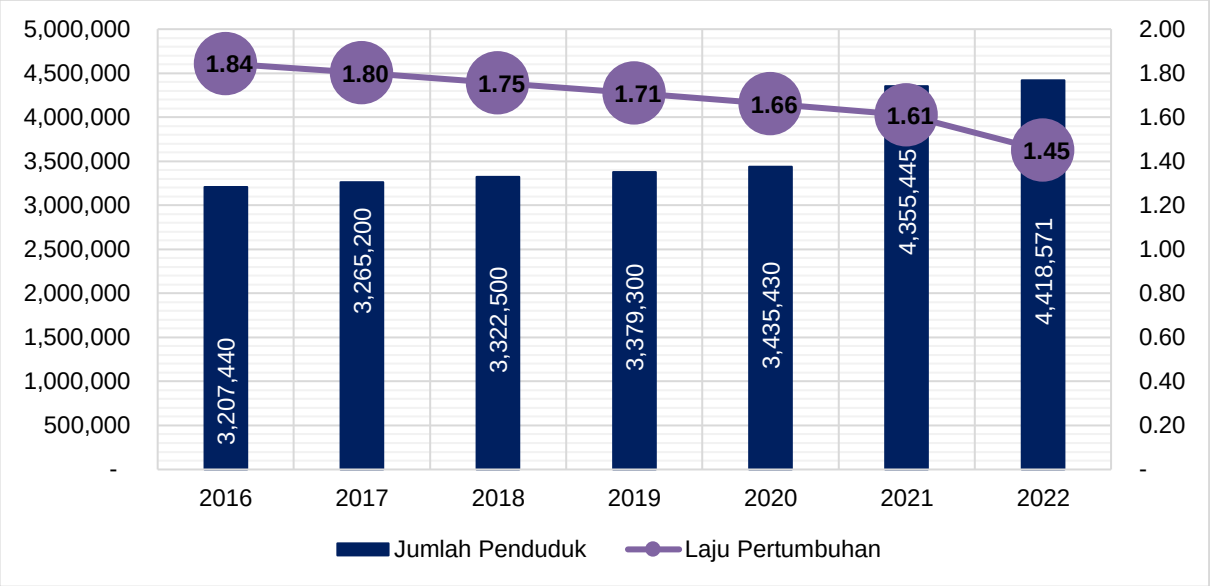

Sumber : BPS

Grafik 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Sex di Provinsi Papua Tahun 2014–2022

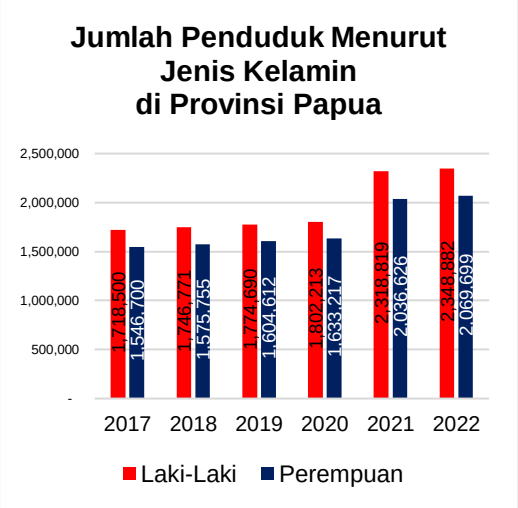

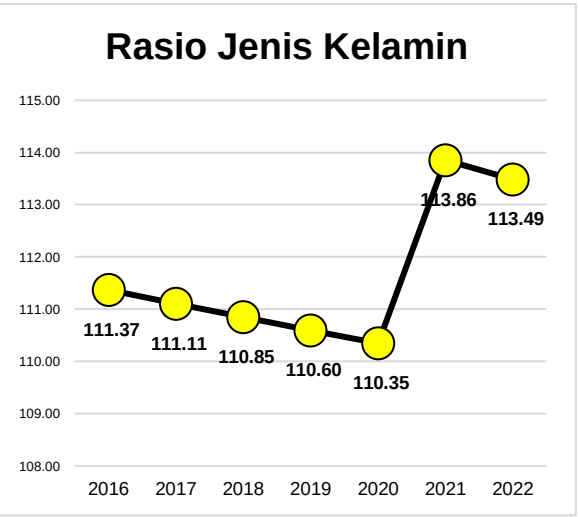

[a] Jumlah Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan [b] Rasio Sex

Dengan luas wilayah 316.553,11 km², kepadatan penduduk di Papua sebanyak 14,13 jiwa per km².Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Jayapura, yakni 491,76 jiwa per km², diikuti Kabupaten Jayawijaya (105,71 jiwa per km2) dan Kabupaten Lanny Jaya (86,10 jiwa per km²).Sedangkan kepadatan terendah terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya, yakni kurang dari 1,34 jiwa per km².

Grafik 1.3 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2022

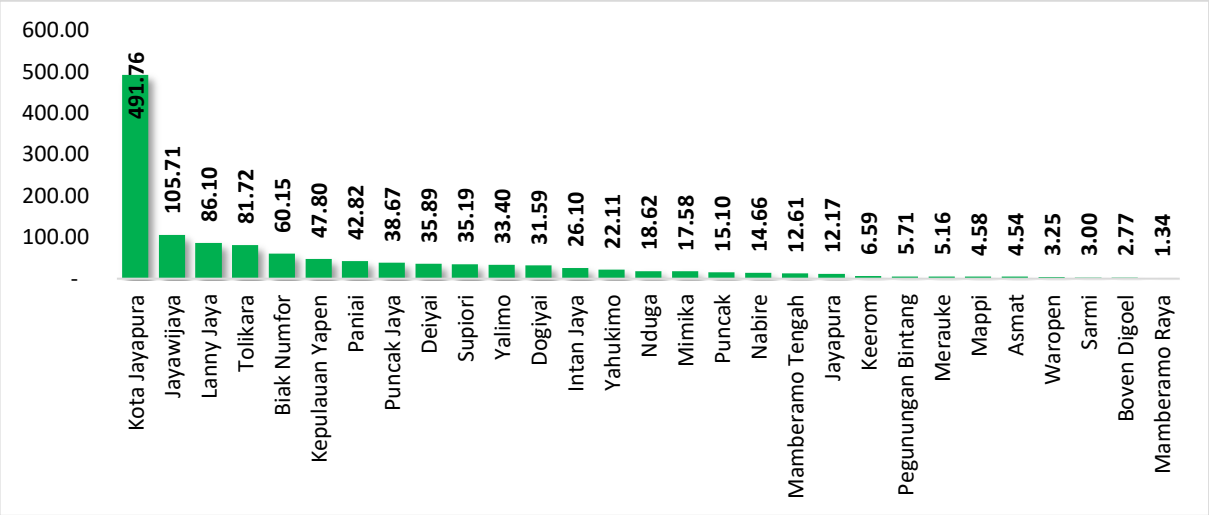

Penduduk Papua berdasarkan kelompok umur ternyata didominasi oleh kelompok usia muda (5-9 tahun). Kecilnya proporsi penduduk usia tua (kelompok usia 75 tahun keatas. Selain itu, komposisi penduduk seperti di atas menyebabkan rasio ketergantungan di Papua tahun 2022 cukup tinggi, yaitu sebesar **44,10** %.

Sumber : BPS

Grafik 1.4 Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2022

1.1.3 Kondisi Pemerintahan

Provinsi Papua, terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota dengan perkembangan jumlah distrik 576, dan desa 5.394. Rincian disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Distrik, Desa dan luas wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022

Kabupaten/Kota	JumlahDesa2022	JumlahKecamatan2022	LuasWilayah
Merauke	190	20	47.406,90
Jayawijaya	332	40	2.331,19
Jayapura	144	19	14.390,16
Nabire	89	15	4.549,75
Kepulauan Yapen	165	16	4.936,37
Biak Numfor	268	19	13.017,45
Paniai	216	24	20.686,54
Puncak Jaya	302	26	2.446,50
Mimika	152	18	2.300,37
Boven Digoel	112	20	24.665,98
Mappi	164	15	23.178,45
Asmat	221	23	24.687,57
Yahukimo	518	51	15.057,90
Pegunungan Bintang	277	34	14.655,36

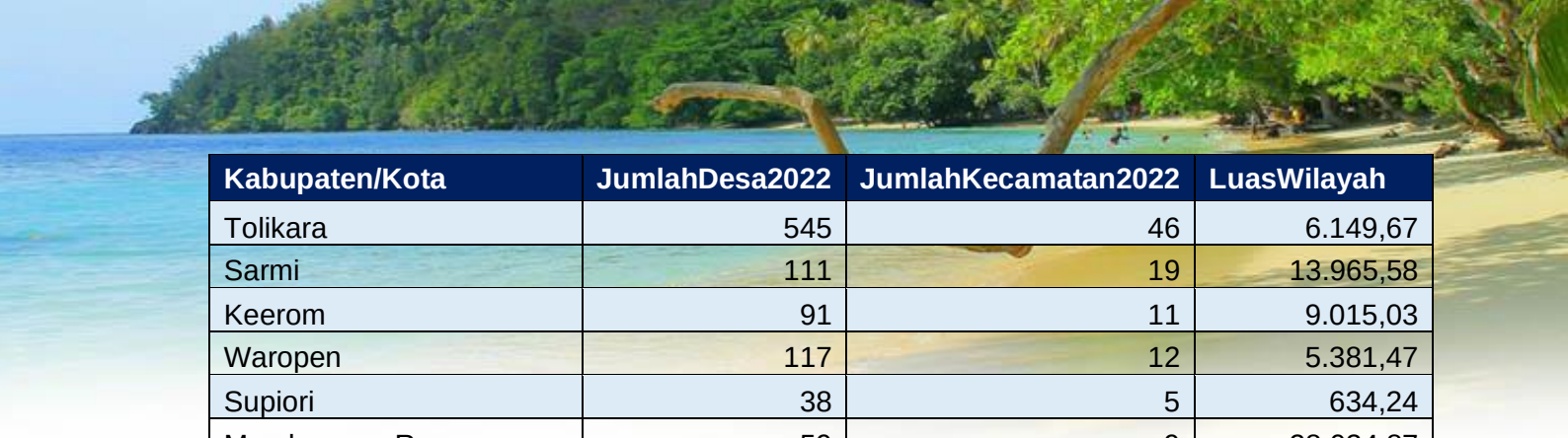

Kabupaten/Kota	JumlahDesa2022	JumlahKecamatan2022	LuasWilayah
Tolikara	545	46	6.149,67
Sarmi	111	19	13.965,58
Keerom	91	11	9.015,03
Waropen	117	12	5.381,47
Supiori	38	5	634,24
Mamberamo Raya	59	9	28.034,87
Nduga	248	32	5.825,22
Lanny Jaya	355	39	3.439,79
Mamberamo Tengah	59	5	3.384,14
Yalimo	300	5	3.658,76
Puncak	206	25	5.618,84
Dogiyai	79	10	4.522,15
Intan Jaya	97	8	9.336,60
Deiyai	67	5	2.325,88
Kota Jayapura	39	5	950,38
Provinsi Papua	**5561**	**576**	**316.553,11**

Gambar 1.3 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020

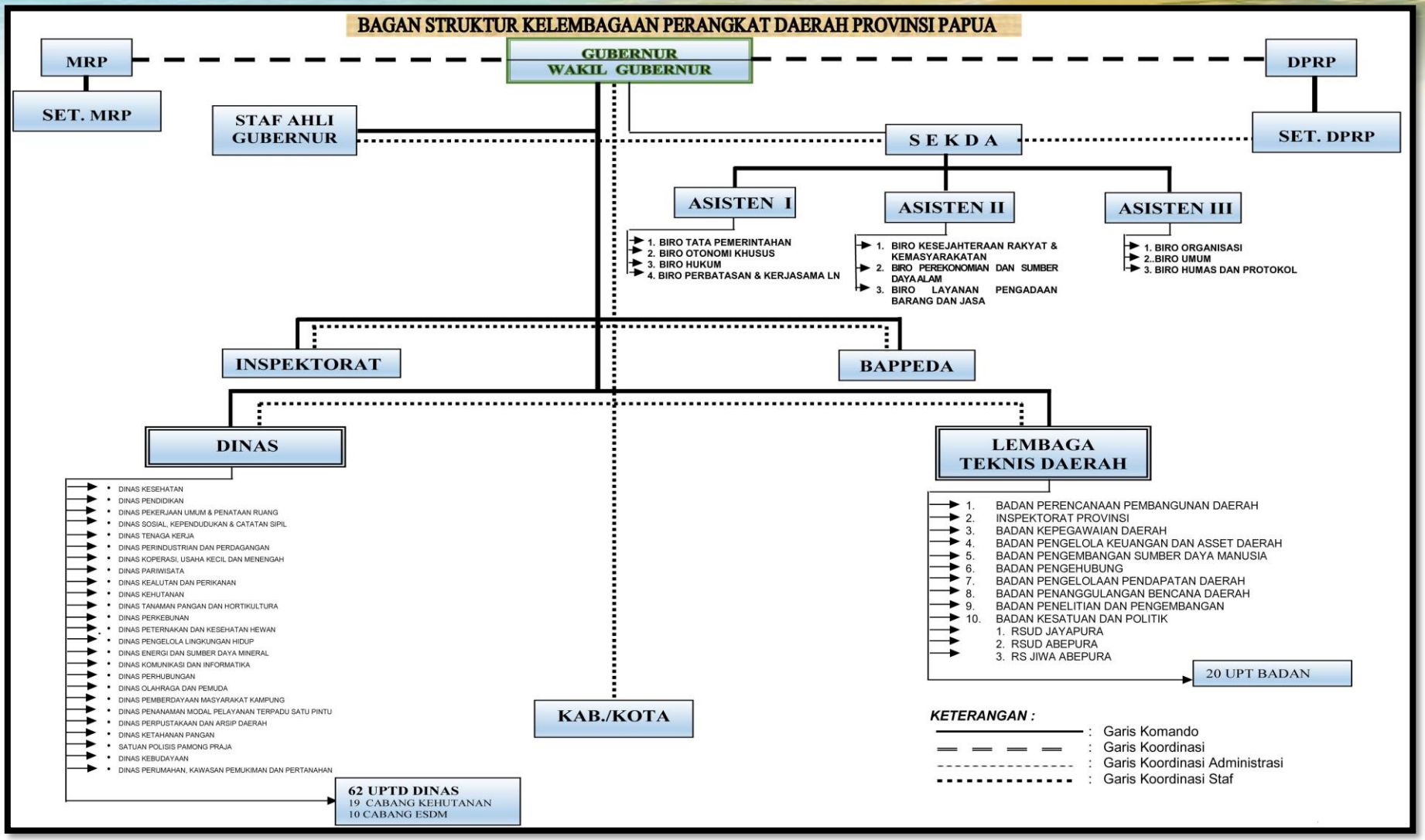

1.1.4 Kondisi Perekonomian

A. Struktur Ekonomi

Pada tahun 2022, distribusi PDRB Provinsi Papua sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami peningkatan di banding tahun sebelumnya, pada tahun 2021 sektor Pertambangan berkontribusi sebesar 36,82% kemudian meningkat di tahun 2022 sebesar 38,60% meningkat 1,78%. Setelah sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi kedua terhadap perekonomian Papua tahun 2022, sumbangan sektor ini sebesar 13,75 persen, menurun jika dibanding kontribusi di tahun 2021 sebesar 13,86%. Di urutan ketiga dan keempat, dengan peranan masing-masing sebesar 10,30 persen dan 9,20 persen adalah sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Perdagangan Besar dan Eceran.

Grafik 1.5 Distribusi PDRB ADHB dengan Tambang Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua (%)

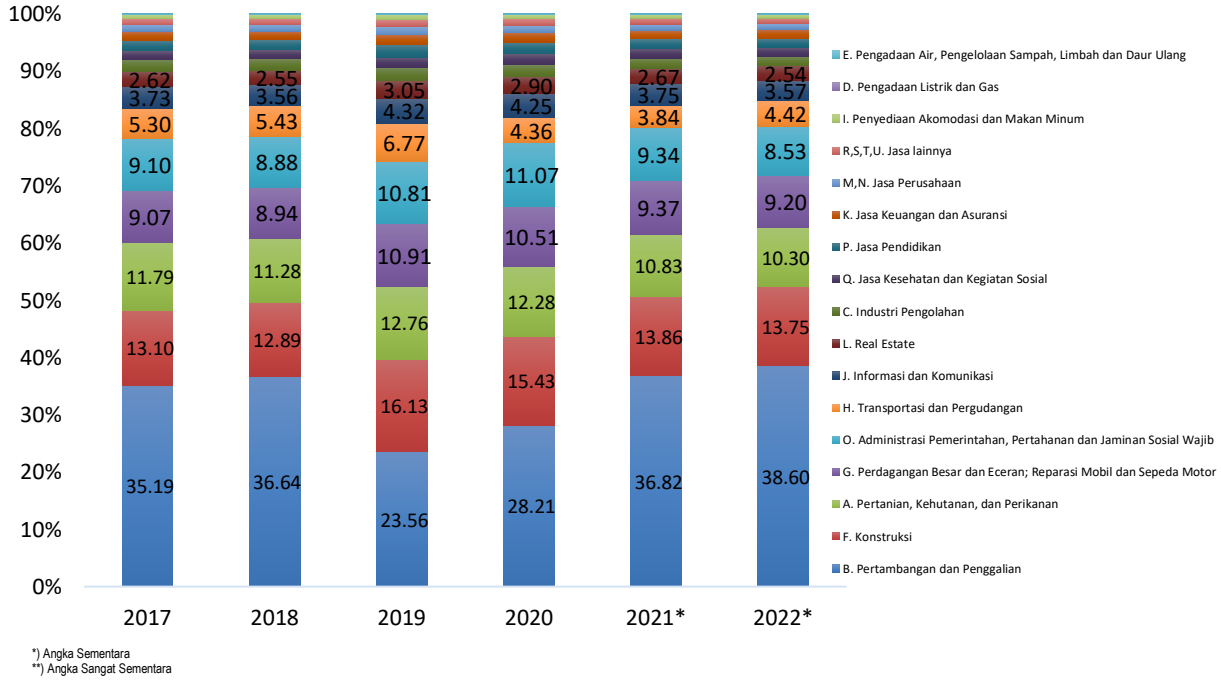

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Grafik 1.6 Distribusi PDRB ADHB Tanpa Tambang Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua (%)

Sumber : BPS

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu di wilayah tersebut. PDRB dapat menggambarkan kondisi perekonomian di suatu wilayah pada waktu tertentu.

PDRB Papua yang diukur atas dasar harga berlaku Papua terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 188.939,08 Miliar Rupiah, terus mengalami peningkatan sampai tahun 2022 sebesar 262.515,82 Miliar Rupiah.

Tabel 1.2 PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Dengan dan Tanpa Tambang Tahun 2011 - 2019 (miliar rupiah)

TAHUN	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU		PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN	
	DENGAN PERTAMBANGAN	TANPA PERTAMBANGAN	DENGAN PERTAMBANGAN	TANPA PERTAMBANGAN
2017	188.938,08	122.457,72	148.818,29	86.644,23
2018	210.600,57	133.440,13	159.711,86	91.100,68
2019	189.510,70	144.868,52	134.565,92	95.640,87
2020	198.185,57	141.985,74	137.786,27	92.391,08
2021*	235.486,11	148.790,05	158.674,32	94.758,87
2022**	262.515,82	161.181,03	172.904,83	98.679,73

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS 2019

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja *(performance improvement)* baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Papua.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), adalah :

1. Merupakan sarana bagi Pemerintah Provinsi untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).
2. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang atau dalam upaya peningkatan kinerja *(performance improvement)* organisasi baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua.

1.3SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerjadan Penetapan Kinerja

Pada bab ini diuraikan diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerjatahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan target capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi.

3.2 Capaian, Analisis, dan Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

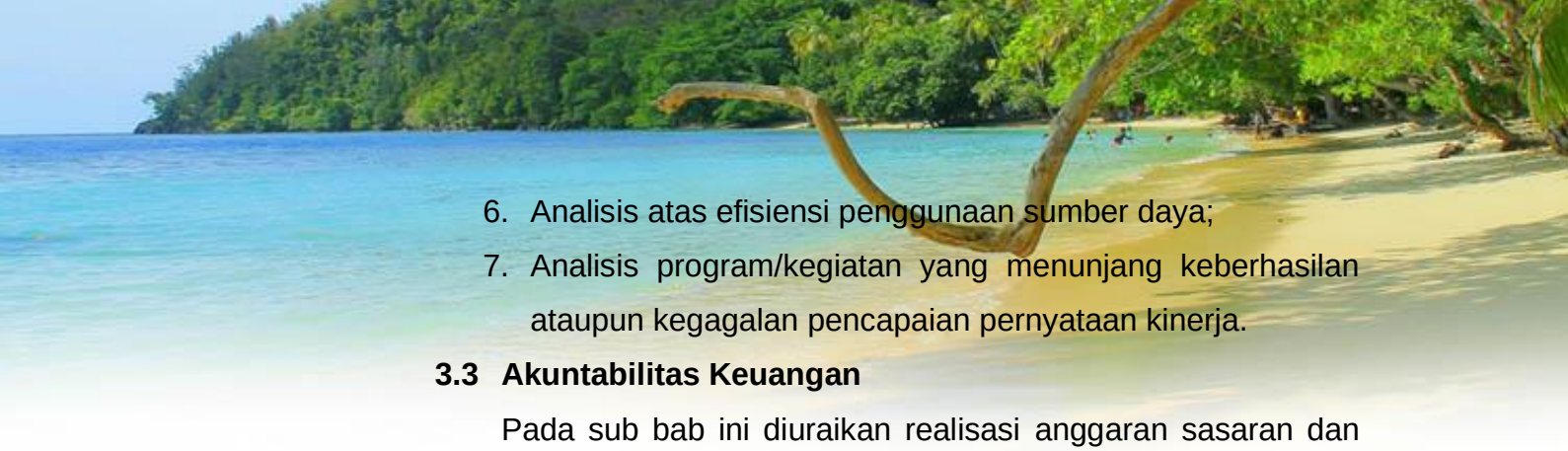

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran sasaran dan program yang mendukung sasaran, yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran : Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penetapan Kinerja (PK)
Penghargaan-Penghargaan

BAB II

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1. Pernyataan Visi dan Misi

Provinsi Papua memiliki modal dan aset yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografis penduduk, serta sumber daya kultural yang beragam dan kuat. Kita mampu bangkit dan mandiri mengubah tantangan pembangunan menjadi peluang dan kesempatan. Kita juga mempunyai lahan yang luas dan subur yang bisa ditanami oleh berbagai komoditi pangan dan pertanian. Masyarakat Papua memiliki potensi tinggi di berbagai bidang, kesenian dan budaya, dan olah raga serta kreativitas.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang telah menuai beragam hasil pada periode 2013-2018, harus terus dipertahankan dan dikembangkan. Capaian dan prestasi pembangunan di tahun 2013-2018, pada hakekatnya adalah salah satu modal dasar ---*main capital*--- yang harus dilanjutkan untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik lagi, di lima tahun yang akan datang. Pada periode 2019-2023 akan terus dan konsisten berfokus pada meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, membangun keadilan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia.

Periode 2019-2023 merupakan tahap ke tiga dalam proses pencapaian Visi jangka panjang Provinsi Papua. Visi Pembangunan Daerah Jangka Panjang seperti yang telah dituangkan dalam dokumen Rancangan RPJPD Provinsi Papua tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya **Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik**. Dalam hal ini, agenda atau tema tahap ke tiga pembangunan jangka panjang Provinsi Papua yang sesuai dengan periode RPJMD Provinsi Papua 2019-2023, ditujukan untuk Memantapkan Pembangunan yang didukung SDM Berkualitas dan Kemapanan di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, dan Lingkungan.

Gambar 2.1. Agenda/Tema Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua

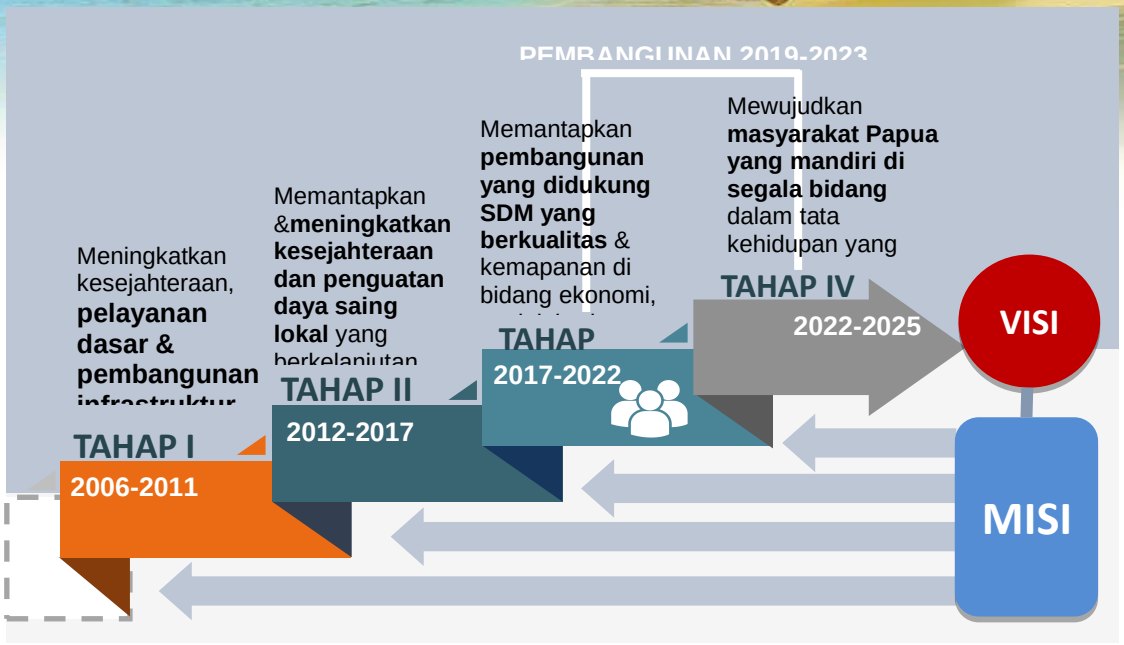

Pelaksanaan pembangunan pada tahap ini dilakukan dengan meningkatkan kemandirian, kemitraan, dan keterlibatan Orang Asli Papua dalam segala bidang pembangunan yang berorientasi pada kemandirian dan kemapanan lokal berbasis keberlanjutan, ketahanan pangan, kemampuan daya saing, yang didukung perlindungan perempuan dan anak, serta menekankan pada kesetaraan gender dan terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kemapanan ini juga ditunjukkan dengan pelembagaan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang didukung oleh kepatuhan dan penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban serta budaya kerja yang professional.

Selanjutnya budaya demokrasi dan saling menghormati perbedaan dan pendapat dengan menitikberatkan kesatuan bangsa dalam koridor NKRI tetap sehat dan berkembang secara dinamis, namun tetap berbasis pada kearifan lokal, khususnya dalam pelaksanaan otonomi khusus yang memasuki tahun ke-20. Pelaksanaan otonomi khusus tetap berprinsip pada peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua yang dilandasi prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat sosial setinggi-tingginya; penguatan kelembagaan pengelola SDA dan lingkungan; peningkatan kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam; serta menghindari pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali.

Sarana dan prasarana dasar dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya sehingga kemapanan bidang infrastruktur dapat menjamin keberlanjutan kemandirian lokal, yang dituangkan dalam program berkesinambungan, melalui pendampingan dan penguatan kelembagaan sosial; kemapanan di bidang kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Program tersebut didukung akses pada sumber daya berbasis budaya lokal yang mampu mempertahankan kemandirian masyarakat Papua berdasarkan perkembangan IPTEK yang mampu dipahami dan dikuasai untuk diterapkan.

Berdasarkan uraian di atas dan mencermati tantangan pembangunan masa depan, maka visi Provinsi Papua tahun 2019-2023, adalah:

PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN

Kebangkitan, **Kemandirian** dan **Kesejahteraan** masyarakat Papua sebagai cita-cita bersama akan terwujud secara hakiki jika dalam pelaksanaan pembangunan menjawab rasa **Keadilan** bagi seluruh masyarakat di Provinsi Papua. Korelasi antara Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan sebagai visi pembangunan dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Papua yang BERKEADILAN menjadi fokus utama bagi perwujudan PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA, yang diselimuti dengan prinsip Kasih Menembus Perbedaan, karena dengan kasih yang akan menembus segala sekat-sekat perbedaan yang ada, inilah yang disebut Papua yang Baru dalam Bingkai Peradaban Baru Papua. Pelaksanaan pembangunan harus dengan pendekatan KASIH, menjadikan pembangunan yang dilaksanakan dapat menghilangkan perasaan masyarakat Papua terhadap bentuk ketidakadilan, marginalisasi, ketimpangan dan diskriminasi.

Gambar 2.2 Visi Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Pendekatan Kasih ini diharapkan dapat menghilangkan konflik dalam masyarakat dan pembangunan dapat terus terjaga dan terpelihara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Adapun penjelasan setiap elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

PAPUA BANGKIT

Papua Bangkit berarti terwujudnya masyarakat Papua yang berkemauan dan bertekad tinggi sebagai kesadaran kontemplatif kolektif untuk melepaskan diri dari label ketertinggalan dan kemiskinan untuk mencapai derajat kualitas hidup yang setinggi-tingginya, sehingga mampu berdiri tegak dengan harkat dan martabat dalam bingkai NKRI tanpa menghilangkan identitas diri dan kekhususan ke-Papua-an. Kebangkitan ini terjadi di level individu, keluarga, komunitas, maupun regional. Identitas diri orang Papua diakui dan dihormati dalam berbagai level dan bidang pembangunan. Dalam hal ini, orang Papua mampu mengaktualisasikan diri dan mengambil peran di berbagai bidang pembangunan. Papua Bangkit dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin baik.

PAPUA MANDIRI

Papua mandiri berarti terwujudnya masyarakat Papua yang mampu mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan kemajuan ekonomi, dengan didukung generasi baru Papua yang memiliki jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) serta ekonomi kampung tumbuh dan berkembang. Perwujudan Papua Mandiri dilakukan dengan mendorong tumbuhnya sektor unggulan tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pariwisata. Tumbuhnya sektor unggulan ini dapat memberi nilai tambah dalam pembangunan dan memastikan tersedianya lapangan kerja, yang didukung pengembangan industri pengolahan yang berbasis keunggulan potensi daerah dan industri ramah lingkungan. Papua Mandiri dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Papua pada sektor dan subsektor unggulan yang semakin baik.

PAPUA SEJAHTERA

Secara sederhana, sejahtera dipahami sebagai tidak kekurangan sesuatu apapun, perasaan aman sentosa, makmur dan selamat atau terlepas dari segala macam gangguan. Dengan pendekatan yang lain, sejahtera dapat dikaitkan dengan meningkatnya kualitas hidup yang setinggi-tingginya yang tercermin dari kenyamanan masyarakat Papua dalam menjalani kehidupan dan menikmati hasil pembangunan. Dalam hal ini, kesejahteraan tidak hanya merupakan konsep lahiriah, tapi juga menjangkau segi batiniah. Kesejahteraan juga bermakna kemampuan sumber daya alam Papua yang kaya dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks makro, pembangunan daerah juga dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Papua untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

PAPUA BERKEADILAN

Papua Berkeadilan berarti masyarakat Papua tanpa terkecuali dapat memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, sandang dan papan secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada Pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Sikap mental dan perilaku adil, menjunjung tinggi kesetaraan dan kebersamaan, didukung moral dan budaya gotong royong, saling menghormati dan menunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan, mempertahankan eksistensi dan jati diri orang asli Papua sebagai kebanggaan sudah terbentuk dan tertanam di dalam setiap individu orang asli Papua. Pembangunan yang adil dan merata merupakan partisipasi aktif adat dan agama serta seluruh komponen masyarakat, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat khususnya Orang Asli Papua.

MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019-2023

Misi pembangunan 2019-2023 merupakan rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi, namun tidak terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2019-2023 yang mempengaruhinya. Misi pembangunan juga diarahkan untuk mewujudkan visi jangka panjang daerah yakni Papua Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik. Usaha-usaha Perwujudan visi akan dijabarkan dalam misi, sebagai berikut:

Gambar 2.3 Misi Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2019-2023

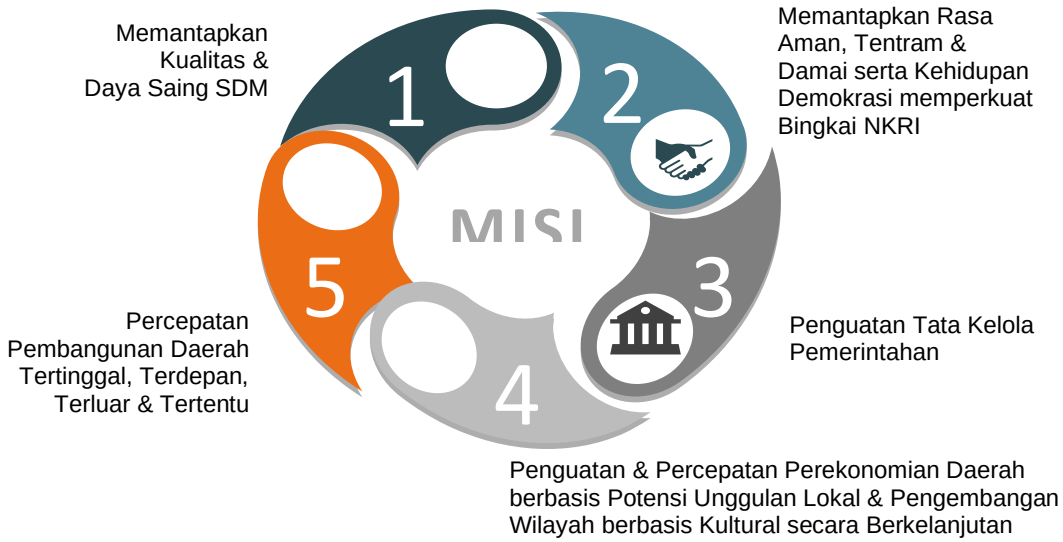

Penjelasan masing-masing misi:

Misi Pertama, Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM

Memantapkan kualitas dan daya saing SDM Papua dilakukan untuk mendukung dan mewujudkan kebangkitan dan kemandirian. Orang Papua yang mandiri memiliki kemauan, kreatif dan inovatif sebagai pelaku pembangunan bagi kemajuan daerah untuk mencapai kualitas hidup manusia serta memungkinkan setiap orang dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kualitas manusia yang bermutu tinggi ditandai dengan meningkatnya IPM yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi lokal Papua dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Program pembangunan dalam peningkatan kualitas dan daya saing SDM tahun 2013-2018 telah meletakkan pondasi dalam memantapkan kualitas dan daya Saing SDM. Hal ini diketahui berdasarkan hasil yang telah dicapai seperti peningkatan angka partisipasi pendidikan, peningkatan angka melek huruf, penurunan angka kematian ibu, pengiriman siswa-siwa berprestasi Asli Papua melanjutkan sekolah di dalam dan luar negeri serta tercapainya target peningkatan IPM tahun 2018. Pondasi peningkatan kualitas dan daya saing SDM juga dapat dilihat dari kebijakan dan program-program yang sudah berjalan dengan baik.

Pelaksanaan pembangunan tahun 2019-2023 mendatang tetap konsisten melanjutkan berbagai program peningkatan kualitas dan daya saing SDM Papua yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan lebih lanjut dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan terarah dalam bentuk pengarusutamaan anggaran, kebijakan serta pengawasan dan pengendalian program terutama pada program beasiswa di dalam dan luar negeri untuk anak Asli Papua. Misi memantapkan kualitas dan daya saing SDM Papua akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan periode 2019-2023, yang berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengembangan IPTEK. SDM yang berdaya saing juga akan tercapai jika SDM Papua terjamin dalam pasokan pangannya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dalam hal ini, kemandirian pangan dan gizi merupakan prioritas dalam pembangunan Papua.

Misi Kedua, Memantapkan Rasa Aman, Tentram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI

Terjaminnya ketentraman dan ketertiban yang menciptakan rasa aman bagi masyarakat, merupakan jaminan bagi terlaksananya pembangunan. Pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya telah dapat dirasakan rasa aman, tentram dan damai, walaupun masih ada peristiwa-peristiwa yang mengganggu rasa aman dan tentram masyarakat. Oleh karena itu pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat kerukunan hidup umat beragama. Sejauh ini telah terdapat peningkatan rasa saling menghargai, rasa percaya dan harmonisasi antar kelompok sehingga tercipta kehidupan toleransi dan tenggang rasa di masyarakat. Di samping itu, dengan keberagaman etnik yang ada di masyarakat, pembangunan budaya diarahkan untuk menghargai nilai budaya masing-masing etnik sebagai suatu nilai keunggulan Provinsi Papua dengan menanamkan prinsip kasih menembus perbedaan. Pemantapan sistem kerukunan hidup juga harus disertai dengan penerapan dan penegakan hukum dan HAM yang dilaksanakan secara tegas dan profesional.

Masyarakat yang demokratis merupakan landasan penting untuk tercapainya masyarakat yang mandiri. Upaya mewujudkan masyarakat yang demokratis dilakukan dengan menguatkan kelembagaan sosial dan politik; memperkuat peran masyarakat; melaksanakan tata pemerintahan yang terdesentralisasi pada tingkat distrik dan kampung; meningkatkan partisipasi dan transparansi; serta mendorong peningkatan peran media massa dan pers dalam pembangunan.

Misi Ketiga, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatnya daya saing suatu daerah. Wujud dari penguatan tata kelola adalah meningkatnya transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas serta meningkatnya pelayanan kepada publik. Sejauh ini, disiplin ASN telah meningkat secara signifikan dan Pemerintah Provinsi Papua telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK atas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya keras dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan tahun 2013-2018 telah berada dalam arah yang benar. Meskipun

demikian, capaian selama periode sebelumnya masih perlu ditingkatkan dan dimantapkan. Harus ada upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tatakelola pemerintahan ini.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga kelangsungan pembangunan berkelanjutan. Reformasi birokasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi pada periode 2013-2018 dilakukan melalui peningkatan disiplin ASN; pengelolaan keuangan daerah; penerapan *e-Government* Provinsi Papua dalam perencanaan, penganggaran, pendapatan, dan investasi daerah; serta penerapan sistem tunjangan kinerja daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, upaya yang telah dilakukan akan dimantapkan dan diperkuat, yang didukung perubahan mind-set, culture-set dan pengembangan budaya kerja secara lebih cepat dan terarah. Dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dan akan dipimpin langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Reformasi birokrasi ini juga akan memperkuat hubungan kelembagaan yang harmonis antara Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota dan kampung, untuk memastikan implementasi Otonomi Khusus Papua dengan baik, termasuk melalui pembiayaan bersama dan transfer anggaran yang mendukung pemerataan dan keadilan.

Misi Keempat, Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah berbasis Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan

Periode pembangunan 2013-2018 telah berhasil membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua berbasis ekonomi lokal. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari terwujudnya iklim investasi yang kondusif, tercapainya stabilitas makro ekonomi, terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari, dan meningkatnya perekonomian masyarakat khususnya di kampung-kampung. Penguatan dan percepatan perekonomian Provinsi Papua pada periode 2019-2023 akan tetap memperkuat ekonomi

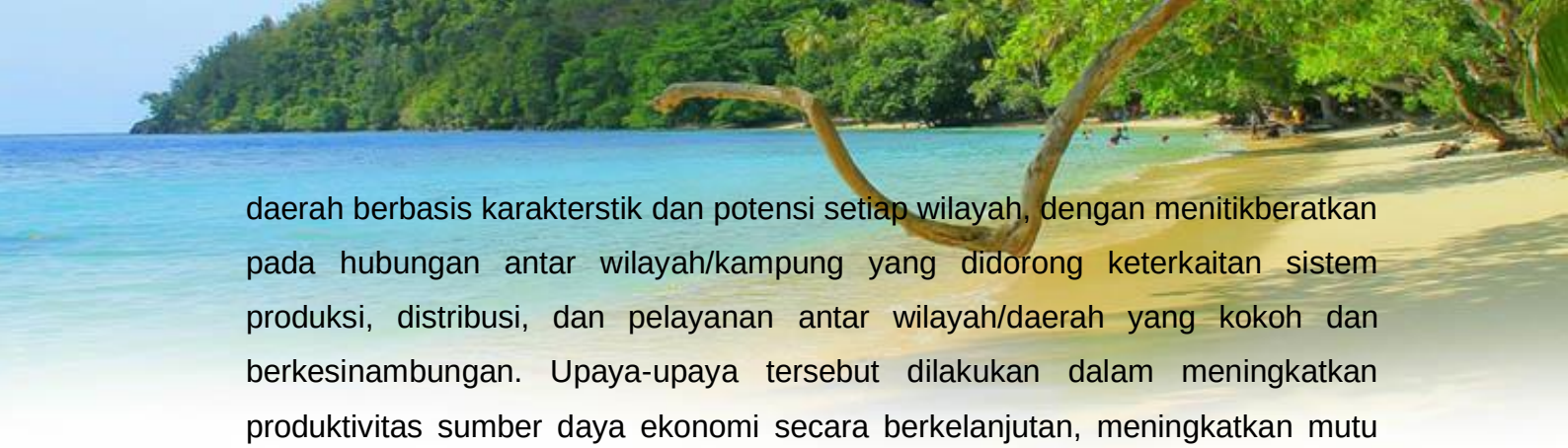

daerah berbasis karakterstik dan potensi setiap wilayah, dengan menitikberatkan pada hubungan antar wilayah/kampung yang didorong keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar wilayah/daerah yang kokoh dan berkesinambungan. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam meningkatkan produktivitas sumber daya ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan mutu produk dan menciptakan nilai tambah.

Penguatan dan percepatan perekonomian daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam, harus tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada orang asli Papua untuk memperoleh akses legal melalui skema-skema perhutanan sosial dan hutan adat. Pemberdayaan orang asli Papua diprioritaskan untuk: menjamin akses bagi masyarakat memperoleh sumber daya ekonomi; memperkuat kemampuan dan kelembagaan masyarakat kampung untuk mengelola sistem produksi, konsumsi dan infrastruktur secara mandiri; dan Pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan. Pengembangan wilayah tetap dilakukan berbasis kultural yaitu wilayah La Pago, Mee Pago, Mamta, Saereri dan Animha, yang akan difokuskan pada pembangunan berbasis kampung dengan prinsip kesetaraan pemenuhan kebutuhan hidup dan pencapaian kualitas hidup di seluruh wilayah Papua, sehingga mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih mampu mendorong percepatan kemandirian masyarakat asli Papua.

Untuk mendukung perekonomian dan pengembangan wilayah secara merata, akan didukung oleh peningkatan dan percepatan konektivitas antar wilayah dan Pemenuhan sarana dan prasarana dasar di wilayah distrik dan kampung diarahkan pembangunan jaringan transportasi antar kampung, pengembangan tenaga listrik terbarukan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi bagi masyarakat asli Papua. Peningkatan dan percepatan konektivitas antar wilayah dan pemenuhan sarana dan prasarana dasar akan diprioritaskan pada periode 2019-2023.

Misi Kelima, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu

Pembangunan yang merata dan berkeadilan akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan periode 2019-2023 karena pelaksanaan pembangunan di masa lalu belum mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan yang menjadi harapan seluruh masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena proses pembangunan yang tidak adil sedemikian intensif pada masa lalu sehingga tidak cukup diperbaiki dalam satu periode pelaksanaan pembangunan.

Perwujudan pembangunan yang merata dan berkeadilan akan diwujudkan di berbagai bidang. Di bidang ekonomi, pemerataan dan keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan distribusi pendapatan, perbaikan pemerataan pendapatan antar daerah, perbaikan kesenjangan antara kampung, terjadinya proses afirmasi bagi orang asli Papua. Dalam bidang sosial, pemerataan dan keadilan berupa perbaikan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebebasan berpolitik, serta pemerataan antara laki-laki dan perempuan. Upaya pemerataan dan keadilan dalam periode 2019-2023 dilakukan dengan berbagai kebijakan. Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, bantuan untuk program pendidikan melalui beasiswa, kesehatan melalui Kartu Papua Sehat dan Gerbangmas pada periode 2013-2018 adalah bukti nyata dari upaya tersebut.

Pada lima tahun ke depan, penguatan pemerataan dan keadilan akan dilakukan untuk setiap kebijakan dan kegiatan. Langkah ini diharapkan dalam jangka pendek akan memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga tersebut (memperbaiki distribusi pendapatan) dan dalam jangka panjang akan dihasilkan generasi baru yang lebih baik tingkat pendidikan dan kesehatannya. Pemerintah Daerah akan memperkuat pengawasan dan pengendalian dari semua program agar benar-benar menyasar orang Asli Papua khususnya yang berada di kampung-kampung. Selanjutnya pengurangan kemiskinan akan diprioritaskan bantuan langsung (*cash transfer*) kepada seluruh penduduk anak usia 4 tahun ke bawah dan usia 60 tahun keatas melalui Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA PAPUA) dan perlindungan sosial melalui bantuan langsung dan program pembedayaan KAT dan bantuan sosial PMKS. Untuk memperkuat perekonomian di level wilayah akan menerapkan trilogi pengembangan ekonomi Papua, yaitu: 1) perubahan pola pikir masyarakat; 2) pengwilayahan komoditas unggulan daerah; serta 3) penerapan prinsip tanam, petik, olah dan jual.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* dari program yang dilaksanakan perangkat daerah.

Misi ke-1: Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM

Misi ke-1 mempunyai 1 tujuan dan 7 sasaran, yaitu:

- **T1** : Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing, dengan sasaran:
  - **S1**. Meningkatnya aksesibiltas, mutu dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan.
  - **S2.** Meningkatkan budaya baca pada masyarakat.
  - **S3.** Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
  - **S4.** Sukses penyelenggaraan PON dan prestasi olahraga.
  - **S5.** Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah.
  - **S6.** Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan.
  - **S7.** Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Misi ke-2: Memantapkan Rasa Aman, Tentram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI

Misi ke-2 mempunyai 1 tujuan dan 4 sasaran, yaitu:

- **T2 :** Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang berbasis kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupanmasyarakat Papua, dengan sasaran:
  - **S8.** Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hokum.
  - **S9.** Meningkatnya keharmonisan dan kohesifitas masyarakat.
  - **S10.** Meningkatnya penegakan HAM.
  - **S11.** Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi.

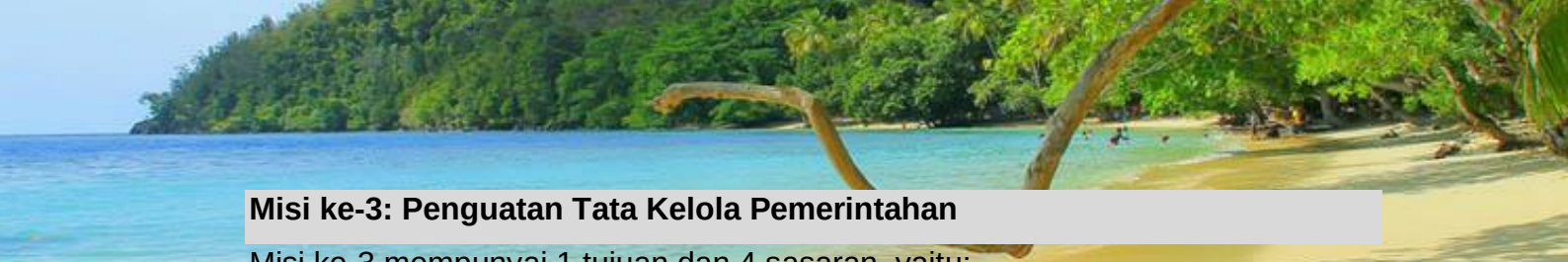

Misi ke-3: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Misi ke-3 mempunyai 1 tujuan dan 4 sasaran, yaitu:

- **T3 :** Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran:
  - **S12.** Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua.
  - **S13** Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
  - **S14.** Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah.
  - **S15.** Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.

Misi ke-4: Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural dan Berkelanjutan

Misi ke-4 mempunyai 2 tujuan dan 14 sasaran, yaitu:

- **T4 :** Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan, dengan sasaran:
  - **S16.** Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
  - **S17.** Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan.
  - **S18.** Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim.
  - **S19.** Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan.
  - **S20.** Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal dan berkelanjutan.
  - **S21.** Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan.
  - **S22.** Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

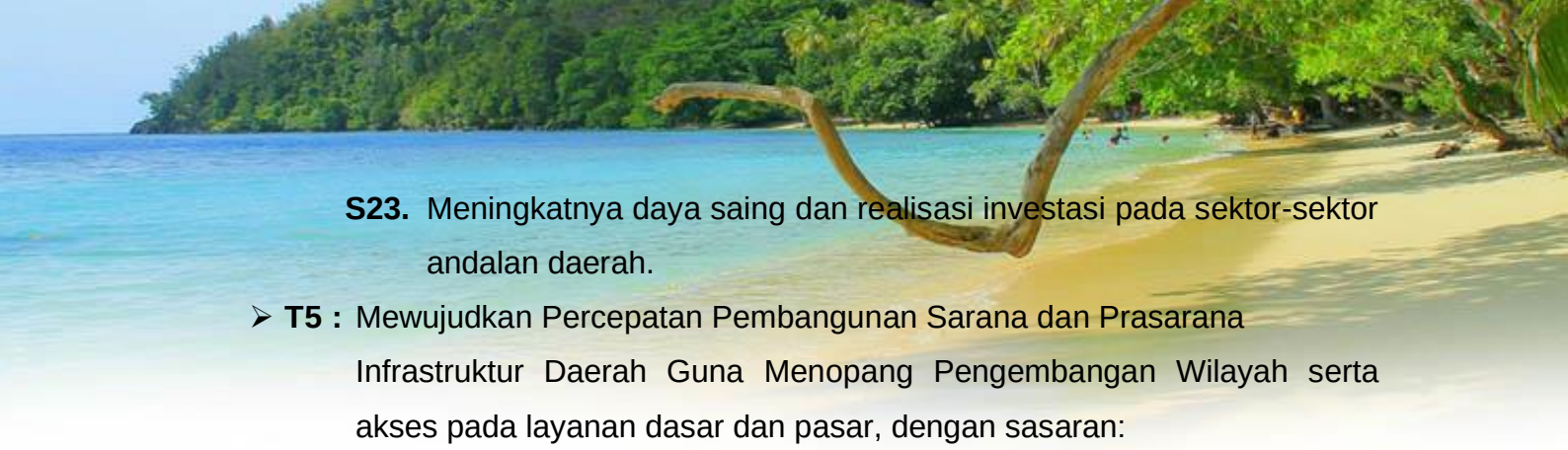

S23. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah.

- **T5 :** Mewujudkan Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar, dengan sasaran:

S24. Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah.

S25. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten.

S26. Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah.

S27. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman.

S28. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan.

S29. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah.

Misi ke-5: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu

Misi ke-5 mempunyai 1 tujuan dan 6 sasaran, yaitu:

- **T6 :** Meningkatkan pemerataan pembangunan, dengan sasaran:

S30. Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampong.

S31. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP.

S32. Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan.

S33. Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS.

S34. Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

S35. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak.

2.1.3. Strategi Pembangunan Daerah

Grand Strategi pembangunan daerah Provinsi Papua periode tahun 2019-2023 didasarkan pada suatu rangkaian intervensi kebijakan (strategi) yang mengarah pada pencapaian kondisi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Berkeadilan dengan didukung oleh 5 misi pembangunan, 3 orientasi pembangunan, 4 pendekatan pembangunan, 5 prinsip dasar pembangunan dan 3 nilai dasar pembangunan.

Gambar 2.4. Grand Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Prinsip dan Nilai Dasar Pembangunan

Untuk pelaksanaan RPJMD Papua 2019-2023, terdapat 6 (enam) prinsip dasar pembangunan yang menjadi pegangan bagi pelaksanaan pembangunan, yaitu:

1. **Perlindungan (*protection*)**: sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, bahwa kebijakan pembangunan Provinsi Papua diarahkan pada perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua.

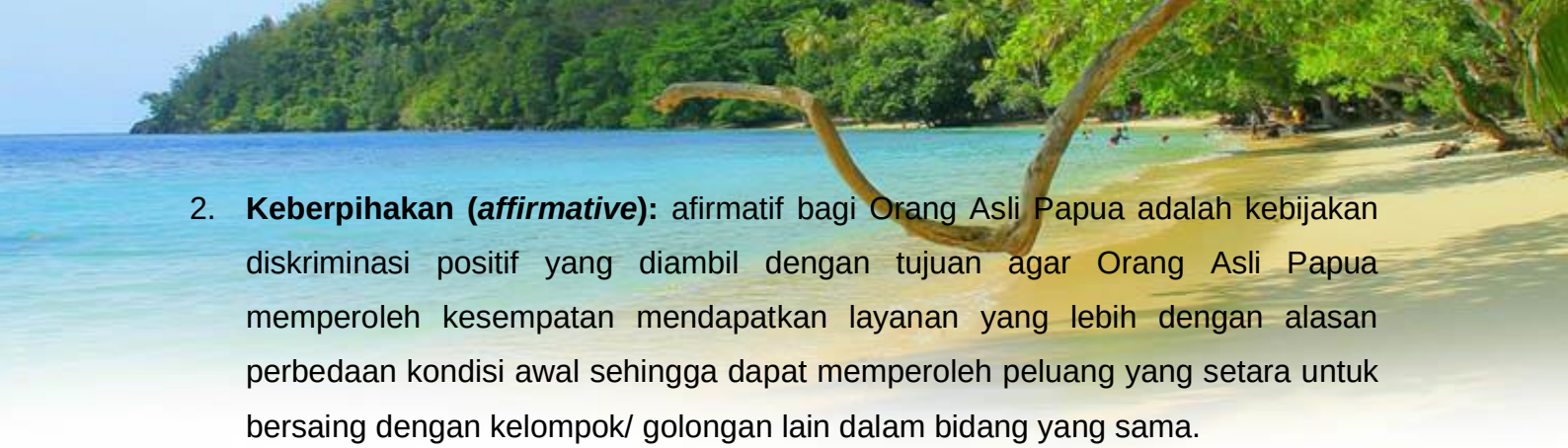

2. **Keberpihakan (*affirmative*):** afirmatif bagi Orang Asli Papua adalah kebijakan diskriminasi positif yang diambil dengan tujuan agar Orang Asli Papua memperoleh kesempatan mendapatkan layanan yang lebih dengan alasan perbedaan kondisi awal sehingga dapat memperoleh peluang yang setara untuk bersaing dengan kelompok/ golongan lain dalam bidang yang sama.
3. **Pemberdayaan (*empowerment*):** bahwa arah kebijakan pembangunan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Orang Asli Papua dalam segala bidang pembangunan.
4. **Keberlanjutan (*sustainibility*):** Pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mengamanatkan bahwa pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
5. **Keterpaduan (*integrated*):**RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023 harus mampu memperkuat sinergi antar bidang, antar ruang dan waktu**.** Setiap SKPD pelaksana pembangunan di setiap bidang harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai sinergi tersebut melalui proses komunikasi, konsultasi, koordinasi serta pengendalian, monitoring, dan evaluasi dengan pemangku kepentingan terkait di pusat dan daerah dan mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan.
6. **Tata Pemerintahan yang Baik (*good governance*):** pelaksanaan pembangunan wajib mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun nilai-nilai dasar pembangunan lima tahun kedepan adalah:

1. **Kecukupan (*sustenance*)**: pembangunan diarahkan agar masyarakat merasa tercukupi semua kebutuhan dasar (*basic need*) seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.
2. **Jati diri (*self esteem*)**: pembangunan membentuk motivasi seluruh masyarakat untuk berkeinginan untuk maju atau *need achivement*, menghargai diri sendiri dan memiiki rasa percaya diri yg tinggi.
3. **Kebebasan (*freedom*)**: pembangunan dilaksanakan dengan mendorong nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM sehingga masyarakat bebas dalam bersikap dan berprilaku, rasa takut, perbudakan, kebodohan, kemiskinan, dan stigmasasi.

Orientasi Pembangunan

Orientasi pembangunan adalah pandangan yang menjiwai seluruh arah kebijakan pembangunan selama lima tahun, yaitu:

1. Orientasi Pembangunan Berpusat pada Manusia

Pelaksanaan pembangunan sebesar-besarnya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya Orang Asli Papua. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, menggunakan pendekatan yang sesuai dengan budaya dan adat masyarakat lokal, serta dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan menghormati hak-hak adat masyarakat setempat. Pembangunan yang berpusat pada manusia menjadi prioritas utama pembangunan dalam lima tahun kedepan dan akan difokuskan pada pendidikan yang bermutu dan terjangkau; pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah; kemandirian perekonomian masyarakat; serta ketahanan pangan bagi seluruh wilayah di Provinsi Papua. Pembangunan manusia merupakan indikator utama mengukur akselerasi perkembangan pembangunan periode 2019-2023.

2. Orientasi Pertumbuhan dan Potensi Unggulan

Pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dan merata diperlukan, sehingga dampak pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya Orang Asli Papua. Kebijakan pembangunan ekonomi secara esensial tidak semata-mata mengejar pertumbuhan, melainkan dampak dari pertumbuhan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Prinsip pembangunan ekonomi dilakukan melalui: perubahan pola pikir, pengwilayahan komoditas, serta tanam, petik, olah dan jual. **Perubahan pola pikir** dimaksudkan bahwa masyarakat khususnya Orang Asli Papua akan ditingkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola sumber daya lokal yang ada di sekitarnya sehingga dapat bernilai ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarkaat. **Pengwilayahan komoditas** diartikan bahwa prioritas pengembangan perekonomian daerah didasarkan pada komoditas unggulan setiap wilayah atau daerah. **Tanam,petik, olah dan jual** dimaksudkan bahwa menyiapkan sistem pemasaran yang terintegrasi dari saat panen, pasca panen dan pemasaran atau penjualan. Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan tahun 2019-2023 merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur perkembangan

pembangunan yang terjadi, dan merupakan suatu indikator antara (bukan hasil akhir yang akan dicapai).

3. Orientasi Pemerataan, Keadilan dan Pembangunan Kewilayahan

Penyediaan Infrastruktur wilayah diarahkan pada menghilangkan ketimpangan antar wilayah dengan menerapkan prinsip keadilan pembangunan antar wilayah. Pengembangan wilayah dan penyediaan infrastruktur ditujukan untuk pelayanan kemandirian kampung, dan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang. Selanjutnya pembangunan kewilayahan ini akan difokuskan pada beberapa wilayah prioritas berdasarkan 5 (lima) wilayah yaitu 1) La Pago; 2) Mee Pago; 3) Anim Ha; 4) Saereri; dan 5) Mamta. Dalam bidang ekonomi, pemerataan dan keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan distribusi pendapatan, perbaikan pemerataan pendapatan antar daerah, perbaikan kesenjangan antara kampung, terjadinya proses afirmasi bagi orang asli Papua. Dalam bidang sosial, pemerataan dan keadilan berupa perbaikan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebebasan berpolitik, serta pemerataan antara laki-laki dan perempuan.

Pendekatan Pembangunan

Pendekatan pembangunan daerah merupakan suatu rangkaian bauran kebijakan yang mengefektifkan potensi-potensi yang dimiliki daerah di berbagai sektor sehingga akan memberi pengaruh terhadap percepatan pencapaian visi pembangunan daerah. 4 (empat) pendekatan pembangunan yang akan diintensifkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2019-2023 adalah;

1. Inovasi artinya pelaksanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada proses dan hasil pengembangan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga akan menambah nilai bagi penciptaan kepuasan bagi masyarakat Papua secara umum;
2. Koloborasi artinya pembangunan daerah harus melibatkan partisipasi yang luas dari seluruh potensi yang dimiliki daerah, baik dari perspektif kelompok adat, agama, pemerintah, swasta, universitas dan mitra pembangunan lainnya.

Pada akhirnya kolobaorasi akan memperkuat *sense of belonging* dari semua pihak dan memberi nilai bagi keberlanjutan pembangunan daerah;

3. Afirmasi artinya pembangunan daerah harus memiliki keberpihakan terhadap potensi-potensi pembangunan daerah yang memerlukan perhatian lebih yang ini juga sejalan dengan prinsip pelaksanaan otonomi khusus Papua;
4. Desentralisasi artinya pembangunan daerah mengelola kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing komponen pemerintahan sehingga mendorong terjadinya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Gambar 2.5 Pendekatan Pembangunan Daerah

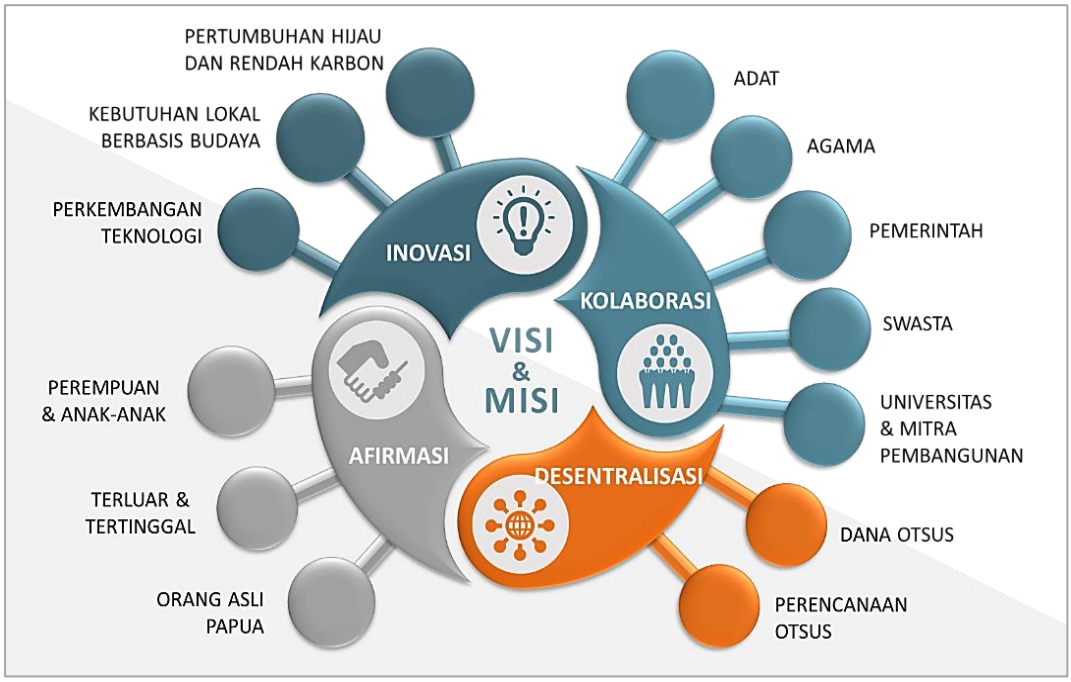

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stake holders* pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan.

2.1.4. Strategi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2022

a. Tema Pembangunan tahun 2022

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022.

Kedudukan RKPD Tahun 2020 Provinsi Papua, dalam RPJMD Provinsi Papua ialah periode transisi. Oleh Sebab itu sesuai dengan Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019–2023, maka Penyusunan Program PrioritasTahun 2020 di Provinsi Papua di landaskan pada permasalahan yang ada di Provinsi Papua guna memastikan perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka Panjang Daerah.

Berdasarkan prioritas dan focus pembangunan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025, upaya pencapaiannya di jabarkan secara lebih sistematis melalui Program Prioritas Daerah Tahun 2020 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dan dapat di rasakan langsung oleh masyarakat, dengan indicator kinerja sasaran pembangunan yang jelas, sederhana, terukur dan dapat tercapai dalam kurun waktu pelaksanaan yang telah ditentukan.

Pencapaian sasaran pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan melalui pelaksanan program dan kegiatan prioritas daerah.Padatahun 2020 orientasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Papua bergeser dari *money follow function* menuju money follow priority program, yaitu alokasi anggaran diarahkan pada Program Prioritas Pembangunan Daerah guna mememenuhi target sasaran RPJMD dan SPM yang telah ditetapkan, sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai seca ramerata. Oleh karena itu, pendekatan system perencanaan dan penganggaran program prioritas daerah disusun berdasarkan aspek holistik, tematik, integrative dan spasial. Hal ini selaras dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran, bahwa penganggaran yang disusun harus berbasis kepada prioritas. Penguatan penganggaran akan diberikan lebih kepada usulan pembangunan yang memiliki keterhubungan dengan prioritas dalam upaya pencapaian target pembangunan.

Prioritas daerah merupakan bagian dari prioritas nasional, sehingga rencana terhadap pembangunan nasional adalah perwujudan terhadap rencana pembangunan daerah. Selainitu, dalam rangka mengakomodir penegasan urusan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, maka rangkaian keterhubungan prioritas pembangunan daerah, disinergikan dengan Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2022 harus merujuk kepada tema

RKP 2022. Oleh karena itu perlu diketahui Tema Rencana kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 sebagai acuan penetapan dan kesinambungan prioritas pembangunan daerah. Adapun Tema RKP 2022 adalah:***"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"*** RKPD tahun 2022 merupakan periode transisi masa perencanaan pada periode 5 Tahunan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023.Untuk itu Tema Pembangunan RKPD Tahun 2022 Provinsi Papua ***"memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat jaminan kesehatan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan serta berkelanjutan"***. Berdasarkan tema tersebut menjadi acuan dalam penetapan prioritas daerah tahun 2022 di ProvinsiPapua.

Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2022 menjelaskan beberapa arahan pokok pembangunan Provinsi Papua yang diharapkan dapat terwujud, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Dasar;
2. Pemantapan rasa aman, tentram dan kedewasaan berdemokrasi;
3. Pemanfaatan Tata Kelola Pemerintahan;
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi;
5. Pemenuhan Dasar Pangan;
6. Pemantapan Infrastruktur Dasar serta Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Tertentu.

b. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan agenda pembangunan nasional, sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 melalui 9 (sembilan) agenda Prioritas Pembangunan Nasional yang disebut Nawa Cita. Selanjutnya tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang mencakup 3 (tiga) dimensi pembangunan, yaitu : (1). Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari : (a) revolusi mental; (b) pembangunan pendidikan; (c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman; (2). Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari : (a). kedaulatan pangan; (b). kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; (c). kemaritiman dan kelautan; (d). pariwisata; dan kawasan

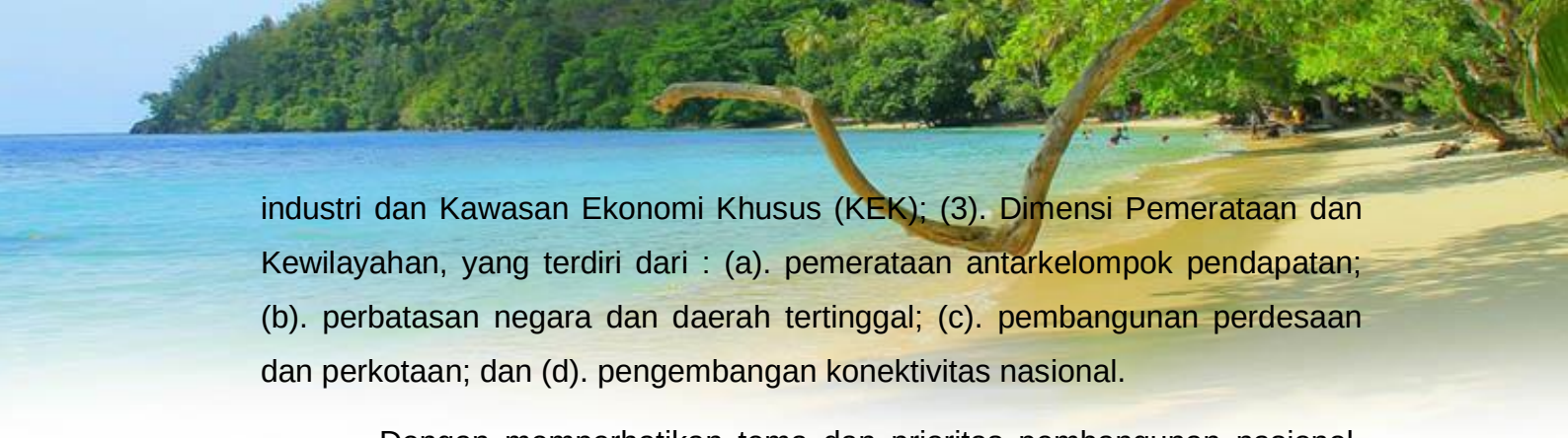

industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (3). Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari : (a). pemerataan antarkelompok pendapatan; (b). perbatasan negara dan daerah tertinggal; (c). pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan (d). pengembangan konektivitas nasional.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan nasional, tema RKPD Provinsi Papua tahun 2022, dan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis yang telah di bahas pada Bab II, perkembangan aspek pembangunan daerah baik sektor maupun wilayah, serta fokus arah kebijakan tahun 2022 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua, maka hasil analisis menghasilkan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Prioritas Nasional (Nawa Cita) dan Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Papua Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita)	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2022
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.	1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Dasar; 2. Pemantapan rasa aman, tentram dan kedewasaan berdemokrasi; 3. Pemanfaatan Tata Kelola Pemerintahan; 4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi; 5. Pemenuhan Dasar Pangan; 6. Pemantapan Infrastruktur Dasar serta Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Tertentu.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan yang merepresentasikan tekad dan janji atau **Harapan Seluruh Rakyat (HASRAT)**Papua untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada antara Gubernur yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja dalam hal ini masyarakat. Dengan demikian, Penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan Gubernur dan Wakil Gubernur.

PenyusunanPerjanjian Kinerja2019 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD dan IKU, RKPD tahun 2019, serta APBD Provinsi Papua tahun 2019. Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Provinsi Papua Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Aksesibiltas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1.1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.8
		1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.7
		1.3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	78.9
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	68.8
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	3.1	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	98
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	4.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	73.8
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	5.1	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kab./kota	7.0
		5.2	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp ribu per kapita	7495.8
6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	6.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	78.2
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	7.1	Nilai skor aspek kebebasan sipil	Skor	94.5
		7.2	Nilai skor aspek hak-hak politik	Skor	48.4
		7.3	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Skor	58.9
8	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	8.1	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	Persen	98.00

1	2	3	4	5	6
9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	9.1	Capaian Nilai SAKIP	predikat	BB
		9.2	Capaian implementasi e-government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	Persen	90
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	10.1	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	Persen	95.0
11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	11.1.	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP
		11.2	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	12.70
12	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	12.1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	Persen	4.4
		12.2	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	3,7
		12.3	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	3.7
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	13.1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	94.3
		13.2	Indeks Kualitas Air	Indeks	79.5
		13.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	83.8
		13.4	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/rupiah	55265.4
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	14.1	Kontribusi sub Sektor perikanan Terhadap PDRB	Persen	10.20
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	15.1	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	98.09
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	16.1	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Triliun	62.67
		16.2	Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	Rp. Triliun	90.63
17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	17.1	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	50.00

1	2	3	4	5	6
18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	18.1	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	Persen	45.00
19	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	19.1	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	Persen	75.00
20	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	20.1	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	38.75
		20.2	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	persen	44.04
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	21.1	Indeks Desa Membangun	indeks	50.16
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	22.1	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen	70.19
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	23.1	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	tahun	11.09
		23.2	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	tahun	67.50
		23.3	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	13.12
24	Meningkatnya bantuan sosial PMKS	24.1	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang per tahun	40
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	25.1	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	Sedang
26	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	26.1	Indeks Pembangunan Gender	indeks	79.90
		26.2	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	64.47

Tabel 2.3 Belanja Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022

(Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	URAIAN	RENCANA (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	5.830.516.549.373.00	45,16
2	Belanja Langsung	7.079.992.700.354.00	54,84
JUMLAH		**12.910.509.249.727,00**	**100**

Sumber: BPKAD Provinsi Papua

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Rencana Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Persen
1	Meningkatnya Aksesibiltas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	217.949.329.950	0.07
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	649.371.311.962	0.22
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	20.730.759.082	0.01
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	-	-
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	699.848.050.608	0.23
6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	14.006.822.103	0.00
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi		
8	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	187.894.694.888	0,06
9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	7.389.370.038	0.00
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	65.262.334.198	0.02

1	2	3	4
11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	41.845.545.000	0.01
12	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	31.575.058.621	0,01
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	69.302.696.221	0.02
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	31.038.143.935	0.01
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	2.816.547.942	0.00
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	6.049.267.510	0.00
17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	38.454.646.088	0.01
18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	423.132.600.120	0.14
19	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	21.192.672.939	0,01
20	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	405.983.343.760	0.14
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	27.604.431.306	0.01
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	3.049.884.866	0.00
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	11.616.178.719	0.00
24	Meningkatnya bantuan sosial PMKS	1.645.595.993	0.00
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	5.070.131.525	0.00
26	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	2.452.411.910	0.00
Anggaran Prioritas IKU		**2.985.281.829.284.00**	**42.16**
Belanja Langsung		**7,079,992,700,354.00**	

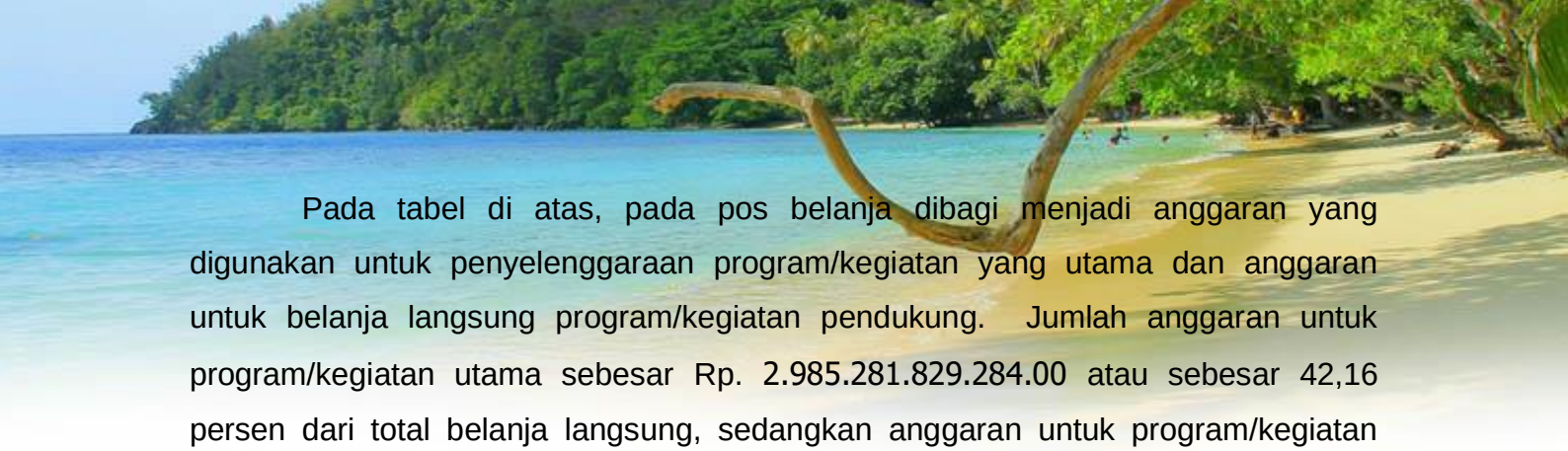

Pada tabel di atas, pada pos belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 2.985.281.829.284.00 atau sebesar 42,16 persen dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 4 .094.710.871.070 atau 4,09 persen dari total anggaran belanja langsung.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran 5 pembangunan dengan anggaran paling besar adalah Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan dengan besaran anggaran 0,23 persen dari total belanja langsung. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran 2 yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yaitu sebesar 0,22 persen. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil sebesar 0,00 persen dari total anggaran belanja langsung adalah yaitu Sasaran 7 Meninjkatnya kebebasan sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi, juga Sasaran 9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, juga Sasaran 15 yaitu Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, juga Sasaran 16 yaitu Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah; juga Sasaran 22 yaitu Meningkatnya kebutuhan dasar bagi OAP, juga Sasaran 23 yaitu Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan, juga Sasaran 24 yaitu Meningkatnya bantuan sosial PMKS, juga Sasaran 25 yaitu Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dan juga Sasaran 26 yaitu Meningkatnya pengarusutamaan Gender dalam pembagunan daerah dan upaya perlindungan anak.

Namun ada juga 1 (Satu) Sasaran yang tidak teranggarkan ditahun 2022 yaitu untuk sasaran 4 “Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah”. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah secara nasional tentang restrukturisasi kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah termasuk pada Pemerintah Provinsi Papua sehingga hal ini berdampak kepada beberapa SKPD yang berpotensi terhadap satu sasaran dimaksud namun SKPD tersebut belum/tidak menganggarkan melalui program kegiatan mereka di tahun 2022 karena adanya

rencana penggabungan beberapa SKPD termasuk pada SKPD yang berpotensi terhadap satu Sasaran dimaksud.

BAB III

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah pemerintah daerah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua melaporkan dan mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rencana kinerja dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Tahun 2019 – 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

Karena itu Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen membangun akuntabilitas melalui pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan, dan berorientasi pada pencapaian kinerja serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Aksesibiltas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1.1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.8	7.02	90,00
		1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.7	11,14	95,21
		1.3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	78.9	92.04	116,65
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	68.8	71.85	104.43
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	3.1	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	95.00	128	134
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	4.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	73.8	29.53	40.01
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	5.1	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kab./kota	7.00	7.00	100
		5.2	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp ribu per kapita	7495.8	7545.3	100.66
6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	6.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	78.2	100.00	127.8
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	7.1	Nilai skor aspek kebebasan sipil	Skor	94.5	100.00	105.8
		7.2	Nilai skor aspek hak-hak politik	Skor	48.4	62.30	128.7
		7.3	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Skor	58.9	100.00	169.8
8	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	8.1	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	Persen	98.00	97.80	99.79
9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	9.1	Capaian Nilai SAKIP	Predikat	BB	B	66.05
		9.2	Capaian implementasi e-government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	Persen	90	90	100
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	10.1	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	Persen	95.00	100.00	105.26

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	11.1	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP	WTP	100.00
		11.2	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	12.70	21.30	182.41
12	Meningkatnya pendayagunaan	12.1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	Persen	4.4	2.28	51.82
		12.2	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	3.7	0.96	75.95
		12.3	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	3.7	0.85	22.43
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	13.1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	94.3	95.32	103.89
		13.2	Indeks Kualitas Air	Indeks	79.5	55.07	70.60
		13.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	83.8	100.00	119.33
		13.4	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/rupiah	55265.4	N/A	N/A
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	14.1	Kontribusi sub Sektor perikanan Terhadap PDRB	Persen	10.20	4.36	42.75
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	15.1	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	98.09	97.20	99.09
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	16.1	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Triliun	62.67	9.41	15.02
		16.2	Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	Rp. Triliun	90.63	0.98	1.08
17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	17.1	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	50.00	74,67	149.34
18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	18.1	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	Persen	45.00	98.18	218.18

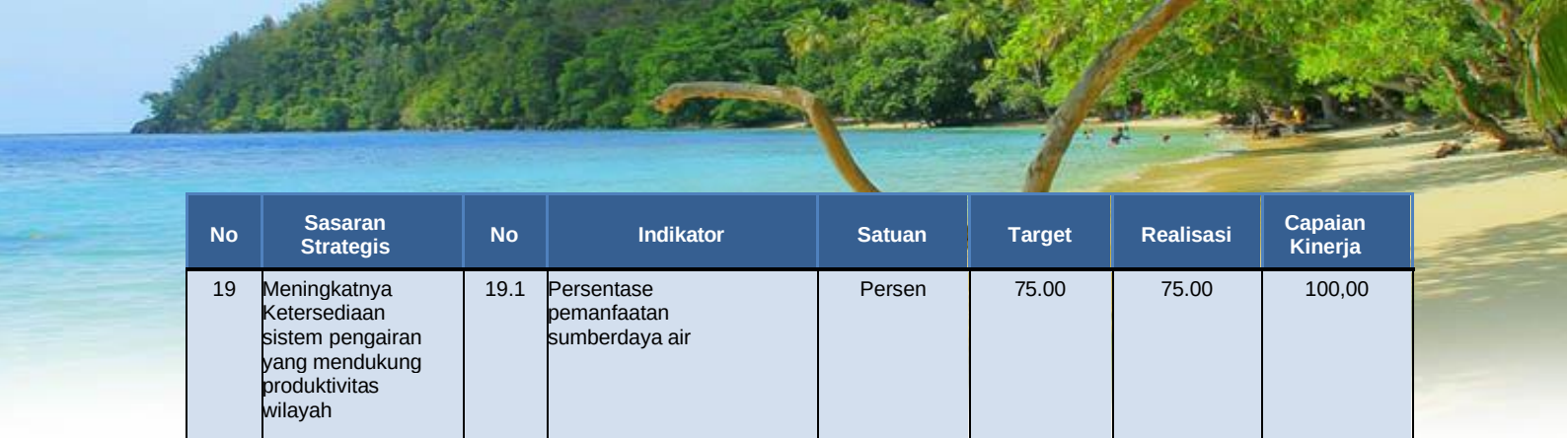

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
19	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	19.1	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	Persen	75.00	75.00	100,00
20	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	20.1	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	Persen	38.75	33.09	85.30
		20.2	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	Persen	44.04	65.26	148.18
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	21.1	Indeks Desa Membangun	Indeks	50.16	3.84	7.65
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	22.1	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	Persen	70.19	97.54	138.96
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	23.1	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	Tahun	11.09	8.41	75.83
		23.2	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	Tahun	67.50	66.15	98.00
		23.3	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	13.12	9.19	70.05
24	Meningkatnya bantuan sosial PMKS	24.1	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang per tahun	40.00	826	2.065
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	25.1	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	Sedang	Rendah	Rendah
26	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	26.1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	79.90	80.16	98.87
		26.2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	64.47	65.27	12.40

3.2 CAPAIAN DAN ANALISA KINERJA

Kesepakatan skala ordinal penilaian untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.2 Skala Ordinal

NOMOR	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1.	91 ≥	Sangat berhasil
2.	76 ≥ 90	Berhasil
3.	66 ≥ 75	Cukup berhasil
4.	51 ≥ 65	Kurang berhasil
5.	0 ≥ 50	Tidak berhasil

Pengukuran Kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana program, namun digunakan untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran guna meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka perwujudan visi Papua Bangkit Mandiri, Sejahtera yang berkeadilan.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktorkeberhasilan dan penyebab ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Oleh karena Pemerintah Provinsi Papua memiliki struktur organisasi sebagai pelaksana kegiatan maka segala pencapaian komponen Rencana Stratejik tidak dapat dilepaskan dari bidang-bidang yang menangani pelaksanaannya sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Pencapaian sasaran - sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah sebanyak 26 Sasaran Strategis, dan Capaian yang dihasilkan berdasarkan Kategori Pencapaian Sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1	Meningkatnya Aksesibilitas Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan hal yang penting. Terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi prioritas dalam pembangunan pendidikan yaitu Akses, Mutu dan Tata Kelola. Secara makro akses pendidikan dapat diindikasikan dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Sementara untuk Mutu pendidikan salah satunya dapat digambarkan melalui kecenderungan indikator angka melek huruf serta Tata Kelola pendidikan dapat dilihat dari sisi manajemen pengelolaan pendidikan secara kotinu dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Aksesibilitas Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan"** sebesar 96.00 persen dengan predikat **"sangat berhasil"**, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Keberhasilan pencapaian Sasaran ini, diukur melalui 3 (Tiga) Indikator Sasaran yaitu :

1). Rata-rata Lama Sekolah;

2). Harapan Lama Sekolah;

3). Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf.

Berikut Target Indikator Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja yang diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Sasaran

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*	*3*	*4*	*5*
1	Rata-rata lama sekolah (RLS)	tahun	7,8	7,02	90,00
2	Harapan lama sekolah	tahun	11,7	11,14	95,21
3	Penduduk yang berusia >15 tahun melek hurup	%	78,9	92,04	116,65
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					**100,62**

Dari gambaran data di atas, dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis meningkatnya aksesibilitas, mutu dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sebagai Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua tahun 2022 khususnya pada sasaran kinerja rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan penduduk melek huruf yang berusia lima belas tahun ke atas pencapaiannya 100,62 persen. Artinya pencapaian target sasaran strategis pada indikator kinerja sebagaimana dalam Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua tahun 2022 telah mununjukkan prestasi “sangat berhasil”**.** Dibandingkan dengan pencapaian sasaran strategis pada 3 (tiga) tahun sebelumnya (2019, 2020 dan 2021) mengalami peningkatan yang cukup baik.

Berikut tabel perbandingan dari Sasaran Strategis **"Meningkatnya Aksesibilitas Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan"** di tahun 2019-2022.

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Sasaran 1 untuk Tahun 2019-2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN											
			2019			2020			2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6.9	6.52	94.5	7.2	6.69	92.92	7,50	6,76	90,13	7,8	7,02	90,00
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11	10.83	98.45	11.2	11.08	98.95	11,50	11,11	96,60	11,7	11,14	95,21
3.	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf.	%	75.9	76.79	101.17	76.9	78	101.43	77,90	78,89	101,27	78,9	92,04	116,65
	Capaian Indikator kinerja				**98,04**			**97,76**			**96,00**			**100,62**

Menjadi perhatian bahwa keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh banyak faktor dan salah satunya adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Sejalan dengan pencapaian sasaran strategis khususnya dalam peningkatan aksesibilitas , mutu dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan, maka ukurannya dapat dilihat antara lain melalui Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah, dan Angka Melek Hurup (AHM).

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas (di Provinsi Papua) untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang dijalani. Indikator rata-rata lama sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat Pendidikan yang sedang dijalankan.

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua tahun 2022 adalah 7,02 persen. Target yang ditetapkan pencapaiannya pada tahun 2022 yaitu 7,8. Dengan demikian tingkat capaiannya yaitu 90,00 persen. Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 6,76 persen menjadi 7,02 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,35 persen dari jumlah penduduk di Provinsi Papua usia 15 tahun ke atas.

Adanya peningkatan angka rata-rata lama sekolah setiap tahun menunjukkan komitmen Kepala Daerah untuk menuntaskan program wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak Papua, pemberian beasiswa bagi pelajar berprestasi dan kurang mampu, meningkatkan sarana prasarana sekolah, dan pembebasan uang sekolah bagi penduduk kurang mampu.

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Angka harapan lama sekolah (HLS) Provinsi Papua tahun 2022 adalah 11,14 persen dari target yang direncanakan sebesar 11,7 atau capaiannya adalah 95,21 persen. Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 11,11 persen menjadi 11,14 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang ditulisnya/dibacanya. AMH digunakan untuk mengetahui pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu

daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.

Persentase pencapaian angka melek huruf di Provinsi Papua tahun 2022 sebesar 92,04 persen dari target yang direncanakan sebesar 78,9 persen. Ini menunjukkan capaian kinerja indikator sebesar 116,65 persen atau kategori sangat berhasil. Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 78,89 persen, mengalami peningkatan sebesar 37,76 persen.

Secara umum pencapaian kinerja angka melek huruf di Provinsi Papua dalam 4 (tiga) tahun terakhir menunjukkan angka yang baik dan menggembirakan. Pencapaian ini tentu didasari oleh adanya kebijakan Gubernur Papua untuk meningkatkan pendidikan diseluruh pelosok Papua guna meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Papua melalui berbagai program dan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pusat kegiatan belajar masyarakat hingga ke kampung-kampung. Disamping itu sektor pendidikan memang merupakan salah satu prioritas terpenting dalam kepemimpinan Gubernur Papua saat ini.

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya aksesibilitas, mutu dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan Tahun 2022 dengan (3) indikator sasaran meliputi rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah, dan penduduk yang berusia >15 tahun melek hurup capaiannya adalah 100,62 persen atau kategori **"sangat berhasil"**. Pencapaian yang demikian itu dapat terwujud karena dukungan dan kerja keras dari semua pihak termasuk Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua yang secara proaktif melaksanakan berbagai program guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Papua.

Namun demikian disadari pula bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan pendidikan di Provinsi Papua ke arah yang lebih baik sangatlah besar antara lain ketersedian guru-guru di sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas masih kurang dibandingkan luas wilayah di Provinsi Papua, ketersedian sarana dan prasaran pendidikan yang relatif terbatas, tingkat kemahalan relatif sangat tinggi dan yang terakhir adalah dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang telah terjadi pada 3 (tiga) tahun terakhir yang juga memaksa Pemerintah Provinsi

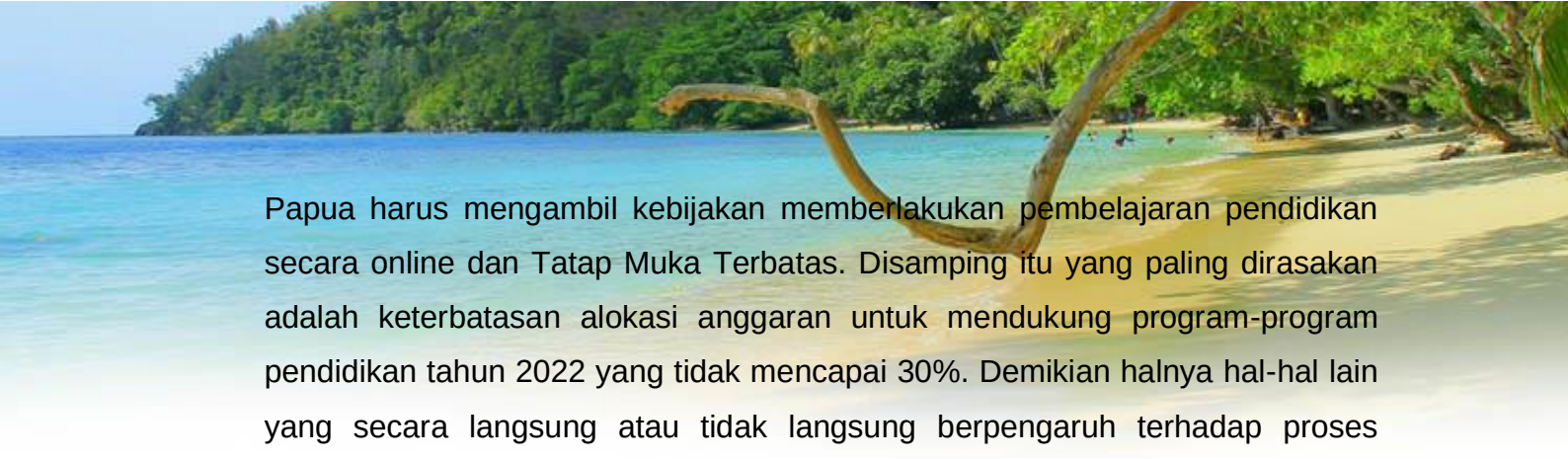

Papua harus mengambil kebijakan memberlakukan pembelajaran pendidikan secara online dan Tatap Muka Terbatas. Disamping itu yang paling dirasakan adalah keterbatasan alokasi anggaran untuk mendukung program-program pendidikan tahun 2022 yang tidak mencapai 30%. Demikian halnya hal-hal lain yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap proses peningkatan pendidikan di Provinsi Papua.

Sasaran 2 — Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat Kesehatan Masyarakat merupakan gambaran profil kesehatan individu atau kelompok individu (masyarakat) di suatu daerah, dimaksud dalam sasaran 2 ini adalah Derejat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Papua.

Rata-rata capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat"** adalah sebesar **104,43** persen dengan predikat **"sangat berhasil".** Pencapaian sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu **Angka Harapan Hidup**. Target Indikator Kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Angka Harapan Hidup	tahun	68,8	71,85	104,43
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					104,43

Capaian ini mengalami kenaikan yang cukup baik bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 96.81 atau naik sebesar 7,20. Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2022 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.6 Indikator Kinerja Sasaran 2 untuk Tahun 2019-2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN											
			2019			2020			2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	66.60	65.65	99,38	67,03	65.79	98,15	68,10	65,93	96,81	68,8	71,85	104,43

Indikator meningkatnya derajat kesehatan masyarakat lebih pada angka harapan hidup di Provinsi Papua semakin baik dapat dilihat dari realisasi rata-rata kemampuan bayi baru lahir di Provinsi Papua tahun 2022 sebesar 71,85, pada tahun 2019 realisasi sebesar 65.65 atau naik sebesar 6.20. Pada tahun 2020 realisasi sebesar 65.79 atau meningkat sebesar 6.06. dan pada tahun 2021 sebesar 65.93, atau realisasi meningkat sebesar 5.92 bila dibandingkat pada tahun 2022. Kondisi ini dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan umur harapan hidup di Provinsi Papua diakibatkan karena program kesehatan yang semakin baik yaitu penanganan penyakit menular, penyakit tidak menular yang semakin baik, ketersedian fasilitas kesehatan dasar di puskesmas dan rujukan di rumah sakit yang semakin baik, penanganan angka kematian ibu dan anak, gizi kesehatan masyarakat yang sudah semakin baik dimasyarakat serta akses, mutu kualitas layanan sudah semakin baik.

Angka harapan hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar. Semakin tinggi angka harapan hidup di suatu wilayah menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Capaian kinerja indikator angka harapan hidup tahun 2022 adalah 104,43 persen dari target angka harapan hidup adalah 68,8 tahun sedangkan realisasinya adalah 71,85 tahun atau melampui target sebesar 3,05.

Secara umum Angka Harapan Hidup dipengaruhi oleh adalah angka kematian dari berbagai penyebab, baik penyebab penyakit menular, penyakit tidak menular, maupun penyebab kematian yang lainnya. Dalam kaitannya dengan kesehatan yang dipengaruhi kematian diantaranya adalah : Angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian anak balita dan angka kematian penyakit menular.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan usia harapan hidup adalah program dan kegiatan untuk menurunkan angka kematian yang mendukung siklus kehidupan meliputi :

- Pelayanan kesehatan pada Bumil dan Bufas.
- Pelayanan Kesehatan pada Bayi dan Balita
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Dini (PAUD)

- Pelayanan Kesehatan pada Usia Sekolah Dasar,
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Remaja
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lansia.
- Pelayanan Imunisasi dan Pencegahan penyakit
- Pelayanan kesehatan Gizi Kesehatan Masyarakat
- Pelayanan Promosi Kesehatan
- Pelayanan kesehatan lingkungan

Tentunya hampir semua pelayanan kesehatan yang dilakukan baik pelayanan promotive, preventif dan kuratif adalah pelayanan untuk meningkatkan angka harapan hidup (AHH). Oleh karena itu semua program atau kegiatan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular adalah kegiatan untuk mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup. Hal inilah mengakibatkan capaian kinerja yang baik pada tahun 2022 ini.

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Angka Harapan Hidup Provinsi Papua Tahun 2019 s/d 2022 untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

GRAFIK 1.1
ANGKA HARAPAN HIDUP PROVINSI PAPUA

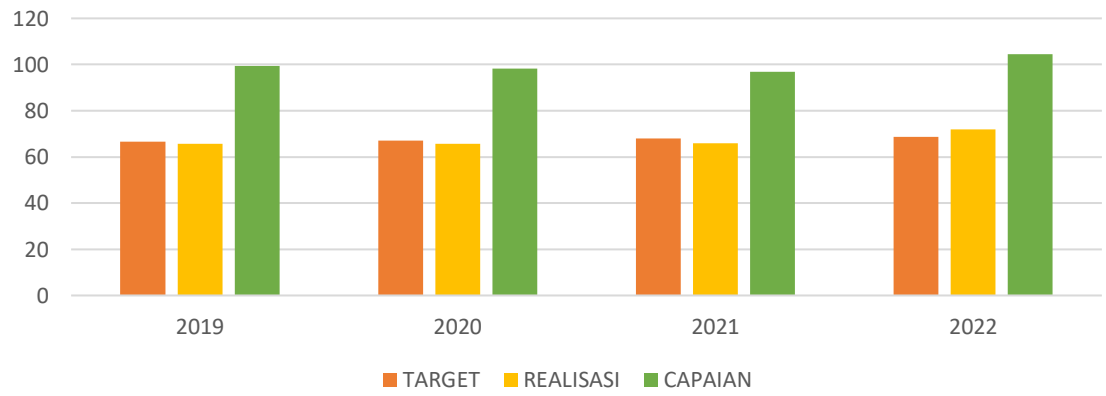

Sasaran 3	Sukses Pelaksanaan dan Prestasi Olahraga

Secara keseluruhan rata-rata Capaian kinerja sasaran **"Sukses Pelaksanaan dan Prestasi Olahraga"** sebesar **134** Atlet dengan predikat **"sangat berhasil"**, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (Satu) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.7 Indikator Kinerja Sasaran 3

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*	*3*	*4*	*5*
1	Jumlah Atlet Berprestasi pada Event Olahraga Nasional	Atlit	95	128	134
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					**134**

Secara keseluruhan capaian kinerja Sasaran "Sukses Pelaksanan dan Prestasi Olahraga mengalami peningkatan di tahun 2022 yaitu sebesar 134 atlet dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 109 atlet atau meningkat 0,67 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan target realisasi dan capaian kinerja dari sukses pelalksanaan dan prestasi olahraga pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8 Indikator Kinerja Sasaran 3 untuk Tahun 2019-2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN											
			2019			2020			2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Jumlah Atlet Berprestasi pada Event Olahraga Nasional	Atlit	40	86	215	80	100	125	85	93	109	95	128	134

Indikator jumlah atlet yang berprestasi pada event olahraga nasional dengan target 95 atlet terealisasi 128 atlet dengan capaian kinerja 137 atlet dengan kategori “sangat berhasil” Indikator jumlah atlet yang berperestasi pada event olahraga nasional meningkatan di tahun 2022 yaitu sebesar 134 atlet atau 0,67 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 86 alet atau 0,40 persen juga tahun 2020 sebesar 100 atlet atau 0,8 persen dan tahun 2021 93 atlet atau 0,47 persen ini bisa di ketahui dari presentase jumlah atlet tahun 2022 yang dikirim untuk mengikuti pertandingan tingkat nasional Pra Pekan Olahraga Pelajar (PRA POPNAS) Zona V Tahun 2022 yang berlangsung di kota Palu Propinsi Sulawesi Tenggara dari tanggal 8 sampai 13 November 2022 sebanyak 125 atlet dengan mempertandingkan 8 (delapan) cabang olahraga tetapi atlet yang mendapatkan penghargaan sebanyak 56 orang atau 56,24 persen dan yamg belum mendapatkan penghargaan sebesar 40,04 persen.tetapi bila dilihat dari jumlah klub olahraga yang dibina dari 37 cabang olahraga (Cabor) maka yang berhasil mendapatkan penghargaan tingkat nasional sebanyak 7 cabang olahraga itu terlihat dari jumlah perolehan medali yang diperoleh oleh kontingen Pra Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional (PRA POPNAS) Zona V Tahun 2022 dengan menyabet 6 Emas, 7 perak dan 6 perunggu sehingga jumlah keseluruhan medali yang di peroleh tim Pra Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional (PRA POPNAS) Zona V provinsi papua sebesar 20 medali dari 34 provinsi provinsi yang mengikuti kejuaraan. PRA POPNAS) Zona V Tahun 2022 untuk mengetahui perolehan medali kontingan (PRA POPNAS) Zona V provinsi papua tahun 2022.

Dari hasil keikutsertaan dalam PRAPOPNAS tersebut Provinsi Papua berhasil memperoleh 20 medali yang terbagi atas beberapa kelompok medali untuk beberapa

cabang olahraga diantara seperti terlihat pada tabel pada halaman berikut.

Tabel 3.9 Perolehan Medali Cabang Olahraga

No	Cabang Olahraga	Perolehan Medali	
1.	Tinju	2	Emas
		2	Perak
		1	Perunggu
2.	Pencak Silat	2	Emas
		2	Perak
		5	Perunggu
3.	Tenis Lapangan	1	Emas
		2	Perak
4.	Basket Putri	1	Emas
5.	Basket Putra	1	Perak
6.	Sepak Bola	1	Perak
Jumlah		**20**	

DAFTAR PARTISIPASI SISWA ATLIT PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAJAR DAERAH (PPLPD) DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAJAR (PPLP) PROVINSI PAPUA BINAAN DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PADA SETIAP IVENT OLAHRAGA DAN HASIL YANG DIPEROLEH SELAMA TAHUN 2022

NO.	NAMA SISWA	EVENT	CABANG OLAHRAGA	HASIL	TEMPAT	MEDALI
1	2	3	4	5	6	7
1	VANI TABUNI	LOMBA LARI 7.7 KM	ATLETIK	JUARA I	KOTA JAYAPURA	EMAS
		HUT RI KE 77 TNI AL				
2	YOSHUA AWAIRARO	LOMBA LARI 5 KM	ATLETIK	JUARA I	STADION LUKAS ENEMBE	EMAS
		HUT RI KE 77				
3	RONALD SROYER	LOMBA LARI 5 KM	ATLETIK	JUARA II	STADION LUKAS ENEMBE	PERAK
		HUT RI KE 77				
4	VANI TABUNI	LOMBA LARI 5 KM	ATLETIK	JUARA I	STADION LUKAS ENEMBE	EMAS
		HUT RI KE 77				
5	DANSELINA TAURUY	LOMBA LARI 5 KM	ATLETIK	JUARA II	STADION LUKAS ENEMBE	PERAK
		HUT RI KE 77				
6	LINA HISAGE	LOMBA LARI 5 KM	ATLETIK	JUARA III	STADION LUKAS ENEMBE	PERUNGGU
		HUT RI KE 77				
7	TONCI SHOUTER I. RAMANDAI	PRA POPNAS WIL V	SEPAK BOLA	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAK
8	ADRIAN SHEVA MALIBELA	PRA POPNAS WIL V	SEPAK BOLA	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAK
9	DAVA DWI PRATAMA	PRA POPNAS WIL V	SEPAK BOLA	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAK
10	DIRK LUKAS AURI	PRA POPNAS WIL V	SEPAK BOLA	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAK
11	M. IRGI KHATABENA	PRA POPNAS WIL V	SEPAK BOLA	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAK

12	JEZREEL DELVIO GERODA	PRA POPNAS WIL V	SEPAK BOLA	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAK
13	MORIS DENI YARANGGA	PRA POPNAS WIL V	SEPAK BOLA	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAK
14	ADRIANO SANDER MALIBELA	PRA POPNAS WIL V	SEPAK BOLA	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAK
15	EDUARD D. RUNGGAWERI	PRA POPNAS WIL V	SEPAK BOLA	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAK
16	RAFEL LUCKY NUMBERI	PRA POPNAS WIL V	TINJU	JUARA I	PALU - SULTENG	EMAS
17	FELERIE KABUARE	PRA POPNAS WIL V	TINJU	JUARA I	PALU - SULTENG	EMAS
18	YAKULINA FANNY PIGAI	PRA POPNAS WIL V	TINJU	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAK
19	REINHART WAIRARA	PRA POPNAS WIL V	TINJU	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAK
20	JENNIVER MANIAI	PRA POPNAS WIL V	TINJU	JUARA III	PALU - SULTENG	PERUNGGU
21	(NAMA-NAMA ATLIT)	PRA POPNAS WIL V	PENCAK SILAT	JUARA I	PALU - SULTENG	EMAS
22	(NAMA-NAMA ATLIT)	PRA POPNAS WIL V	PENCAK SILAT	JUARA I	PALU - SULTENG	EMAS
23	(NAMA-NAMA ATLIT)	PRA POPNAS WIL V	PENCAK SILAT	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAK
24	(NAMA-NAMA ATLIT)	PRA POPNAS WIL V	PENCAK SILAT	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAK
25	(NAMA-NAMA ATLIT)	PRA POPNAS WIL V	PENCAK SILAT	JUARA III	PALU - SULTENG	PERUNGGU
26	(NAMA-NAMA ATLIT)	PRA POPNAS WIL V	PENCAK SILAT	JUARA III	PALU - SULTENG	PERUNGGU
27	(NAMA-NAMA ATLIT)	PRA POPNAS WIL V	PENCAK SILAT	JUARA III	PALU - SULTENG	PERUNGGU
28	(NAMA-NAMA ATLIT)	PRA POPNAS WIL V	PENCAK SILAT	JUARA III	PALU - SULTENG	PERUNGGU

29	(NAMA-NAMA ATLIT)	PRA POPNAS WIL V	PENCAK SILAT	JUARA III	PALU - SULTENG	PERUNGGU
30	ASTRIYANI LAHAR	PRA POPNAS WIL V	TENIS LAPANGAN	JUARA I	PALU - SULTENG	EMAS
31	EIRENE MURIB WENDA	PRA POPNAS WIL V	TENIS LAPANGAN	JUARA I	PALU - SULTENG	EMAS
32	SULTAN DANU ADISTY	PRA POPNAS WIL V	TENIS LAPANGAN	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAK
33		PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRI	JUARA I	PALU - SULTENG	EMAS
34		PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRI	JUARA I	PALU - SULTENG	EMAS
35		PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRI	JUARA I	PALU - SULTENG	EMAS
36		PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRI	JUARA I	PALU - SULTENG	EMAS
37		PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRI	JUARA I	PALU - SULTENG	EMAS
38		PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRI	JUARA I	PALU - SULTENG	EMAS
39		PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRI	JUARA I	PALU - SULTENG	EMAS
40		PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRI	JUARA I	PALU - SULTENG	EMAS
41		PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRI	JUARA I	PALU - SULTENG	EMAS
42		PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRI	JUARA I	PALU - SULTENG	EMAS
43		PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRI	JUARA I	PALU - SULTENG	EMAS

44		PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRI	JUARA I	PALU - SULTENG	EMAS
45	SALOMO FRANKLIN MERABANO	PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRA	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAK
46	AGUSTINUS W. AWOR	PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRA	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAK
47	RAUL FLORENZOE MALIMONGAN	PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRA	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAK
48	ALESSANDRO H. S. PARIARIBO	PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRA	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAK
49	PASKALINO H. TAKAYEITOUW	PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRA	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAK
50	STEVEN RENHARD P. NUBURAI	PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRA	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAK
51	KALVIN B.G. YOUWE	PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRA	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAK
52	HENRY GLEEN V. HAUMAHU	PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRA	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAK
53	ABRAHAM ADOLOF AWARAWI	PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRA	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAK
54	JULIAN EDWARD V. SARIOA	PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRA	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAT
55	PAUSTINUS W. KAMKOPIMU	PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRA	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAT
56	MARCO M. TANATI	PRA POPNAS WIL V	BASKET PUTRA	JUARA II	PALU - SULTENG	PERAT

Pencapaian prestasi olahraga di Provinsi Papua dimulai dari pembinaan prestasi Kabupaten dan Kota. Hal ini dilakukan untuk menggali potensi bibit-bibit unggul yang ada di daerah agar terus dikembangkan untuk menopang prestasi olahraga di level

Provinsi dan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005, pasal 33 menyebutkan: ***"Pemerintah Provinsi melaksanakan kebijakan keolahragaan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, penggalangan sumber daya dan pengawasan."***. Hal ini mengandung makna bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan prestasi olahraga secara nasional melalui pengembangan dan pembinaan olahraga di provinsi, termasuk di Provinsi Papua.

Tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua yang diberikan oleh Pemerintah untuk pembinaan prestasi atlet pelajar adalah melalui pembentukan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) dan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP). Perbedaan PPLPD dan PPLP semata-mata hanya berdasarkan sumber anggaran pembinaan, dimana PPLP bersumber dari dana APBN sementaran PPLPD bersumber dari anggaran APBD Provinsi Papua.

PPLP/PPLD adalah wadah berhimpunnya atlet pelajar potensial, mempunyai bakat, skill , potensi dan kemauan untuk mengasah dan meningkatkan prestasi olahraga. PPLP/PPLPD merupakan unit pembinaan olahraga pelajar yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui pembinaan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua. Keberadaan PPLP/PPLPD tersebut sebagai sentra olahraga pendidikan di daerah mempunyai posisi yang stretegis dalam upaya mencetak bibit-bibit unggul olahragawan pelajar di daerah. Oleh karena PPLP/PPLPD merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan prestasi atlet/pelajar maka sejatinya harus melakukan inovasi kebijakan untuk keberhasilan pembinaan atlet di daerah. Inovasi kebijakan dimaksud adalah kebijakan pembinaan atlet yang berorientasi hasil dan prestasi berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Revisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU-SKN) rohnya adalah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Pencanangan DBON mengusung tema Sport Science, Sport Tourism, dan Sport Industry. Terbitnya UU-SKN baru ini merupakan suatu kegembiraan bagi insan-insan olahraga tanah air, mengingat banyak hal digantungkan pada undang-undang ini untuk dapat***kebijakan keolahragaan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, penggalangan sumber daya dan pengawasan."***. Hal ini

mengandung makna bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan prestasi olahraga secara nasional melalui pengembangan dan pembinaan olahraga di provinsi, termasuk di Provinsi Papua.

Tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua yang diberikan oleh Pemerintah untuk pembinaan prestasi atlet pelajar adalah melalui pembentukan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) dan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP). Perbedaan PPLPD dan PPLP semata-mata hanya berdasarkan sumber anggaran pembinaan, dimana PPLP bersumber dari dana APBN sementaran PPLPD bersumber dari anggaran APBD Provinsi Papua.

PPLP/PPLD adalah wadah berhimpunnya atlet pelajar potensial, mempunyai bakat, skill , potensi dan kemauan untuk mengasah dan meningkatkan prestasi olahraga. PPLP/PPLPD merupakan unit pembinaan olahraga pelajar yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui pembinaan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua. Keberadaan PPLP/PPLPD tersebut sebagai sentra olahraga pendidikan di daerah mempunyai posisi yang stretegis dalam upaya mencetak bibit-bibit unggul olahragawan pelajar di daerah. Oleh karena PPLP/PPLPD merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan prestasi atlet/pelajar maka sejatinya harus melakukan inovasi kebijakan untuk keberhasilan pembinaan atlet di daerah. Inovasi kebijakan dimaksud adalah kebijakan pembinaan atlet yang berorientasi hasil dan prestasi berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Revisi Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 yang telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 11 tahun 2022 tentang sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) intinya adalah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON),. Pencanangan DBON yang mengusung tema Sport Science Sport Tourism, dan Sport industry. Terbitnya UU-SKN baru ini merupakan suatu kegembiraan bagi insan-insan olahraga tanah air mengingat banyak hal digantungkan pada undang-undang ini untuk meningkatkan prestasi olahraga indonesia

kebijakan keolahragaan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, penggalangan sumber daya dan pengawasan.”. Hal ini mengandung makna bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai

tanggung jawab dalam meningkatkan prestasi olahraga secara nasional melalui pengembangan dan pembinaan olahraga di provinsi, termasuk di Provinsi Papua.

Sasaran 4	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah

Pemuda merupakan tulang punggung pembangunan, sehingga peran pemuda sebagai subjek dalam pembangunan merupakan hal yang penting. Pemuda diharapkan dapat melakukan perannya untuk mengkawal roda pembangunan baik pada level pemerintahan tetapi juga ditengah masyarakat.

Secara keseluruhan capaian kinerjasasaran **"Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah"** mencapai **40,01** .persen dengan predikat **"Tidak Berhasil"**. Ketidakberhasilan sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator sasaran. Target Indikator kinerja realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.11 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 4

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*	*3*	*4*	*5*
1	Persentase Organisasi Pemuda Aktif	Persen	73,8	29.53	40.01
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					**40,01**

Capaian ini mengalami peningkatan sedikit dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 23.82 persen atau naik sebesar 16.19 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja selama tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022 sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

Tabel 3.12 Indikator Kinerja Sasaran 4 untuk Tahun 2019-2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN											
			2019			2020			2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Persentase Organisasi Pemuda Aktif	Persen	70.3	16.98	24.15	71.5	14.51	20.29	72.6	14.75	23.82	73,8	29.53	40.01

Indikator persentase organisasi Pemuda yang aktif dengan **target 73,8 terealisasi 29,53 persen** dengan **capaian kinerja 40,01 persen** dengan kategori **Tidak Berhasil.** Indikator persentase organisasi pemuda aktif yang terdaftar pada kesbangpol provinsi papua di tahun 2022 berjumlah 62 Organisasi Pemuda. Jumlah ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0,17 persen kemudian tahun 2020 sebesar 0,14 persen dan tahun 2021 sebesar 0,14 persen.di tahun 2019 tidak ada peningkatan karena belum adanya soasialisasi dan pembagian formulir dari badan kesatuan bangsa dan politik provinsi papua kepada setiap organisasi pemuda yang ada di kota jayapura,.kemudian di tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2019 tetapi peningkatan ini tidak sesuai dengan target yang diharapkan hal ini disebabkan karena di tahun 2020 indonesia termasuk papua diserang wabah covid 19 yang membuat semua aktivitas pemerintah maupun organisasi masyarakat tidak berjalan dengan baik sehingga mempengaruhi partisipasi pemuda untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan pendaftaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi papua. Sedangkan di tahun 2021 pemerintah provinsi papua dipercayakan oleh pemrintah pusat menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON XXI sehingga semua SKPD diwajibkan untuk memangkas anggarannya demi mendukung terselenggaranya pelaksanaan penyelenggaraan PON XXI papua tahun 2021 Hal ini sangat mempengaruhi anggaran yang sudah disiapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi papua untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan organisasi pemuda Sedangkan di tahun 2022 sedikit

mengalami peningkatan, peningkatan ini dikarenakan adanya upaya dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi papua untuk melakukan sosialisasi dan pembagian formulir pendaftaran kepada orgamisasi pemuda yang bertempat tinggal / berdomisili di wilayah kota jayapura dari hasil sosialisasi dan pembagian formulir kepada organisasi pemuda sehingga di tahun 2022 ada 44 organisasi pemuda yang melakukan pendaftaran secara hukum dan legalitasnya diakui oleh pemerintah lewat Badan Keseatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi papua. Dan. untuk mengetahui organisasi pemuda yang aktif adalah melakukan pendaftaran ulang setiap tahun sehingga mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai bukti legitimasi serta mengkomunikasikan program kegiatannya yang setiap tahun dijalankan kepada Badan Kesbangpol Provinsi Papua. Sementara ada 18 organisasi pemuda yang terdaftar di Badan Kesbangpol Papua namun tidak aktif sampai dengan tahun 2022 karena tidak melakukan pendaftaran ulang sehingga dinyatakan tidak aktif hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor:17 Tahun 2013 yang mengharuskan setiap organisasi agar setiap 5 (Lima Tahun) harus melakukan pendaftaran ulang apabila tidak melakukan pendaftaran ulang maka dinyatakan tidak aktif secara hukum.

Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus berupaya dengan merangkul Ormas Pemuda melalui kegiatan sosialisasi tentang bahaya penggunaan Miras, Narkoba, Sex Bebas bagi Ormas Pemuda di Kabipaten Timika, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Merauke. Belum semua Kab/Kota se Papua dilakukan pembinaan sosialisasi tersebut karena keterbatasan anggaran serta letak geografis.

Berikut Data Organisasi Pemuda yang terdaftar dan aktif di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua di Tahun 2022.

Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai bukti legitimasi maka ada 44 (Empat puluh empat) Organisasi Pemuda yang terdaftar secara aktif yaitu :

Tabel. 3.13 Daftar Organisasi Pemuda di Provinsi Papua Yang Aktif

No.	Nama Organisasi Pemuda
1.	Brigade 571 Trisula Putih provinsi papua 220/020, 17 Januari 2022
2.	Majelis Pimpinan ICMI Muda (PM-ICMI Muda) Provinsi Papua 220/021, 17 Janari 2022
3.	Lembaga Perlindungan dan Pengembangan Bahasa Daerah Provinsi Papua 220/024, 17 Januari 2022
4.	Yayasan Vita Papua Mandiri Provinsi Papua 220/025, Januari 2022
5.	Forum Komunikasi Mahasiswa Papua Provinsi Papua 220/023, 17 Januari 2022
6.	DWP Komando Pasukan Khusus (KPK) Tipikor Provinsi Papua 220/056, 31 Januari 2022
7.	Lembaga Adat Masyarakat Ugimba Paniai Papua Serikat Provinsi Papua 220/055, 31 Januari 2022
8.	Pemerintah Kerajaan Ibunda Sahye Kukumen Papua Serikat Provinsi Papua 220/057, 31 Januari 2022
9.	Kelompok Kotak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 220/026, 16 Januari 2022
10.	Yayasan Al-Barakah Abepura Provinsi Papua 220/111, 24 Februari 2022
11.	Forum Peduu Perempuan Kabupaten Yahukimo 220/110, 24 Februari 2022
12.	Dewan Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Papua 220/150, 15 Maret 2022

13.	Perkumpulan Keluarga Besar Fategomi 220/153, 16 Maret 2022
14.	Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia 220/152, 16 Maret 2022
15.	Persatuan Keluarga Besar purnawirawan 220/234, 14 April 2022
16.	Perkumpulam Perlindungan dan Pengembangan Bahasa Daerah Papua (PPPBDP) 220/236, 14 April 2022
17.	DWP satria Kita Pancasila Provinsi Papua 220/235, 14 April 2022
18.	Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) 220/464, 14 Juni 2022
19.	Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) 220/566, 18 Juli 2022
20.	DPW Sekretariat Bersama (SEKBAR) Wartawan Indonesia Provinsi Papua 220/567, 18 Juli 2022
21.	DPW Barisan Kader Gusdur Provinsi Papua 220/559, 13 Juli 2022
22.	Patriot Pembela Pancasila (LASKAR PALAPA) 220/651, 28 Juli 2022
23.	Yayasan Nsaret Provinsi papua 220/650, 28 Juli 2022
24.	DPD Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) 220/677, 10 Agustus 2022
25.	DPP Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba 220/676, 10 Agustus 2022

26.	DPW Garda Puma Puan Maharani Provinsi Papua 220/672, 10 Agustus 2022
27.	Yayasan Sinergi Timur Mas (STIMAS) Provinsi Papua 220/697, 22 Agustus 2022
28.	Satu Pena Provinsi papua 220/695, 22 Agustus 2022
29.	Yayasan Kebugaran Lansia Pra Lansia Indonesia (KLPI) 220/006, 29 April 2022
30.	DPD Masyarakat Sadar Wisata (MASATA) 220/088, 27 April 2022
31.	DPD Maluku Satu Rasa Salam Sarane Bersatu Provinsi Papua 220/046, 12 Juni 2022
32.	Lembaga Masyarakat Adat Botenka Wogee Mee Selatan (LEMABWOMES) 220/801, 12 Juni 2022
33.	Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) 220/263, 20 Agustus 2022
34.	Lembaga Musyawarah Adat Suku Komoro (LEMASKO) 220/800, 7 oOktober 2022
35.	DPO Lembaga Swadaya Masyarakat Rumah Aspirasi Perempuan Tabi Nasional (LSM-RAPIN) Provinsi Papua 220/799, 7 Oktober 2022
36.	OPW Pro Gerakan Nasional Provinsi Papua 220/832, 31 Oktober 2022
37.	Imai Papua 220/829, 31 Oktober 2022
38.	Yayasan Pelayanan Injili (YAPELIN) Gidi

	220/834, 31 Oktober 2022
39.	Ikatan Mahasiswa Teologi Puncak Jaya, Timika dan Intan Jaya (IPMT-PUTIIN) PAPUA 220/830, 31 Oktober 2022
40.	Pengurus Wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) Papua 220/831, 31 Oktober 2022
41.	DPD Garda Manguni Provinsi Papua 220/833, 31 Oktober 2022
42.	Dewan Koperas Indonesia Wilayah provinsi Papua (DEKOPINWIL) 220/852, 31 Oktober 2022
43.	Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Papua 220/828, 31 Oktober 2022
44.	Yayasan Bina Hasanah Al-Fitrah 220/829, 31 Oktober 2022

Sumber Data Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Papua Tahun 2022

Sasaran 5	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan"** mencapai **100.33** persen dengan predikat **"Sangat Berhasil"**. Sasaran ini diukur melalui pencapaian

2 (Dua) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.14 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 5

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*	*3*	*4*	*5*
1	Cakupan daerah rawan pangan	Jml. kab/Kota	7	7	100.00
2	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Rp. Ribu per kapita	7495.8	7.545,3	100,66
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					100.33

Capaian ini sedikit menurun bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 0,67 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022 sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

Tabel. 3.15 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 5

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN								
			2020			2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Cakupan daerah rawan pangan	Jml. kab/Kota	10	22	45.45	9	7	128.57	7	7	100
2.	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Rp. Ribu per kapita	7291.7	7294	100.03	7393.1	100.66	7344	7495.8	7545,3	100,66
	Capaian Indikator kinerja				**72.74**			**101.005**			**100,33**

Indikator kinerja **cakupan daerah rawan pangan** dengan **Target 9** Kab/Kota se Papua, **Realisasi7** Kab/Kota dengan **Capaian** 128.57. Cakupan Pemetaan Rawan Pangan dilakukan berdasarkan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*/FSVA) Provinsi Papua. Penyusunan FSVA Tahun 2021 diarahkan pada FSVA Kabupaten, yang merupakan analisis lanjutan dari hasil FSVA Nasional dan Provinsi yang telah disusun sebelumnya. Dimana melalui FSVA Kabupaten akan diidentifikasi wilayah-wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan pada level desa.

Pada tahun 2019 pemetaan daerah rawan pangan sebanyak 22 kabupaten (75,86 %) dan pada tahun 2020 dilanjutkan pemetaan kerawanan pangan yang tersisa sebanyak 7 kabupaten/kota (24,13 %) dari total kabupaten/kota, sehingga pemetaan kerawanan dan ketahanan pangan tahun 2021 sudah dilaksanakan di 29 kabupaten/kota se Provinsi Papua dan pada tahun 2022 di laksanakan di 29 kabupten/kota.

Dari hasil komposit FSVA Provinsi Papua, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa :

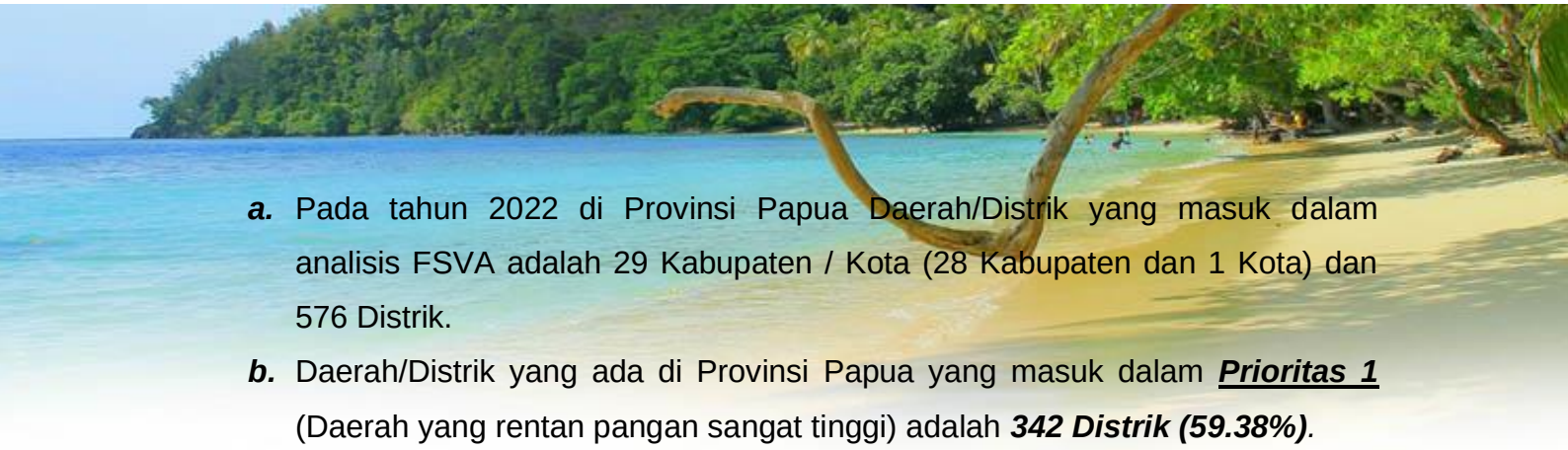

a. Pada tahun 2022 di Provinsi Papua Daerah/Distrik yang masuk dalam analisis FSVA adalah 29 Kabupaten / Kota (28 Kabupaten dan 1 Kota) dan 576 Distrik.

b. Daerah/Distrik yang ada di Provinsi Papua yang masuk dalam ***Prioritas 1*** (Daerah yang rentan pangan sangat tinggi) adalah ***342 Distrik (59.38%)***.

c. Daerah/Distrik yang masuk dalam ***Prioritas 2*** (Daerah yang rentan pangan agak tinggi) adalah ***65 Distrik (11.28%)*.**

d. Daerah/Distrik yang masuk dalam ***Prioritas 3*** (Daerah yang rentan pangan tinggi) tersebar dalam ***96 Distrik (16.67%).***

e. Daerah/Distrik yang masuk dalam ***Prioritas 4*** (Daerah yang rentan pangan cenderung tahan pangan) tersebar di ***38 Distrik (6.60%)*.**

f. Daerah/Distrik yang masuk dalam ***Prioritas 5*** (Daerah yang agak tahan pangan) tersebar di ***18 Distrik (3.13%)*.**

g. Daerah/Distrik yang masuk dalam ***Prioritas 6*** (Daerah yang tahan pangan) tersebar dalam ***17 Distrik (2,95%)*.**

h. Daerah yang termasuk dalam prioritas 1 (Daerah kerentanan kerawanan terhadap ketahanan pangan sangat tinggi) tersebar di 19 Kabupaten dan 342 Distrik, yaitu:

1. Kabupaten Kepulauan Yapen 13 Distrik yaitu : Distrik Yapen Timur, Distrik Pantura Yapen, Distrik Teluk Ampimoi, Distrik Raimbawi, Distrik Pulau Kurudu, Distrik Angkaisera, Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Yawakukat, Distrik Yapen Barat, Distrik Wonawa, Distrik Pulau Yerui, Distrik Poom, dan Distrik Windesi;
2. Kabupaten Biak Numfor 11 Distrik yaitu : Distrik Numfor Timur, Distrik Bruyadori, Distrik Poiru, Distrik Padaido, Distrik Aimando Padaido, Distrik Yendidori, Distrik Andey, Distrik Yawosi, Distrik Bondifuar, Distrik Biak Barat, dan Distrik Swandiwe;
3. Kabupaten Puncak Jaya 26 Distrik Yaitu : Distrik Fawi, Distrik Dagai, Distrik Kiyage, Distrik Mulia, Distrik Yambi, Distrik Ilamburawi, Distrik Muara, Distrik Pagaleme, Distrik Gurage, Distrik Irimuli, Distrik Ilu, Distrik Torere, Distrik Yamoneri, Distrik Waegi, Distrik Nume, Distrik Nioga, Distrik Gubume, Distrik Taganombak, Distrik Tingginambut, Distrik Kalome, Distrik Wanwi, Distrik Mewoluk, Distrik Lumo, Distrik Molanikime, Distrik Yamo, Distrik Dokome;

4. Kabupaten Boven Digoel 17 Distrik yaitu : Distrik Subur, Distrik Kia, Distrik Mindiptana, Distrik Iniyandit, Distrik Kombut, Distrik Sesnuk, Distrik Fofi, Distrik Arimop, Distrik Bomakia, Distrik Firiwage, Distrik Manggelum, Distrik Yaniruma, Distrik Kawagit, Distrik Kombay, Distrik Waropko, Distrik Ambatkwi, Distrik Ninati;
5. Kabupaten Mappi 15 Distrik Yaitu : Distrik Nambioman Bapai, Distrik Minyamur, Distrik Edera, Distrik Venaha, Distrik Syahcame, Distrik Bamgi, DistrikYakomi, Distrik Obaa, Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Assue, Distrik Citakmitak, Distrik Kaibar, Distrik Passue Bawah, Distrik Ti-Zain;
6. Kabupaten Asmat 10 Distrik Yaitu : Distrik Kopay, Distrik Der Koumur, Distrik Safan, Distrik Awyu, Distrik Fayit, Distrik Aswi, Distrik Ayip, Distrik Kolf Braza, Distrik Joutu, dan Distrik Pulau Tiga;
7. Kabupaten Yahukimo 51 Distrik Yaitu : Distrik Kurima, Distrik Musaik, Distrik Dekai, Distrik Obio, Distrik Pasema, Distrik Amuma, Distrik Suru-suru, Distrik Wusama, Distrik Silimo, Distrik Ninia, Distrik Holuwon, Distrik Lolat, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik Suntamon, Distrik Sobaham, Distrik Korupun, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Anggruk, Distrik Panggema, Distrik Walma, Distrik Kosarek, Distrik Ubahak, Distrik Nalca, Distrik Puldama, Distrik Nipsan, Distrik Samenage, Distrik tangma, Distrik Soba, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Kayo, Distrik Sumo, Distrik Hogio, Distrik Ukha, Distrik Werima, Distrik Soloikma, Distrik Seradala, Distrik Kabianggama, Distrik Kwikma, Distrik Hilipuk, Distrik Yahuliambut, Distrik Hereapini, Distrik Ubalihi, Distrik Talambo, Distrik Pronggoli, Distrik Endomen, Distrik Kona, Distrik Duram, Distrik Dirwemna;
8. Kabupaten Tolikara 46 Distrik Yaitu : Distrik Kanggime, Distrik Woniki, Dsitrik Nabunage, Distrik Gilubandu, Distrik Wakuo, Distrik Aweku, Distrik Bogonuk, Distrik Karubaga, Distrik Goyage, Distrik Wunin, Distrik Kondaga, Distrik Nelawi, Distrik Kuari, Distrik Lianogoma, Distrik Biuk, Distrik Bokondini, Distrik Bokoneri, Distrik Bewani, Distrik Kembu, Distrik Wina, Distrik Umagi, Distrik Panaga, Distrik Poganeri, Distrik Kamboneri, Distrik Air garam, Distrik Dow, Distrik Wari/Taiyeve, Distrik Egiam, Distrik Nunggawi, Distrik Kubu, Distrik Anawi, Distrik Wugi, Distrik Geya, Distrik Wenam, DistrikNumba, Distrik Kai, Distrik Dundu, Distrik Gundagi, Distrik

Timori, Distrik Yuneri, Distrik Tagime, Distrik Danime, Distrik Yuko, Distrik Telenggeme, Distrik Gika, Distrik Tagineri;

9. Kabupaten Waropen 12 Distrik Yaitu : Distrik Waropen Bawah, Distrik Inggerus, Distrik Urei Faisei, Distrik Oudate, Distrik Wapoga, Distrik Masirei, Distrik Risei Sayati, Distrik Demba, Distrik Soyoi Mambai, Distrik Wonti, Distrik Walani, dan Distrik Kirihi;
10. Kabupaten Supiori 5 Distrik Yaitu : Distrik Supiori Selatan, Distrik Kepulauan Aruri, Distrik Supiori Utara, Distrik Supiori Barat, dan Distrik Supiori Timur;
11. Kabupaten Mamberamo Raya 9 Distrik Yaitu : Distrik Waropen Atas, Distrik Benuki, Distrik Sawai, Distrik Mamberamo Hilir, Distrik Mamberamo Tengah, Distrik Iwaso, Distrik Mamberamo Tengah Timur, Distrik Rofaer, dan Distrik Mamberamo Ulu;
12. Kabupaten Nduga 32 Distrik Yaitu : Distrik Wosak, Distrik Moba, Distrik Pija, Distrik Kora, Distrik Kenyam, Distrik Mbuwa Tengah, Distrik Krepkuri, Distrik Embetpem, Distrik Geselma, Distrik Kilmid, Distrik Yenggelo, Distrik Alama, Distrik Meborok, Distrik Mapenduma, Distrik Kroptak, Distrik Paro, Distrik Kegayem, Distrik Mugi, Distrik Yal, Distrik Mam, Distrik Yigi, Distrik Dal, Distrik Nirkuri, Distrik Inikgal, Distrik Mbuwa, Distrik iniye, Distrik Wutpaga, Distrik Nenggeangin, Distrik Mbulmu Yalma, Distrik Gearek, Distrik Pasir Putih, dan Distrik Wusi;
13. Kabupaten Lanny Jaya 39 Distrik Yaitu : Distrik Makki, Distrik Gupura, Distrik Kolawa, Distrik Gelok Beam, Distrik Awina, Distrik Kully Lanny, Distrik Pirime, Distrik Buguk Gona, Distrik Milimbo, Distrik Gollo, Distrik Wiringgabut, Distrik Tiom, Distrik Nogi, Distrik Mokoni, Distrik Niname, Distrik Yiginua, Distrik Tiom Ollo, Distrik Yugungwi, Distrik Lannyna, Distrik Balingga, Distrik Balingga Barat, Distrik Bruwa, Distrik Ayumnati, Distrik Goa Balim, Distrik Kuyawage, Distrik Wano Barat, Distrik Malagaineri, Distrik Melagai, Distrik Tiomneri, Distrik Wereka, Distrik Dimba, Distrik Kelulome, Distrik Nikogwe, Distrik Gamelia, Distrik Karu, Distrik Yiluk, Distrik Guna, Distrik Poga, dan Distrik Muara;
14. Kabupaten Mamberamo Tengah 5 Distrik Yaitu : Distrik Kobakma, Distrik Ilugwa, Distrik Kelila, Distrik Eragayam, dan Distrik Megambilis;

15. Kabupaten Yalimo 4 Distrik Yaitu : Distrik Welarek, Distrik Apalapsili, Distrik Abenaho, dan Distrik Elelim;
16. Kabupaten Puncak Jaya 24 Distrik Yaitu : Distrik Agadugume, Distrik Lambewi, Distrik Oneri, Distrik Gome, Distrik Amungkalpia, Distrik Gome Utara, Distrik Erelmakawia, Distrik Ilaga Utara, Distrik Mabugi, Distrik Omukia, Distrik Sinak, Distrik Sinak Barat, Distrik Mageabume, Distrik Yugumuak, Distrik Pogoma, Distrik Kembru, Distrik Bina, Distrik Wangbe, Distrik Ogamanin, Distrik Beoga, Distrik Beoga Barat, Distrik Beoga Timur, Distrik Doufo, dan Distrik Dervos;
17. Kabupaten Dogiyai 10 Distrik Yaitu : Distrik Sukikai Selatan, Distrik Piyaiye, Distrik Mapia Barat, Distrik Mapia Tengah, Distrik Mapia, Distrik Dogiyai, Distrik Kamu Selatan, Distrik Kamu, Distrik Kamu Timur, dan Distrik Kamu Utara;
18. Kabupaten Intan Jaya 8 Distrik Yaitu : Distrik Homeyo, Distrik Sugapa, Distrik Ugimba, Distrik Hitadipa, Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Biandoga, dan Distrik Wandai; dan
19. Kabupaten Deyai 5 Distrik Yaitu : Distrik Kapiraya, Distrik Tigi Barat, Distrik Tigi, Distrik Tigi Timur, dan Distrik Bowobado;

i. Daerah yang termasuk dalam prioritas 2 (Daerah kerentanan kerawanan terhadap ketahanan pangan agak tinggi) tersebar di 12 Kabupaten 1 Kota dan 65 Distrik, yaitu :

1) Kabupaten Jayawijaya 16 Distrik yaitu : Distrik Asolokobal, Distrik Walelagama, Distrik Trikora, Distrik Walaik, Distrik Walesi, Distrik Asotipo, Distrik Ibele, Distrik Asologaima, Distrik Musatfak, Distrik Silo Karno Doga, Distrik Bolakme, Distrik Tagime, Distrik Tagineri, Distrik Siepkosi, Distrik Itlay Hasige dan Distrik Popugoba;
2) Kabupaten Nabire 4 Distrik yaitu : Distrik Menou, Distrik Dipa, Distrik Teluk Umar, dan Distrik Siriwo;
3) Kabupaten Kepulauan Yapen 3 Distrik yaitu : Distrik Yapen Selatan, Distrik Kosiwo, dan Distrik Anataurei;
4) Kabupaten Biak Numfor 8 Distrik yaitu : Distrik Numfor Barat, Distrik Orkeri, Distrik Biak Timur, Distrik Oridek, Distrik Biak Kota, Distrik Samofa, Distrik Biak Utara, dan Distrik Warsa;
5) Kabupaten Paniai 2 Distrik yaitu :Distrik Kebo,danDistrik Yagai;

6) Kabupaten Boven Digoel 3 Distrik yaitu : Distrik Jair, Distrik Mandobo dan Distrik Kouh;
7) Kabupaten Asmat 12 Distrik yaitu : Distrik Pantai Kasuari, Distrik Atsy, Distrik Sirets, Distrik Bectbamu, Distrik Suator, Distrik Koroway Buluanop, Distrik Akat, Distrik Jetsy, Distrik Sawa Erma, Distrik Suru-suru, Distrik Unir Sirau dan Distrik Joerat;
8) Kabupaten Pegunungan Bintang 4 Distrik yaitu : Distrik Pamek, Distrik Yefta, Distrik Kiwirok Timur, dan Distrik Okbemta;
9) Kabupaten Sarmi 5 Distrik yaitu : Distrik Tor Atas, Distrik Ismari, Distrik Verkam, Distrik Apawer Hulu, dan Distrik Apawer Tengah;
10) Kabupaten Keerom 5 Distrik yaitu : Distrik Web, Distrik Towe, Distrik Yaffi, Distrik Kaisenar dan Distrik Arso Timur;
11) Kabupaten Yalimo 1 Distrik yaitu : Distrik Benawa;
12) Kabupaten Puncak 1 Distrik yaitu ; Distrik Ilaga; dan
13) Kota Jayapura 1 Distrik yaitu : Distrik Muara Tami.:

j. Daerah yang termasuk dalam prioritas 3 (Daerah kerentanan kerawanan terhadap ketahanan pangan tinggi) tersebar di 9 Kabupaten dan 96 Distrik, yaitu :

1) Kabupaten Jayawijaya 23 Distrik yaitu : Distrik Napua, Distrik Wouma, Distrik Maima, Distrik Hubikosi, Distrik Pelebaga, Distrik Tailarek, Distrik Hubikiak, Distrik Pyramid, Distrik Muliama, Distrik Wame, Distrik Kurulu, Distrik Usilimo, Distrik Wita Waya, Distrik Libarek, Distrik Wadangku, Distrik Pisugi; Distrik Wollo, Distrik Yalengga, Distrik Molagalome, Distrik Bugi, Distrik Bpiri, Distrik Koragi dan Distrik Wesaput;
2) Kabupaten Jayapura 3 Distrik yaitu :Distrik Kaureh, Distrik Ravenirara dan Distrik Ebungfau;
3) Kabupaten Nabire 5 Distrik yaitu : Distrik Uwapa, Distrik Yaur, Distrik Napan, Distrik Wapoga dan Distrik Kepulauan Moora;
4) Kabupaten Paniai 22 Distrik Yaitu : Distrik Paniai Timur, Yatamo, Distrik Pugo Dagi, Distrik Wege Muka, Distrik Wegee Bino, Distrik Deiyai Miyo, Distrik Bibida, Distrik Dumadama, Distrik Dogomo, Distrik Aradide, Distrik Ekadide, Distrik Aweida, Distrik Fajar Timur, Distrik Topiyai, Distrik Paniai Barat, Distrik Siriwo, Distrik Muye, Distrik Nakama, Distrik Teluk Deya, Distrik Bogodaida, Distrik Youtadi, dan Distrik Baya Biru;

5) Kabupaten Mimika 1 Distrik yaitu : Distrik Jita;
6) Kabupaten Asmat 1 Distrik yaitu : Distrik Agats
7) Kabupaten Pegunungan Bintang 25 Distrik Yaitu : Distrik Iwur, Distrik Kawor, Distrik Tarup, Distrik Awinbon, Distrik Oksibil, Distrik Pepera, Distrik Alemsom, Distrik Serambakon, Distrik Kolomdol, Distrik Oksop, Distrik Ok Aon, Distrik Borme, Distrik Bime, Distrik Epumek, Distrik Weime, Distrik Pamek, Distrik Nongme, Distrik Batani, Distrik Aboy, Distrik Teiraplu, Distrik Kiwirok, Distrik Oksebang, Distrik Oklip, Distrik Batom, Distrik Murkim, dan Distrik Mofinop;
8) Kabupaten Sarmi 12 Distrik yaitu : Distrik Pantai Timur Bagian Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Veen, Distrik Bonggo, Distrik Bonggo Timur, Distrik Bonggo Barat, Distrik Sarmi Timur, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sobey, Distrik Muara Tor, Distrik Pantai Barat dan Distrik Apawer Hilir; dan
9) Kabupaten Keerom 4 Distrik yaitu : Distrik Senggi, Distrik Waris, Distrik Arso, dan Distrik Mannem.

k. Daerah yang termasuk dalam prioritas 4 (Daerah yang cenderung agak tahan terhadap kerawanan pangan) tersebar di 7 Kabupaten dan 38 Distrik, yaitu :

1) Kabupaten Merauke 5 Distrik yaitu : Distrik Waan, Distrik Ilwayab, Distrik Tubang, Distrik Ngguti dan Animha;
2) Kabupaten Jayapura 7 Distrik yaitu : Distrik Airu, Distrik Kemtuk, Distrik Kemtuk Gresi, Distrik Grase Selatan, Distrik Unurum Guay, Distrik Demta dan Distrik Yokari;
3) Kabupaten Nabire 6 Distrik yaitu : Distrik Wanggar, Distrik Nabire Barat, Distrik Nabire, Distrik Teluk Kimi, Distrik Makimi dan Distrik YaroUwapa dan Distrik Yaur;
4) Kabupaten Mimika 11 Distrik yaitu : Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Amar, Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Tembagapura, Distrik Agimuga, Distrik Jila, Distrik Alama dan Distrik Hoya;
5) Kabupaten Pegunungan Bintang 5 Distrik yaitu : Distri Ok Bape, Distrik Okbi, Distrik Okbab, Distrik Okhika dan Distrik Oksamol;
6) Kabupaten Sarmi 2 Distrik yaitu : Distrik Sungai Biri dan Distrik Sarmi; dan

7) Kabupaten Keerom 2 Distrik yaitu : Distrik Arso Barat dan Distrik Skanto.

l. Daerah yang termasuk dalam prioritas 5 (Daerah yang agak tahan terhadap kerawanan pangan) tersebar di 4 Kabupaten dan 18 Distrik, yaitu :

1) Kabupaten Merauke 7 Distrik antara lain : Distrik Tabonji, Distrik Okaba, Distrik Kaptel, Distrik Tanah Miring, Distrik Naukenjerai, Distrik Muting dan Distrik Eligobel;
2) Kabupaten Jayawijaya 1 Distrikyaitu : Distrik Wamena;
3) Kabupaten Jayapura 9 Distrik yaitu : Distrik Yapsi, Distrik Nimboran, Distrik Nimboran Timur/ Namblong, Distrik Nimbokrang, Distrik Depapre, Distrik Sentani Barat, Distrik Waibu, Distrik Sentani dan Distrik Sentani Timur; dan
4) Kabupaten Mimika 1 Distrik yaitu : Distrik Kwamki Narama.

m. Daerah yang termasuk dalam prioritas 6 (Daerah tahan terhadap kerawanan pangan) tersebar di 2 Kabupaten 1 Kota dan 17 Distrik, yaitu :

1) Kabupaten Merauke 8 Distrik yaitu : Distrik Kimaam, Distrik Kurik, Distrik Malind, Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Jagebob, Distrik Sota dan Distrik Ulilin;
2) Kabupaten Mimika 5 Distrik yaitu : Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Baru, Distrik Kuala Kencana, Distrik Wania, dan Distrik Iwaka; dan

Kota Jayapura 4 Distrik yaitu : Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara.

Indikator kinerja **pengeluaran perkapita yang disesuaikan** dengan **Target** 7393.1 Rp.Ribu per kapita, **Realisasi** 7.545,3 Rp.Ribu per kapita dengan **Capaian** 71.44 Rp.Ribu per kapita. Khusus Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Papua yang didasarkan pada data di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mengungkapkan NTP di Papua turun 0.25 Persen dengan Indeks NTP sebesar 100.66 pada Desember 2021. Penurunan NTP terjadi karena Indeks Harga yang diterima Petani Naik sebesar 0.39 persen sementara Indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0.65 persen. NTP adalah adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP adalah salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar atau term of trade dari produk pertanian dengan

barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Berdasarkan data BPS Provinsi Papua, perkembangan rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan selama 5 (lima) tahun terakhir seperti tabel berikut.

Tabel 3.16 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan di Provinsi Papua Tahun 2020– 2022

No	Tahun	Pengeluaran Per Kapita disesuaikan (Rp.000)	Laju Pengeluaran Per Kapita disesuaikan (%)
1.	2017	6.996	-
2.	2018	7.159	2,33
3.	2019	7.336	2,47
4.	2020	6.954	- 5,20
5.	2021	6.955	0,01
6	2022	7.545,3	8,48

Sumber : BPS Papua Dalam Angka 2023

Berdasarkan data tersebut di atas, maka tingkat pengeluaran rata-rata per kapita selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana titik terendah terjadi pada tahun 2020 dengan laju pengeluran per kapita minus 5,20 % dibanding tahun sebelumnya, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan cukup signifikan dengan laju pengeluaran per kapita sebesar 8,48 %.

Apabila dikaitkan dengan indeks pengeluaran terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi, dengan nilai jual produksi sektor pertanian yang diterima oleh petani di perdesaan, maka nilai tukar petani (NTP) rata-rata sektor pertanian tahun 2022 mencapai 100,69 mengalami peningkatan sebesar 0,03 dibanding tahun 2021. Semakin tinggi NTP, maka secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Sasaran 6	Meningkatnya Keharmonisan dan Kohesifitas Masyarakat

Luas Provinsi Papua menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 adalah 312.816,35 km^2 dan merupakan Provinsi terbesar dan terluas **pertama** di Indonesia, Papua, memiliki keanekaragaman suku, agama, ras dan budaya dengan jumlah suku 255 suku yang tersebar di 28 (dua puluh delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesajahteraan masyarakat.

Namun Untuk mencapai keberhasilan pembangunan di Bumi Cenderawasih bukan perkara mudah, sebab banyak hambatan dan tantangan yang selalu menghadang dalam pelaksanaannya di lapangan, akan tetapi, pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, bersama Gubernur Lukas Enembe seakan tak pernah menyerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua, dengan terbangunnya infrastruktur transportasi pembangunan jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 kilometer dapat diselesaikan, pembangunan jalan akses jalan menuju di perbatasan negara tetangga Papua Nugini, pembangunan di sektor perhubungan dan telekomunikasi gencar dilakukan, namun banyak memakan korban akibat penyerangan KKB di beberapa daerah Kabupaten.

Berdasarkan Databoks.Katadata.go,id By Erlina F.Santika (2/3/2023), tentang Konflik yang terjadi di Papua Tahun 2022 sebanyak 47 kali lebih banyak dibanding konflik pada tahun 2021 sebanyak 34 konflik, meningkat 28 persen, jumlah konflik yang ditangani sebanyak 47 (Empat puluh tujuh) konflik, Untuk mencapai sasaran **"Meningkatnya keharmonisan dan kohesifitas masyarakat"**diukur melalui jumlah konflik yang tertangani dibagi jumlah konflik dengan realisasi 100 persen.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Keharmonisan dan Kohesifitas Masyarakat"** mencapai 127,8 persen dengan predikat **"Sangat Berhasil"**. Sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.17 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 6

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*	*3*	*4*	*5*
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	78,2	100	127,8
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					**127,8**

Tidak semua Kabupaten di Papua menjadi daerah rawan konflik, namum ada beberapa daerah yang telah di petakan Polda Papua menjadi daerah rawan konflik seperti Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nduga, Puncak Jaya, Dogiyai, di Paniai, Intan Jaya, dan Kota Jayapura. “Wilayah-wilayah ini masih menjadi atensi khusus dari Polda Papua untuk penanganan situasi dan keamanan yang lebih baik,” ujar Mathius (Republika Tgl 27/1/2023) dalam konferensi pers pertengahan Januari 2023.

Pendekatan terus dilakukan walaupun masih ada riak-riak konflik berikutnya yang akan terjadi, pendekatan terus dilakukan untuk menghindari terjadinya gesekan dan pelanggaran HAM, pendekatan tersebut antara lain :

1. Pendekatan dengan mengedepankan pendekatan ekonomi dan infrastruktur.
2. Pendekatan sosial/keserasian sosial
3. Pendekatan keamanan
4. Dialog yang dibangun dalam masyarakat dan pemerintah

Pendekatan Keserasian sosial merupakan pendekatan yang dilakukan dapat berupa kegiatan fisik maupun non fisik dengan melibatkan unsur masyarakat. Kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan penuh persaudaraan yang dilandasi semangat saling menghargai, saling menghormati antar anggota dan komunitas masyarakat dan tanpa membedakan golongan, asal usul dan lainnya.

Tindakan preventif ini dapat diwujudkan dengan melakukan aksi perdamaian melalui agenda kegiatan yang bertujuan menciptakan kohesivitas kelompok-kelompok di masyarakat, contoh keserasian sosial berupa kegiatan fisik adalah :

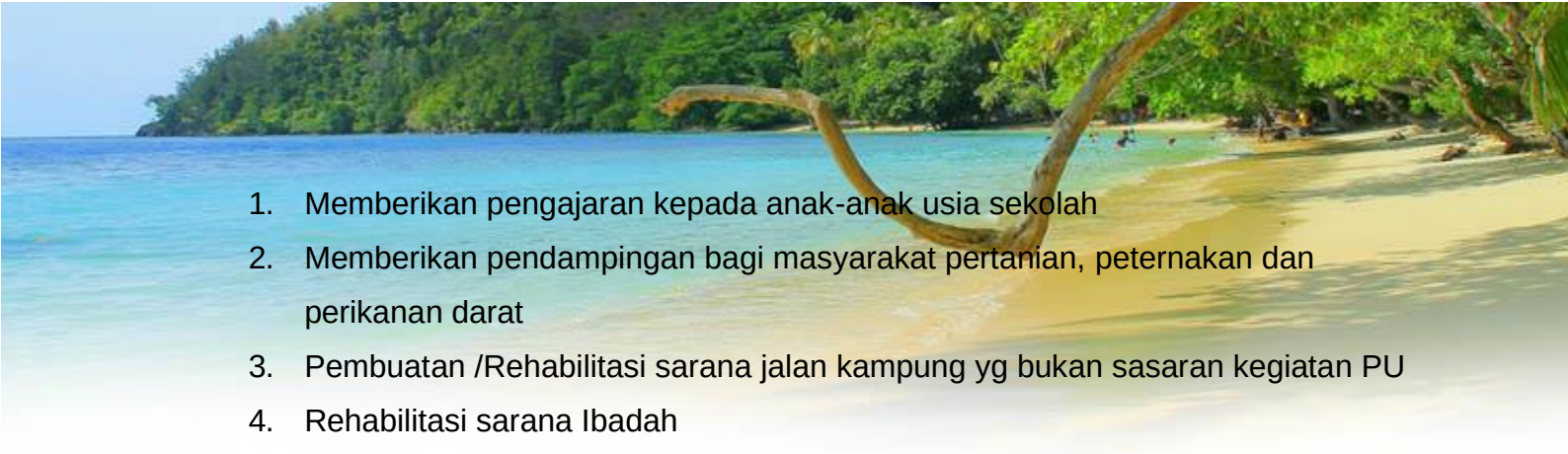

1. Memberikan pengajaran kepada anak-anak usia sekolah
2. Memberikan pendampingan bagi masyarakat pertanian, peternakan dan perikanan darat
3. Pembuatan /Rehabilitasi sarana jalan kampung yg bukan sasaran kegiatan PU
4. Rehabilitasi sarana Ibadah
5. Acara bakar batu bersama TNI, Polri dan Masyarakat
6. Pembangunan Balai pertemuan Rakyat (gedung serbaguna Keserasian Sosial)
7. Pembuatan lapangan Olahraga (tidak untuk pembelian tanah)
8. Rehabilitasi Saluran air lingkungan
9. Pengadaan sarana air bersih (MCK, Sumur Umum, Pipanisasi)
10. Pembuatan landasan terbang pesawat sementara
11. Pembuatan sarana penerangan lingkungan

Melalui Pendekatan ini akan akan diketahui masalah apa yang berkembang di dalam masyarakat dan diharapkan akan mempererat kehidupan masyarakat dengan Polri dan TNI di daerah.

Rata-rata pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Keharmonisan dan Kohesifitas Masyarakat” 127 persen bila dibandingkan dengan hasil Skors Indeks Kerukunan Umat Beragama yang ditetapkan Kementerian Agama RI. untuk Provinsi Papua berada pada urutan ke-5 dari 34 Provinsi di Indonesia dengan skors 79,78 turun 0,42 dibanding skors tahun 2021 yaitu 80,20 hal disebabkan meningkatkan konflik tahun 2022 dibanding 2021, Konflik yang terjadi di Papua masih didominasi konflik idiologi sedangkan untuk konflik agama belum terjadi, walau demikian Provinsi Papua dengan keanekaragamannya dan kebhinekatunggal ika-nya termasuk dalam skors indeks KUB “ Tinggi” , sebagaimana tergambar pada data 10 Provinsi dengan Skor KUB terbaik dari 34 Provinsi, sebagai berikut :

1. Nusa Tenggara Timur 83,93
2. Kepulauan Riau 85,78
3. Kalimantan Utara 80,95
4. Maluku 78,94
5. Papua 79,78
6. Kalimantan Timur 79,11
7. D.I Jogyakarta 78,90
8. Papua Barat 78,55
9. Sulawesi Tengah 77,36
10. Sulawesi Utara 77,11

Sumber Data : balitbangdiklat.kemenag.go.id

Hasil Skor KUB untuk Papua tersebut menunjukan toleransi, kebersamaan dan kesetaraan dalam kehidupan masyarakat berjalan dengan baik di Papua.

Penanganan konflik di Papua tidak bisa didekati dengan pendekatan keamanan semata yang cenderung represif. Masyarakat Papua memiliki ikatan sosial yang kuat, menghormati ajaran agama dan patuh pada hukum adat. Oleh karena itu penyelesaian konflik di Papua lebih membutuhkan dialog dengan melibatkan tokoh masyarakat sipil non politik, tokoh lintas agama, tokoh adat, lembaga adat dan pemerintah. Menciptakan sejumlah lapangan pekerjaan. Mendeklarasikan kearifan lokal yang lebih menekankan penyelesaian adat diharapkan dapat menyadarkan kembali warga agar mengedepankan semangat persaudaraan dan kekeluargaan. Dibawah ini terdapat Tabel yang mengambarkan tahap penyelesaian konflik di daerah, sebagai berikut:

Gambar 3.1

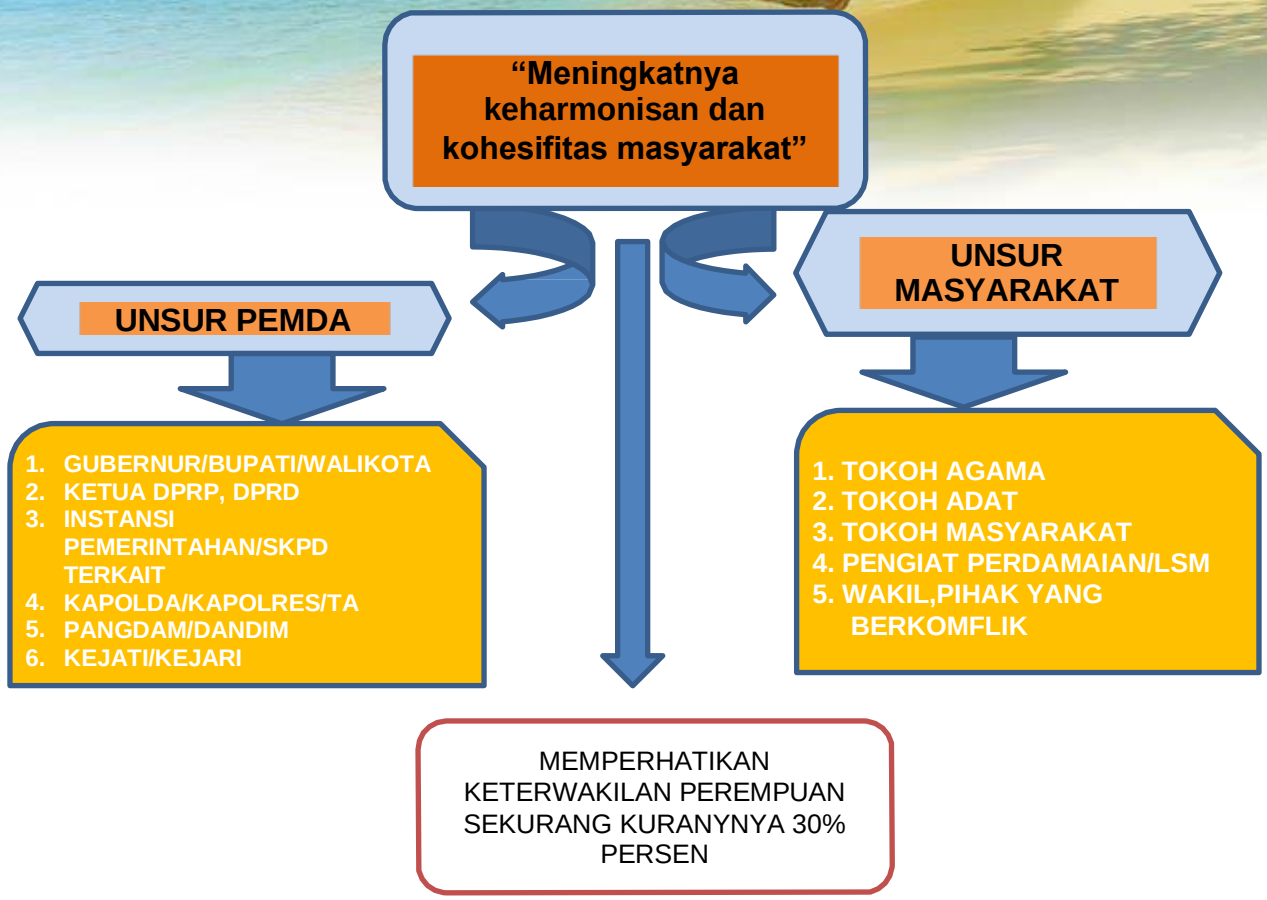

Sumber Data : Badan KESBANGPOL , 2019

Tabel 3.18 Jenis Konflik

Dibawah ini adalah data jenis konflik yang terjadi di Papua Tahun 2021 sebagai berikut : Tabel 3.19 Jenis Konflik

No	Jumlah Kasus	Kab/Kota	Jenis Konflik & Sumber Konflik	Data Korban						Jumlah Korban
				Luka			Meninggal Dunia			
				TNI	POLRI	SIPIL	TNI	POLRI	SIPIL	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	2	JAYAWIJAYA	Konflik antar masyaralat sipil dengan OTK	-	-	21	-	1	-	22
2.	4	PEGUNUNGAN BINTANG	Konflik Brimop dan TPNPB	-	2	-	1	-	3	6
3.	2	YALIMO	Konflik antar masyaralat/Warga/OTK	-	-	1	1	-	1	3
4.	15	PUNCAK	Kontak senjata dengan TPNPB	5	2	3	3	-	11	24
5.	5	INTAN JAYA	Kontak senjata TNI dan TPNPB	1	-	1	-	-	1	3
6.	3	YAHUKIMO	Kontak senjata antara Polri dan TPNPB	-	2	2	-	-	3	7
7.	4	NDUGA	Kontak senjata TNI dan TPNPB	9	-	-	3	-	11	23
8.	1	NABIRE	Kontak senjata antara TNI dan TPNPB (Korban jiwa TPNPB)	-	-	-	-	-	-	0
9.	1	DOGIYAI	Konflik sosial	-	-	-	-	-	-	0
10.	1	DEYAI	Konflik Sosial Oleh OTK	-	-	1	-	-	-	1
11.	2	PANIAI	Kontak senjata antara TNI dan TPNPB	1	2	9	-	-	1	13
12.	1	MERAUKE	Konflik sosial	-	-	-	1	-	-	1
13.	1	LANNY JAYA	Konflik sosial	-	-	-	1	-	-	1
14.	1	MIMIKA	Perang suku antar warga	-	-	-	-	-	4	4
15.	2	MAPPI	Konflik Masyarakat dengan TNI	-	-	11	-	-	2	13
16.	1	YAPEN	Kontak senjata antara TNI TPNPB	-	-	1	-	-	-	1
17.	1	KERROM	Konflik Masyarakat dengan TNI	-	-	3	-	-	-	3
JUMLAH	**47**			**16**	**8**	**53**	**10**	**1**	**37**	**125**

Sumber Data : Databoks.Katadata.go,id/konflik2022
Editor : By Erlina F.Santika(2/3/2023)

Data Korban akibat konflik Pada Tahun 2019 - 2022, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.19 Data Korban Konflik

DATA KORBAN LUKA	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
TNI	7	4	5	16
POLRI	7	4	1	8
SIPIL	112	15	2	53
JUMLAH	126	23	8	77
DATA KORBAN MENINGGAL	**TAHUN 2019**	**TAHUN 2020**	**TAHUN 2021**	**TAHUN 2022**
TNI	13	1	11	10
POLRI	1	1	4	1
SIPIL	65	28	16	37
JUMLAH	79	30	31	48

Berdasarkan data tersebut jumlah korban akibat konflik pada Tahun 2019 dan 2021 menunjukan ada penurunan jumlah korban luka dan korban meninggal baik dari INI, POLRI ataupun Sipil, tetapi pada tahun 2022 ada peningkatan yang signifikan baik dari segi intensitas maupun jumlah korban luka ataupun korban meninggal. dibawah ini adalah matriks capaian sasaran meningkatnya keharmonisan dan kohesitas masyarakat Tahun 2019-2022 sebagai berikut :

Tabel 3.20 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 6

Sasaran Strategis	Satuan	Tahun											
		2019			2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya keharmonisan dan kohesitas masyarakat.	Indeks	76,9	0	0	77,30	57,50	74,38	77,8	100	128,5	78,2	100	127
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran				**0**			**74,38**			**128,5**			**127**

Rata-rata capaian kinerja sasaran Tahun 2021 dan 2022 meningkat 54,12 persen dibanding capaian kinerja sasaran tahun 2020 dan 2019, dengan demikian rata-rata capaian kinerja sasaran diatas 100 persen dengan predikat " **Sangat berhasil"**. data ini menunjukan adanya keharmonisan dan kohesitas masyarakat dalam penyelesaian konflik, kerjasama POLRI, TNI, Tokoh Agama dan Masyarakat ditingkatkan walaupun masih ada PR yang harus diselesaikan pemerintah terkait konflik, karena kekerasan akan mengorbankan masyarakat, oleh karena itu kebijakan keamanan perlu ditinjau ulang, perlunya konsolidasi bersama dengan mengedepankan sikap non diskriminatif.

Sasaran 7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran 7 (ketujuh) yaitu **"Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi"** diukur melalui pencapaian 3 (Tiga) indikator sasaran dengan capaian kinerja 134,8 persen dengan kategori **"Sangat Berhasil",** Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 3(Tiga) indikator sasaran, sebagai berikut :

Tabel 3.21 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 7

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1.	Nilai Skor aspek kebebasan sipil	Skor	94,5	**100**	105,8
2.	Nilai skor aspek hak-hak politik	Skor	48,4	**62,30**	128,7
3.	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Skor	58,9	**100**	169,8
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					134,8

Nilai skor aspek kebebasan sipil diukur melalui jumlah permohonan ijin yang diberikan kepada kepada LSM dan Organisasi Masyarakat (ORMAS) oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanaan fungsi pembinaan didaerah, pada Tahun 2022 jumlah permohonan ijin yang dikeluarkan sebanyak 43 ijin dari 43 data ORMAS yang mengajukan permohonan ijin lengkap dan memenuhi syarat dengan ditetapkannya surat Keterangan keberadaan organisasi terealisasi 100 persen dengan capaian kinerja sebesar 105,8 persen dari target 94,5 persen. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh LSM dan Ormas dalam melakukan pendaftaran sesuai

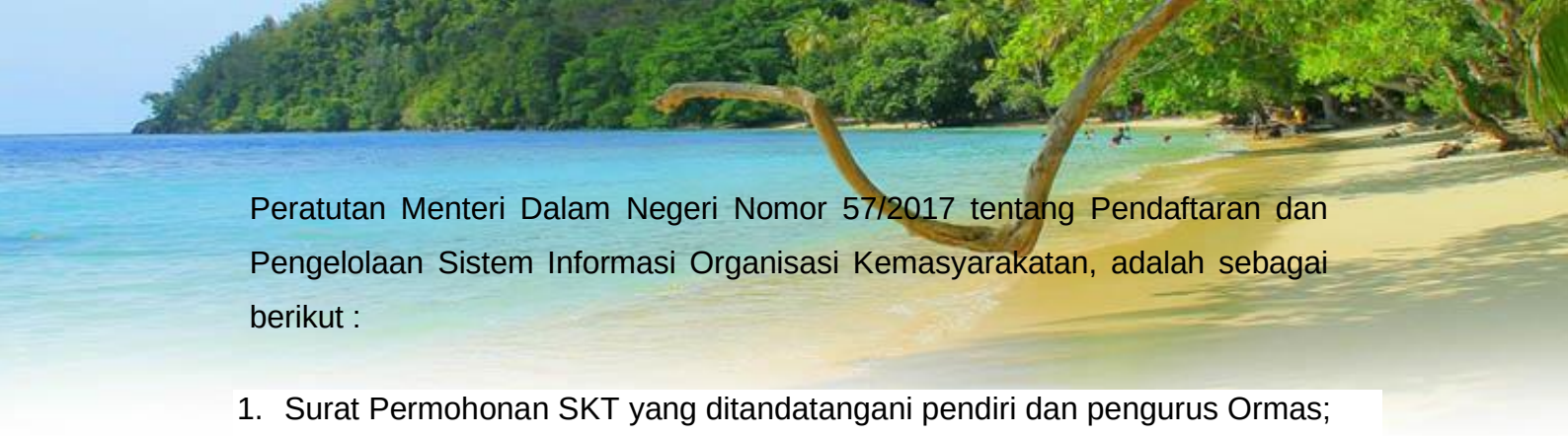

Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 57/2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, adalah sebagai berikut :

1. Surat Permohonan SKT yang ditandatangani pendiri dan pengurus Ormas;
2. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (memuat paling sedikit nama dan lambang, tempat kedudukan, asas, tujuan dan fungsi, kepengurusan, hak dan kewajiban anggota, pengelolaan keuangan, mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal, dan pembubaran organisasi);
4. Foto Logo dan;
5. Foto Bendera(tidak wajib)
6. Program Kerja;
7. Susunan pengurus yang dibuktikan dengan surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART Ormas (yang memuat paling sedikit Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lain. Dan pengurus dan anggota kesemuanya berkerwarganegaraan Indonesia tanpa terkecuali);
8. Biodata pengurus organisasi (Ketua, Sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya);
9. Pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4×6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir (Ketua, Sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya); (File JPG Max.700 kb)
10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus organisasi (Ketua, Sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya);
11. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Ormas;
12. Surat Keterangan Domisili Sekretariat Ormas yang diterbitkan oleh lurah/ Kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
13. Bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/ pengelola;
14. Foto kantor atau secretariat Ormas tampak depan yang memuat papan nama;
15. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan

16. Surat pernyataan bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/ atau anggota organisasi;
17. Formulir isian data Ormas;
18. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;
19. Surat Pernyataan bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi;
20. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, symbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;
21. Rekomendasi dari Kementerian yang melaksanakan urusan dibidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
22. Rekomendasi dari Kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
23. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat Negara, pejabat pemerintahan, dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas;

    NB : – 1 Berupa Bentuk File
    – 1 Print Out berdasarkan listnya;
    – Surat Pernyataan Masing-masing dibuat 1 rangkap

TA. 2022 data LSM dan ORMAS yang diberikan ijin oleh Badan Kesatuan Bangsa dan politik, sebagai berikut :

Tabel 3.22 Data Organisasi Masyarakat Sipil Tahun 2022

NO	NAMA OGANISASI,TGL,NOMOR PENDAFTARAN DI BAKESBANG	NOMOR SURAT PERMOHONAN ,AHU & TGL DITERBIT	TAHUN	ALAMAT
1	BRIGADE 571 TRISULA MACAN PUTIH PROVINSI PAPUA 220/020,17 JANUARI 2022	AHU00006014 AH 01.07,TAHUN 2018,TGL 02 MEI 2018, 220/020,TGL 17 JANUARI 2022	2022	Jln.GAGAK No.529 RT 002/RW 001, YUWANAIN ARSO,DISTRIK ARSO,KAB.KEEROM.
2	MAJELIS PIMPINAN ICMI MUDA (PM-ICMI MUDA) WILAYAH PROVINSI PAPUA, 220/021, 17 JANUARI 2022	AHU-0000544.AH.01.08, TAHUN 2021,TGL 05 APRIL 2022, 220/021, TGL 17 JANUARI 2022	2022	Jln.BARU PERUM GRAHA AMPERA, KEL.WAYMHOROCK DISTRIK ABEPURA - KOTA JAYAPURA
3	LEMBAGA PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH PAPUA (LPPBDP) 220/024, 17 JANUARI 2022	SRT.PERMOHONAN : 02/01/Xii, LPPBDP/2021, TGL 09 DESEMBER 2021 220/024, TGL 17 JANUARI 2022	2022	Jl.RAYA PERUMNAS II ABEPURA - JAYAPURA.
4	YAYASAN VITA PAPUA MANDIRI 220/025; 17 JANUARI 2022	AHU-0005081.AH.01.04 TAHUN 2019 TGL 29 MARET 2022. 220/025, TGL.17 JANUARI 2022	2022	Jl.SIMPANG N.12ANGKASA INDAH – JAYAPURA
5	FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA PAPUA PROVINSI PAPUA 220/023; 17 JANUARI 2022	SURAT PERMOHONAN : 014/FKMP/UCN/XI2021, TGL 03 DESEMBER 2021; 220/023, TGL.17 JANUARI 2022	2021	Jl.PERCETAKAN No.1 KOTA JAYAPURA
6	DPW KOMANDO PASUKAN KHUSUS(KPK)TIPIKOR PROVINSI PAPUA 220/056, 31 JANUARI 2022	AHU-0043267.AH.01.04 TAHUN 2016, TGL 15 NOVEMBER 2016	2022	Jl.DOYO BARU SENTANI JAYAPURA
7	LEMBAGA ADAT MASYARAKAT UGIMBA PANIAI(LAMUP) PROVINSI PAPUA 220/055; 31 JANUARI 2022	SURAT PERMOHONAN : 01/LAMUP/SKT/XXI/2021, TGL 08 DESEMBER 2021.	2022	Jl.CENDERAWASIH SP.3 PERUM.TIMIKA REGENCY BLOK A. RT.18/RW.05 K EL.KARANG SENANG DISTRIK KUALA KENCANA KAB.MIMIKA PROV.PAPUA
8	PEMERINTAH KERAJAAN IBUNDA SAHYE KUKUMEN PAPUA SERIKAT 220/057;31 JANUARI 2022	SURAT PERMOHONAN : 01/AKKI/ODST/XI/2021, TGL 10 NOVEMBER 2021	2022	Jl.PERINTIS I RT.01/RW.06 KLUFKAM KEL.GURABESI DISTRIK JAYAPURA UTARA.
9	KELOMPOK KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA) PROVINSI PAPUA 220/026;16 JANUARI 2022	SURAT PERMOHONAN : 01-0000/025/D.IV.1/V/2017, 15 MEI 2017	2022	DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN PROVINSI PAPUA LANTAI III DINAS OTONOM PROVINSI PAPUA
10	AYASAN AL-BARAKAH ABEPURA 220/111, 24 FEBRUARI 2022	AHU-0000342.AH.01.05,Tahun 2016, 19 APRIL 2016	2022	Jl.MESJID AL-BARAKAH No.1 ABEPURA-KOTA JAYAPURA
11	FORUM PEDULI PEREMPUAN KABUPATEN YAHUKIMO 220/110;24 FEBRUARI 2022	AHU-0001107.AH.01.07,TAHUN 2022;07 FEBRUARI 2022	2022	Jl.KURIMA KABUPATEN YAHUKIMO
12	DEWAN PENGURUS KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA PROVINSI PAPUA(KNPI) 220/150;16 MARET 2022	AHU-0000037.AH.01.08, TAHUN 2020, 17 JANUARI 2019	2022	Jl.RAYA ABEPURA No.77 KOTARAJA, DISTRIK ABEPURA, KEL.WAHNO, KOTA JAYAPURA
13	PERKUMPULAN KELUARGA BESAR FATEGOMI SE- TANAH PAPUA 220/153, 16 MARET 2022	AHU-0015319.AH.01.07 TAHUN 2020, 05 JANUARI 2022	2022	Jl.TANJUNG SELE, KELURAH AN KLABULU, DISTRIK MALAIMSIMSA, KOTA SORONG
14	PERKUMPULAN TUKANG BANGUNAN INDONESIA(PWB DPN PERKASA PAPUA) 220/152, 16 MARET 2022	AHU-0005715.AH.01.07 TAHUN 2019, 27 MEI 2019	2022	Jl.KOMPLEKS PASAR LAMA ABE RT.001/RW.001 KEL YOBE, DISTRIK ABEPURA- KOTA JAYAPURA-PAPUA
15	PERSATUAN KELUARGA BESAR PURNAWIRAWAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PP.POLRI) DAERAH PAPUA 220/234;14 APRIL 2022	AHU.0046970.AH.01.07 TAHUN 2016; 19 APRIL 2016	2022	Jl.TANJUNG RIA I PASIFIK INDAH No.49 ASPOL SPN BASE "G"JAYAPURA

16	PERKUMPULAN PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH PAPUA (PPPBDP) 220/236, 14 APRIL 2022	AHU-0001655.AH.01.07, TAHUN 2022, 17 FEBRUARI 2022	2022	Jl.TK-BUPER, KOMP.PERUM.PEMDA BLOK D WAENA -JAYAPURA- PAPUA
17	DPW SATRIA KITA T PANCASILA PROVINSI PAPUA 220/235, 14 APRIL 2022	AHU-0000038.AH.01.08, TAHUN 2021, 11 JANUARI 2021	2022	KOMP. RSUD DOK II JAYAPURA, RT.002/006 KEL. BHAYANGKARA, KEC. JAYAPURA UTARA, KOTA JAYAPURA
18	LEMBAGA PPENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) LPPD PROVINSI PAPUA 220/464, 14 JUNI 220/464, 14 JUNI 2022	SURAT PERMOHONAN :71/LPPD- PAPUA/VI/2022, TAHUN 2022, 03 JUNI 2022	2022	Jl.RAYA KOTARAJA ABEPURA, KOMPLEKS RUKO SKYLINE RESIDENCE
19	RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI) 220/566; 18 JULI 2022	AHU-045201.AH.01.08 TAHUN 2022,19 MARET 2022	2022	Jl.ALTER NATI SKYLINE KAMPUNG BUTON, PERUM VILLA MEGAPURA SKYLINE E/7 JALUR 3-ENTROP JAYAPURA
20	DPW SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER) WARTAWAN INDONESIA PROVINSI PAPUA 220/567;18 JULI 2022	AHU-0007972 AH.01.07, TAHUN 2021; 30 JUNI 2021	2022	Jl.WIJAYA KUSUMA SANGGARIA, DISTRIK ARSO BARAT-KABUPATEN KEEROM
21	DPW KADER BARISAN GUSDUR PROVINSI PAPUA 220/559;13 JULI 2022	AHU-0012044.AH.01.07, TAHUN 2018; 02 OKTOBER 2018	2022	Jl.AMPHIBI HAMADI No.28,RT.005/RW.010,KEL.HAMADI-DISTRIK JAYAPURA SELATAN,KOTA JAYAPURA
22	PATRIOT PEMBELA EPANCASILA (LASKAR PALAPA) 220/651; 28 JULI 2022	AHU-0000811.AH.01.08.TAHUN 2019, 10 SEPTEMBER 2019	2022	Jl.PERINTIS I RT 001/RW.006 KLOOFKAMP-KEL.GURABESI-KEC JAYAPURA UTARA KOTA JAYAPURA
23	YAYASAN NASARET PROVINSI PAPUA 220/650;28 JULI 2022	AHU-0009859.AH.01.04, TAHUN 2018, 28 JULI 2018	2022	Jl.BAKUM SAMPING PLTD PERUMNAS II WAENA
24	DPD PERSATUAN WANITA KRISTEN INDONESIA (PWKI) 220/677; 10 AGUSTUS 2022	SURAT PERMOHONAN : 03/DPD-PWKI/III/2022	2022	Jl.PERMATA INDAH NO.210 - KOTARAJA
25	DPP GERAKAN NASIONAL PEDULI ANTI NARKOBA,TAWURAN DAN ANARKIS (GEPENTA) PROVINSI PAPUA 220/676; 10 AGUSTUS 2022	SURAT PERMOHONAN:007)/DPP- PROV/ PAPUA/VII/2022, 25 JULI 2022	2022	BTN PURWODADI YAHIM, JALUR 1 NO.2,RT.002/RW.03, KEL DOBONSOLO-DISTRIK SENTANI KOTA,KABUPATEN JAYAPURA
26	DPW.GARDA PUMA PUAN MAHARANI PROVINSI PAPUA 220/672; 10 AGUSTUS 2022	AHU-0010348.AH.01.07 TAHUN 2021; 01 SEPTEMBER 2021	2021	Jl.PERINTIS KLOOFKAMP, KOTA JAYAPURA
27	YAYASAN SINERGI TIMUR MAS (SITIMAS) 220/697; 22 AGUSTUS 2022	AHU-0027727 AH.01.12 TAHUN 2021; 30 SEPTEMBER 2021	2022	Jl.TAMAN KEPO INDAH III, KAMPUNG SEKEPALA, RT.05/RW.09, DESA MASGAHAYU, KEC.MARGASIH-KAB.BANDUNG-JAWA BARAT
28	SATU PENA PROVINSI PAPUA 220/695; 22 AGUSTUS 2022	AHU-0001211.AH.01.08 TAHUN 2021, 01 SEPTEMBER 2021	2022	Jl.CENDANA NO.384 PERUMAHAN ORGANDA ABEPURA
29	YAYASAN KEBUGARAN LANSIA PRA LANSIA INDONESIA (KLPI)	AHU-0006200.AH.01.04,TAHUN 2019, TANGGAL 20 APRIL 2019	2022	Jl.SOA-SIU DOK II BAWAH, RT.03/RW.05 KELURAHAN BHAYANGKARA-JAYAPURA

30	DPD MASYARAKAT SADAR WISATA (MASATA)	AHU-0000880.AH.01.08, TAHUN 2020, TANGGAL 27 APRIL 2020	2022	Jl.KESEHATAN I RT.002/RW.008 KELURAHAN YOBE, DISTRIK ABEPURA- KOTA JAYAPURA
31	DPD MALUKU SATU RASA SALAM SARANE BERSATU PROVINSI PAPUA	AHU-0004618.AH.01.07, TAHUN 2020, TANGGAL 12 JUNI 2020	2022	PERUMNAS III WAENA,GANG BOBARA VII NO.104.a, RT.003/RW.008, KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM
32	LEMBAGA MASYARAKAT ADAT BOTENKA WOGEE MEE SELATAN (LEMBABWOMES)	AHU-0007801.AH.01.07, TAHUN 2022, TANGGAL 08 AGUSTUS 2022	2022	JL.TRANS TIMIKA DEIYAI DISTRIK BOUWOBADO KABUPATEN DEIYAI
33	LASKAR MERAH PUTIH INDONESIA (LMPI)	AHU-0077402.AH.01.07, TGL 02 NOVEMBER 2016 220/263, TGL 20 AGUSTUS 2019	2022	Jl.BOJONG RAYA NO.45, RT 002/RW.004 RAWA BUAYA CENGKARENG JAKARTA BARAT
34	LEMBAGA MUSYAWARAH ADAT SUKU KAMORO (LEMASKO)	5/PENDIRI-BM/V/2022, TANGGAL 23 MEI 2022 220/800, TGL 07 OKTOBER 2022	2022	Jl.KASUARI RT.12/RW.05 KELURAHAN KAMORO JAYA, DISTRIK WANIA KABUPATEN MIMIKA- PROVINSI PAPUA
35	DPD LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT RUMAH ASPIRASI PEREMPUAN TABI NASIONAL (LSM RAPIN) PROVINSI PAPUA	04/DPD.SP/RPN/VIII/2022, 14 AGUSTUSTUS 2022 220/799, TGL 07 OKTOBER 2022	2022	Jl.YABASO NO.06 CAFÉ SARI LAUT BANDARA SENTANI
36	DPW PRO GERAKAN NASIONAL PROVINSI PAPUA	001DPW/PGN/PAPUA/X/2022 , TGL. 18 OKTOBER 2022 220/832, TGL 31 OKTOBER 2022	2022	Jl.SUKUN POLIMAK II GUNUNG NO.35,RT.04/RW.IX KEL.ARDIPURA-KOTA JAYAPURA
37	IMAJI PAPUA	AHU-781.AH.02.01.TAHUN 2010 TGL.26 MARET 2010 220/829, TGL 31 OKTOBER 2022	2022	PERUM PEMDA II BLOK L NO.1 CIGOMBONG KOTARAJA DALAM, KELURAHAN VIM- KOTARAJA
38	YAYASAN PELAYANAN INJILI (YAPELIN) - GIDI	AHU-AH.01.06-0024969, TAHUN 2022, TGL.11 MARET 2022 220/834, TGL.31 OKTOBER 2022	2022	Jl.PLN 7 SENTANI, KABUPATEN JAYAPURA
39	IKATAN PELAJAR MAHASISWA TEOLOGI ASAL PUNCAK JAYA - TIMIKA DAN INTAN JAYA (IPMT - PUTIIN) PAPUA	01/BP.IPMT-PUTIIN PAPUA/SPBDO/JY/VII/2022 220/830, TGL 31 OKTOBER 2022	2022	Jl.PETERNAKAN PUSPIGRA KAMPUNG HARAPAN
40	PENGURUS WILAYAH KELUARGA BESAR PELAJAR ISLAM INDONESIA (PII) PAPUA	AHU-0008533.AH.01.07, TAHUN 2019, TGL.25 APRIL 2019 220/831, TGL.31 OKTOBER 2022	2022	Jl.BERINGIN BELAKANG GEREJA ADONAI,ENTROP- KOTARAJA-JAYAPURA
41	DPD GARDA MANGUNI PROVINSI PAPUA	AHU-0001286.AH.01.08, TGL.07 JULI 2022 220/833, TGL.31 OKTOBER 2022	2022	JAYA ASRI BLOK AD, DISTRIK JAYAPURA SELATAN-KOTA JAYAPURA- PROVINSI PAPUA
42	DEWAN KOPERASI INDONESIA WILAYAH PROVINSI PAPUA (DEKOPINWIL)	12/DEKOPINWIL/P/X/2022, TGL 25 OKTOBER 2022 220/852, TGL.31 OKTOBER 2022	2022	KOMPLEKS DPRD JL.BARU KOTARAJA-JAYAPURA
43	PERSATUAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELURUH INDONESIA PROVINSI PAPUA	AHU-1225.AH.02.01.TAHUN 2010, TGL.17 OKTOBER 2014 220/828, TGL 31 OKTOBER 2022	2022	JL.PERAHU NO.105 LAPANGAN FUTSAL BOL IVARD ENTROP-JAYAPURA

Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA.2022

Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2022 jumlah permohonan ijin yang diberikan, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.23 Data Organisasi Masyarakat Sipil yang mendapat Ijin di Tahun 2021

NO.	BIDANG KEGIATAN ORMAS	2019	2020	2021	2022
1.	jumlah permohonan ijin yang diberikan	20	431	54	43
Jumlah		20	431	54	43

Sumber data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Tahun 2019-2021

Tahun 2020 merupakan tahun terbanyak jumlah ijin yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada LSM dan ORMAS yang mengajukan pendaftaran. Tahun 2022 jumlah ijin yang diberikan sebanyak 43 (empat puluh tiga).

Capaian Indikator ke-1 Nilai skor aspek kekekasan sipil untuk mendukung sasaran **"Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi"** adalah 100 persen, bila di kaitkan dengan Data BPS Tahun 2022 capaian aspek Kebebasan Sipil adalah 75,64 berada dalam kategori "Sedang" hal ini karena ada 2 (dua) indikator penyusunnya yang mendapat capaian terendah yaitu pada :

- Indikator no.1 : terjamin kebebasan berkumpul, berekspresi,berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dengan capaian 54,15
- Indikator no.2 : terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dengan capaian 0,00

Bila dikaitkan dengan sasaran **"Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi"**, Indikator-indikator tersebut memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik.

Capaian IDI Provinsi Papua Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian IDI 2019-2020 karena ada perbedaan cara perhitungan, begitu pula dengan jumlah indikator penyusunnya, dan bila dibandingkan maka IDI 2021 akan nampak lebih rendah nilainya dibanding tahun 2020 (sumber BPS),

namun demikian capaian IDI Provinsi Papua masih berada pada kategori **"Sedang"**. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni "baik" (indeks > 80), "sedang" (indeks 60–80), dan "buruk" (indeks < 60).

Tabel 3.24 Angka Indikator IDI Provinsi Tahun 2021

Deskripsi		Capaian	Kategori
IDI Komposit		66,39	**SEDANG**
Aspek 1	**Kebebasan**	**75,64**	SEDANG
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	66,39	
2	Terjaminya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	0,00	_
3	Terjaminya kebebasan berkeyakinan	100,00	_
4	Terjaminya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat,dan berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	100,00	
5	Terjaminya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu	99,48	_
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	100,00	_
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	68,87	_
Aspek 2	**Kesetaraan**	**62,30**	SEDANG
8	Kesetaraan Gender	89,01	_
9	Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan Publik melalui lembaga perwakilan	43,48	_
10	Anti Monopoli sumber daya ekonomi	54,00	_
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	50,32	_
12	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	96,67	_
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	66,37	_
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	48,43	_
Aspek 3	**Kapasitas Lembaga Demokrasi**	**62,15**	_
15	Kinerja Lembaga Legislatif	4,17	_
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	87,23	_
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	85,00	_
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	71,67	_
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	80,23	_
20	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	57,14	_
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	75,20	_
22	Pendidikan politik pada kader partai politik	10,77	_

Capaian Indikator ke-2 Nilai skor aspek hak-hak politik di Provinsi Papua menunjukan capaian indikator atas sasaran strategis terealisasi 62,30 dari **target 48,4 persen** dengan **capaian kinerja 128,7 persen.**

Realisasi indikator ke-2 merupakan data yang diambil dari IDI Provinsi Papua Tahun 2021, karena dalam Buku Papua Dalam Angka Tahun 2022 tidak terdapat data IDI Provinsi Papua 2022, dengan realisasi hak-hak politik 62,30.

capaian ini masih berada dalam kategori "**Sedang**" karena masih berada pada (indeks 60-80), indikator penyusun yang mempengaruhi nilai tersebut yaitu adanya 4 indikator yang mendapat nilai "Buruk"dari 7 indikator pendukungnya yaitu pada

- Indikator no.9 yaitu : Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan Publik dengan capaian 43,48
- Indikator no.10 : Anti Monopoli sumber daya ekonomi dengan capaian 54,00
- Indikator no.11 : Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial dengan capaian 50,32
- Indikator no.14 : Kesetaraan dalam pelayanan dasar dengan capaian 48,43

Ke-4 Indikator ini harus mendapat perhatian untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Hak-hak politik merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Ketentuan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi provinsi Papua pasal 6 ayat (2 dan 4). Dimana realisasi hak-hak politik dan otonomi khusus telah dimulai dari pengangkatan anggota DPRP melalui jalur Otonomi Khusus atas 14(empat belas) kursi dilakukan sesuai Perdasus Nomor 9 Tahun 2019 yang pelaksanaan pendaftaran di laksanakan di Kabupaten dan Provinsi. Tahap Pendaftaran, seleksi, tes wawancara sampai dengan penetapan disampaikan kepada Gubernur atas 14 (empat belas kursi) orang anggota DPRP yang diangkat dan 28 (Dua puluh delapan) daftar tunggu. MRP sebagai lembaga representatip hanya melihat dari sisi keaslian orang asli papua.

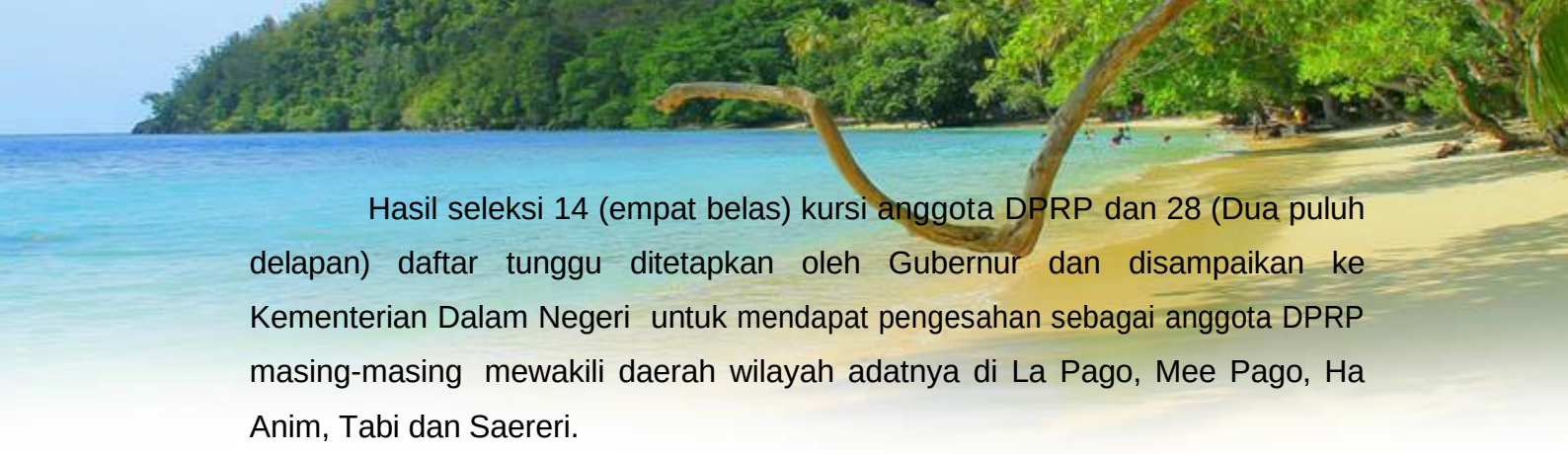

Hasil seleksi 14 (empat belas) kursi anggota DPRP dan 28 (Dua puluh delapan) daftar tunggu ditetapkan oleh Gubernur dan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan sebagai anggota DPRP masing-masing mewakili daerah wilayah adatnya di La Pago, Mee Pago, Ha Anim, Tabi dan Saereri.

Saat ini Papua telah di mekarkan menjadi 3 Provinsi yaitu :

1. Provinsi Papua Pegunungan dengan Undang-Undang 16/2022
2. Provinsi Papua Selatan dengan Undang-Undang 14/2022
3. Provinsi Papua Tenggah dengan Undang-Undang 15/2022

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati,Wakil Bupati (Pilkada) akan dilakukan melalui tahapan Pilkada secara serentak pada Tanggal 27 November 2024 diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Untuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2024.

Data Jumlah anggota DPRP melalui jalur pengangkatan sebanyak 14 (empat belas) Kursi pada keterwakilan 5(lima) Wilayah adat di Provinsi Papua untuk periode 2019-2024, akan berubah sesuai wilayah adat setelah pemekaran, untuk Provinsi Papua terdiri dari Wilayah Adat Saereri dan Wilayah adat Tabi, dengan komposisi jumlah kursi untuk daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi diatur dalam pasal 188 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, antara lain untuk DPRD Provinsi jumlah kursi paling sedikit 35 kursi dan paling banyak 120 kursi, sedangkan untuk DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi, kuota kursi didasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 191 ayat 1 dan 2), untuk Pemilu Legislatif tahun 2024 yang diangkat melalui jalur pengangkatan menjadi 11 kursi (1/4 X 45) untuk wilayah adat Tabi dan Saereri berdasarkan jumlah penduduk Provinsi Papua.

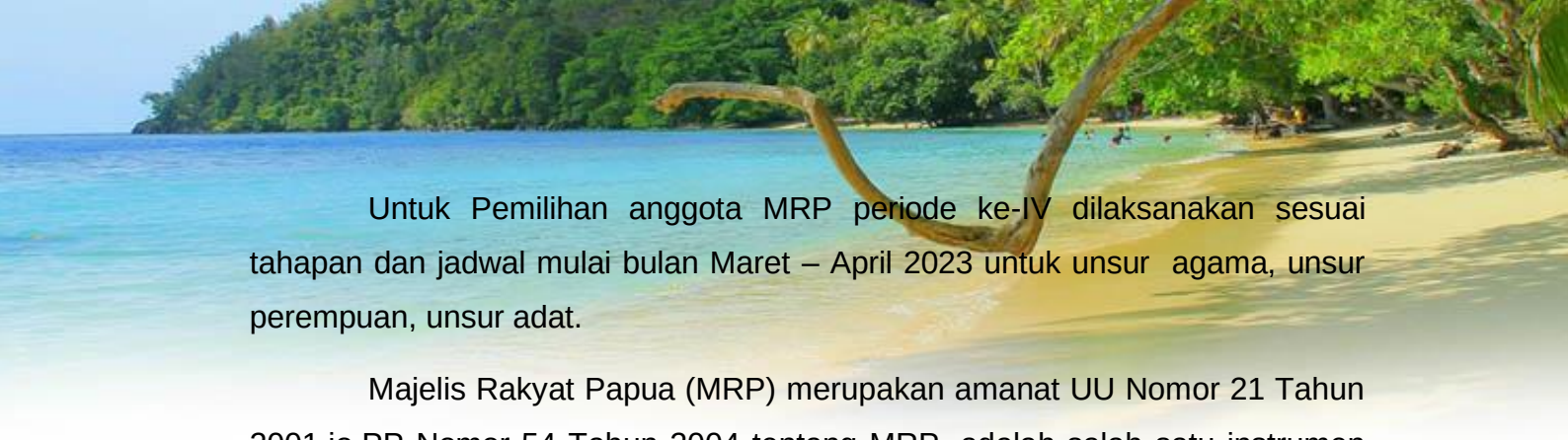

Untuk Pemilihan anggota MRP periode ke-IV dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal mulai bulan Maret – April 2023 untuk unsur agama, unsur perempuan, unsur adat.

Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 jo PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP, adalah salah satu instrumen yang sangat penting dalam implementasi otonomi khusus Papua yang beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan, dimana jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP. Pemilihan anggota MRP periode 2005-2010 berjumlah sebanyak 42 anggota, periode 2011-2016 sebanyak 51 anggota, periode 2017-2022 sebanyak 51 anggota. Pemilihan anggota MPR periode 2023-2028 diatur dengan PERDASI Nomor 5 /2023 tentang Tatacara Pemilihan Anggota MRP, yang mengatur secara khusus untuk wilayah adat Tabi dan Saereri berjumlah sebanyak 42 (empat puluh dua) orang/anggota.

Tabel 3.25
Keterwakilan Keanggotaan DPRP yang diangkat diwilayah Provinsi Papua(29 Kabupaten/Kota)

NO.	DAERAH WILAYAH ADAT DI PAPUA	JUMLAH KURSI
1.	**Mamta/Tabi, terdiri dari Kab/Kota :**	3
	1). Kota Jayapura	
	2). Jayapura	
	3) Mambramo Raya	
	4) Keerom	
	5) Sarmi	
2	**Saereri, terdiri dari Kabupaten :**	2
	1). Waropen	
	2). Kep. Yapen	
	3). Biak Numfor	
	4). Supiori	
3	**Mee pago, terdiri dari Kabupaten :**	3
	1). Nabire	
	2). Paniai	
	3). Deiyai	
	4). Dogiyai	
	5). Intan Jaya	
	6). Mimika	
4	**Ha Anim, terdiri dari Kabupaten :**	2
	1). Merauke	
	2). Mappi	
	3). Asmat	
	4). Boven Digoel	
5	**La Pago, terdiri dari Kabupaten :**	4
	1). Jayawijaya	
	2). Puncak Jaya	
	3). Puncak	
	4). Tolikara	
	5). Lanni Jaya	
	6). Nduga	
	7). Pegunungan Bintang	
	8). Mambramo Tengah	
	9). Yalimo	
	10). Yahukimo	

Sumber data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Tahun 2021

Jumlah anggota DPRP periode 2019-2024 hasil pemilu 2019 sebanyak 55(lima puluh lima) kursi dan 14 (empat belas) kursi yang diangkat, jumlah total keanggotaan DPRP sebanyak 69 (enam puluh sembilan), dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.26 Jumlah Anggota DPRP Provinsi Papua
Periode 2019-2024 Hasil Pemilu 2019

Anggota DPRP	OAP	Non OAP	Jumlah
Laki Laki	49	10	59
Perempuan	5	5	10
Jumlah			69

Sumber data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua
Keterwakilan perempuan masih 14,5 persen.

Jumlah anggota DPRP Kabupaten/Kota se Provinsi Papua periode 2019-2024 hasil pemilu 2019 sebanyak 740(tujuh ratus empat puluh) anggota dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.27 Jumlah Anggota DPRP Kabupaten/Kota
Periode 2019-2024 Hasil Pemilu 2019

Anggota DPRP	OAP	Non OAP	Jumlah
Laki Laki	522	147	669
Perempuan	43	28	71
Jumlah			740

Sumber data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua
(keterwakilan perempuan masih 10 persen).

Berdasarkan data tersebut keterwakilan perempuan dalam Pemilu sangat minim, bila dikaitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa aspek kebijakan negara telah mengatur keterlibatan perempuan dalam Partai Politik.

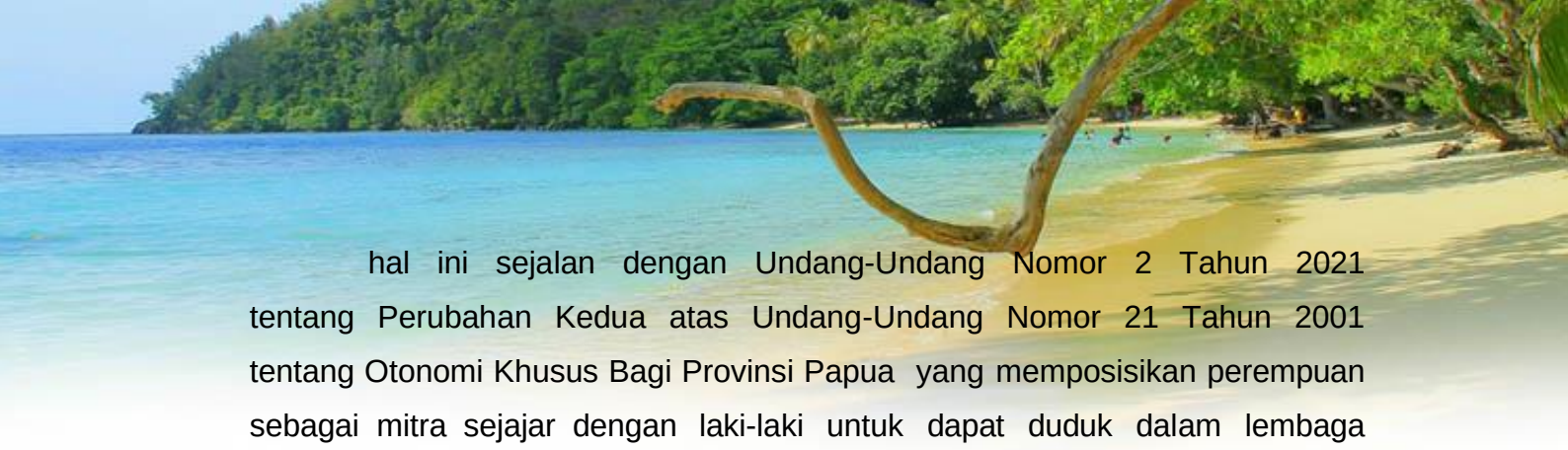

hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang memposisikan perempuan sebagai mitra sejajar dengan laki-laki untuk dapat duduk dalam lembaga legislatif, diatur kembali dalam dalam PP 106/2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, mulai dari pasal 32 sd pasal 84 mengatur tentang pengisian anggota DPRP dan DPRK yang diangkat dari unsur OAP termasuk dalam komposisi sekurang-kurangnya 30 persen adalah keterwakilan perempuan.

Capaian Indikator ke-3 Nilai skor aspek lembaga demokrasi diukur melalui jumlah lembaga demokrasi yang mendapat ijin, dengan realisasi 100 persen dengan capaian kinerja 169,8 persen, diukur melalui jumlah lembaga demokrasi yang mendapat ijin di bagi jumlah lembaga demokrasi yang terdaftar.

Jumlah partai peserta pemilu periode 2019-2024 sebanyak 16(enam belas) partai dan di Provinsi Papua tidak ada partai politik lokal sebagaimana di Aceh, UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tidak mengatur adanya pembentukan partai lokal di Provinsi Papua.

Pada Tanggal 9 Desember 2020 telah dilaksanakan Pilkada serentak secara nasional. Di Provinsi Papua ada 11 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada. Hasil Pilkada tahun 2020 di Provinsi Papua terdapat 1 Kabupaten (Yalimo) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tangggal 5 Mei 2021 sesua dengan perintah MK dalam putusan perkara nomor 97/php.bup-xix/2021. Hasil pelaksanaan pemungutan suara ulang digugat kembali oleh satu Paslon ke MK. Pada tanggal 26 Januari 2022 dilaksanakan lagi Pemungutan suara ulang (PSU) tahan kedua pasca putusan MK nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dan hasil putusan MK telah di dibacakan tanggal 10 Maret 2022 pukul 14.00 WIB, dengan putusan sela maka KPU Kabupaten Yalimo telah menetapkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Tanggal 14 Maret 2022, DPRP Kabupaten Yalimo telah melaksanakan sidang paripurna istimewa, penggumuman Bupati dan Wakil Bupati pada Tanggal 17 Maret 2022

di Hotel Aston Jayapura. Dibawah ini Tabel Partai peserta dari pemilu ke pemilu, sebagai berikut :

Tabel 3.28 Pemilu Dalam Angka di Indonesia

NO	PEMILU	JUMLAH PESERTA
1.	1955	172 peserta
2.	1971	10 partai
3.	1977, 1982, 1987, 1992, 1997	3 partai
4.	1999	48 partal
5.	2004	24 partai
6.	2009	38 partai + 6 parpol lokal di Aceh
7.	2014	12 parpol + 3 parpol lokal di Aceh
8.	2019	16 parpol + 4 parpol lokal di Aceh
9.	2024	18 Partai Politik

Sumber data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Tahun 2020

Daftar Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, adalah :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya(Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP)
4. Partai Golingan Karya(Golkar)
5. Partai Nasional demokrasi (Nasdem)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara(PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat(Hanura)
11. Partai Gerakan Perubahan Indonesia(Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang(PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia(PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia(Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan(PPP)
18. Partai Ummat

Pendaftaran partai politik untuk Pemilu 2024 dilaksanakan pada Bulan Agustus 2022,

Tabel 3.29 Pemenang Pemilu dari Pemilu ke Pemilu

PEMILU	PEMENANG	PERSENTASE SUARA
1	2	3
1955	PNI	DPR (22,32%), KONSTITUANTER (23,97)
1971	GOLKAR	62,82%
1977	GOLKAR	62,11%
1982	GOLKAR	68,34%
1987	GOLKAR	73,16%
1992	GOLKAR	66,10%
1997	GOLKAR	74,51%
1999	PDIP	33,74%
2004	GOLKAR	31,58%
2009	DEMOKRAT	26,40%
2014	PDIP	18,85%
2019	PDIP	22,24%

Data KESBANGPOL Tahun 2019

Jumlah Partai politik dapat berubah jumlahnya pada masa menjelang Pemilu Pelaksanaan Pilkada diatur dengan aturan yang berlaku secara nasional dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pelaksanaan Pilkada tidak diatur dalam Undang-undang OTSUS Papua, sehingga setiap Parpol yang mengusung pasangan calonnya bersifat umum kepada OAP dan non OAP. Sedangkan hak politik yang diatur dalam UU Otsus yang terkait dengan Pilkada hanya kekhususan untuk calon Gubernur dan

Wakil Gubernur adalah orang asli Papua setelah mendapatkan persetujuan keasliannya dari MRP.

Gambar 3.1

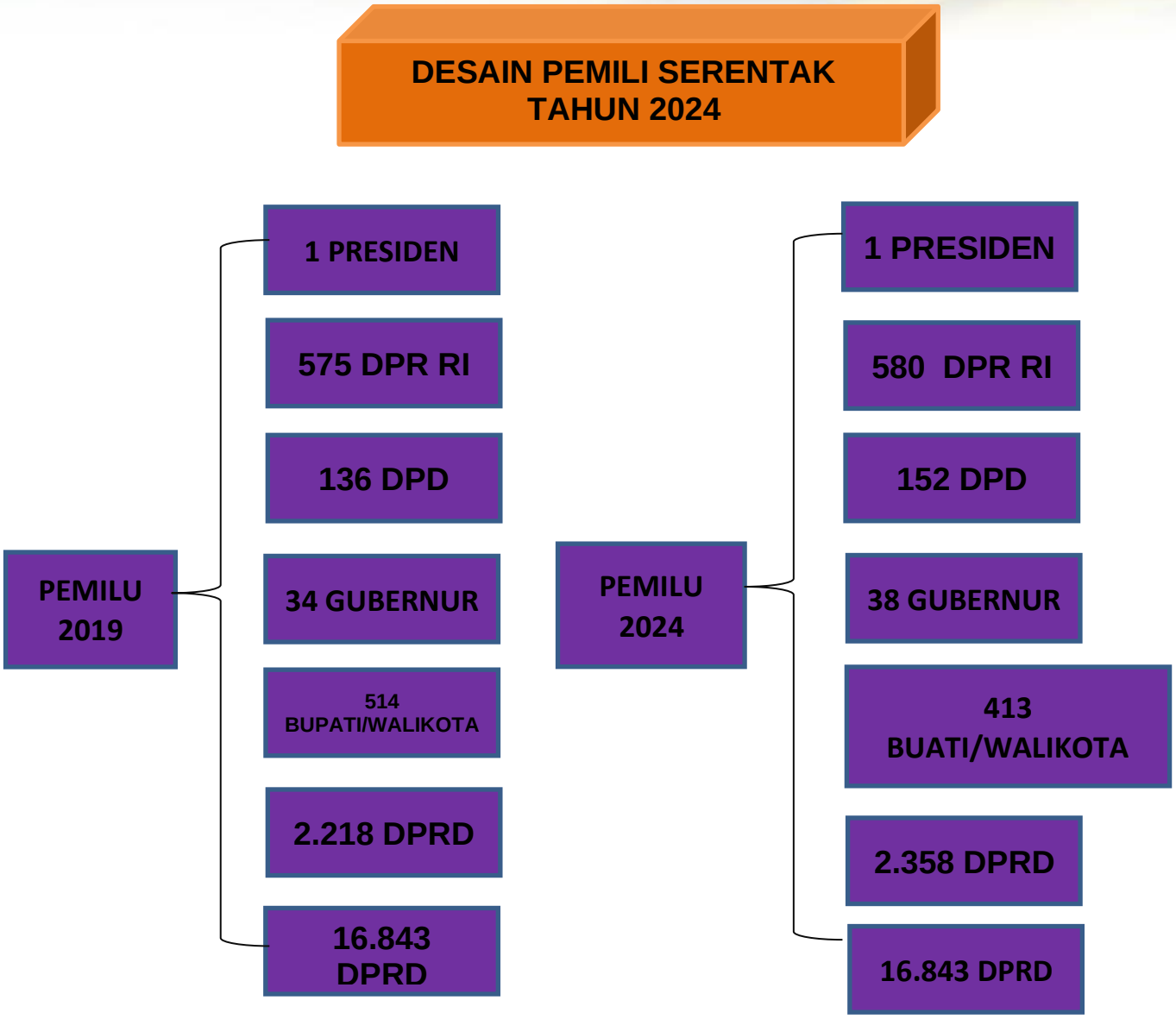

Sumber data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua

Gambar 3.2

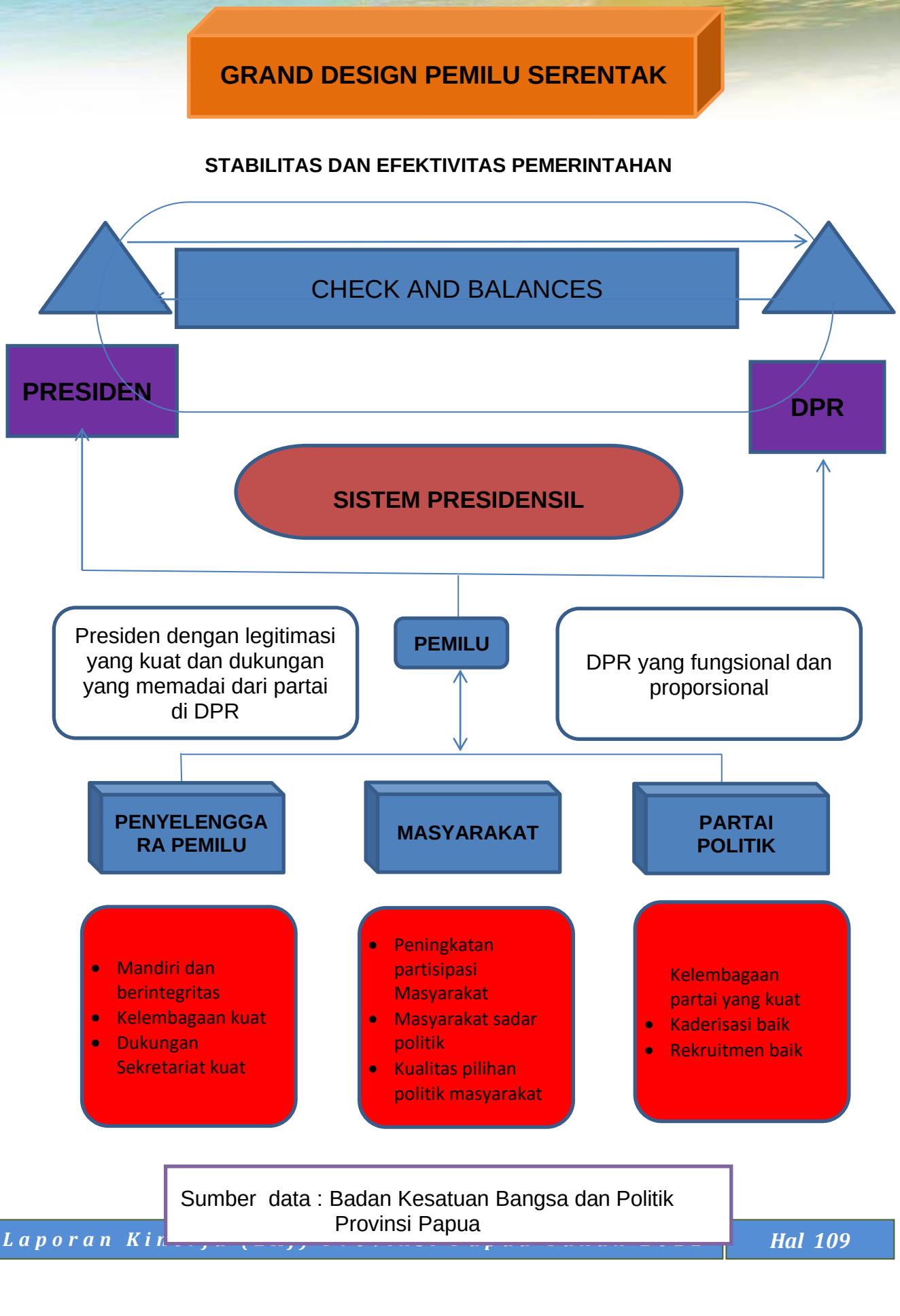

Sumber data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua

Bila di kaitkan dengan Indeks variabel IDI Papua pada Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi dari Tahun 2021 termasuk dalam kategori “Sedang” (indeks 60-80), ada 3 Indikator dengan skor buruk yaitu :

Lima indikator dari aspek Lembaga Demokrasi, yaitu:

- Indikator no 15 : Kinerja Lembaga Legislatif dengan capaian 4,17 ;
- Indikator no. 20 : Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN /D oleh pemerintah dengan capaian 57,14;
- Indikator no. 22 : Pendidikan politik pada kader partai politik dengan capaian 10,77;

Indikator-indikator ini memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik, dalam meningkatkan skor pada aspek lembaga-lembaga demokrasi.

Di bawah ini terdapat matriks capaian sasaran “Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi” Tahun 2019-2022, sebagai berikut :

Tabel 3.30 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 7

Sasaran Strategis	Satuan	Tahun											
		2019			2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi	Skor	93,1	100	107,4	93,6	100	108,8	94,0	100	106,4	94,5	100	105,8
	Skor	43,9	42,81	99,79	46,3	51,16	112,9	46,8	51,83	110,7	48,4	62,30	128,7
	Skor	55,5	57,05	102,79	56,6	52,61	92,9	57,7	50,00	86,7	58,9	100	169,8
Rata-rata capaian kinerja asasaran				103,33			104,2			101,3			134,8

Rata-rata capaian kinerja sasaran Tahun 2020 meningkat 0,9 persen dibanding capaian kinerja saasaran tahun 2019, dan menurun 2,9 persen tahun 2021 sedangkan pada tahun 2022 rata-rata capaian kinerja sasaran meningkat 33,5 persen dengan capaian 134,8 persen.

dengan demikian rata-rata capaian kinerja sasaran Tahun 2019-2022 diatas 100 persen dengan predikat “ **Sangat berhasil”**. data ini menunjukan besarnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan politik dan demokrasi.

.

Sasaran 8	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Otonomi Khusus (OTSUS) Papua"** sebesar **99.79 persen** dengan predikat**"Sangat Berhasil"**, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (Satu) indikator kinerja sasaran.Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.31 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 8

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Tingkat capaian realisasi program-program OTSUS yang direncanakan	Persen	98.00	97,80	99.79
				Capaian Kinerja Sasaran	99.79

Dari data diatas menunjukkan bahwa Indikator kinerja **tingkat capaian realisasi program-program OTSUS yang direncanakan** targetnya adalah sebesar **98.00 persen** dengan **realisasi** sebesar **97.80 persen** sehingga tercapai kinerja sebesar **99.79 persen** dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Capaian tersebut untuk tahun 2022 walaupun dikategorikan berhasil tetapi secara trend mengalami penurunan dari tahun 2021 yakni sebesar 103,06 persen ato turun sebesar 1, 81 persen, hal ini dapat dilihat pada perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja dari Tahu 2019-2021 dibawah ini:

Tabel 3.32 Indikator Kinerja Sasaran 8 untuk Tahun 2019-2021

No	INDIKATOR KINERJA	2019				2020			2021		
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	8	9	10	12	13	14	12	13	14
1	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	%	90	92,07	102,3	93	95,85	103,06	95	97,80	102,95

dilihat dari table diatas, memperilihat bahwa capaian setiap tahunnya cenderun naik, baik dari target dan realisasinya karena adanya dukungan Pemerintah Provinsi Papua dalam pemanfaatan dana Otsus Pembiayaan pelayanan terhadap pembagian alokasi 80% bagian penerimaan kabupaten/kota diatur dalam peraturan daerah khusus provinsi papua nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Daerah Khusus Nomor 13 Tahun 2016 Juncto Peraturan Daerah Khusus Nomor 3 Tahun 2019 tentang pembagian penerimaan dan pengelolaan keuangan dana otonomi khusus, dengan diarahkan kepada : pendidikan minimal 30%, kesehatan minimal 15%, pemberdayaan ekonomi kerakyatan minimal 20% (Perdasus 25/2013) dan minimal 25% (Perdasus 13/2016), infrastruktur minimal 20%, afirmasi 6%, monitoring, evaluasi dan pengawasan 4% (Perdasus 25/2013), 2% monitoring, evaluasi dan pengawasan, 2% lainnya (pembiayaan pelayanan sosial, kependudukan, tenaga kerja), (Perdasus 13/2016).

Pembiayaan pelayanan terhadap pengelolaan alokasi 20% bagian provinsi diarahkan kepada : pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastuktur, operasional lembaga majelis rakyat papua, lembaga keadaan 10% dari alokasi 20% yang dikelola pronvinsi, monitoring dan evaluasi.

Penganggaran dana otonomi khusus yang bersumber dari dana tambahan otonomi khusus bagian infrastuktur sepenuhnya diarahkan kepada kepentingan infrastuktur dalam perspektif luas dengan arahan oprerasionalisasi diatur dalam peraturan gubernur yang ditujukan untuk membiayai kepentingan

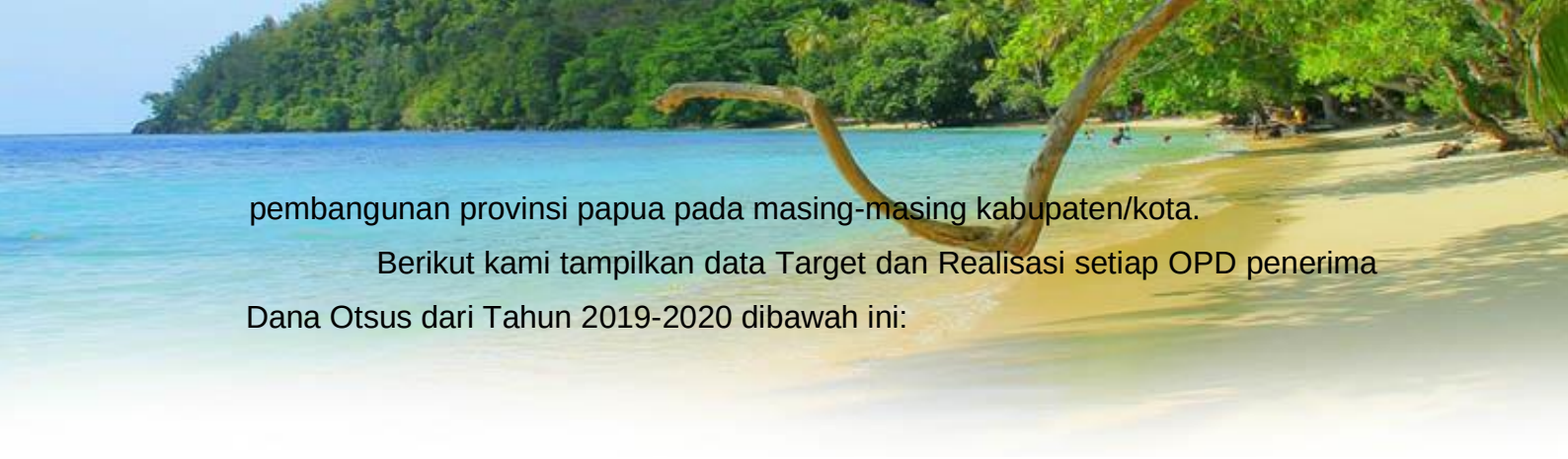

pembangunan provinsi papua pada masing-masing kabupaten/kota.

Berikut kami tampilkan data Target dan Realisasi setiap OPD penerima Dana Otsus dari Tahun 2019-2020 dibawah ini:

Tabel 3.33
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja per OPD di Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2021

OPD	SATUAN	2019			2020			2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sektor Pendidikan										
Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	Persen	90,00	90,77	100,86	90,00	95,60	106,22	90,00	80,19	89,10
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Persen	90,00	96,07	106,74	90,00	100,00	111,11	90,00	82,68	91,87
Rata-rata	***Persen***	***90,00***	***93,42***	***103,80***	***90,00***	***97,80***	***108,67***	***90,00***	***81,44***	***90,48***
Sektor Kesehatan										
Dinas Kesehatan	Persen	90,00	84,58	93,98	90,00	95,60	106,22	90,00	85,54	95,04
Rata-rata	***Persen***	***90,00***	***84,58***	***93,98***	***90,00***	***95,60***	***106,22***	***90,00***	***85,54***	***95,04***
Sektor Infrastruktur										
Dinas PU, Penatan Ruang, dan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Persen	85,00	73,46	86,42	85,00	89,82	105,67	85,00	81,45	95,82
Dinas Perhubungan	Persen	85,00	70,11	82,48	85,00	37,06	43,60	85,00	61,30	72,12
Rata-rata	***Persen***	***85,00***	***71,79***	***84,45***	***85,00***	***63,44***	***74,64***	***85,00***	***71,38***	***83,97***
Sektor Ekonomi										
Dinas Pertanian dan Pangan	Persen				90,00	100,00	111,11	90,00	78,47	87,19
Dinas Ketahanan Pangan	Persen									
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Persen	90,00	98,50	109,44						
Dinas Perkebunan	Persen	90,00	99,99	111,10						
Dinas Peternakan	Persen	90,00	99,50	110,56						

OPD	SATUAN	2019			2020			2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua	Persen	90,00	97,15	107,94	90,00	100,00	111,11	90,00	89,46	99,40
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Persen				90,00	99,90	111,00	90,00	99,90	111,00
Dinas Koperasi dan UKM	Persen	90,00	94,73	105,26						
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persen									
Perdagangan	Persen	90,00	85,56	95,07						
Perindustrian	Persen	90,00	95,70	106,33						
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persen				90,00	98,18	109,09	90,00	93,88	104,31
Dinas Kebudayaan	Persen									
Dinas Pariwisata	Persen	90,00	99,34	110,38						
Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	90,00	99,98	111,09	90,00	99,35	110,39	90,00	92,98	103,31
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Persen	90,00	97,19	107,99				90,00	88,04	97,82
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	Persen	85,00	77,26	90,89	85,00	100,00	117,65	85,00	95,15	111,94
Rata-rata	***Persen***	***89,55***	***94,99***	***106,00***	***89,17***	***99,57***	***111,72***	***89,29***	***91,13***	***102,14***
Total Rata-rata	***Persen***	***88,64***	***86,19***	***97,06***	***88,54***	***89,10***	***100,31***	***88,57***	***82,37***	***92,91***

Sumber data: TP2K Bappeda (diolah)

Sasaran 9	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik"** sebesar **83,02** persen dengan capaian **Berhasil** dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.34 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 9

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1.	Capaian Nilai SAKIP	Predikat	BB	B	66.05
2.	Capaian implementasi e-government terintegrasi	Persen	90	90	100.00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					**83.02**

*Prediksi

Berikut nya adalah **Indikator Kinerja "Capaian Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) oleh KEMENPANRB dan RI"** dengan **Target BB** dan **Realisasi B dengan Nilai 66.05 sebagai penilaian Akuntabilitas Kinerja untuk Tahun 2022.** Untuk memenuhi Target masih belum bisa tercapai ke Predikat BB karena ini dinilai Untuk memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan Predikat BB hinga Predikat A harus didukung pula dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja dari Kab/Kota se Papua dimana untuk Kab/Kota se Papua rata-rata Nilai Akuntabilitas Kinerja nya masih pada level Predikat D, C, sementara yang Predikat CC baru 4 (Empat) Kabupaten yaitu Kota Jayapura, Kab.Jayapura, Kab.Merauke, Kab.Jayawijaya sementara yang Predikat B baru 1 (Satu) Kabupaten yaitu Kab.Asmat. Sementara syarat untuk mencapai nilai BB sebelum A adalah 1/3

Kab/Kota (kurang lebih 10 Kab) Nilai Akuntabilitas Kinerjanya harus sudah Predikat B sementara realisasinya baru 1 (Satu) Kab yang berpredikat B yaitu Kab.Asmat. Itulah sebabnya mempengaruhi Kinerja Provinsi Papua secara keseluruhan untuk belum dapat sampai pada Predikat BB apalagi Predikat A dan Predikat AA.

Prediksi Nilai Akuntabilitas Kinerja di Tahun 2021 dengan Nilai 70.00 dengan indikator Komitmen Pimpinan, Kerjasama semua unsur SKPD, pemenuhan Administrasi dokumen SAKIP serta Kualitas dan Implementasi SAKIP. Berikut adalah perkembangan nilai Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Provinsi Papua yang tertera pada Tabel sebagai berikut :

Tabel.3.35
Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Papua Tahun 2015-2022

NILAI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

TAHUN	NILAI	PREDIKAT	KET
2015	46.03	C	KURANG
2016	51,18	CC	CUKUP
2017	60,04	B	BAIK
2018	62,59	B	BAIK
2019	64,05	B	BAIK
2020	64,53	B	BAIK
2021	64,57	B	BAIK
2022	66,05	B	BAIK

Sumber : KEMENPANRB RI

Pendataan oleh : Biro Organisasi Setda Provinsi Papua

Tahun 2022 ada Perubahan Bobot Penilaian dapat dilihat di penjelasan dibawah ini :

Target SAKIP Provinsi Papua di Tahun 2022 adalah BB hal ini sesuai dengan RPJMD Provinsi Papua melalui PERDA Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023 juga sesuai Indikator Kinerja

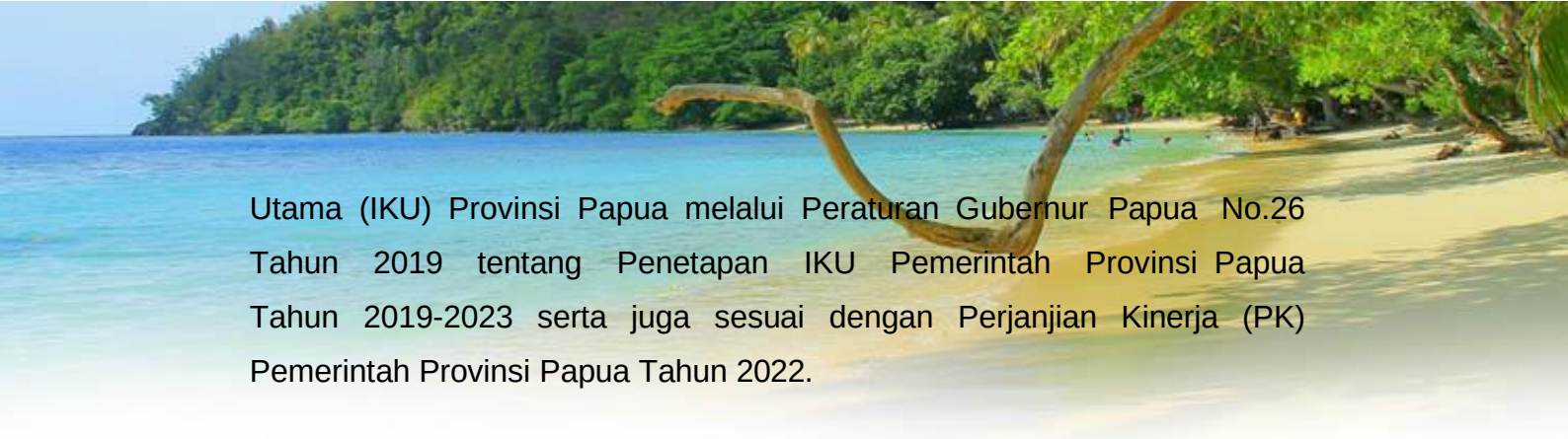

Utama (IKU) Provinsi Papua melalui Peraturan Gubernur Papua No.26 Tahun 2019 tentang Penetapan IKU Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023 serta juga sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022.

Berikut Perkembangan SAKIP Provinsi Papua untuk tahun 2015- 2021 oleh KEMENPAN dan RB RI yaitu :

Tabel. 3.36 Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Papua Tahun 2015-2021

KOMPONEN YANG DINILAI		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
a	Perencanaan Kinerja	30	16,59	35	16,74	35	20,12	35	20,72	35	20.88	35	21.26	35	21.26
b	Pengukuran Kinerja	25	9,55	25	10,94	25	12,85	25	13,28	25	13.95	25	13.95	25	13.48
c	Pelaporan Kinerja	15	7,79	15	8,31	15	9,95	15	10,12	15	10.67	15	10.67	15	10.69
d	Evaluasi Internal	10	2,62	10	4,09	10	5,77	10	6,93	10	7.01	10	7.11	10	7.11
e	Capaian Kinerja	20	9,48	20	11,10	20	11,35	20	11,54	20	11.54	20	11.54	20	12.03
JUMLAH		**100**	**46,03**	**100**	**51,18**	**100**	**60,04**	**100**	**62,59**	**100**	**64,05**	**100**	**64,53**	**100**	**64,57**
			C		**CC**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**
Kenaikan Nilai AKIP					**5.15**		**8.86**		**2.55**		**1.46**		**0.48**		**0.04**

Sumber : KEMENPANRB RI

Intepretasi dari Predikat B yaitu dengan nilai >60-70 sesuai dengan PERMENPANRB No.12 Tahun 2015 tentang Evaluasi SAKIP. Maka Intepretasi dari **Predikat B** adalah **Baik** dimana Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

Berikut penjelasan penilaian AKIP Tahun 2022 yang mengalami perubahan bobot penilaian sebagaimana terlampir dalam Surat MENPANRB RI RI kepada Sekda Provinsi Papua yaitu :

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor : B/807/AA.05/2022 — 6 Desember 2022
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
di
Jayapura

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Papua Sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Papua. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil *(result oriented government)***. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

1) **Perencanaan kinerja**

Pemerintah Provinsi Papua telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja dan dokumen lainnya baik pada tingkat PD. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya:

- Masih terdapat indikator kinerja yang dapat diturunkan ke tingkat PD, hal ini untuk memastikan penjenjangan kinerja yang sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan organisasi;
- Penjenjangan/*cascading* kinerja pada level Pemda dan PD perlu diuji apakah telah mengacu pada PermenPANRB No. 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja. Penjenjangan kinerja tersebut perlu dilakukan untuk memastikan keselarasan kinerja dari tingkat organisasi sampai dengan kinerja individu;
- Identifikasi kinerja *crosscutting* belum dilakukan secara menyeluruh dan menyentuh aspek implementasi yang efektif dan efisien.

2) **Pengukuran Kinerja**

Pemerintah Provinsi Papua dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan rencana aksinya kepada seluruh perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya:

- Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berkala sebagai referensi pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan program atau kegiatan belum optimal;
- Belum seluruh PD mengunggah rencana aksinya sehingga belum didapat informasi pemanfaatannya terhadap pengukuran capaian kinerja. Pengukuran rencana aksi masih lebih kepada realisasi anggaran namun belum memberikan umpan balik perencanaan.

3) **Pelaporan Kinerja**

Pemerintah Provinsi Papua telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat pemda maupun tingkat Perangkat Daerah (PD). Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan PD. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya:

3

- Laporan kinerja pada level PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai di antaranya tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Hal tersebut terlihat pada laporan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan dari belum adanya informasi tentang pemanfaatan rekomendasi pada rencana aksi tahun berikutnya. Hal tersebut terlihat pada seluruh rencana aksi PD yang diunggah dalam aplikasi ESR.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Provinsi Papua telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah (PD), laporan hasil evaluasi tersebut telah memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya:

- Evaluasi atas program baru sebatas pada pelaksanaan program dan penyerapan anggaran, belum mengarah kepada hasil program dan dampak program;
- Hasil evaluasi internal belum seluruhnya ditindaklanjuti dengan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada perencanaan selanjutnya;
- Perlu memanfaatkan hasil evaluasi internal kinerja menjadi dasar *reward* dan *punishment* sehingga mendorong peningkatan implementasi SAKIP.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyusun penjenjangan/*cascading* kinerja pada level Pemda dan PD mengacu pada PermenPANRB No. 89 Tahun 2021, mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) pencapaian kinerja;
2. Melakukan identifikasi kinerja *crosscutting* secara menyeluruh dan memanfaatkanya dalam penetapan perjanjian kinerja;
3. Mendorong seluruh PD untuk menyusun dan mengunggah rencana aksi, serta meningkatkan pemanfaatannya sebagai media monitoring dan evaluasi kinerja;

4. Meningkatkan kualitas evaluasi internal sehingga memberikan umpan balik perbaikan perencanaan;
5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada level PD sehingga mampu memberikan informasi yang memadai tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Meningkatkan pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan dan pada rencana aksi tahun berikutnya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, dan pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua serta menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Papua.

Berikutnya adalah **Indikator Kinerja "Capaian implementasi e-government terintegrasi"** dengan **Target 90 persen** dan **Realisasi 90 persen** dengan **Capaian Kinerja sebesar 100 persen.**

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dalam tahun anggaran 2022 melakukan Pemeliharaan aplikasi, monitoring Website, dukungan infrastruktur e-Government dan Optimalisasi PPID untuk meningkatkan pelayanan Publik dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Dalam rangka Pemeliharaan Aplikasi dan website Pemerintah Provinsi Papua dengan kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan layanan berupa:

A. Pengembangan Layanan Publik yang online dan integerasi = 18 Aplikasi

1. e-SIMDA
2. e-SAMSAT
3. SP2D dan Tax Online
4. e-Pusdalisbang / Aplikasi pusat analisa data
5. e-PPO / e-Perizinan (https://ppo.papua.go.id)
6. e-SKP/ e-absensi (Embedded e-Absensi)
7. TP2K / e-Monev (https://tp2k.papua.go.id)
8. e-LPPD (https://lppd.papua.go.id)
9. e-SAKIP aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (https://sakip.papua.go.id)
10. e-Absensi (https://absensi.papua.go.id)
11. e-TPP (Embedded e-Absensi)
12. e-SPPD (https://sppd.papua.go.id)
13. e-SITI PITALOKA (Monitoring Inspektorat) (https://ppr.papua.go.id/2020/siti)
14. Portal ULP (https://ulp.papua.go.id)

15. Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) Papua (https://sikap-oap.papua.go.id)
16. e-SINGA sistem informasi pengadaan (https://singa2.papua.go.id)
17. npd.papua .go.id
18. e-efficial.papua.go.id

B. Pemeliharaan Website Pemerintah Provinsi Papua dan monitoring website SKPD dilingkungan Pemprov Papua dengan melaksanakan monitoring pelaksanaan

pemanfaatan domine dan sub domine Pemerintah Provinsi Papua, dengan jumlah domain dan sub domain di OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, adalah:

1. Jumlah Domain sebanyak 1 website, yaitu:

https://papua.go.id

III. Fasilitas Jaringan Intranet, Akses Internet antra SKPD di Lingkung Pemerintah Provinsi Papua dan ppengelolaan Server dan Disaster Recovery System (DRC) serta Sistem Pengelolaan Keamanan Informasi Pada e-Governement

1. Jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua terhubung dengan Akses Intranet;
2. Terdapat Internet Kampung yang di kembangan ada 3 kampung antara lain ;
   - Kampung Kayupulo
   - Kampung Enggros
   - Kampung Tobati
3. Kapasitas Bandwith Internet tersedia dan terpakai untuk mendukung e-Government;

4. Jumlah Space Server Lokal dan Co-Location terpasang dan jumlah terpakai;
5. Jumlah DRC yang disiapkan untuk recovery Sistem e- Governemt
6. Jumlah Cyber Attack yang masuk pada Server Pemprov Papua dalam 1 (satu) Periode.

Berikut perkembangan Indikator Sasaran Kinerja capaian implementasi e-Government terintegrasi dalam tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel. 3.37 Indikator Kinerja Sasaran 9 Indikator 2 untuk Tahun 2019-2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN											
			2019			2020			2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Capaian Implementasi e-Government terintegrasi	Persen	85	120	70,83	85	79.17	107,36	90	100	90	90	90	100

Perkembangan capaian e-Government Pemerintah Provinsi Papua dari sisi capaian realisasi mengalami peningkatan di Tahun 2022 yaitu 100% jika dibandingkan dengan tahun 2021 (90 %), hal ini dikarenakan pada Tahun 2022 tidak ada penambahan aplikasi, tetapi kami melalukan pemeliharan sistem aplikasi yang sudah terbangun untuk dapat dijalankan secara maksimal di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Sasaran 10	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program serta Kegiatan Pembangunan Daerah.**

Salah satu tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua periode 2019-2023 ialah Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perwujudan tujuan dimaksud adalah meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah yang diukur dengan **Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPJMD**.

Tabel 3.38 Indikator Kinerja Sasaran 10

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun											
		2019			2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPJMD	%	80,00	100,00	125,00	85	100	117,65	90	100	111,11	95	100	105,26

Untuk tahun 2022 sebagai tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023, realisasi tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD mencapai 100 persen, melampaui target yang ditetapkan yaitu 95,0 persen atau dengan **capaian kinerja sebesar 105,26 persen.** Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD mencapai 100% dari tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 atau 4 tahun berturut-turut berhasil dipertahankan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Capaian kinerja indikator mengalami penurunan dibandingkan capaian kinerja tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 hanya dikarenakan perbedaan target di tahun 2019 sebesar 80 persen, tahun 2020 sebesar 85 persen, tahun 2021 ditargetkan sebesar 90 persen sedangkan tahun 2022 ditargetkan naik dibandingkan tahun 2021 sebesar 95 persen.

Terkait pencapaian dari tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD pada tahun 2022, dari 456 Program yang direncanakan dalam RKPD Provinsi Papua tahun 2022 semua konsisten dengan RPJMD, sama dengan tahun 2020 dengan program sebanyak 488 Program dan di tahun 2019 sebanyak 568 program.

Grafik 3.4 Jumlah Program RPJMD, RKPD dan Program Yang Konsisten

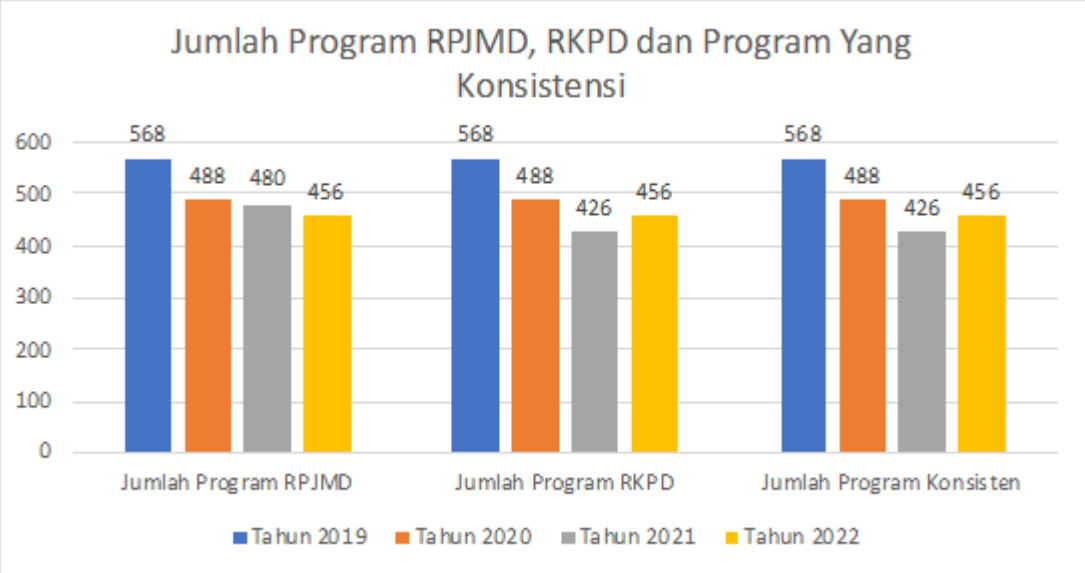

Pencapaian kinerja ini sasaran ini didukung dengan kebijakan, antara lain:

1. Implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis Elektonik yang terintegrasi.
2. Peningkatan kualitas aparatur perencana Pembangunan Daerah sampai ditingkat pelaksana program di SKPD Provinsi Papua.
3. Peningkatan Perencanaan Pembangunan berbasis Data/Bukti (evidence base planning) serta penguatan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.
4. Memperkuat integrasi perencanaan pembangunan dengan perencanaan tata guna lahan, kewilayahan serta sektor sehingga prioritas pembangunan dapat terarah, terukur dengan jelas, dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
5. Peningkatan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Sasaran 11	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas dan Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya sistem akuntabilitas dan Pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah"** sebesar **141,205 persen** dengan predikat **"sangat berhasil",** dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.39 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 11

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1.	Opini BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP	WTP	100,00
2.	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	12,70	21,30	182,41
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					**141, 205**

Indikator **Opini BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LPKD)** menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pemerintah Provinsi Papua menargetkan kembali untuk mempertahankan Opini WTP atas LKPD Tahun 2022 oleh BPK RI

Adapun Indikator Opini oleh BPK RI adalah :

1. Kesesuaian dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Pengungkapan yang memadai;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas pengendalian intern; jika tidak ada permasalahan yang signifikan dan material berpengaruh terhadap penyajian Laporan Keuangan (LK) terkait 4 Indikator diatas, opini nya WTP.

Berikut Realisasi Perkembangan Opini BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi Papua tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.40 Perkembangan LKPD Provinsi Papua

oleh BPK RI Tahun 2014-2022

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BKP RI Atas LKPD Pemerintah Provinsi Papua	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	*WTP

(*) Pemerintah Provinsi Papua Menargetkan Opini BPK RI Di Tahun 2022
Yang Baru Hasilnya Diketahui Pada Sekitar Triwuan II Tahun 2023 Adalah Dengan Tetap Predikat WTP

Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua dengan predikat WTP ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah semakin membaik artinya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual.

Adapun Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

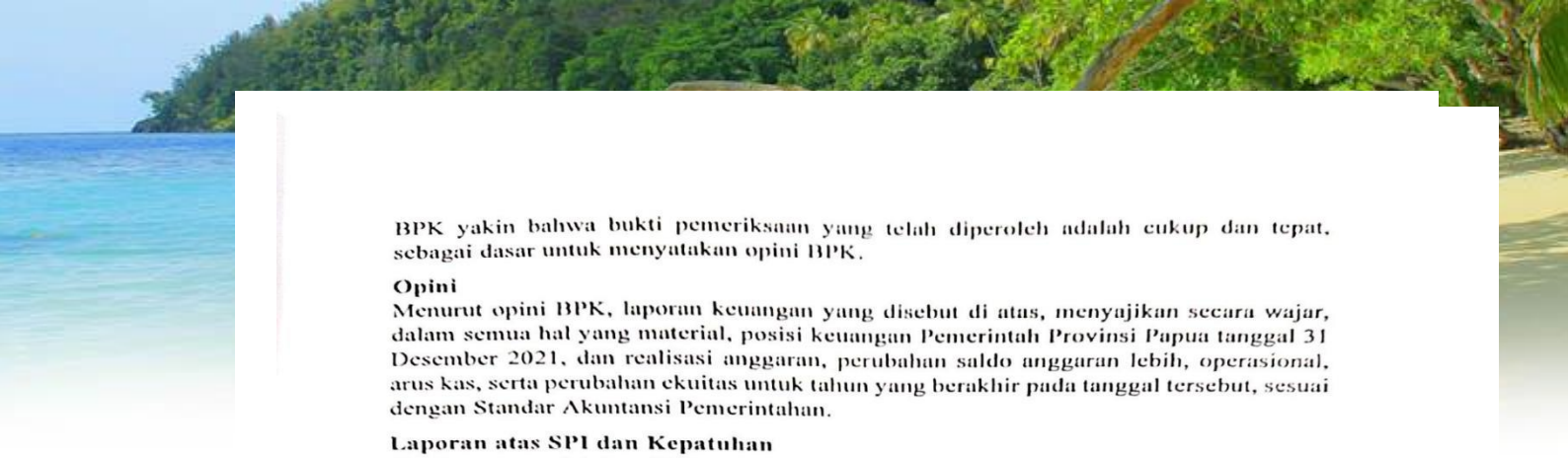

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Papua tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 15.B/LHP/XIX.JYP/05/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jayapura, 23 Mei 2022
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Papua
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Arjuna Sakir, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Register Negara Akuntan Nomor RNA 13404

Dipindai dengan CamScanner

Indikator Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap

Pendapatan Daerah, dengan target tahun 2022 sebanyak **12.70** persen dan realisasi sebanyak **21.30** persen sehingga tercapai kinerja sebanyak **182.41** persen.

Pendapatan Daerah merupakan hakekat dari adanya Otonomi Daerah dan merupakan alat ukur bagi kemampuan dan kemandirian setiap daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dengan target yang ditetapkan sebesar **12.70 %** dan realisasi sebesar **21,30%** dengan capaian kinerja sasaran sebesar **182.41%.** Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan Kontribusi PAD yang sangat signifikan terhadap Pendapatan Daerah tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar **7,55%.**

Meskipun ada penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 yaitu Rp. 1.198.114.776.543,00 dari yang sebelumnya pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.765.651.609.757,00 yang artinya target PAD tumbuh negatif, akan tetapi realisasinya justru bertumbuh sangat positif bahkan merupakan realisasi tertinggi bila dibandingkan dengan realisasi PAD beberapa tahun sebelumnya. Ada beberapa alasan mengapa target PAD menurun di tahun 2022 adalah karena :

1. Tahun 2021 terdapat pembayaran sengketa Pajak Air Permukaan (PAP) termin II dari PT. Freeport Indonesia.
2. Tahun 2022 tidak ada lagi sisa pembayaran sengketa PAP PT. Freeport Indonesia dan hanya membayar kewajiban PAP untuk masa berjalan.

Dapat dijelaskan beberapa hal yang menjadi penyebab realisasi penerimaan PAD bertumbuh posistif adalah adanya komitmen pimpinan dengan seluruh staf, stakeholder yang terkait (Polda Papua, PT. Jasa Raharja, PT. Bank Papua, Perusahaan/BUMN/BUMD, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan masyarakat yang taat membayar pajak.

Adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Papua melakukan program Pembebasan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Berikut ditampilkan sumber-sumber pendapatan asli daerah di Provinsi Papua sebagai terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.41 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Tahun 2021-2022

No	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		%
			2021	2022	
1.	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Presentasi Peningkatan PAD	2.104.347.557.382,78	2.276.282.359.211	89,99
		2. Presentasi Peningkatan Pajak Daerah	1.627.363.546.469,00	1.235.322.605.248	20,64
		3. Presentasi Peningkatan Retribusi Daerah	18.406.439.197,78	17.713.806.139	- 4,40
		4. Presentasi Peningkatan PAD Lain-lain	418.088.193.782,00	256.254.390.188	23,37

Sumber : Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2022

Tabel 3.42 Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Provinsi Papua Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TOTAL REALISASI PENDAPATAN	%
1.	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja dararah	1. Jumlah Realisasi PAD / Jumlah Realisasi Total Total Pendapatan Daerah	2.276.282.359.211	10.832.546.680.596,30	21,01
		2. Jumlah Realisasi Pajak Daerah / Jumlah Realisasi Total Total Pendapatan Daerah	1.235.322.605.248	10.832.546.680.596,30	11,40
		3. Jumlah Realisasi Retribusi Daerah / Jumlah Realisasi Total Total Pendapatan Daerah	17.713.806.139	10.832.546.680.596,30	0,16
		4. Jumlah Realisasi Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan / Jumlah Realisasi Total Total Pendapatan Daerah	766.991.557.636	10.832.546.680.596,30	0,70
		5. Jumlah Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah / Jumlah Realisasi Total Total Pendapatan Daerah	256.254.390.188	10.832.546.680.596,30	0,24

Sumber : Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2022

Kontribusi terhadap Total Pendapatan adalah sebanyak 21,01 % dengan penjelasan sebagai berikut :

Total Pendapatan		**Rp 10.832.546.680.596,30**
1. Pendapatan Asli Daerah	**Rp**	**2.276.282.359.211,00**
1). Pajak Daerah	Rp	1.235.322.605.248,00
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB	Rp	267.997.212.856,00
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)	Rp	150.789.322.000,00
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB)	Rp	254.150.270.400,00
- Pajak Air Permukaan (PAP)	Rp	225.537.665.973,00
- Pajak Rokok	Rp	336.848.130.019,00
2). Retribusi Daerah	Rp	17.713.806.139,00
3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp	766.991.557.636,00
2. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang Sah	**Rp**	**256.254.390.188,00**

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 melampaui Target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 182,41 % dengan rincian sebagai berikut :

Target PAD : Rp. 1.198.114.778.543,00
Realisasi : Rp. 2.276.282.359.211,00
Capaian : 203,50 %

Total Penerimaan Pendapatan Provinsi Papua Tahun 2022

Target : Rp. 9.821.195.710.061,00
Realisasi : Rp. 10.832.546.680.596,30
Capaian : 110,29 %

Sasaran 12	Meningkatnya Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Alam Untuk Penciptaan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas.

Ekonomi Papua di tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 8,97 persen, di dorong oleh mulai pulihnya perekonomian dampak dari COVID-19 lalu. Perekonomian Papua sangat fluktuatif, tergantung pada besar kecilnya nilai produksi tambang nonmigas (tembaga & emas) dimana tahun 2020 mengalami pertumbuhan 2,39 persen walaupun di masa pandemik Covid-19, selanjutnya tahun 2021 mengalami pertumbuhan 15,16 persen.

Gambar 3.5 Perekonomian Papua Tahun 2022 dari Sisi Produksi

Sumber : BPS, Tahun 2022 (diolah)

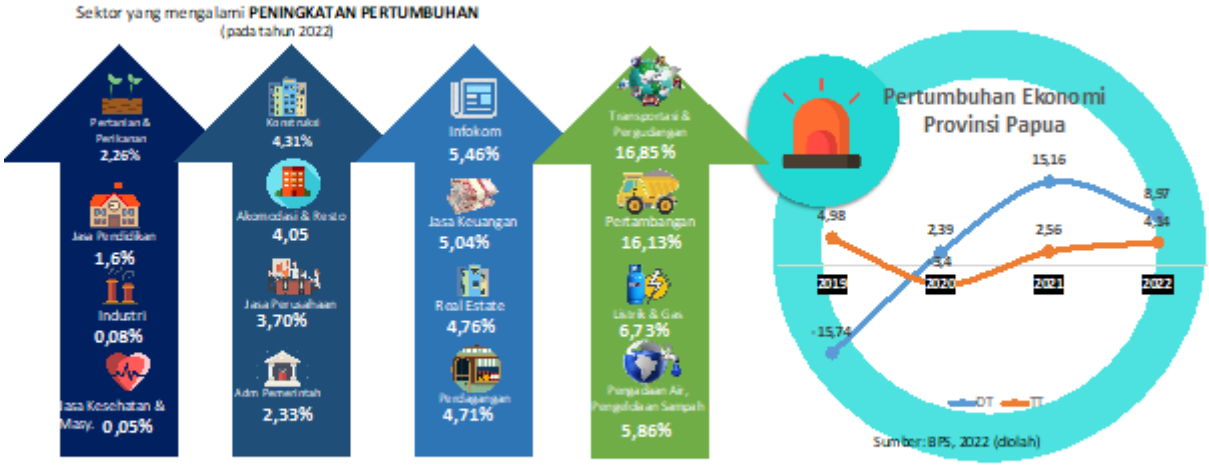

Dari sisi produksi, pertumbuhan ini disebabkan oleh pertumbuhan lapangan usaha Transportasi pergudangan sebesar 16,85 persen, Pertambangan dan Penggalian sebesar 16,13 persen, pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,73 persen serta Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,86 persen.

Sedangkan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 2,26 persen dengan kontribusi sebesar 10,30 persen untuk pembentukan PDRB Papua tahun 2022, dengan demikian berdampak pula pada pencapaian sasaran strategis pembangunan Provinsi Papua di tahun 2022 yaitu **meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang** diukur melalui pencapaian 3 (tiga) sub sektor pada Sektor Pertanian dan Perikanan yaitu Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB, Sektor Perkebunan dan Kontribusi Sektor Peternakan.

Tabel 3.43 Indikator Kinerja Sasaran 12

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Tahun											
			2019			2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	%	3,00	2,69	89,52	3,40	2,62	77,06	3,84	2,42	63,02	4,4	2,28	51,82
2	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	%	1,5	1,04	69,33	2,00	1,11	55,50	2,71	0,98	36,16	3,7	0,96	25,95
3	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	%	1,5	1,03	68,67	2,00	0,99	49,50	2,74	0,85	31,02	3,7	0,83	22,43
Rata-Rata Capaian Kinerja					**75,84**			**60,69**			**43,40**			**33,40**

Sumber : BPS, 2022, (diolah)

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran : **Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas** adalah 33,40 persen. Jika dibandingkan pencapaian kinerja tahun 2021 yang sebesar 43,40 persen, maka capaian kinerja tahun 2022 mengalami penurunan. Rata-rata capaian kinerja sasaran ini selama periode tahun 2019-2022 cenderung mengalami penurunan, di mana tahun 2019 capaian kinerja sasaran mencapai 75,84 persen, menurun di tahun 2020 menjadi 60,69 persen, tahun 2021 turun menjadi 43,40 persen dan tahun 2022 mengalami penurunan yang signifkan

menjadi 33,40 persen. Diharapkan ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah khususnya urusan Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan dalam mendukung dan mendorong peningkatan produksi di sub sektor ini mengingat dari tahun ke tahun sumbangan sub sektor ini cenderung mengalami penurunan.

Jika diurai ke 3(tiga) Capaian Kinerja masing-masing Indikator maka Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB dengan capaian tertinggi sebesar 53,82 persen, selanjutnya Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB mencapai 25,95 persen dan indikator Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB dengan capaian kinerja yaitu 22,43 persen.

Dapat dilihat dari realisasi tahun 2022, semua indikator kinerja yang jadi ukuran pencapaian sasaran meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas belum mencapai target, untuk itu disarankan dalam menetapkan target di tahun 2023 dapat mempertimbangkan rata-rata kontribusi ke tiga sub sektor ini selama tahun 2019-2022 sehingga betul-betul dapat sesuai dengan kinerja sesungguhnya. Indikator Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB yang ditargetkan sebesar 4,4 persen hanya terealisir sebesar 2,28 persen. Untuk indikator Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB yang ditargetkan 3,7 persen, teralisir hanya sebesar 0,96 persen juga masih dibawah target. Sedangkan Indikator Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB terealisir sebesar 0,83 persen masih dibawah target sebesar 3,7 persen, juga mengalami penurunan kontribusi dibanding tahun 2020. Adapun rata-rata kontribusi dari tahun 2019-2023 untuk sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB sebesar 3,73 persen, selanjutnya kontribusi sub sektor perkebunan PDRB sebesar 1,49 persen dan kontribusi sub sektor sebesar 1,37 persen.

Gambar 3.44 Perkembangan Kontribusi Sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan terhadap PDRB dan Rata-rata Kontribusi dari tahun 2019 sd 2022

IKU	2019	2020	2021	2022	Rata2 Pertumbuhan
Kontribusi Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB	2,69	2,62	2,42	2,28	**3,73**
Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	1,04	1,11	0,98	0,96	**1,49**
Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	1,04	0,99	0,85	0,83	**1,37**

Sumber : BPS, tahun 2023 (diolah)

Capaian indikator kinerja **Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB**, terdapat beberapa komoditas sebagai kontributor sektor tanaman pangan 3 tertinggi di tahun 2021 yaitu : Kangkung, Tomat dan Petsai (Kol).

Gambar 3.6 Produksi Tanaman Holtikultura Provinsi Papua tahun 2018 & 2021

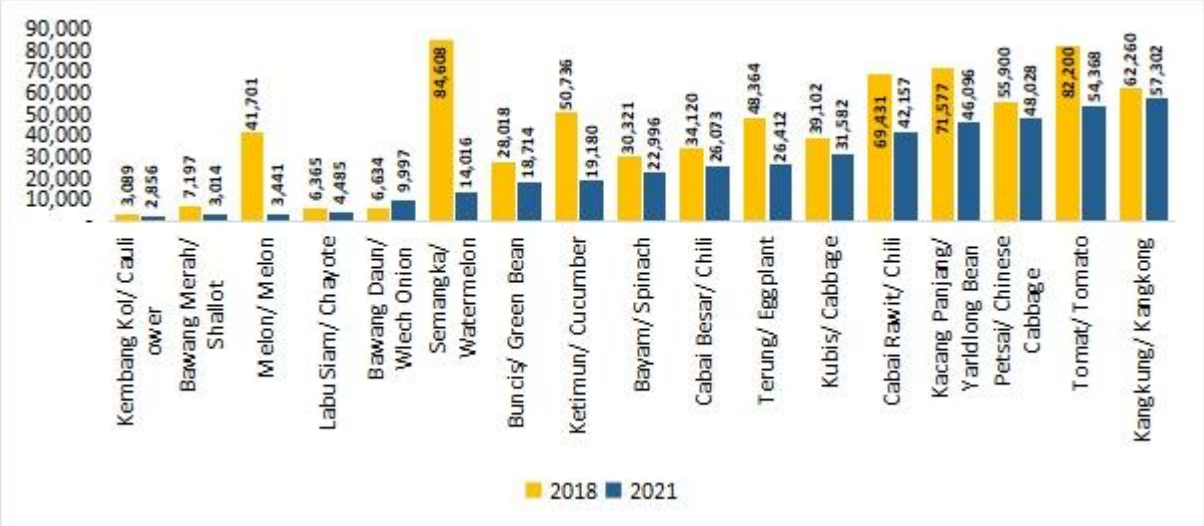

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2022

Untuk sub sektor perkebunan, beberapa komoditas unggulan Provinsi

Papua adalah Sagu, Kelapa Dalam, Kakao, Sawit, Kopi dan Pinang. Komoditas sagu dengan. Produksi tertinggi, selanjutnya Kelapa Dalam dan Kakao.

Gambar 3.7 Produksi Tanaman Holtikultura Provinsi Papua tahun 2018 & 2021

Gambar..... Produksi Komoditi Perkebunan (ton) Tahun 2019 dan 2021

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

Secara umum produktivitas tanaman perkebunan yang ada di Provinsi Papua masih di bawah 60 persen, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Penggunaan bibit/benih yang berasal dari benih asalan (tidak bersertifikat) menyebabkan produksi secara jangka panjang berkurang.
2. Tingginya intensitas serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).
3. Rendahnya kemampuan dan pengetahuan petani dalam penerapan sistem budidaya yang baik.
4. Usia tanaman yang melewati batas usia produktif.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalah di atas adalah:

1. Melakukan penendalian secara terintegrasi dan terpadu melalui gerakan massal pengendalian hama dan penyakit.
2. Pelatihan dan pembinaan petani melalui sekolah lapang pengendalian

hama terpadu (SL-PHT), Bintek dan pelatihan.

Indikator kinerja **Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB** dapat dilihat dari produksi daging ternak besar, produksi daging ternak kecil dan produksi daging unggas. Untuk tahun 2022 produksi daging ternak besar mengalami peningkatan khususnya sapi potong sebesar 125.101 Kg dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 121.210 Kg.

Grafik 3.8 Jumlah Produksi Daging (Kg)

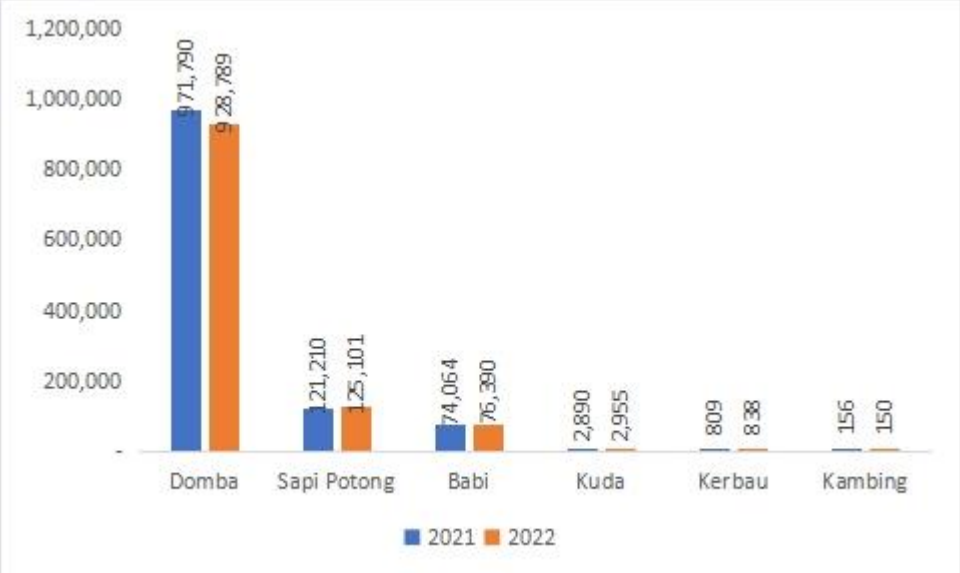

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2023 (diolah)

Grafik 3.9 Jumlah Produksi Daging Unggas (Kg)

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2021 (diolah)

Dalam menunjang capaian output indikator kinerja tahun 2022 dilakukan kegiatan pasar murah, dan penguatan kelembagaan pelaku usaha peternakan. memang dilihat bahwa pada tahun 2022 investasi sub sektor peternakan masih sangat terbatas untuk itu perlu diambil langkah-langkah strategis dalam menumbuhkan investasi peternakan di Provinsi Papua juga melakukan pembinaan dan penerapan teknologi yang dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil produk peternakan.

Sasaran 13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim"** sebesar **73.45 persen** dengan predikat **"Cukup Berhasil",** dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.45 Indikator Kinerja Sasaran 13

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	94.3	95.32	103.89
2.	Indeks Kualitas Air	Indeks	79.5	55.07	70.60
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	83.8	100.00	119.33
4.	Intensitas Penurunan Emisi	Ton CO2 eq /juta Rp	55265.4	N/A	N/A
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					**73.45**

Rata-rata capaian ini 73.45% lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 119.83 % Tahun 2021 dan tahun 2020 yaitu 82.915% dan tahun 2019 43.75%. Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2019-2022 sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

Tabel 3.46 Indikator Kinerja Sasaran 13 untuk Tahun 2019-2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN											
			2019			2020			2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,3	N/A	0	92,9	90	97,82	93,62	94.02	100,43	94.3	95.32	103.89
2.	Indeks Kualitas Air	Indeks	78,2	N/A	0	78,7	77	97,84	79,10	90	113,78	79.5	55.07	70.60
3.	Indeks Kualitas tutupan Lahan	Indeks	80,4	92,64	115	81,5	111	136	82,7	111	134	83.8	100.00	119.33
4	Intensitas Penurunan Emisi	Ton CO2 eq/juta Rp	0,39	0,65	60	0,37	N/A	0	0,343	0,449	130	55265.4	N/A	N/A
	Capaian Indikator kinerja				**43.75**			**82.915**			**119.83**			**73.45**

Sasaran "meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim" diukur dengan 4 (empat) Indikator yaitu :

Analisis Indeks Kualitas Udara

Pada tahun 2022 terdapat peningkatan kinerja yang signfikan untuk Indeks Kualitas Udara dibandingkan tahun 2022, bahkan melewati target yaitu 103,89%, dimana indeks kualitas udara yang dicapai sebesar 95,32 dari target 94,3

Pencapaian ini dicapai karena Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah melaksanakan program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut, termasuk peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota.

Analisis Indeks Indeks Kualitas Air

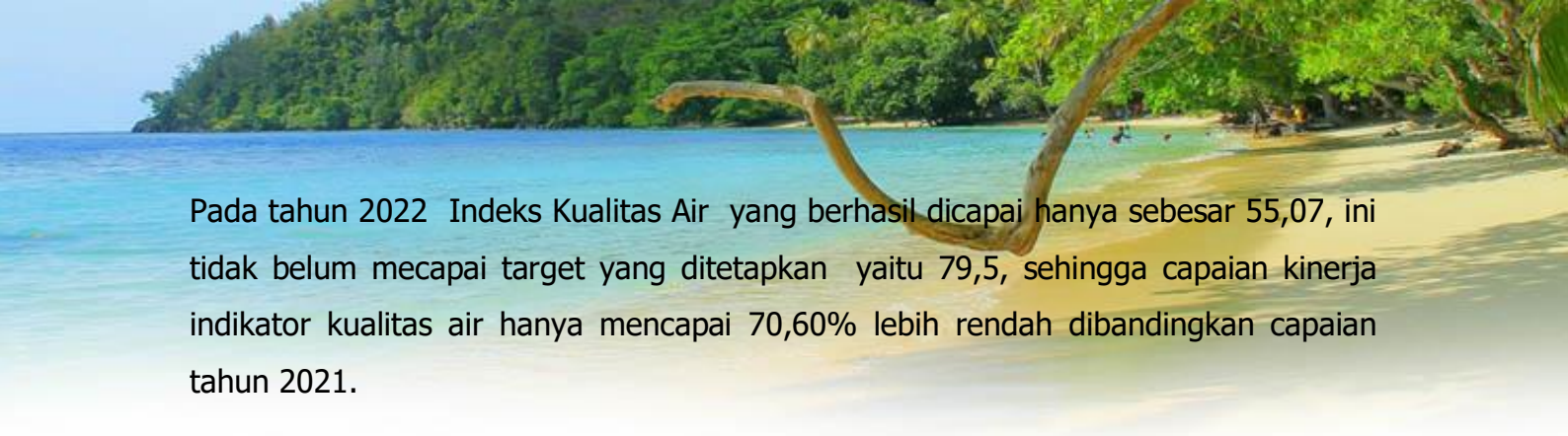

Pada tahun 2022 Indeks Kualitas Air yang berhasil dicapai hanya sebesar 55,07, ini tidak belum mecapai target yang ditetapkan yaitu 79,5, sehingga capaian kinerja indikator kualitas air hanya mencapai 70,60% lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2021.

Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, namun pencapaian kinerja ini telah dicapai oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup melalui program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut.

Analisis Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Pada tahun 2022 Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Provinsi Papua mengalami pencapaian kinerja sebesar 119,33%, melebihi target yang ditetapkan. Pencapaian sasaran ini dicapai melalui program Pengelolaan Hutan yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari :

- Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan, Fungsi dan Peruntukan Hutan.
- Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Sub Kegiatan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua 18 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
- Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi, Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfatan Hutan di KPH
- Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

Operasionalisasi KPH

Analisis Intensitas Penurunan Emisi

Data capaian intensitas penurunan emisi Provinsi Papua tahun 2022 belum tersedia, karena saat penyusunan LKj, perhitungan data ini masih diprosesn dalam sistem pelaporan pembangunan rendah karbon nasional. Data ini diolah berdasarkan inputan data SKPD terkait untuk pelaporan aksi mitigasi yang dilakukan untuk penurunan emisi oleh SKPD terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk sektor lahan dan persampahan, Dinas Perhubungan untuk sektor transportasi, Dinas PUPR untuk sektor limbah dan Dinas ESDM untuk sekor energi.

Sasaran 14	**Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumber daya secara berkelanjutan.**

Sasaran Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan daerah yaitu Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan yang selanjutnya akan mendukungv pencapaian **Misi Keempat, Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural Secara Berkelanjutan.**

Indikator untuk mengukur pencapaian sasaran Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan dengan indikator “Kontribusi Sub Sektor perikanan Terhadap PDRB”.

Tabel 3.47 Indikator Kinerja Sasaran 14

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun										
		2019			2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Kontribusi sub Sektor perikanan Terhadap PDRB	%	8,27	8,00	96,69	7,37	5,07	68,79	8,67	4,50	51,90	10,20	4,36	42,75

Sumber : BPS, 2023, (diolah)

Indikator kinerja **Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB** ditargetkan 10,20 persen dan terealisasi 4,36 persen dengan capaian kinerja 42,75 persen pada tahun 2022. Lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun 2021 yang mencapai 51,90 persen dan tahun 2020 mencapai 68,79 persen. Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan kontribusi, di tahun 2019 kontribusi mencapai sebesar 6,0 persen, mengalami penurunan di tahun 2020 dengan kontribusi 5,07 persen, tahun 2021 menurun 4,50 persen dan tahun 2022 hanya mencapai 4,38 persen. Hal ini menandakan bahwa Sub Sektor Perikanan diperlukan kebijakan dan dukungan dari SKPD terkait dalam mendorong peningkatan produksi perikanan yang merupakan salah satu potensi unggulan Provinsi Papua dalam menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya OAP.

Grafik 3.10 Produksi Perikanan Budidaya
Provinsi Papua tahun 2019 & 2021 (Volume dan Nilai)

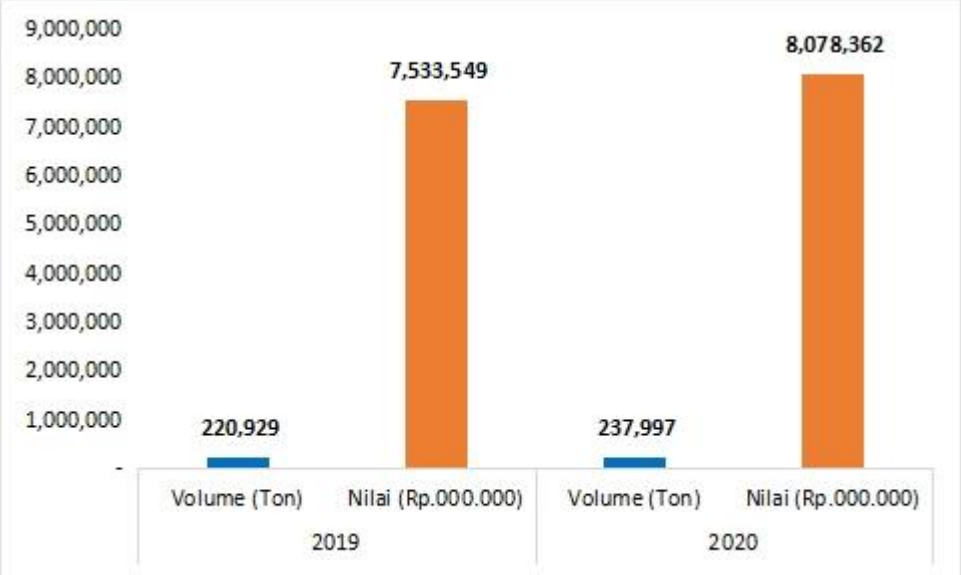

Sumber : BPS, 2021(diolah)

Sasaran 15	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja yang mencari pekerjaan atau sebuah keadaan yang memperlihatkan jumlah lapangan kerja yang masih kosong dan siap diisi para pencari kerja. Adapun angkatan kerja adalah sebagian penduduk atau mereka yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan, pengangguran ataupun mereka yang sewaktu-waktu siap untuk bekerja (biasanya 15 Tahun keatas).

Faktor – Faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja adalah :

1. Adanya kesempatan kerja yang tersedia (demand for labor)
2. Tingkat pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan
3. Usia tenaga kerja dan jumlah angkatan kerja yang tersedia
4. Jumlah permintaan total masyarakat
5. Jumlah investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta
6. Kebijakan pajak dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan
7. Ekspor impor

Terbukanya kesempatan kerja merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunann ekonomi. Jika ketersediaan kesempatann kerja tidak seimbang dengan peningkatan penduduk usia kerja maka akan menimbulkan permasalahan yang disebut pengangguran.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja”** sebesar **99,09 persen** dengan predikat **“Sangat Berhasil”,** dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.48 Indikator Kinerja Sasaran 15

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1.	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	98.09	97.20	99.09
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					**99.09**

Selanjutnya ditampilkan perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja selama 3 (tiga) tahun, yaitu Tahun 2020 sampai dengan 2022 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.49 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2020 - 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun								
		2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Tingkat Kesempatan Kerja	Tahun	97,59	95,60	97,96	97.84	96.6	98.73	98.09	97.20	99.09

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat kesempatan kerja pada tahun 2020 sebesar 95.60% dari target 97.59% dengan capaian kinerja 97.96% dimana Jumlah angkatan kerja di Papua pada tahun 2020 mencapai 1.76 juta jiwa, lebih sedikit jika dibandingkan kondisi Tahun 2019 yang mencapai 1.85 juta jiwa. Sedangkan penduduk yang bekerja di Papua pada Tahun 2020 mencapai 1.69 juta jiwa. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 96.6% dengan capaian kinerja 98.73%. Data menunjukkan penduduk usia kerja di Provinsi Papua Tahun 2021 sebanyak 2,49 juta jiwa dengan jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua pada Tahun 2021 sebanyak 1,95 juta jiwa (78,29%) sedangkan jumlah penduduk bekerja di Provinsi Papua Tahun 2021 sebanyak 1,88 juta jiwa yang didominasi oleh laki-laki (58,37 persen). Selanjutnya pada Tahun 2022 tingkat kesempatan kerja naik menjadi 97.20% dari target sebesar 98.09% dengan capaian kinerja sebesar 99.09% yang mana jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Papua Tahun 2022 sebanyak 2,56 juta jiwa, kondisi ini lebih banyak dibandingkan dengan Agustus 2021 dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 1.99 juta jiwa (77,75%).

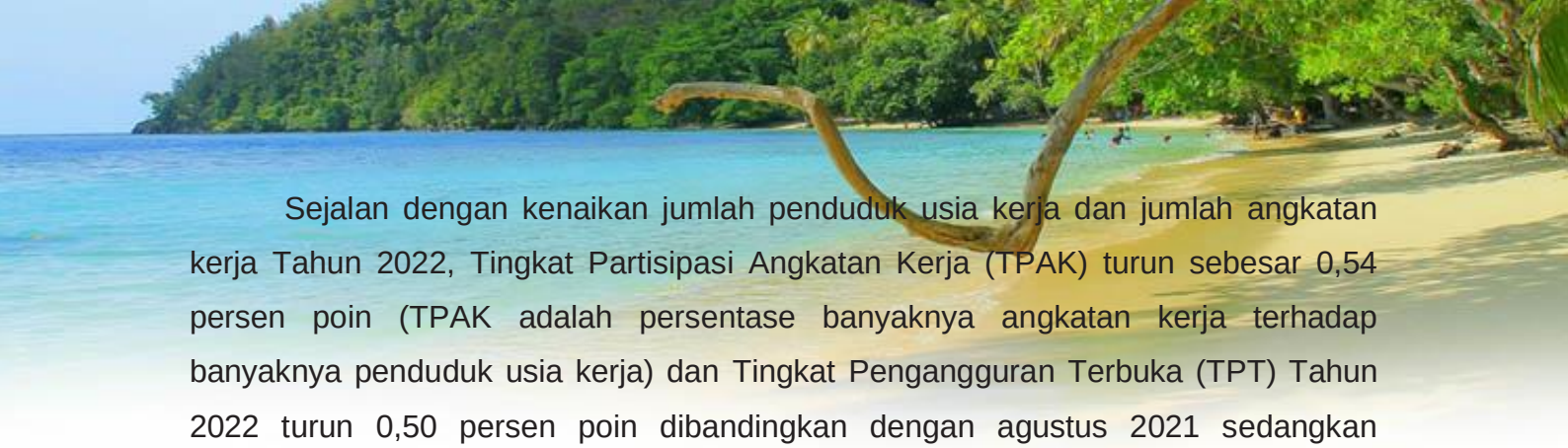

Sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk usia kerja dan jumlah angkatan kerja Tahun 2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,54 persen poin (TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2022 turun 0,50 persen poin dibandingkan dengan agustus 2021 sedangkan Penduduk yang bekerja sebanyak 1,93 juta jiwa, meningkat sekitar 47 ribu orang dari agustus 2021.

Tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 71,49 persen, Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,78 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,68 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2021. Dibandingkan Agustus 2021, hanya lima lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada lapangan pekerjaan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (97,04 ribu orang). Sementara sebagian besar lapangan pekerjaan lainnya mengalami penurunan jumlah penduduk bekerja, dengan penurunan terbesar pada lapangan pekerjaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 26,37 ribu orang.

Sasaran 16	Meningkatnya Daya Saing dan Realisasi Investasi pada Sektor-Sektor Andalan Daerah

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah"** sebesar **8,05 persen** dengan predikat **"tidak berhasil"**, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.50 Indikator Kinerja Sasaran 16

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1.	Jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang direalisasikan	Rupiah (Triliun)	62,67	9,41	15,02
2	Jumlah nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang direalisasikan	Rupiah (Triliun)	90,63	0,98	1,08
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					**8,05**

Selanjutnya ditampilkan perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja selama 4 (empat) tahun, yaitu Tahun 2019 sampai dengan 2022 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.51 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2019 - 2022

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun											
			2019			2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang direalisasikan	Rupiah (Triliun)	56,36	42,45	75,32	58,39	1,13	1,94	60.49	3,34	5,52	62,67	9,41	15,02
2	Jumlah nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang direalisasikan	Rupiah (Triliun)	77,65	503,64	648,6	81,75	1,53	1,87	86.08	2,00	2,32	90,63	0,98	1,08
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran				**361,96**			**1,90**			**3,92**			**8,05**

Dari data diatas menunjukkan bahwa Indikator pertama yaitu **jumlah nilai investasi PMDN** tahun 2022 dengan **target** sebanyak **62,67 triliun** dan realisasi sebanyak **9,41 triliun** sehingga **tercapai kinerja** sebanyak **15,02 persen**, hal ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat rendah, namun apabila dibandingkan dengan capaian kinerja nilai investasi PMDN tahun 2021 dengan target sebanyak 60,49 triliun dan realisasi sebanyak **3,34** triliun dengan capaian kinerja sebesar **5,52** persen sehingga mengalami peningkatan capaian kinerja sebanyak **9,50** persen.

Kemudian untuk Indikator yang kedua yaitu **jumlah nilai investasi PMA** tahun 2022 dengan **target** sebanyak **90,63 triliun** dan **realisasi** sebanyak **0,98 triliun** dengan capaian kinerja sebanyak **1,08 persen**, hal ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat rendah, dan bila dibandingkan dengan capaian kinerja jumlah nilai investasi PMA tahun 2021 dengan target sebanyak 86,08 triliun dan realisasi sebanyak 2,00 triliun dengan capaian kinerja sebanyak 2,32 persen, mengalami penurunan sebesar 1,24 persen capaian kinerja.

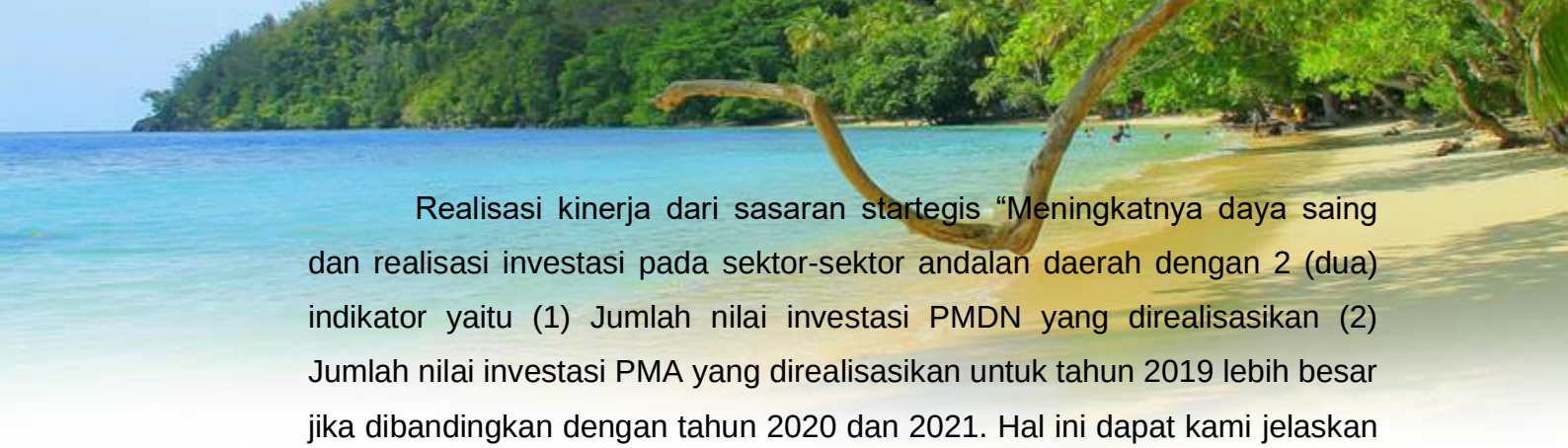

Realisasi kinerja dari sasaran startegis “Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah dengan 2 (dua) indikator yaitu (1) Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan (2) Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan untuk tahun 2019 lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Yang menjadi acuan dalam pencapaian IKU SKPD dan penyusunan LKJ adalah berdasarkan data yang diberikan oleh Bidang Pengendalian Penanaman Modal.
2. Target kinerja dalam IKU SKPD terlalu besar sehingga capaian kinerja menjadi sangat kecil.
3. Terjadinya penurunan dan peningkatan realisasi nilai investasi disebabkan :
    a. Terjadi kenaikan apabila pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan perusahaan PMA dan PMDN dilakukan secara optimal.
    b. Terjadi penurunan apabila dilakukan pencabutan Surat Persetujuan baik PMA maupun PMDN yang menyebabkan jumlah perusahaan PMA atau PMDN berkurang.
    c. Perusahaan PMA dan PMDN lalai dalam penyampaian LKPM.

Berikut adalah perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.52 Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN yang merealisasikan kegiatannya pada Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1.	Jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang merealisasikan kegiatan-nya	perusahaan	25	22	14	22	25

Salah satu pendukung terjadinya peningkatan nilai investasi PMA dan PMDN adalah perizinan diperlukan bagi calon investor untuk dapat memulai usahanya di Indonesia. Pemerintah telah memastikan bahwa perizinan usaha bisa didapatkan dengan mudah oleh pelaku usaha. Pelaku usaha merupakan perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu yang proses penerbitannya dilaksanakan oleh pelayanan terpadu satu pintu dalam hal ini pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Manajemen PTSP meliputi, pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi.

Proses penerbitan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah terlaksanan dengan baik, karena pengurusan perizinan dan non perizinan ditempuh dalam 5 (lima) hari setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap. Lama hari pengurusan ijin investasi tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.53 : Indikator kinerja Lama hari pengurusan ijin investasi Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Data Awal Tahun 2021	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%
Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	Lama hari pengurusan ijin investasi	5 hari	5 hari	5 hari	100

Indikator kinerja lama hari pengurusan ijin investasi yaitu 5 (lima) hari proses penerbitan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan di DPMPTSP Provinsi Papua setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap. Adapun kondisi awal tahun 2021 lama hari pengurusan ijin investasi yaitu 5 (lima) hari dan masih tetap 5 (lima) hari tahun 2022 atau sesuai target kinerja pada tahun 2022.

Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.54 : Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan DPMPTSP Provinsi Papua Tahun 2019-2022

No.	Bidang Usaha/Sektor	Jumlah Izin dan Nonizin		
		T a h u n		
		2020	2021	2022
1.	Perencanaan dan Pengembangan Daerah	-	-	-
2.	Penanaman Modal	11	-	
3.	Kesehatan	27	15	-
4.	Bina Marga	-	-	-
5.	Pengairan	-	7	2
6.	Perhubungan	30	27	16
7.	Sosial	-	-	-
8.	Tenaga Kerja	6	-	-
9.	Koperasi dan UMKM	-	-	-
10.	Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-
11.	Pertanian	-	1	-
12.	Perkebunan	-	-	-
13.	Peternakan	-	-	-
14.	Perikanan dan Kelautan	198	280	432
15.	Energi dan Sumber Daya Mineral	143	100	141
16.	Perindustrian dan Perdagangan)	1	3	1
17.	Pendidikan	-	6	14
18.	Kehutanan	89	103	1.232
19.	Lingkungan Hidup	26	-	-
20.	Penelitian dan Pengembangan	1	-	-
	Jumlah	**506**	**542**	**1.838**

Sasaran 17	**Meningkatnya Akses Transportasi Berbasis Antar Moda Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Wilayah/Daerah Dan Akses Bagi Seluruh Wilayah.**

Capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah"** adalah **149,34** persen atau dalam skala ordinal adalah **"Sangat Berhasil".** Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap.

Perbandingan Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja, diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.55 Indikator Kinerja Sasaran 17

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TAHUN											
			2019			*2020*			*2021*			*2022*		
			T	R	CK	T	R	CK	T	R	CK	T	R	CK
1	Persentase panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persen	32,00	53,19	166,22	40,00	53,69	134,23	45,00	60,37	134,15	50,00	74,67	149,34
Capaian Kinerja Sasaran					166,22			134,23			134,15			149,34

Indikator kinerja persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap diperoleh dengan cara membandingkan antara panjang jalan provinsi dalam kondisi baik dengan total panjang jalan provinsi. Panjang jalan provinsi sesuai SK Gubernur Papua Nomor 188.4/368/Tahun 2016 adalah 2.361,76 km. Data dari Dinas PUPRPKP untuk panjang jalan provinsi dalam kondisi baik tahun 2022 adalah 1.763,50 km, meningkat signifikan sepanjang 337,67 km dari panjang jalan kondisi baik di tahun 2021 yaitu 1.425,83.

Panjang jalan di Provinsi Papua terdiri dari 1.763,50 km dalam kondisi baik dan 890,93 km dalam kondisi rusak.

Dinas PUPRPKP Provinsi Papua dalam upayanya meningkatkan akses transportasi di seluruh wilayah Provinsi Papua, pada tahun 2022 melaksanakan program penyelenggaraan jalan provinsi yang diimplementasikan dengan beberapa kegiatan yaitu:

1. Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
2. Pembebasan Lahan Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan;
3. Pembangunan Jalan;
4. Rekonstruksi Jalan; dan
5. Rehabilitasi Jalan.

Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah dengan pagu anggaran Rp1.874.362.214.274,00 dan terealisasi Rp1.697.555.704.337,34 atau 90,57 persen.

Indikator kinerja persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap dengan target tahun 2022 sebesar 50 persen terealisasi 74,67 persen dengan capaian kinerja indikator sebesar 149,34 persen. Capaian indikator kinerja tahun 2022 meningkat tipis yaitu 15,19 persen dibanding tahun 2021 sebesar 134,15 persen.

Jalan sebagai salah satu akses penting dalam dunia transportasi dan mendukung pengembangan wilayah yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian suatu wilayah selayaknya mendapatkan perhatian tinggi oleh pemerintah dalam rangka pembangunan dan pemeliharaannya.

Tahun 2022, Dinas PUPRPKP memperoleh dana dari pemerintah pusat melalui Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp2,097,859,366,000,00, dan Dana ALokasi Khusus (DAK) sebesar Rp104,513,700,000,00. Dana tersebut diperuntukkan bagi pengembangan infrastruktur termasuk infrastruktur jalan.

Perkembangan kondisi jalan menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut : sampai dengan tahun 2022 panjang jalan provinsi masih mengacu pada SK Gubernur Papua Nomor 188.4/368/Tahun 2016 yaitu 2.361,76 km dengan panjang jalan dengan kondisi baik sepanjang 1.763,50 km dan kondisi rusak 890,93 km, kemudian pada tahun 2021 total panjang jalan provinsi adalah 2.361,76 km dengan panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap sepanjang 1.425,83 km, pada tahun 2020 total panjang jalan provinsi adalah 2.361.76 km terdiri dari jalan dengan kondisi mantap 1.267.98 km, pada tahun 2019 total panjang jalan provinsi adalah 2.361.76 km sedangkan panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap adalah 1.256.18 km, tahun 2018 total panjang jalan provinsi adalah 2.361.76 km dan panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap adalah 883,04 km sedangkan pada tahun 2017 panjang jalan provinsi kondisi mantap adalah 1.111,47 km. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap yaitu pada tahun 2022 sepanjang 1.763,50 km bertambah 337,67 km dibanding tahun 2021, pada tahun 2021 bertambah 157,85 km dibanding panjang jalan provinsi tahun 2020, kemudian tahun 2020 dibanding tahun 2019 bertambah 11,80 km, tahun 2019 dibanding tahun 2018 yaitu bertambah 373,14 km, tahun 2018 dibanding tahun 2017 yaitu berkurang sebanyak 228,04 km. Ini terjadi karena adanya perubahan pada penetapan ruas jalan provinsi sesuai Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/368/Tahun 2016 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi.

Apabila dilihat dari data di atas, maka panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap untuk tahun 2022 mengalami peningkatan sepanjang 337,67 km dibanding tahun 2021. Capaian kinerja tahun 2022 meningkat 15,12 persen dibanding tahun 2021. Peningkatan capaian target disebabkan pemerintah Provinsi Papua semakin fokus dalam upaya meningkatkan aksesibilitas wilayah dengan tujuan meningkatkan kemudahan transportasi guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jalan sebagai salah satu infrastruktur penting yang menghubungkan wilayah satu dengan lainnya di Provinsi Papua memerlukan pemeliharaan yang terus menerus serta peningkatan jalan untuk menjaga kondisi jalan agar tetap dalam kondisi baik sehingga aman dalam penggunaannya. Dinas Pekerjaan

Umum sebagai instansi teknis pengelola infrastruktur pada tahun 2022 telah melaksanakan pemeliharaan jalan yang ada di seluruh wilayah Provinsi Papua.

Perkembangan jalan dalam kondisi mantap hingga tahun 2022 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.56 Perkembangan Jalan dalam Kondisi Mantap

Tahun 2015-2022

Uraian	Tahun (km)							
	s/d 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan kondisi Mantap	969,33	1.004,68	1.111,47	883,04	1.256.18	1.267.98	1.425,83	1.763,50

Data panjang jalan provinsi bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dalam Laporan Kinerja tahun 2022 dan tahun sebelumnya.

Sasaran 18	**Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten.**

Salah satu orientasi pembangunan Provinsi Papua ialah orientasi **Pemerataan, Keadilan dan Pembangunan Kewilayahan.** Orientasi ini dimaksudkan bahwa Penyediaan Infrastruktur wilayah diarahkan pada menghilangkan ketimpangan antar wilayah dengan menerapkan prinsip keadilan pembangunan antar wilayah dimana Pengembangan wilayah dan penyediaan infrastruktur ditujukan untuk pelayanan kemandirian kampung dan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Provinsi Papua. Oleh karena itu salah satu Sasaran Pembangunan Provinsi Papua adalah Implementasi Tata Ruang secara Konsisten, yang diukur dengan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.

Tabel 3.57 Indikator Kinerja Sasaran 18

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2019			2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Prosentase Pemanfaatan Ruang	%	30,00	85,00	283,33	35,00	98,00	280,00	40,00	97,86	244,65	45,00	98,18	218,18

Sumber : Bappeda Provinsi Papua, 2023 (diolah)

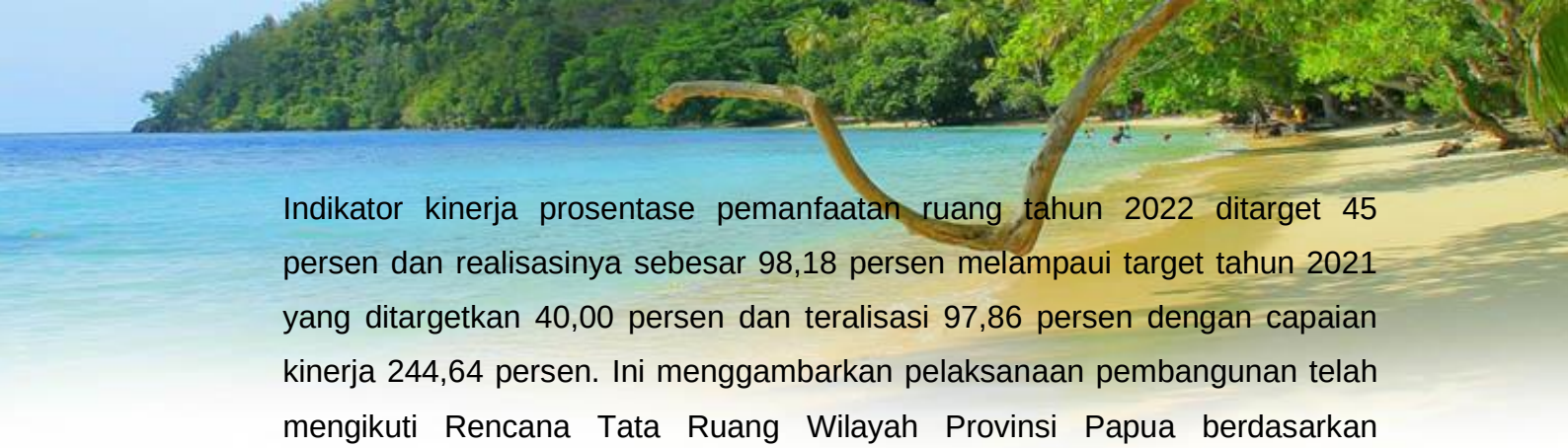

Indikator kinerja prosentase pemanfaatan ruang tahun 2022 ditarget 45 persen dan realisasinya sebesar 98,18 persen melampaui target tahun 2021 yang ditargetkan 40,00 persen dan teralisasi 97,86 persen dengan capaian kinerja 244,64 persen. Ini menggambarkan pelaksanaan pembangunan telah mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 23 tahun 2013.

Di tahun 2022 Pemerintah Provinsi telah melaksanakan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033, hal ini dilakukan karena adanya dinamika pemekaran wilayah menjadi 3 (tiga) Daerah Otonomi Baru. Diharapkan penetapan RTRW Provinsi Papua menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua ditargetkan tahun 2023 dan diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Sasaran 19	Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktifitas wilayah

Capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktifitas wilayah"** sebesar **100,00** persen dengan predikat **"sangat berhasil"**, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran persentase pemanfaatan sumber daya air. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaian indikator kinerjanya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.58 Indikator Kinerja Sasaran 19

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TAHUN											
			2019			*2020*			*2021*			*2022*		
			T	R	CK	T	R	CK	T	R	CK	T	R	CK
1	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	persen	60,00	100	166,67	65,00	100	153,85	70,00	75,00	107,14	75,00	75,00	100,00
Capaian Kinerja Sasaran					5,44			153,85			107,14			100,00

Capaian kinerja persentase pemanfaatan sumberdaya air sebesar 100,00 diperoleh dari jumlah sumber daya air yang termanfaatkan sebesar 75 persen (sebesar 75 ltr/dtk sesuai rencana di tahun 2022) dibagi target yang ditetapkan yaitu sebesar 75 persen. Pada tahun 2022, panjang jaringan irigasi di wilayah Provinsi Papua yang berfungsi baik sebesar 67,50 % atau sama dengan 8.697,21 m2 dari total panjang jaringan irigasi yaitu 12.884,76 m2.

Capaian kinerja tahun 2022 menurun dibanding tahun 2021, dimana pada tahun 2022 capaian kinerja 100 persen sedangkan tahun 2021 mencapai 107,14 persen. Hal ini disebabkan adanya peningkatan target kinerja di tahun 2022. Target kinerja tahun 2022 dinaikkan menjadi 75 persen dari target 2021 yaitu 70 persen atau naik 5 persen. Peningkatan target capaian kinerja dilakukan berdasarkan evaluasi capaian kinerja tahun 2021 yang mencapai 107,14 persen, sehingga melampaui target yang ditetapkan.

Tahun 2022, Dinas PUPRPKP menangani daerah abrasi sebanyak 93,67 persen, sama dengan penanganan abrasi pada tahun 2021 karena tahun 2022 tidak ada kegiatan penanganan. Demikian juga dengan perlindungan kawasan dari bahaya banjir, untuk tahun 2022 luasan kawasan yang dilindungi dari bencana banjir sama dengan tahun 2021 yaitu sebesar 81,27 persen atau sama dengan 3.571,00 m2 dikarenakan pada Tahun 2022 tidak ada kegiatan penanganan.

Dinas PUPRPKP Provinsi Papua pada tahun 2022 melaksanakan program/kegiatan dalam upaya memenuhi target dari sasaran meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktifitas wilayah, yaitu program Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatannya yaitu Normalisasi Restorasi Sungai. Anggaran pelaksanaan program sebesar Rp38.153.761.792,00 dan realisasi sebesar Rp37.427.536.672,68 atau 98,10 persen. Selain itu dilaksanakan juga program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha – 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan berupa Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa dan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa dengan anggaran Rp13.295.435.000,00 dan realisasi Rp12.911.006.899,79 atau 97,11 persen.

Sumber daya air yang banyak dimanfaatkan di Provinsi Papua adalah irigasi. Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dan dimanfaatkan serta berfungsi dengan baik hingga tahun 2022 adalah sebesar 67,50 % atau sama dengan 8.697,21 m2 dari total jaringan irigasi di wilayah Provinsi Papua sepanjang 12.885,76 m2. Sebagai perbandingan, pada tahun 2021 panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik adalah 7.255,3 m2.

Dari panjang jaringan irigasi tersebut, jumlah sumber daya air yang dapat dimanfaatkan adalah 100 persen atau dimanfaatkan seluruhnya dengan debit air 75 ltr/dtk.

Realisasi jaringan irigasi diwilayah Provinsi Papua sebesar 100 persen dengan capaian kinerja **100,00** persen dengan kategori **sangat berhasil.** Pemerintah Provinsi Papua memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap ketahanan pangan yang menjadi program pemerintah Republik Indonesia untuk swasembada pangan, sehingga untuk meningkatkan hal tersebut diusahakan peningkatan pelayanan irigasi untuk mengaliri sawah.

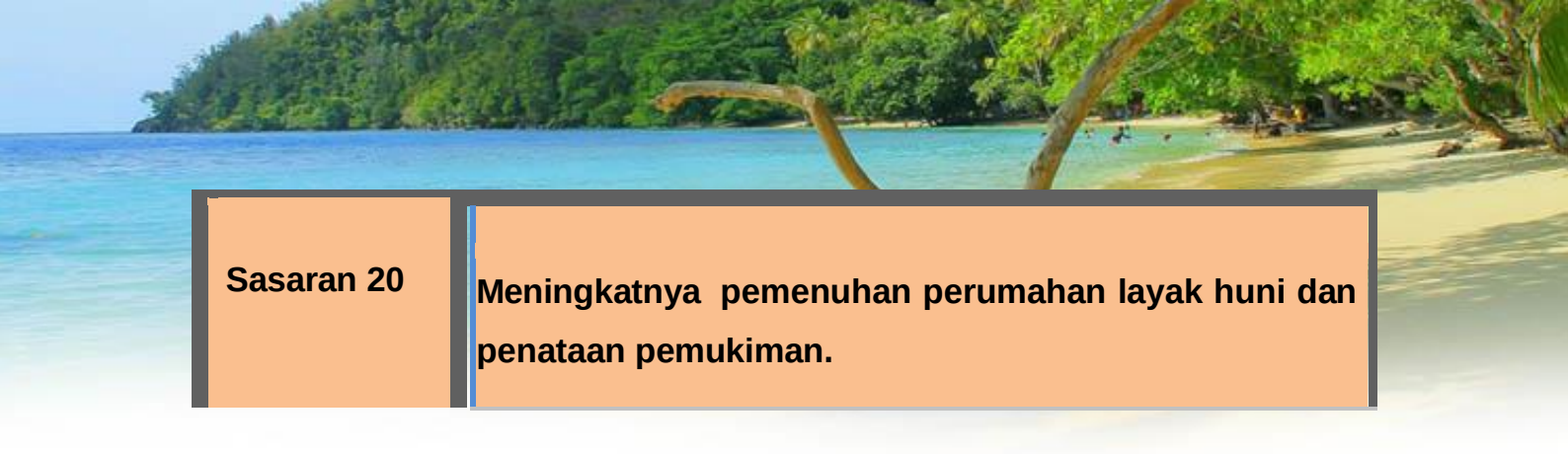

Sasaran 20	Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman.

Sasaran strategis **Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman** didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik dan Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman"** adalah 144,28 persen dengan predikat **"sangat berhasil"**.

Tabel 3.59 Indikator Kinerja Sasaran 20

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TAHUN											
			2019			*2020*			*2021*			*2022*		
			T	R	CK	T	R	CK	T	R	CK	T	R	CK
1	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	35,22	35,02	99,43	35,36	33,09	91,01	37,54	40,31	107,3	38,75	33,09	85,30
2.	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	persen	40.61	31.82	78,36	41,72	100	239,69	42,87	100	233,26	44,04	65,26	148,18
Capaian Kinerja Sasaran					88,895			165,35			170,28			116,74

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman tahun 2022 sebesar 144,28 persen diperoleh dari capaian individu indikator kinerja Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua dengan capaian kinerja sebesar 85,30 persen dan Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua dengan capaian kinerja sebesar 116,74 persen.

Secara individu, capaian kinerja indikator yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut:

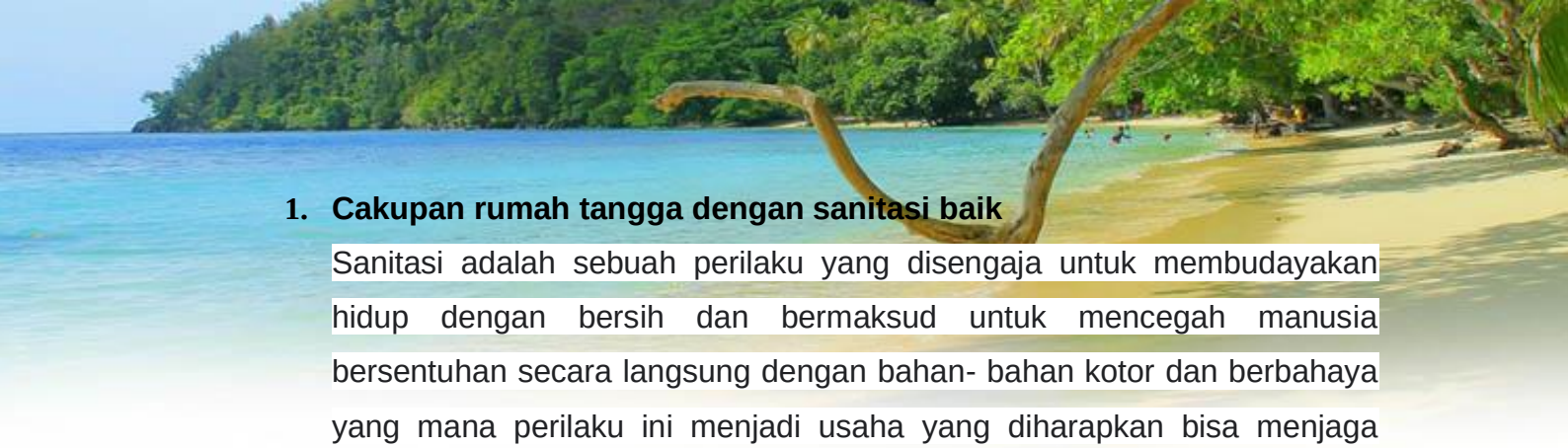

1. **Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik**

Sanitasi adalah sebuah perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup dengan bersih dan bermaksud untuk mencegah manusia bersentuhan secara langsung dengan bahan- bahan kotor dan berbahaya yang mana perilaku ini menjadi usaha yang diharapkan bisa menjaga serta meningkatkan kesehatan manusia.

Sanitasi menjadi salah satu indikator kinerja utama Gubernur Papua karena sanitasi sangat penting dalam membangun masyarakat yang sehat, masyarakat yang sehat akan mendukung keberhasilan pembangunan suatu wilayah menuju kemajuan dan kesejahteraan.

Indikator kinerja cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

Capaian kinerja indikator Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik untuk tahun 2022 adalah **85,30 persen** dengan predikat **berhasil** diperoleh dari realisasi 33,09 persen dibagi dengan target yang ditetapkan yaitu 38,75 persen.

Kota Jayapura sebagai wilayah terdekat dengan pusat pemerintahan Provinsi Papua dan sebagai ibukota provinsi memiliki cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik mencapai 56,09 persen yaitu dari target yang ditetapkan sebanyak 103,020 rumah tangga dan terealisasi 58,709 rumah tangga. Capaian ini tertinggi dibanding wilayah lain di Provinsi Papua.

Data realisasi cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik pada 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.60

Cakupan Rumah Tangga dengan Sanitasi Baik di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Dengan Cakupan Sanitasi Baik		
		Penduduk menggunakan jamban sesuai syarat kesehatan	Penduduk yang menjadi target	Persentase
1	2	3	4	5
1.	Merauke	32.848	57.428	57.20
2.	Jayawijaya	1.821	15.882	11.47
3.	Jayapura	24.938	38.390	64.96
4.	Nabire	13.030	33.491	38.91
5.	Kepulauan Yapen	4.143	14.690	28.20
6.	Biak Numfor	18.501	29.891	61.89
7.	Paniai	5.305	43.309	12.25
8.	Puncak Jaya	335	1.172	28.58
9.	Mimika	18.373	55.673	33.00
10.	Boven Digoel	2.921	12.212	23.92
11.	Mappi	1.275	29.653	4.30
12.	Asmat	4.593	23.894	19.22
13.	Yahukimo	42	10.456	0.4
14.	Peg. Bintang	853	4.958	17.2
15.	Tolikara	1.630	29.264	5.57
16.	Sarmi	4.556	7.232	63.00
17.	Keerom	6.461	14.016	46.1
18.	Waropen	1.735	6.284	27.61
19.	Supiori	2.331	3.934	59.25
20.	Mamberamo Raya	1.186	5.925	20.02
21.	Nduga	197	1.820	10.82
22.	Lanny Jaya	1.044	30.791	3.39

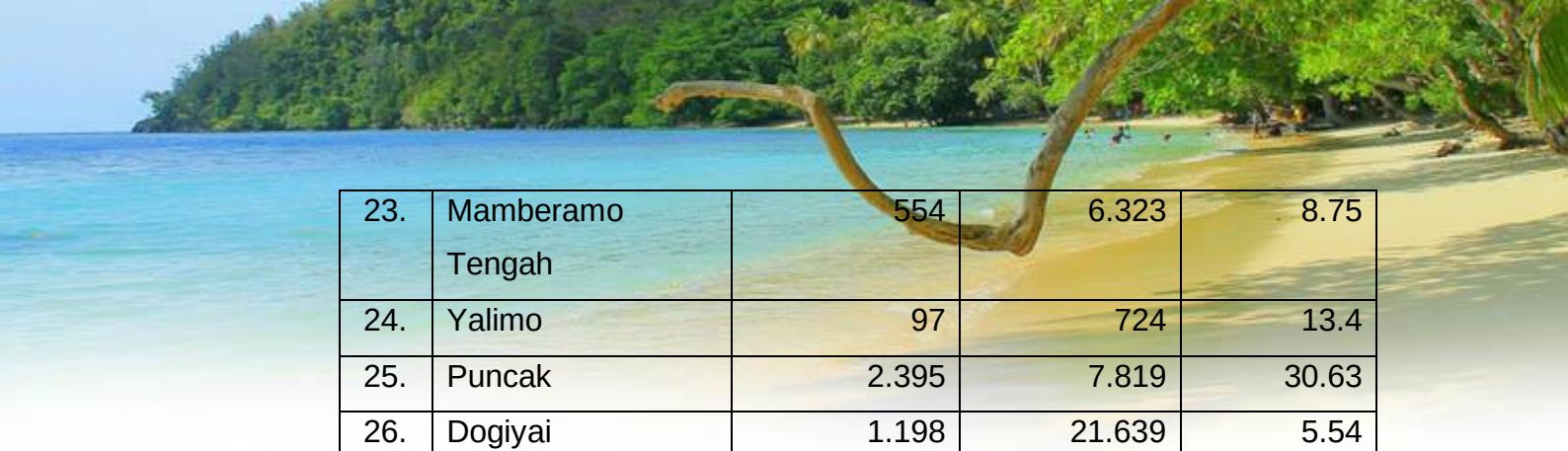

23.	Mamberamo Tengah	554	6.323	8.75
24.	Yalimo	97	724	13.4
25.	Puncak	2.395	7.819	30.63
26.	Dogiyai	1.198	21.639	5.54
27.	Intan Jaya	454	22.704	2
28.	Deiyai	403	7.925	5.09
29.	Kota Jayapura	59.709	103.020	56.99
Jumlah		**211.928**	**640.519**	**33.09**

Sumber data : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua TA. 2022

Realisasi kinerja indikator Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik sebagaimana data pada tabel di atas adalah 33,09 persen, sementara target yang ditetapkan adalah 38,75 persen sehingga capaian kinerja indikator ini untuk tahun 2022 adalah 85,30 persen.

Indikator kinerja ini tidak tercapai 100 persen disebabkan kurangnya fasilitas, sarana prasarana sanitasi yang belum terstandar, dan juga layanan fasilitas umum dan fasilitas pemukiman yang belum memenuhi standar.

Capaian indikator Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik tahun 2022 menurun secara signifikan dibanding tahun 2021 dan 2020. Tahun 2021 capaian indikator cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik adalah sebesar 107,30 persen dan tahun 2020 mencapai 91,01 persen. Ini berarti terjadi penurunan sebesar 22 persen dibanding capaian tahun 2021 dan 5,71 persen dibanding capaian tahun 2020. Penurunan terjadi disebabkan minimnya sarana prasarana sanitasi yang berstandar, juga dipengaruhi oleh akses rumah tangga terhadap air bersih yang setiap tahun berfluktuasi mengikuti ketersediaan volume air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh rumah tangga/masyarakat.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk meningkatkan cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik adalah dengan menerapkan program pemerintah pusat yang mengacu pada Peraturan

Menteri Kesehatan RI Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yaitu “Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)”. Perilaku SBS diikuti dengan pemanfaatan sarana sanitasi yang saniter berupa jamban sehat. Saniter merupakan kondisi fasilitas sanitasi yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan yaitu:

1) Tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia.
2) Dapat mencegah vector pembawa untuk menyebar penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya.

Jamban merupakan alat yang sehat dan efektif untk memutus mata rantai penularan penyakit. Jamban sehat harus dibangun, dimiliki dan digunakan oleh keluarga dengan penempatan di dalam ataupun diluar rumah yang mudah dijangkau oleh seluruh penghuni rumah.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan yang mendukung capaian indikator cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik tahun 2022 yaitu program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, sub program penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan tingkat provinsi dengan anggaran sebesar Rp8.708.720.735,00 dan terealisasi sebesar Rp7.977.031.424,00 atau 91,60%, dengan implementasi beberapa kegiatan diantaranya kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dan penyelenggaraan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat.

2. Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak

Air bersih sangat penting keberadaannya bagi keberlangsungan hidup manusia. Jika air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup memiliki kualitas yang baik maka akan dapat membantu menjaga tingkat kesehatan, sebaliknya jika air yang digunakan berkualitas buruk akan berdampak buruk juga kesehatan. Untuk itulah ketersediaan air bersih ini menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi.

Indikator kinerja Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak dilaksanakan oleh Dinas PUPRPKP Provinsi Papua dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

Target kinerja indikator cakupan masyarakat akses terhadap air bersih yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan ditetapkan sebesar 51,5 persen dan terealisasi 41 persen.

Dinas PUPRPKP menetapkan target kinerja indikator cakupan rumah tangga dengan air bersih layak sebesar 44,04 persen sebagaimana dicantumkan dalam target IKU Gubernur Papua. Target indikator tersebut dapat terealisasi 89,52.

Capaian kinerja indikator cakupan rumah tangga dengan air bersih layak dalam IKU Gubernur dihitung sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Dinas Kesehatan + realisasi kinerja Dinas PUPRPKP dan hasilnya dibagi 2 (rata-rata), diinput sebagai realisasi kinerja indikator.
2. Capaian kinerja indikator diperoleh dari perhitungan sebagaimana biasanya yaitu realisasi dibagi target dikalikan 100 persen.

Dari perhitungan seperti di atas, diperoleh nilai realisasi indikator cakupan rumah tangga dengan akses air bersih layak sebesar 65,26 persen sehingga diperoleh nilai **capaian kinerja indikator sebesar 148,18** persen dengan predikat **sangat berhasil**.

Terjadi penurunan nilai capaian indikator cakupan rumah tangga dengan akses air bersih layak dari tahun sebelumnya.

Penurunan capaian kinerja terjadi disamping karena target kinerja yang naik dari 42,87 di tahun 2021 menjadi 44,04 di tahun 2022, juga disebabkan kurangnya penanganan atau pemeliharaan jaringan air bersih dan minimnya data karena kurang proaktifnya daerah dalam hal ini kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Papua dalam menyampaikan laporan pengawasan kualitas air bersih sebagai sumber air minum kepada Dinas Kesehatan Provinsi.

Data dari Dinas Kesehatan, dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua, hanya 7 (tujuh) kabupaten yang menyampaikan laporan pengawasan kualitas air minum dalam *e-monev* yaitu Kabupaten Jayapura, Nabire,

Kepulauan Yapen, Mimika, Boven Digoel, Keerom dan Mamberamo Tengah.

Hal yang dapat menjadi faktor penunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini antara lain adalah adanya curah hujan yang tinggi ditambah dengan pemeliharaan jaringan perpipaan dapat meningkatkan kelancaran distribusi air bersih bagi rumah tangga.

Volume air bersih yang disalurkan adalah banyaknya air bersih yang disalurkan oleh perusahaan air bersih (dalam satuan m3). Semakin besar volume air bersih yang disalurkan maka akan semakin terpenuhi kebutuhan konsumen akan air bersih.

Data dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua bahwa total air bersih yang terdistribusi mencapai 75 ltr/dtk sementara total air bersih layak untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah 1.025,00 Ltr/dtk.

Capaian kinerja ini dipengaruhi juga oleh ketersediaan intake air minum yang terus menerus menurun debitnya, kurangnya curah hujan, berkurangnya daerah resapan air, seringnya terjadi kerusakan pipa distribusi air minum, bencana alam seperti banjir dan longsor yang menyebabkan rusaknya sarana distribusi air minum dan lain-lain. Disisi lain adanya peningkatan jumlah penduduk dan tuntutan peningjatan kualitas hidup juga sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan air bersih.

Dengan kondisi seperti telah dijelaskan di atas, masyarakat tidak dapat hanya mengandalkan sumber air bersih/air minum hanya dari satu sumber yaitu PDAM saja. Oleh karena itu disamping menggunakan air dari PDAM, masyarakat juga berusaha memenuhi kebutuhan air bersih/air minumnya dari sumber – sumber lain antara lain air sungai, danau dan air tanah sebagaimana digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.61

Jumlah Volume Air Baku (m3) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

Kabupaten	Volume Air Baku (m3)				
	Sungai	Danau	Mata Air	Air Tanah	Jumlah
Merauke	-	1.059.131,00	-	245.169,00	1.304.300,00
Nabire	792.780,00	-	-	13.150,00	805.930,00
Kep. Yapen	3.177.907,00	-	-	-	3.177.907,00
Biak Numfor	1.400.000,00	-	-	3.400.000,00	4.800.000,00
Mimika	-	-	-	-	-
Kota dan Kab. Jayapura	-	-	-	18.855.526,00	18.855.526,00
Papua	**5.370.687,00**	**1.059.131,00**	**-**	**22.513.845,00**	**28.945.663,00**

Sumber data: Statistik Air Bersih Provinsi Papua Tahun 2021

Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa air tanah menyumbang sebagian besar pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat di Papua yaitu 77,78%. Air tanah disalurkan baik melalui PDAM maupun sumur-sumur bor yang dikelola oleh pihak swasta.

Capaian kinerja indikator sasaran ini dicapai dengan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pemenuhan cakupan rumah tangga dengan sumber air bersih layak dengan dukungan anggaran sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan: Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan indikator cakupan masyarakat akses terhadap air bersih. Anggaran pelaksanaan program (terdiri dari beberapa kegiatan yang mendukung program) sebesar Rp8.708.720.735,00 dan realisasi anggaran program Rp7.977.031.424,00 atau 91,60%. Didalamya termasuk anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp1.323.352.875,00.

   Secara total, Dinas Kesehatan Provinsi Papua mendapatkan alokasi anggaran tahun 2022 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran baik untuk sasaran

kepala daerah maupun sasaran kinerja dinas sendiri sebesar Rp102.843.929.179,00 dan realisasi sebesar Rp96.631.222.913,00 atau 93,96%.

2. Dinas PUPRPKP: Program Pengelolaan dan Pengembangan System Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp174.674.136.485,00 dan realisasi Rp151.091.516.944,00 atau 86,50 persen dan Program Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dengan anggaran Rp41.249.401.515,00 dan realisasi Rp40.608.327.436,35 atau 98,45 persen.

   Secara total, Dinas PUPRPKP Provinsi Papua pada tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran baik untuk sasaran kepala daerah maupun sasaran kinerja dinas sendiri sebesar Rp3.180.786.563.311,00 dengan realisasi sebesar Rp2.932.931.139.971,85 atau 92,21 persen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran kinerja :

1. Pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan.
2. Optimalisasi sumber daya manusia.
3. Adanya koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam proses pembangunan.
4. Komitmen pimpinan dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
5. Tersedianya Pembiayaan (Anggaran).

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja :

1. Lokasi belum selesai pembebasan lahan.
2. Keterbatasan anggaran sehingga dilakukan pembangunan secara bertahap.
3. Pemakaian bahan non standar yang didatangkan dari luar daerah serta teknologinya.

4. Keterlambatan dalam pelaksanaan pelelangan.
5. Perencanaan yang tidak lengkap akibat keterbatasan dalam pembiayaan perencanaan.
6. Kurang koordinasi antara bidang pengendalian dengan bidangbidang yang melaksanakan pekerjaan fisik.
7. Kurang ketat dalam pelaksanaan pengawasan ketentuan keterampilan.
8. Kurangnya dalam pelaksanaan monitoring dan pengendalian.
9. Kurang disiplin dalam melaksanakan tugas.
10. Kondisi keamanan di lokasi pekerjaan.

Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala :

1. Menertibkan tata guna lahan, peruntukan serta hak kepemilikannya.
2. Mengalokasi rencana anggaran sesuai usulannya.
3. Memaksimalkan material serta teknologi setempat.
4. Mengefesien dan mengefektifkan waktu lelang sedini mungkin.
5. Mengaloksikan biaya perencanaan secara tuntas.
6. Perlu dilakukan koordinasi antar bidang sehingga tupoksi masingmasing bidang difungsikan.
7. Dalam pelaksanaan pengawasan perlu diperketat.
8. Perlu disiapkan dana yang cukup agar pengendalian berjalan dengan baik.
9. Perlu peningkatan disiplin terhadap ASN.

Sasaran 21	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Kampung

Capaian kinerja untuk sasaran **"Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Kampung"** mencapai 7,65 persen dengan predikat **"Tidak Berhasil"**. Pencapaian sasaran ini, diukur melalui indikator kinerja sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel. 3.62 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 21

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TERGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Indeks Kampung Membangun	Indeks	50,16	3,84	7,65
Capaian Indikator Kinerja					7,65

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Kampung ini berdasarkan Indikator kinerja yakni : Indek Kampung Membangun atau dalam Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia disebut Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Secara umum Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah dan desa (di Provinsi Papua disebut Kampung) dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa.

Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, masukan dalam perumusan target (sasaran lokasi) terkait dengan target

pembangunan nasional dan instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian Desa, yang disebut dengan Klasifikasi Status Desa. Klasifikasi Status Desa dalam PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun tersebut adalah:

a. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.
b. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072.
c. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989.
d. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya

adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,5989 dan lebih besar (>) dari 0,4907.

e. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (≤) dari 0,4907.

Apa Saja Komponen IDM ?

IDM terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi.

1. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Dalam hal klasifikasi status Desa sebagaimana tersebut di atas dimana kriteria penetuan status desa disamaratakan untuk seluruh Indonesia, maka atas pertimbangan letak geografis, ketersediaan infrastruktur, adat

budaya lokal dan rentang kendali penyelenggaraan Pemerintahan tingkat Provinsi sampai Kampung, maka ditetapkan target kampung membangun adalah Kampung Berkembang menjadi titik fokus pembangunan ke arah Kampung Maju dan Kampung Mandiri, Sudah barang tentu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga mengupayakan secara maksimal kemajuan Kampung Sangat Tertinggal dan Tertingggal ke tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan 3 (tiga) Indeks tersebut di atas, maka jumlah Desa/Kampung Berkembang di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua tergambar sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel. 3.63

Jumlah Kampung Berkembang Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAMPUNG	KAMPUNG BERKEMBANG
1.	Merauke	179	37
2.	Jayawijaya	328	0
3.	Jayapura	139	38
4.	Nabire	72	1
5.	Kepulauan Yapen	160	58
6.	Biak numfor	254	17
7.	Puncak Jaya	302	0
8.	Paniai	216	0
9.	Mimika	133	11
10.	Sarmi	92	1
11.	Keerom	91	16
12	Pegunungan Bintang	277	4
13.	Yahukimo	510	0
14.	Tolikara	541	0
15.	Waropen	100	1
16.	Boven Digul	112	0
17	Mappi	162	0
18.	Asmat	221	0
19.	Supiori	38	11
20.	Mamberamo Raya	60	2
21	Mamberamo Tengah	59	0
22.	Yalimo	300	0
23.	Lanny Jaya	354	0

24.	Nduga	248	0
25.	Puncak	206	1
26.	Dogiyai	79	0
27	Intan Jaya	97	0
28.	Deiyai	67	1
29	Kota Jayapura	14	9
Jumlah		5.411	208
Realisasi Kinerja			3,84

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan OAP, Tahun 2022.

Dari tabel 3.43 tersebut di atas, maka terdapat 15 (lima belas) Kabupaten/kota yang sudah menginput dan telah selesai diverifikasi berjumlah 1.544 (seribu lima ratus empat puluh empat) kampung atau setara dengan 29%, sementara 14 (empat belas) kabupaten belum selesai menginput dan verifikasi atau sebanyak 3.867 (tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh) kampung atau setara dengan 71%.

Hasil penginputan dan verifikasi, dari 1.544 (seribu lima ratus empat puluh empat) kampung yang tersebar di 15 kabupaten/kota terdapat Kampung Berkembang sebanyak 208 (dua ratus delapan), Kampung Sangat Tertinggal berjumlah 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu), Kampung Tertinggal berjumlah 523 (lima ratus dua puluh tiga), jumlah kampung dalam kategori Kampung Maju berjumlah 21 (dua puluh satu) dan Kampung Mandiri berjumlah 1 (satu) kampung.

Sasaran 22	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Orang Asli Papua (OAP)

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Orang Asli Papua"** sebesar **138.96 persen** dengan predikat**"Sangat Berhasil"**, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (Satu) indikator kinerja sasaran.Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.64 Indikator Kinerja Sasaran 22

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	RATA-RATA REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1.	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	Persen	70,19	97,54	138.96
Capaian Kinerja Sasaran					**138.96**

Dilihat dari table diatas menunjukkan bahwa Indikator kinerja **persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP** dengan target sebesar **70,19 persen** dan rata-rata capaian **realisasi** adalah **97,54** persen maka capaian realisai kinerja adalah seebsar **138.96 persen** dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Sementara itu untuk perkembangan selama tahun 2019-2021 dapat di lihat pada table dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.65 Indikator Kinerja Sasaran 22 untuk Tahun 2019-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN								
			2019			2020			2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	%	62,4	76,41	126,5	64,9	89,58	138,03	67,49	97,54	146.37

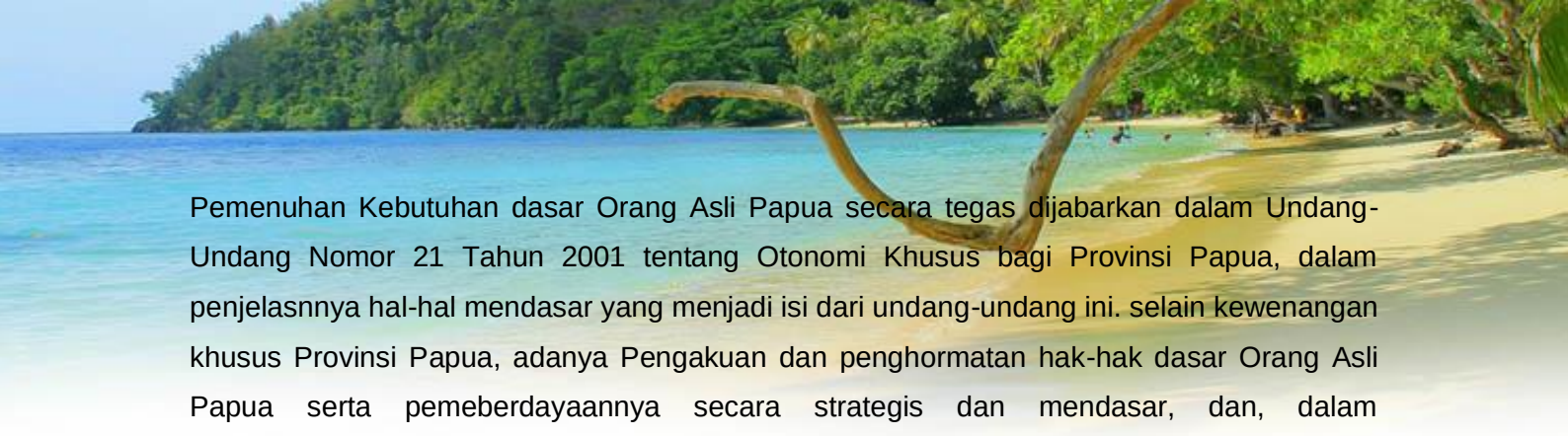

Pemenuhan Kebutuhan dasar Orang Asli Papua secara tegas dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dalam penjelasnnya hal-hal mendasar yang menjadi isi dari undang-undang ini. selain kewenangan khusus Provinsi Papua, adanya Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar Orang Asli Papua serta pemeberdayaannya secara strategis dan mendasar, dan, dalam penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua. Kemudian dipertegas lagi dalam Perda Nomor 25 Tahun 2013, pasal 10, ayat 2, point a, dimana Pemenuhuna Kebutuhan Dasar Orang Asli Papua ditujukan pada 4 (empat) sector utama, yakni Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan Infrastruktur.

Persentase pencapaian 4 (empat) sektor utama untuk 3 (tiga) Sektor dilaksana dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar, dimana ke 3 sektor tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Khusus Nomor 13 Tahun 2016 Juncto Peraturan Daerah Khusus Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus yakni Pendidikan (30%), Kesehatan (20%) dan Infrastruktur (15%). Sementara untuk sector Ekonomi (15%) dilaksanakan dalam 2 (dua) urusan yakni Uransan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan dengan porsi anggaran Otsus adalah 20% Bagian Provinsi Papua setalah dikurangi dengan Urusan Bersama (UB) dan 80% Bagian Kabupaten/Kota sebagai Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, diluar Dana Tambahan Infrastruktur.

1. **Sektor Pendidikan**

   Realisai capaian pada sector Pendidikan Rata-rata adalah sebesar 108,67 persen, yang dilaksanakan oleh 2 (dua) OPD yakni, yakni oleh Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

   Secara Umum Peningkatan Layanan Akses Pendidikan yang merupakan kewenangan provinsi yakni SMA dan SMK, menunjukan trend yang positif dalam rangka mengoptimalisasi layanan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, dimana dari penyebaran jumlah sekolah dari meningkatkan karena system Zonasi, sehingga kebutuhan dari perserta didik dapat terpenuhi, untuk Papua tahun 2020 adanya penambahan jumlah sekolah sesuai kewenangan yakni menjadi 10, SMA 9 Sekolah dan SMK 1 Sekolah. Sehingga pesentase pertumbuhan menjadi 3,78 % untuk SMA dan 0,72 persen untuk SMK.

   Sementara itu untuk sarana dan prasasrana pendidikan untuk SMA 83,85 persen Ruang Kelas rusak ringan/sedang, dan 2,24 persen ruang kelas rusak berat, dan untuk SMK 79,29 persen Ruang Kelas rusak ringan/sedang dan 2,12

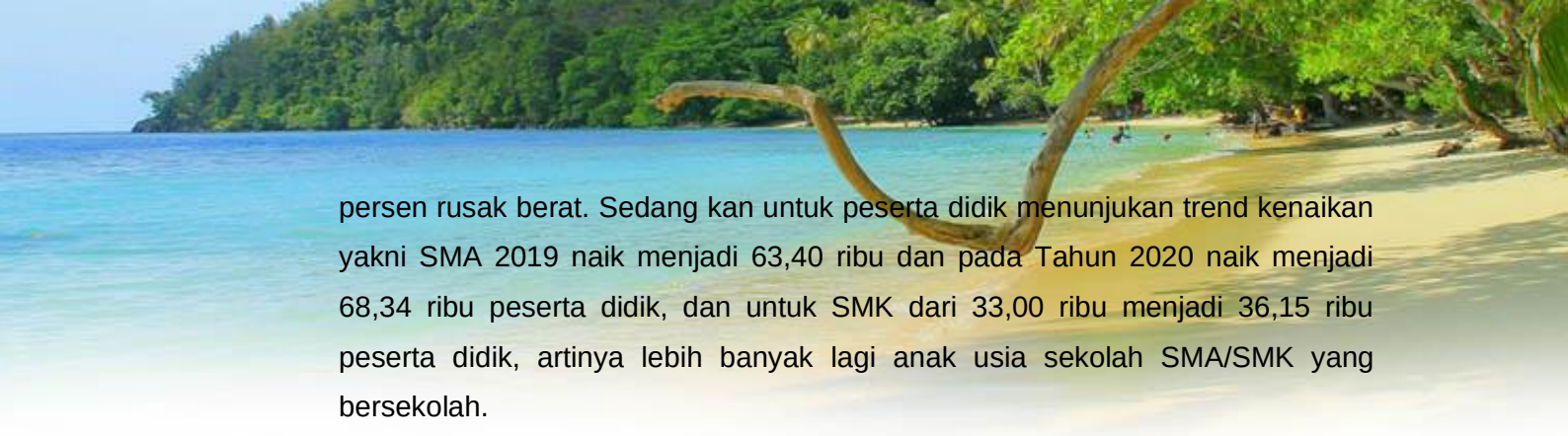

persen rusak berat. Sedang kan untuk peserta didik menunjukan trend kenaikan yakni SMA 2019 naik menjadi 63,40 ribu dan pada Tahun 2020 naik menjadi 68,34 ribu peserta didik, dan untuk SMK dari 33,00 ribu menjadi 36,15 ribu peserta didik, artinya lebih banyak lagi anak usia sekolah SMA/SMK yang bersekolah.

Untuk jenjang Pendidikan Tinggi yang dikelola oleh Badan Pengembangan SDM adalah dengan tetap memberikan beasisiwa kepada Orang Asli Papua yang bersekolah di Indonesia maupun diluar Negeri, sehingga Indikator Pembangunan Manusia bias terus naik untuk tahun 2021 adalah sebesar 60,62 persen atau meningkat sebesar 0,30 dari tahun 2020 yakni sebesar 60,32 persen, dimana untuk Dimensi pengetahuan diukur dari pendidikan, yakni Rata-rata Lama Sekolah adalah 25 tahunyang menjalani pendidikan formal dan Harapan Lama Sekolah yang diharapkan oleh anakpada umur tertentu dimasa mendatang.

2. Sektor Kesehatan

Capaian Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan adalah sebesar 106,22, dimana capaian kinerja tersebut dicapai melalui program/kegiatan di Dinas Kesehatan, RSUD Dok II Jayapura, RSUD Abepura dan RS Jiwa Abepura, yang diarahkan pada Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam Bidang Kesehatan, melalui Pelaksanaan Kartu Papua Sehat (KPS), Informasi Kesehatan, Peningkatatan Kesehatan Ibu, bayi dan Balita serta pemenuhan gizi masyarakat dalam meweujudkan Generasi Emas Papua, Penurunan Angka Kematian Ibu melahirkan, Pencegahan Penyakit Menular, Menjamin ketersedian tenaga kesehatan, SDM Kesehatan, Pembanguna RS Rujukan di 5 Wilayah Adat, Peningkatan Layanan Puskesmas serta Memperkuat dan memantapkan Pelayanan Kesehatan berbasis Kontekstual Papua, yakni Pelayanan Kaki Telanjang.

Asas manfaat yang bisa terlihat pada perkembangan Sektor Kesehatan persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dimana tahun 2019 dari 46,10% meningkat pada tahun 2020 sebesar 48,19% atau naik sebanyak 2,09%, dan pada tahun 2021 naik ditargetkan naik menjadi 50% naik 2,81%. Sementar khusus untuk Orang Asli Papua seluruhnya di tanggung oleh Jaminan Kesehatan Papua (Jamkespa).

3. **Sektor Infrastruktur**

Realisai capaian pada secktor Infrastruktur Rata-rata adalah sebesar 85,97 persen, yang dilaksankan oleh 2 (dua) OPD yakni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Perhubungan, dimana pemenuhana Infrastruktur yang diarahkan pada pencapian konektifitas dalam rangka membuka keterisolasian di Provinsi Papua, yang mana hamper seluruh akses transportasi darat 75 persennya sudah bisa terhubung malalui jalan darat, yakni sesuai data Kemeneterian PUPR panjang jalan yang sudah dibangun adalah sepanjang 2.361,76 km^3 melalui program pembangunan jalan dan jembatan pencapaiannya mencapai 90 persen, yang seluruhnya mengunakan Dana Tambahan Infrastruktur. Sementara itu Capaian Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman adalah sebesar 95,82 %, dimana pencapaian tersebut dicapai melalui program-program dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua yang diarahkan pada pemantapan infrastruktur dasar khususnya dengan Memberikan kewenangan bagi kabupaten/kota melalui mekanisme bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan.

Sementara itu untuk sector perhubungan Capaian Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan adalah sebesar 72,12%, dimana seluruh pelaksanan program/kegiatan diarahkan pada pembangunan beberapa bandara udara di kabupaten dan terminal yang mana pelaksanaan perkerjaan rata-rata 2-3 tahun. Selain itu pula program-program lainnya diarahkan pada pengendalian dan pengaman lalu lintas yang menjadi kewenangan provinsi, serta sarana prasrana fasilitas perhubungan lainnya.

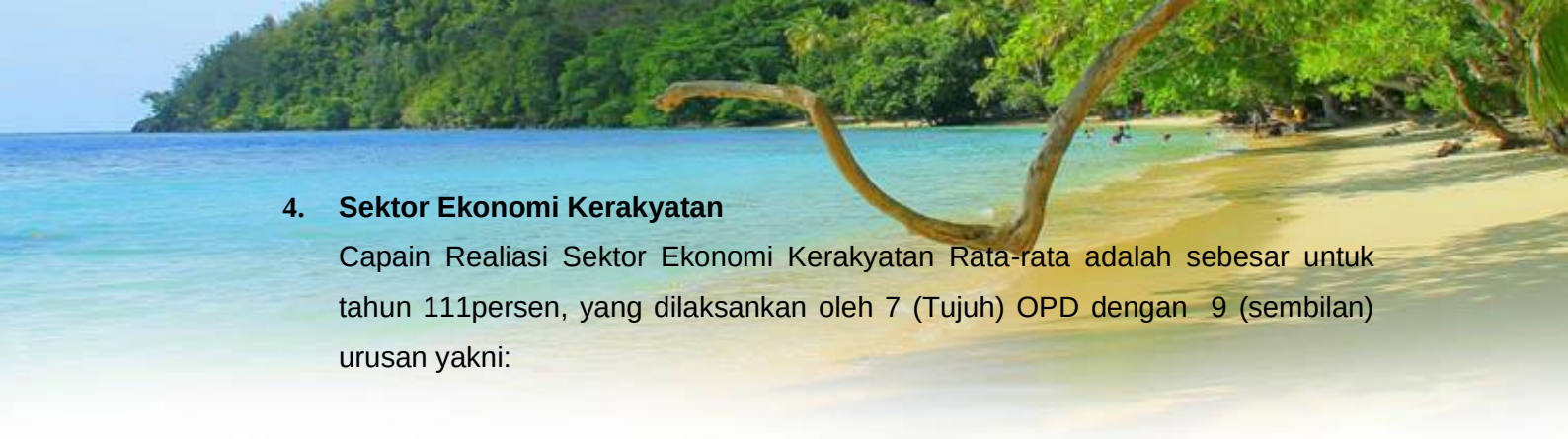

4. Sektor Ekonomi Kerakyatan

Capain Realiasi Sektor Ekonomi Kerakyatan Rata-rata adalah sebesar untuk tahun 111persen, yang dilaksankan oleh 7 (Tujuh) OPD dengan 9 (sembilan) urusan yakni:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Capain Realisasi Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan., Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dicapaian dari urusan Tenaga Kerja mencapai 96,03% dan dari Urusan Perindustrian Perdangan dan Koperasi UKM mencapai 111,11 persen. Capain tersebut pada urusan tenaga kerja dicapai melalui pelaksanaan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenga kerja, Peningkatan kesempatan kerja dan pengawasan ketenagakerjaan, semetara dari urusan perindutrian, perdagangan koperasi dan UKM dicapai melalui pelaksanaan program pengembangan kewirasaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil, system pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil menengah, dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

Dinas Pertanian dan Pangan

Capaian Realisasi Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebesar 87.19%, dimana capaian tersebut dicapai melalui pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan), peningkatan kesehteraan petani, pemasaran hasil produksi pertanian, peningkatan penerapan tekno;ogi pertanian/perkebunan, peningkatan produksi pertanian/perkebunan. pencegehan dan penanggulangan penyakit ternak.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua

Capain Realisasi Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua adalah sebesar 111%, dimana capaian tersebut dicapai melalui program pemberdayaan masayarakat kampong, penguatan kapasitas kelembagaan Distrik dan kampong, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, asas manfaatnya adalah sampai dengan tahun 2019 Provinsi Papua sudah memeiliki 266 Kampung Mandiri dari 5456 Kampung dengan Indeks Pembangunan Desa sebesar 34,67%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Capaian Realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebesar 143,70% dimana capaian teresebut dilaksanakan melalui

program promosi dan kerjsama Investasi, pelayanan perijinan penenanaman modal, peningkatan daya saing investasi dan peningkatan pengawasan, pengendalian penanaman modal

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Capaian Realisasi Dinas Kebudayan dan Pariwisata adalah sebesar 109,09%, dimana capaian tersebut dicapai melalui program pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya,serta pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Dinas Kelauatan dan Perikanan

Capaian Realisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebesar 109,09% dimana capaian tersebut dicapai melalui pelaksanaa program pengembangan budidya perikanan, pengembangan dan peningkatan produksi perikanan tangkap, peningkatan mutu produksi nelayanan, pengelolaan dan pemasaran serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan peulau-pulau terluar. Produksi hasil perikanan tangkap di Provinsi Papua tahun 2019 ada sebanyak 220.929 ton. Produksi hasil perikanan tangkap tertinggi terdapat di Kota Jayapura sebanyak 56.762 ton. Sedangkan, produksi hasil perikanan budidaya di Provinsi Papua pada tahun 2019 ada sebanyak 23.474 ton hasil pembesaran, 5.617.000 ekor hasil pembenihan, serta 14.000 ekor merupakan ikan hias.

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

Capaian Realisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral adalah sebesar 117,65, dimana capaian tersebut dilaksankan melalui program pelayanan air bersih dan pengembangan energy terbarukan. Papua pada tahun 2019, sebanyak enam perusahaan air bersih mempunyai pelanggan sebanyak 70.483 pelanggan. Volume air bersih yang disalurkan kepada pelanggan pada tahun 2019 adalah sebesar 17,76 juta m^3 , diharapkan pada tahun 2023 selurah masayarakat Papua seluruhnya bias menikmati air bersih. Jumlah pengguna listrik di Provinsi Papua pada tahun 2019 sebanyak 444.958 pelanggan. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 dimana jumlah pengguna listrik sebanyak 414.986 pelanggan.

Sasaran 23	Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan.

Untuk mengetahui tingkat kehidupan masyarakat yang bermukim di daerah perbatasan khususnya di Provinsi Papua dapat diukur malalui capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan"** dengan Capaian Kinerja sebesar **81,29** persen dengan predikat **"Berhasil"**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini, diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

a. Rata-Rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan;

b. Angka Harapan Hidup Wilayah Perbatasan;

c. Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan.

Yang dirinci lebih lanjut sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.66 Target dan Realisasi Capaian Sasaran 23

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Rata-Rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan	Tahun	11,09	8,41	75,83
2	Angka Harapan Hidup Wilayah Perbatasan	Tahun	67,50	66,15	98,00
3	Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan	Rp Juta/ Kapita	13,12	9,19	70,05
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					**81,29**

Sasaran Kinerja "Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan" yang diukur melalui Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan, Angka Harapan Hidup Wilayah Perbatasan dan Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan" pada tahun 2022 tentang Target, Realisasi dan Capaian dapat dilihat grafik di bawah ini :

Grafik 3.11 Perbadingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2022

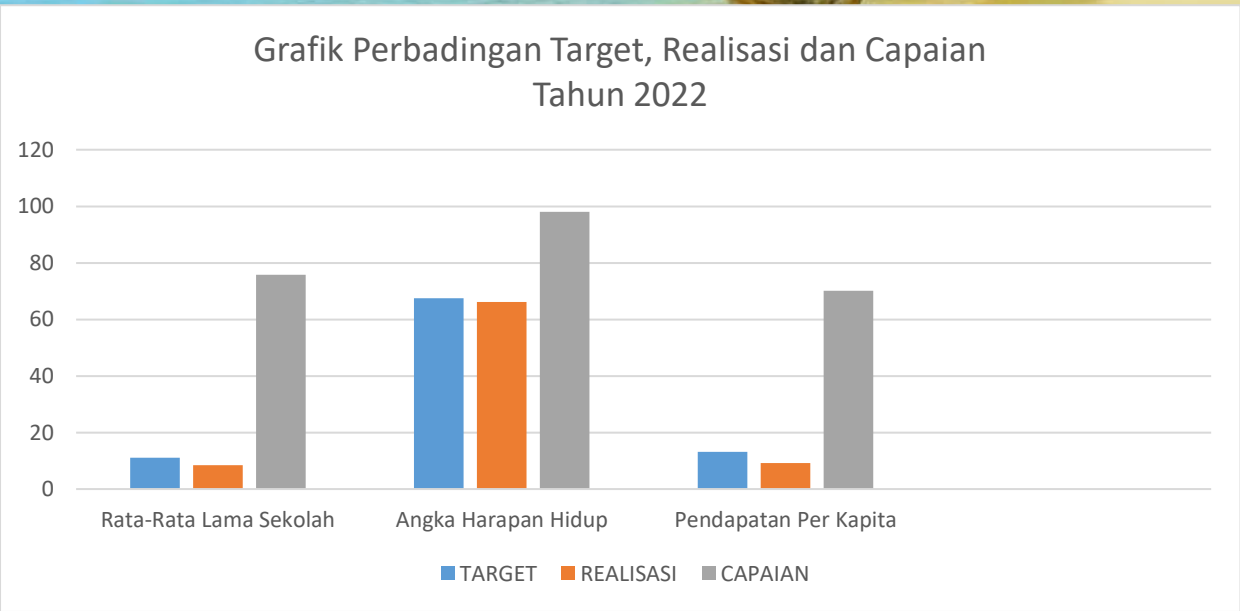

Capaian Kinerja Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan tahun 2022 sebesar 81,29 lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 yaitu sebesar 83,32 atau turun sebesar 2,03. Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2022 sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

Tabel 3.67 Indikator Kinerja Sasaran 23 untuk Tahun 2019-2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN											
			2019			2020			2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan	Tahun	8,75	7,73	88,34	9,47	7,98	84,27	10,25	8,17	79,70	11,09	8,41	75,83
2.	Angka Harapan Hidup Wilayah Perbatasan	Tahun	66,04	65,33	98,92	66,53	65,62	98,63	67,01	65,88	98,31	67,50	66,15	98,00
3.	Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan	Rp Juta/ Kapita	10,80	8,97	83,06	11,52	9,11	79,08	12,30	8,85	71,95	13,12	9,19	70,05
	Capaian Indikator kinerja				**90,11**			**87,33**			**83,32**			**81,29**

Dari tabel tersebut di atas, memperlihatkan bahwa capaian kinerja setiap tahun cenderung menurun, misalnya pada tahun 2019 capaian kinerja sebesar 90,11 persen, pada tahun 2020 menurun sebesar 2,78 persen menjadi 87,33 persen, pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 4,01 menjadi 83,32, dan pada tahun 2022 turun lagi menjadi 81,29 persen atau mengalami penurunan sebesar 8,82 dari tahun 2019. Kecenderungan penurunan ini akibat penetapan target yang tinggi sehingga tidak seimbang dengan capaian realiasi, walaupun sesungguhnya setiap tahun tidak selalu menurun realisasinya. Selain itu dampak pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan seluruh sendi kehidupan baik kesehatan, pendidikan perekonomian, sosial, budaya dan aspek lainnya yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan dan hingga saat ini kodisi kehidupan sosial, budaya dan perekonomian masyarakat yang berada di wilayah perbatasan belum pulih sebagaimana yang diharapkan bersama. Belum lagi masalah keamanan dan pelintas batas yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik akibat kewenangan Pemerinah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perbandingan setiap indikator kinerja dari Target, Realisasi dan Capaian Kinerja dirinci sebagai berikut :

1. Target untuk indikator kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan pada Tahun 2019 sebesar 8,75 dengan realisasi sebesar 7,73 atau tidak tercapai target sebesar 1,02. Pada tahun 2020 target meningkat menjadi 9,47 dengan realisasi sebesar 7,98 atau tidak tercapai target sebesar 1,49. Pada tahun 2021 target sebesar menjadi 10,25, dengan realisasi sebesar 8,17 atau tidak tercapai target sebesar 2,08 dan pada tahun 2022 terget 11,09 dengan realisasi sebesar 8,41 atau tidak tercapai target sebesar 2,68.
2. Target untuk indikator kinerja Angka Harapan Hidup Wilayah Perbatasan pada Tahun 2019 sebesar 66,04 dengan realisasi sebesar 65,33 atau tidak tercapai target sebesar 0,71. Pada tahun 2020 target meningkat menjadi 66,53 dengan realisasi sebesar 65,62 atau tidak tercapai target sebesar 0,91. Tahun 2021 target sebesar 67,01 dengan realisasi sebesar 65,88 atau tidak tercapai target sebesar 1,13 dan Tahun 2022 target sebesar 67,50 dengan realisasi sebesar 66,15 atau tidak tercapai target sebesar 1,35.

3. Target untuk indikator kinerja Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan pada Tahun 2019 target sebesar 10,80 dengan realisasi sebesar 8,97 atau tidak mencapai target sebesar 1,83. Pada tahun 2020 target meningkat menjadi 11,52 dengan realisasi sebesar 9,11 atau tidak mencapai target sebesar 2,41. Tahun 2021 target sebesar 12,30 dengan realisasi sebesar 8,85 atau tidak mencapai target sebesar 3,45 dan pada tahun 2022 target ditetapkan sebesar 13,12 dengan realisasi sebesar 9,19 atau tidak mencapai target sebesar 3,93.

Grafik 3.12 Capaian Sasaran Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan

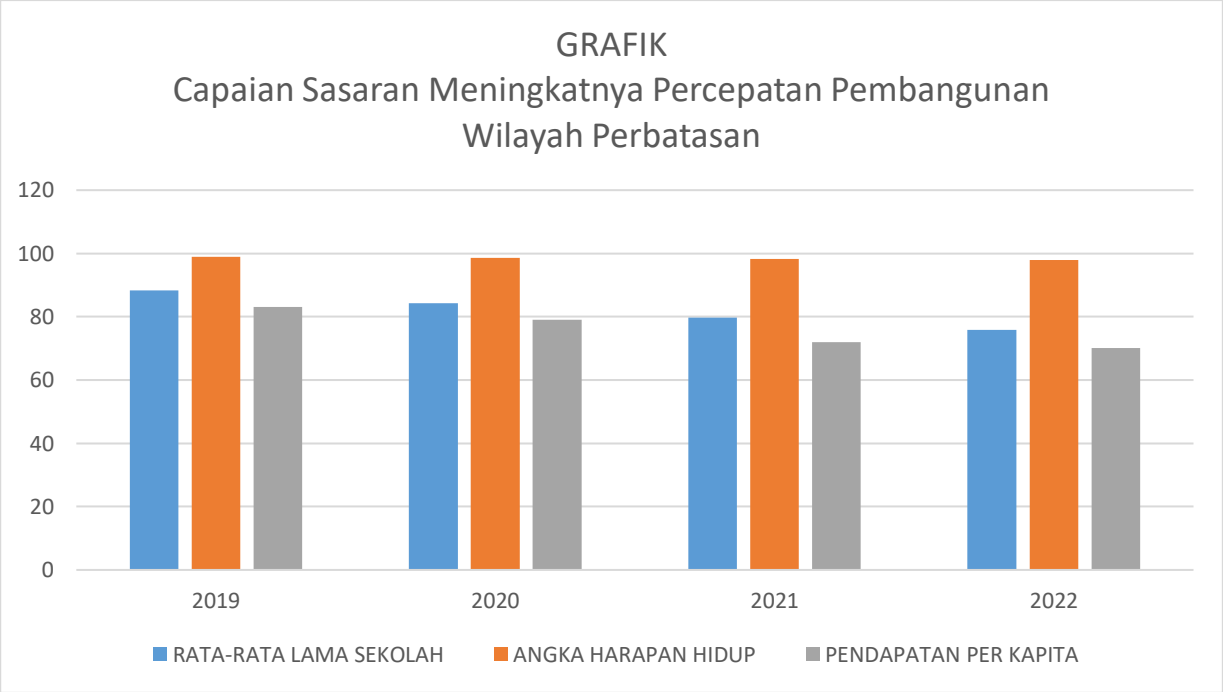

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan pada tahun 2019-2022 berdasarkan data makro 3 (tiga) Indikator kinerja yakni : Rata-Rata Lama Sekolah Wilayah Perbatan, Angka Harapan Hidup Wilayah Perbatasan dan Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan pada grafik tersebut di atas terlihat cenderung menurun setiap tahunnya akibat penetapan target yang tinggi sehingga tidak dapat direalisasikan, namun sesungguhnya realiasi yang diperoleh dari 6 (enam) kabupaten/kota di Provinsi Papua yang berada di wilayah perbatasan terus mengkat, seperti tabel berikut ini :

Tabel 3.77

Data Makro Capaian Indikator Setiap Kabupaten/Kota di Wilayah Perbatasan

NO.	KABUPATEN / KOTA	RATA-RATA LAMA SEKOLAH				ANGKA HARAPAN HIDUP				PENGELUARAN PER KAPITA			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1.	Merauke	8,56	8,72	8,73	9,04	66,93	67,00	67,07	67,31	10,50	10,10	10,20	10,42
2.	Boven Digul	8,55	8,78	8,79	9.03	59,64	59,97	60,32	60.64	8,30	7,95	7,86	8,86
3.	Pegunungan Bintang	2,61	2,81	3,04	3,23	64,34	64,44	64,54	64,79	5,63	5,41	5,43	5,62
4.	Keerom	8,00	8,01	8,02	8,32	66,60	66,69	66,78	67,04	9,14	8,91	8,93	9,15
5.	Supiori	8,60	8,81	8,87	9,09	65,81	65,94	66,06	66,36	5,82	5,68	5,71	5,90
6.	Kota Jayapura	11,55	11,56	11,57	11,75	70,38	70,45	70,52	70,76	15,18	14,78	14,94	15,19

Sumber Data : BPS-Papua Dalam Angka 2022.

Dari tabel tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2022 dari 6 (enam) Kabupaten/Kota di wilayah perbatasan paling rendah adalah Kabupaten Pengunungan Bintang dengan rata-rata lama sekolah sebesar 3,23, lebih baik atau meningkat sebesar 0,19 bila dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 3,04 dan paling tinggi adalah Kota Jayapura dengan rata-rata lama sekolah sebesar 11,75 lebih baik atau meningkat sebesar 0,18 bila dibandingkan tahun 2021 sebesar 11,57 tahun.

Untuk Angka Harapan Hidup pada tahun 2022 paling rendah adalah Kabupaten Boven Digul sebesar 60,64 lebih baik atau meningkat sebesar 0,32 bila dibandingkan tahun 2021 sebesar 60,32 dan paling tinggi adalah Kota Jayapura dengan angka harapa hidup sebesar 70,76 lebih baik atau meningkat sebesar 0,24 bila dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 70,52.

Demikian juga dengan Pengeluaran Per Kapita pada tahun 2022 yang terendah adalah Kabupaten Pengunungan Bintang sebesar 5,62 lebih baik atau meningkat sebesar 0,19 bila dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 5,43 Juta Rupiah per Kapita dan paling tinggi adalah Kota Jayapura sebesar 15,19 lebih baik atau meningkat sebesar 0,25 bila dibandingkan tahun 2021 yang berkisar sebesar 14.94 Juta Rupiah per Kapita.

Perbedaan ini disebabkan keadaan geografis dan aksesibiltas serta jangkaun pelayanan terhadap 6 (enam) kabupaten/kota di wilayah perbatasan sangat berpengaruh terhadap capaian tersebut di atas. Hal Ini terbukti Kota Jayapura yang daya jangkau dan aksesibilitasnya lebih mudah capaian masing-masing Indikator Kinerja lebih baik atau tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain yang jangkauan pelayanan dan aksesibilitasnya sulit capaian masing-masing indikator kinerja lebih rendah.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan ini, secara jujur belum menggambarkan keadaan Pembangunan Wilayah Perbatasan sesungguhnya, karena data yang digunakan untuk mengukur 3 (tiga) Indikator Kinerja tersebut masih menggunakan Data Makro dari 6 (enam) kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan. Hal ini terjadi akibat :

a. Indikator dari Sasaran ini baru sehingga Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi Papua belum dapat menyediakan data yang dibutuhkan dalam waktu singkat (BPS hanya memiliki Data Makro);
b. Penetapan Peraturan Gubernur Papua tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Triwulan IV (menunggu penetapan Perda tentang RPJMD), sehingga waktu untuk mengumpulkan data ini sangat mepet;
c. Kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan belum dapat menyajikan data yang dibutuhkan.

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja meningikatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan di Provinsi Papua dapat dilihat pada Grafik berikut di bawah ini :

Grafik 3.13 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan Tahun 2019 s/d 2022

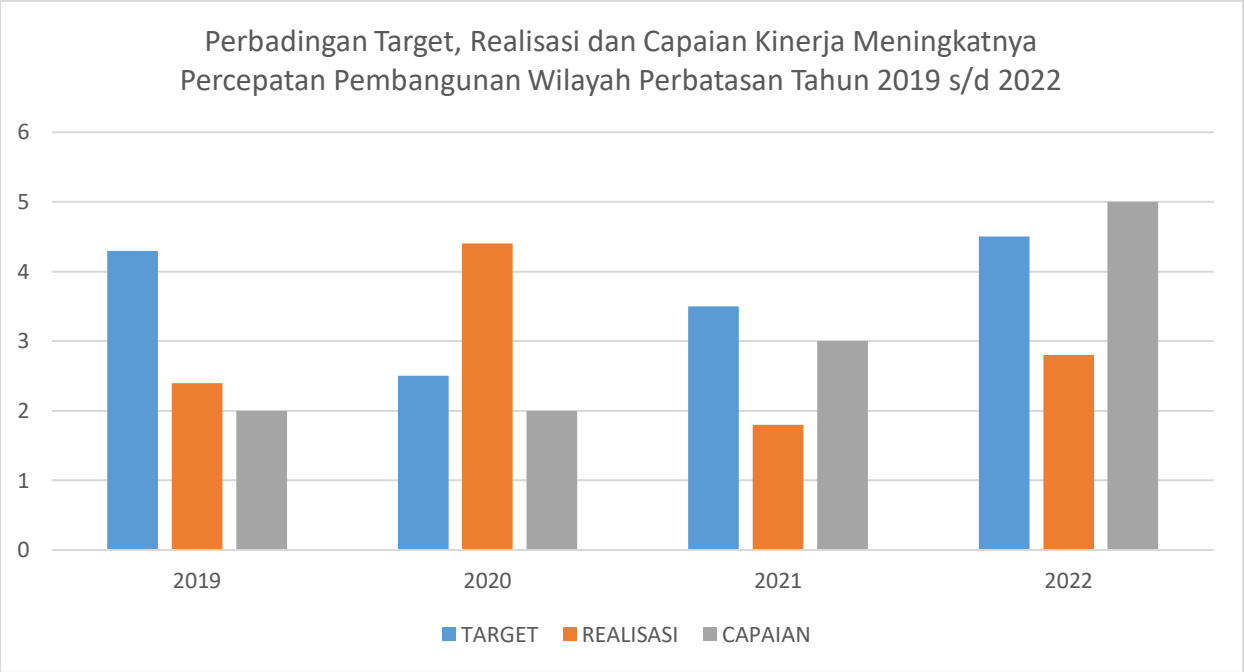

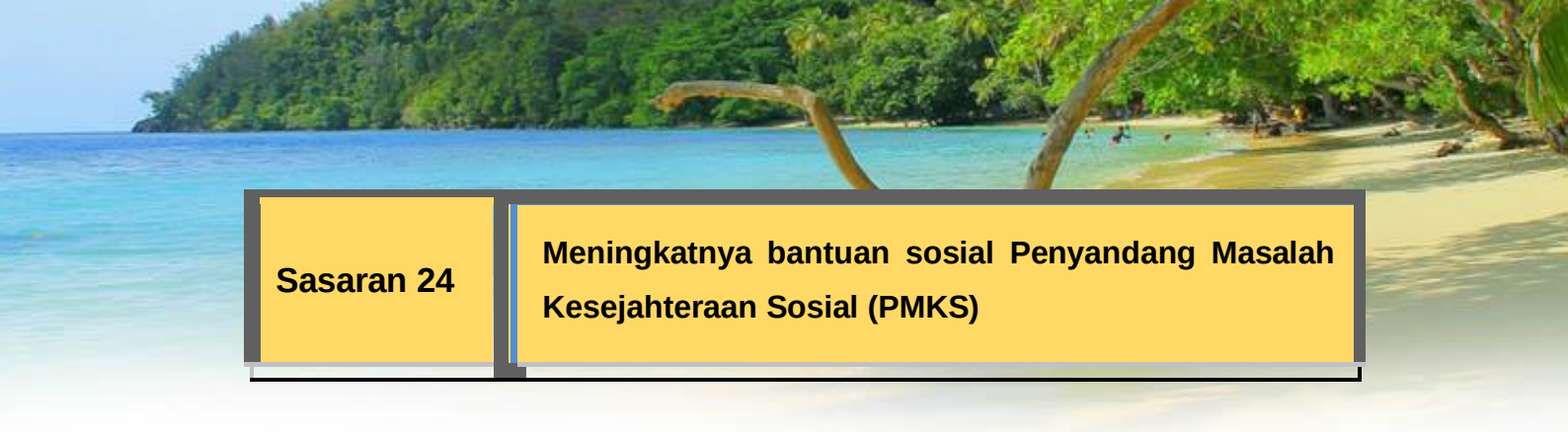

Sasaran 24	Meningkatnya bantuan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya bantuan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)"** sebesar **2.065%** persen dengan predikat **"Tidak Berhasil"**, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui jumlah orang yang memperoleh bantuan sosial. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.78 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 24

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Ribu Orang Per Tahun	40.000	826	2,065%
Capaian Kinerja Sasaran					**2,065%**

Selanjutnya ditampilkan perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja selama 3 (tiga) tahun, yaitu Tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.79 Indikator Kinerja Sasaran 24 untuk Tahun 2019-2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN											
			2019			2020			2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Ribu orang per Thn	10	7.831	78,31	20	7.831	39.16	30	3.432	11.44	40	826	2,07

Grafik 3.14 Capaian Indikator Meningkatnya Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

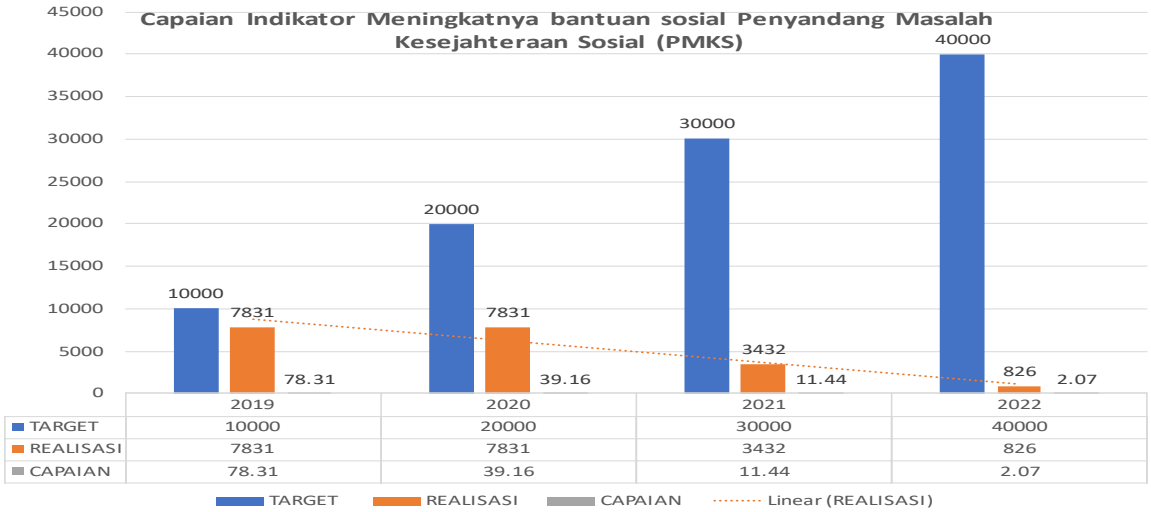

Sumber : Dinas Sosial, Kependudukan dan P3A, tahun 2022 (diolah)

Indikator Cakupan PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial dari jumlah target sebanyak 40.000 orang yang direncanakan untuk menerima bantuan, baru dapat terealisasi sebanyak 826 orang pada tahun 2022 atau sekitar 2,07%. Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 9,375% dari tahun 2021 yakni sebanyak 2.606 orang. Penurunan indikator sebesar 9,375%**%** ini karena Jumlah orang yang memperoleh bantuan sosial berkurang dan hal ini juga merupakan dampak dari perubahan kebijakan oleh pemerintah pusat terkait dana otonomi khusus bagi Pemerintah Provinsi Papua, jumlah anggaran yang berkurang (menurun drastis) dan program pemerintah pusat yang tidak ada pada tahun 2022.

Realisasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 826 atau 2,065% ini didapat dari delapan (8) Kelompok PMKS yang tertangani di Provinsi Papua yakni:

1. Komunitas Adat Terpencil (KAT), bantuan yang diberikan berupa pembinaan Komunitas Adat Terpencil adalah sebagai berikut:
   a. Pemberian Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial tidak dilaksanakan karena terbatasnya anggaran
   b. Pemberian Bantuan Jaminan Hidup tidak dilaksanakan karena terbatasnya anggaran.

c. Pemberian Bantuan Bibit bagi warga Komunitas Adat Terpencil, bantuan diberikan kepada 30 KK.
d. Pemberian Bantuan Peralatan Kerja bagi warga KAT. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran
e. Pemberian Bantuan Jaminan Hidup tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran

2. Lanjut Usia (Lansia), bantuan yang diberikan berupa pembinaan dan rehabilitasi Lansia adalah sebagai berikut:
   a. Tidak ada Pemberian bantuan rehabilitasi dan perlindungan bagi lanjut usia karena minimnya anggaran yang tersedia.
   b. Pemberian bantuan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi 58 orang lanjut usia di dalam panti.
3. Anak Terlantar, dalam hal ini bantuan yang diberikan adalah berupa peningkatan anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan diberikan dalam bentuk sebagai berikut:
   a. Tidak ada Pemberian bantuan kepada anak balita terlantar, anak terlantar/anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus karena minimnya anggaran yang tersedia.
   b. Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan remaja, bantuan diberikan terhadap 80 orang anak.
4. Penyandang Disabilitas, bantuan yang diberikan berupa rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan diberikan dalam bentuk sebagai berikut:
   a. Pelayanan penyandang cacat Tuna Netra di dalam panti sebanyak 18 orang.
5. Tuna Sosial, bantuan yang diberikan adalah berupa rehabilitasi tuna sosial:
   a. Pelayanan dan Rehabilitasi bagi wanita rawan sosial dan ekonomi, bantuan diberikan kepada 60 orang
6. Untuk Korban Penyalahgunaan NAPZA, pada tahun 2022 tidak terdapat anggaran sehingga tidak ada kegiatan.
7. Korban Bencana Alam, bantuan yang diberikan berupa perlindungan bagi korban bencana alam adalah sebagai berikut:

a. Bantuan yang diberikan berupa kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat di lokasi bencana pada tahun ini tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
b. Korban Bencana Sosial yang mendapat pelayanan tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
c. Bantuan Jaminan Sosial Keluarga (PKH) untuk KPM tidak dilakukan karena keterbatasan anggaran
d. Bantuan kepada pendamping PKH tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
e. Bantuan Kedaruratan Logistik Bencana Alam dan Sosial kepada 460 jiwa.

8. Fakir Miskin, dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2022 tidak mendapat bantuan oleh karena terbatasnya ketersediaan anggaran.
9. Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA Papua), Pada Tahun 2022 tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Faktor yang menyebabkan menurunnya indikator kinerja Cakupan PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial adalah:

1. Adanya perubahan kebijakan oleh pemerintah pusat terkait dana otonomi khusus bagi Pemerintah Provinsi Papua**.**
2. Menurunnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
3. Tidak adanya Program dari Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Provinsi Papua
4. Indikator Target Pencapaian yang begitu tinggi.

Sasaran 25	**Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana Melalui Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana.**

Secara keseluruhan capaian kinerja untuk sasaran **"Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana Melalui Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana"** termasuk kategori **Rendah** dengan predikat **"Tidak Berhasil"**. Pencapaian sasaran ini, diukur melalui indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.80 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 25

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1		2	3	4	5
1.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Kategori	Sedang	**Rendah**	**Rendah**
Capaian Indikator Kinerja					**Rendah**

Dimana penentuan kategori tersebut berdasarkan kriteria sebagai berikut :

Rendah = 0 % – 50%

Sedang = 50,1% - 75%

Tinggi = 75,1% - 100%

Selanjutnya ditampilkan perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja selama 4 (empat) tahun, yaitu Tahun 2019 sampai dengan 2022 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.81 Indikator Kinerja Sasaran 25 untuk Tahun 2019-2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN											
			2019			2020			2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Kategori	Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah

Berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka terdapat beberapa pengertian berhubungan dengan Sasaran ini sebagai berikut :

a. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
b. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
c. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangikemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
d. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
e. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan

kegiatan masyarakat;

f. Kesiapsiagaan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukanuntuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana;
g. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat acaman dan tingkat kerugian akibat bencana.

Secara garis besar, Indonesia memiliki 13 (tiga belas) ancaman bencana yang sering dialami dan patu diwaspadai terdiri dari :

a. Gempa Bumi;
b. Tsunami;
c. Banjir;
d. Tanah Longsor;
e. Letusan Gunung Berapi;
f. Gelombang Ekstrim dan Abrasi;
g. Cuaca Ekstrim;
h. Kekeringan;
i. Kebakaran Hutan dan Lahan;
j. Kebakaran Gedung dan Pemukiman;
k. Epidemi dan Wabah Penyakit;
l. Gagal Teknologi; dan
m. Konflik Sosial.

Untuk mengukur capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah (Satpol PP dan PBD) Provinsi Papua dimana Satpol PP dan PBD Prov.Papua di Tahun 2022 adalah mengikuti target 65 % dari target nasional (BNPB RI).

Sedangakan Capaian yang diperoleh pada tahum 2022 adalah hasil dari Jumlah kasus yang terjadi dibagi jumlah kasus yang tertangani yaitu : 4 : 32 x 100% = 19, 23.

Untuk mengukur tinggi atau rendahnya capain kinerja Satpol PP dan PBD Provinsi Papua menggunakan Skala Ordinal Penilaian guna mengukur sejauhmana keberhasilan dan ketidak berhasilan pencapaian sasaran.

Dari hasil analisis pencapaian target dari penetapan target 65% dan realisasinya adalah 12.5% dengan capaiannya 19,23% menunjukan tingkat kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dan PBD Provinsi papua adalah Tidak Berhasil/Rendah.

Rendahnya capaian target ini disebabkan oleh minimnya/ kurangnya dukungan anggaran yang di kelola oleh Satpol PP dan PBD Provinsi Papua untuk mendorong peningkatanan kinerja dalam Penanggulangan Bencana baik di Kabupaten/Kota se-Papua.

Tolok ukur Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan tingkat penangananya masih rendah terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.82 Jumlah dan Jenis Bencana
di Kab/Kota se Papua
Tahun 2022

NO.	KABUPATEN/KOTA	JENIS BENCANA							Jumlah Kasus
		Gempa Bumi	Banjir	Longsor	Abrasi	Gelombang Pasang	Angin Puting	Embun Beku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Merauke								0
2.	Jayawijaya								0
3.	Jayapura		4	1			1		6
4.	Nabire		1						1
5.	Kepulauan Yapen								0
6.	Biak numfor								0
7.	Puncak Jaya								0
8.	Paniai			1					1
9.	Mimika						1		1
10.	Sarmi								0
11.	Keerom								0
12	Pegunungan Bintang			1					1
13.	Yahukimo		1						1
14.	Tolikara								0
15.	Waropen		1	1			1		3
16.	Boven Digul								0

NO.	KABUPATEN/KOTA	JENIS BENCANA							Jumlah Kasus
		Gempa Bumi	Banjir	Longsor	Abrasi	Gelombang Pasang	Angin Puting	Embun Beku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Mappi			1					1
18.	Asmat								0
19.	Supiori								0
20.	Mamberamo Raya	1							1
21	Mamberamo Tengah								0
22.	Yalimo								0
23.	Lanny Jaya							1	1
24.	Nduga								0
25.	Puncak								0
26.	Dogiyai								0
27	Intan Jaya								0
28.	Deiyai			1					1
29	Kota Jayapura			4					4
Jumlah		**1**	**7**	**10**	**0**	**0**	**3**	**1**	**22**

Sumber data : Satpol PP dan PBD Provinsi Papua Tahun 2022

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 22 (dua puluh dua) kasus dari jenis bencana yang sering terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua sepanjang Tahun 2022 adalah bencana banjir sebanyak 7 (Tujuh) Kasus, tanah longsor sebanyak 10 (sepuluh) kasus, gempa bumi sebanyak 1 (satu) kasus, angin puting beliung sebanyak 3 (tiga) kasus dan embun beku sebanyak 1 (satu) kasus. Untuk Kabupaten yang paling terbanyak mengalami berbagai bencana adalah Kabupaten Jayapura sebanyak 6 (enam) kasus. Untuk lebih jelasnya mengenai perincian kejadian bencana di tiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua berdasarkan jenis bencananya dapat dilihat pada tabel 3.81 diatas.

Dari 22 (dua puluh dua) kasus yang terjadi di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua ada 11 (sebelas) kasus yang dapat tertangani oleh Satpol PP dan PBD Provinsi Papua hanya sebesar 50 % dari target nasional yang di tetapkan oleh BNPB RI yaitu sebesar 65 %.

Kendala ini disebabkan oleh minimnya/ kurangnya dukungan anggaran pada yang di kelola oleh Satpol PP dan PBD Provinsi Papua untuk pengadaan dan pendorongan Logistik, Tim Operasi Reaksi Cepat dan Peralatan Penanggulangan Bencana yang memadai.

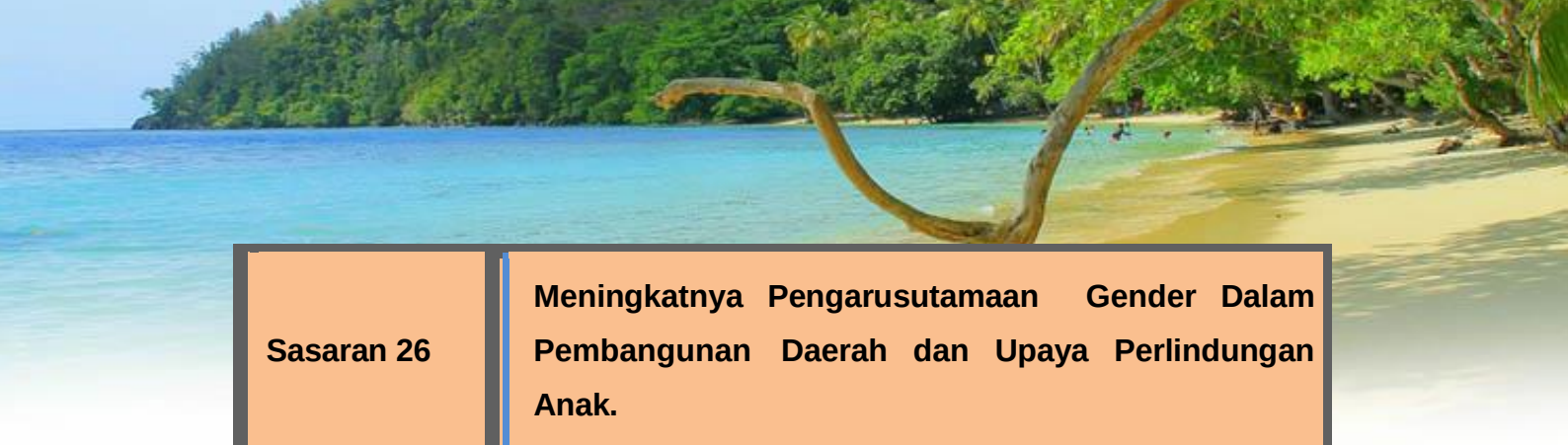

Sasaran 26	**Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Upaya Perlindungan Anak.**

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak” sebesar 111,27 persen dengan predikat ***sangat berhasil,***dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Target indikator kinerja realisasi dan capaiannya diuraikan dalam table berikut :

Tabel 3. 83 Rencana dan Realisasi Capaian sasaran 26

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1		2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	79,90	80,16	98,87
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	64,47	65,27	12,40
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja					**111.27**

Selanjutnya ditampilkan perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja selama 4 (empat) tahun, yaitu Tahun 2019 sampai dengan 2022 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.84 Pembanding Indikator Kinerja Sasaran 26 dari Tahun 2019-2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN											
			2019			2020			2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Pembangunan Gender (IDG)	Indeks	79.99	80.05	100.06	79.69	79.59	99.87	79.79	79.69	99.87	64,47	65,27	12,40
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks	62.91	70.68	112.35	63.43	65.37	103.06	63.95	65.27	102.6	79,90	80,16	98,87
	Capaian Indikator Kinerja				**85.37**			**101.46**			**100.96**			**111,27**

Indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG), dengan Target 79,90 terealisasi 80,16 dengan capaian kinerja 98,87 dengan kategori ***berhasil.*** *Artinya ini hampir mencapai* target IPG 100,00% atau 0,98 akan tetapi secara keseluruhan telah berhasil memperoleh capaian kinerja 98,87 di tahun 2022. Perkembangan indeks pembangunan gender (IPG) menurun sedikit dibandingkan dengan IPG tahun sebelumnya (2021) sebesar 80,69, atau sekitar 0,53 poin. Adapun penurunan indikator IPG dipengaruhi oleh :

1. Angka Harapan Hidup (AHH)
2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
4. Pengeluaran Perkapita yang ditentukan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki – laki dan perempuan dan kesetaraan gender akan terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Dari sisi pendidikan dilihat melalui Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, dari sisi kesehatan dilihat melalui Usia Harapan Hidup, dan Pengeluaran pada laki-laki dan perempuan dilihat dari pengeluaran perkapita yang ditentukan. Tahun 2022 pendidikan dan kesehatan masyarakat meningkat akan tetapi pengeluaran perkapita yang ditentukan agak menurun. Banyak Faktor menyebabkan penurunan pengeluaran perkapita baik secara nasional maupun di Papua. Beberapa factor yang mempengaruhi menurunan pengeluaran perkapita disebabkan situasi yang berlaku, dimana masa pandemic covid-19 ini menyebabkan focus penanganan lebih banyak menangani permasalahan kesehatan dan pendidikan, atau dapat dikatakan ada pengurangan intensitas pada beberapa sector lainnya, seperti sector perekonomian, pemberdayaan, social termasuk mempengaruhi pelayanan public/ pemerintahan. Oleh karena itu dimensi pengeluaran perkapita yang di tentukan tentu akan menurun sedangkan pendidikan dan kesehatan berkembang stabil. Situasi ini berpengaruh juga terhadap pembangunan manusia di Indonesia tanpa terkecuali Papua.

Pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM) nasional tahun 2022 dibanding tahun – tahun sebelumnya sebesar 72,55 atau meningkat 0,56 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua sebesar 60,68 angka ini naik 0,08 poin atau naik 0,99 persen dibandingkan tahun 2021 60,62. Akan tetapi trent pertumbuhan IPM Papua dari tahun 2019 – 2022 terlihat tumbuh walaupun kemudian menurun sedikit di tahun 2020, namun di tahun 2021 dan 2022 terjadi kenaikan. Perlambatan pertumbuhan IPM Papua tahun 2022 dipengaruhi oleh menurunnya rata – rata pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Penurunan dan Kenaikan rata–rata pengeluaran perkapita dapat dilihat paga grafik 2 dan grafik 3. Pertumbuhan IPM nasional dan IPM Papua dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.15 PERKEMBANGAN IPM PAPUA, IPM NASIONAL

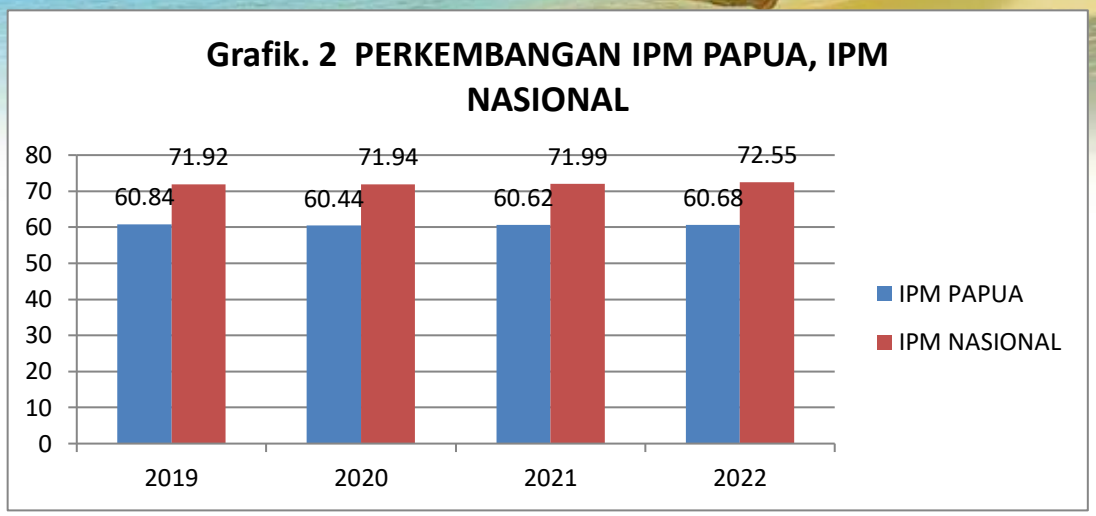

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Tabel berikut menggambarkan perkembangan IPM dilihat dari data terpilah gender.

Grafik 3.16 IPM Nasional Menurut Jenis Kelamin

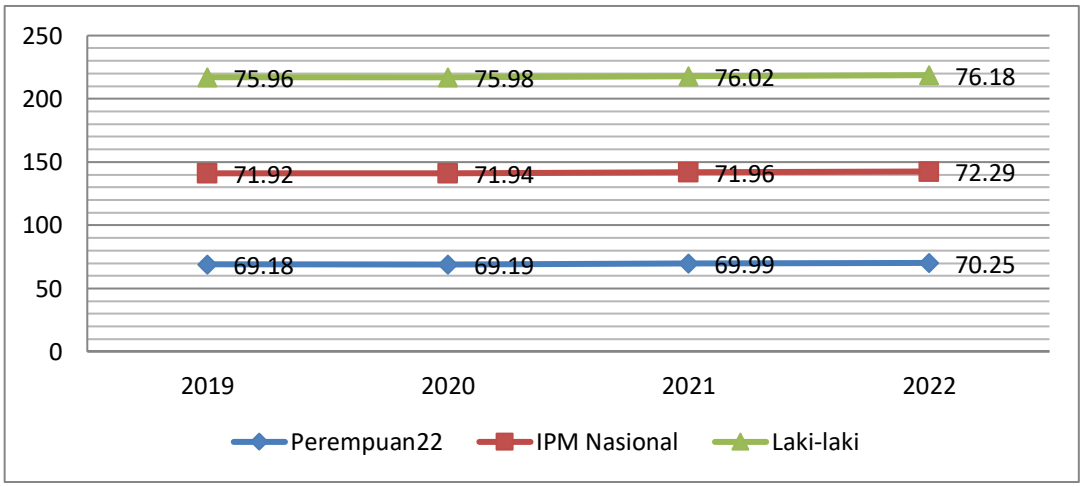

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022.

Secara Nasional Tahun 2022 IPM laki-laki lebih tinggi dibanding tahun 2021 yaitu terjadi kenaikan 0,16 sedangkan IPM perempuan juga terjadi peningkatan sedikit lebih besar yaitu 0,26 dibandingkan IPM laki-laki. Peningkatan IPM perempuan di tahun 2022 sekitar 0,26 poin sedangkan IPM laki-laki 0,16 poin. Peningkatan IPM perempuan yang sedikit lebih tinggi di

tahun 2022 dibandingkan laki-laki menunjukkan pembangunan sudah menuju keadilan gender. Sedangkan rata-rata IPM Nasional terjadi peningkatan 0,33 point.

Grafik 3.17 Perkembangan IPM Papua Menurut Jenis Kelamin

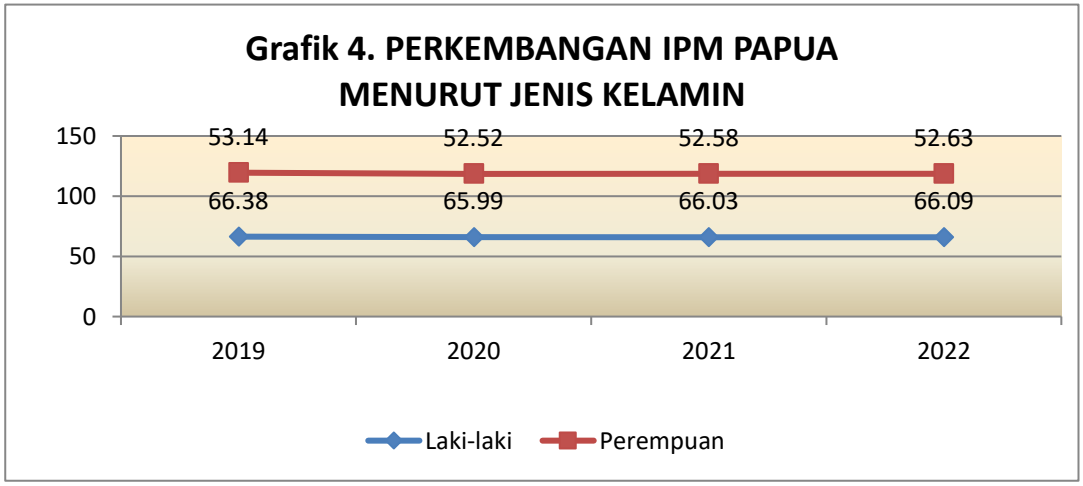

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022.

Khusus di Papua Perkembangan IPM laki-laki naik sedikit lebih besar pada tahun 2022 atau sekitar 0.06 poin dibandingkan dengan tahun 2021, sedangkan IPM Perempuan naik 0,05 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2019-2022 dapat dikatakan pertumbuhan IPM menurut jenis kelamin di tahun 2019 terjadi kenaikan, namun menurun ketika memasuki tahun 2020, tetapi di tahun 2021 dan 2022 terjadi sedikit kenaikan. Dalam Penyusunan Indeks Laki-laki dan Indeks Perempuan digunakan rumus yang sama dengan IPM. Metode agregasi yang dilakukan guna mendapatkan angka IPM laki-laki dan perempuan sama seperti metode agregasi yang dilakukan ketika ingin mendapatksn IPM. Penghitungan angka IPG tidak lagi membandingkannya dengan angka IPM, namun dengan menggunakan rasio perhitungan dari PMBG, sebagai berikut :

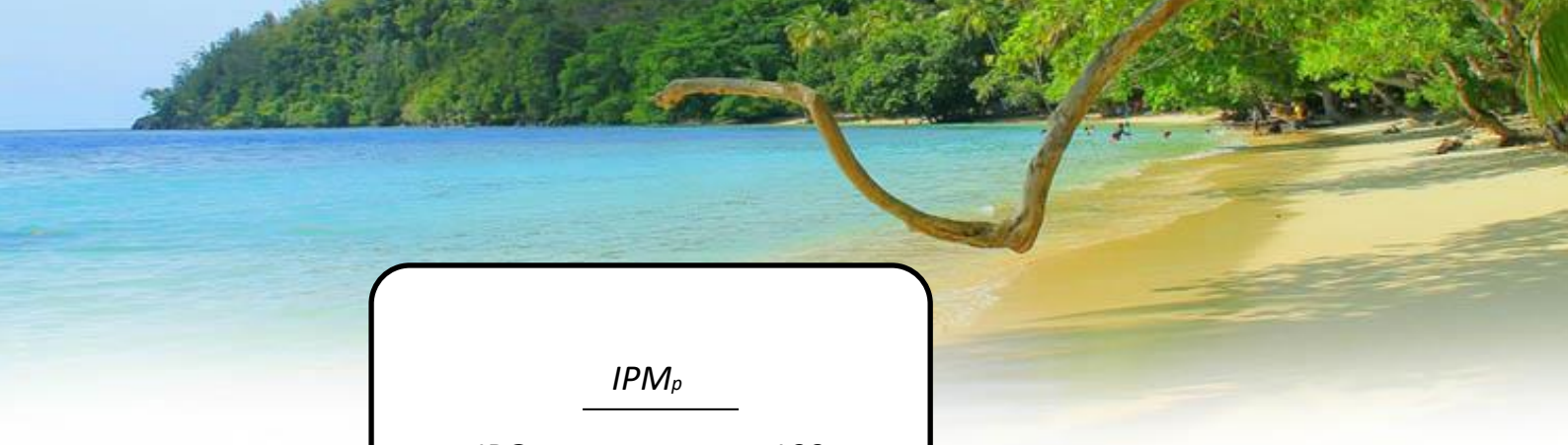

$$IPG = \frac{IPM_p}{} \times 100$$

Pada Grafik 4 Perkembangan IPM Papua menurut jenis kelamin di hitung berdasarkan rumus ; 52,63

IPG = ——— X 100 = 79,63

66,09

Angka 79,63 yang di dapat dari IPM laki-laki dibagi IPM Perempuan dikali 100, ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati nilai 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antara jenis kelamin. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan.Angka 100 dijadikan parokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna

Pencapaian dimensi komposit pembentuk indikator IPM/IPG akan di uraikan pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.18 Angka Harapan Hidup (AHH)
Menurut Jenis Kelamin Di Papua

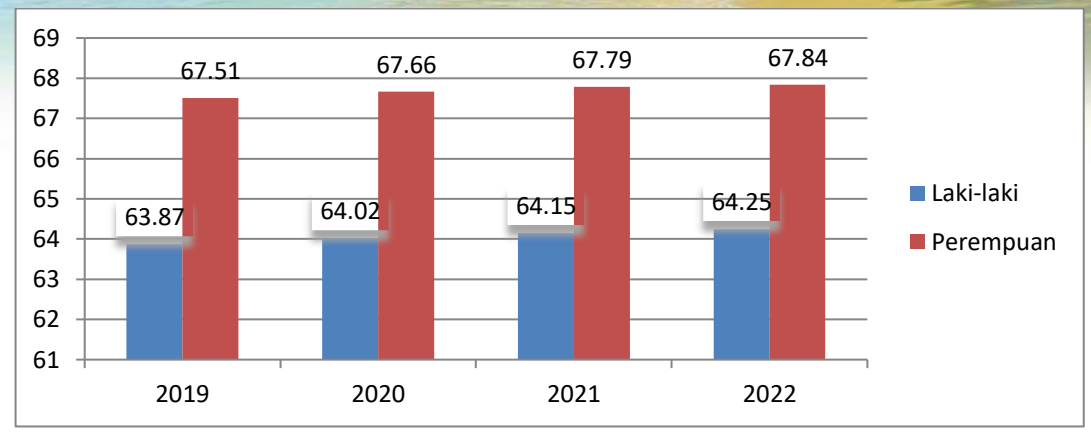

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022.

Dari grafik diatas diketahui bahwa angka harapan hidup baik laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan, hal ini menunjukan adanya peningkatan status kesehatan masyarakat.

Grafik 3.19 Angka Harapan Hidup (AHH)
Menurut Jenis Kelamin Secara Nasional

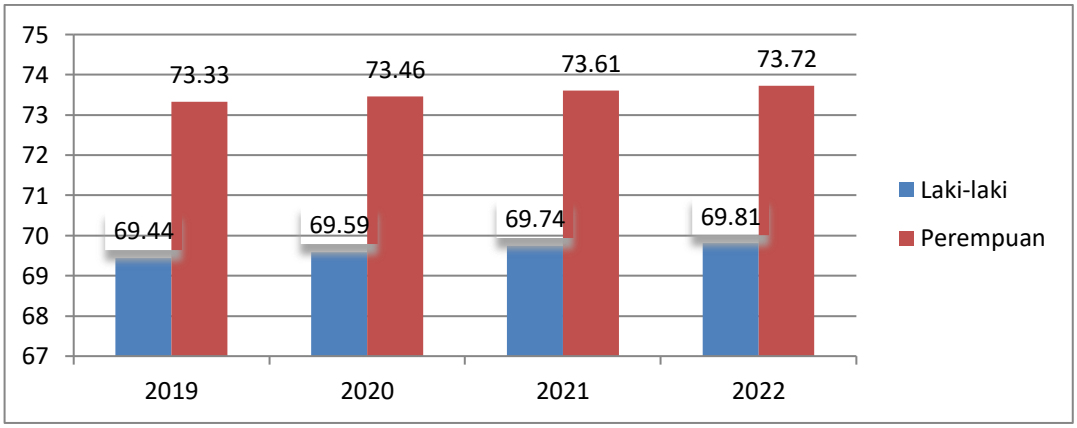

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022.

Grafik diatas juga menunjukkan bahwa rata – rata angka harapan hidup perempuan lebih lama dibandingkan laki-laki. Ini berarti bahwa bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 73,72 tahun demikian sebaliknya. Kondisi ini mengindikasikan derajat kesehatan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Grafik 3.20 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
Menurut Jenis Kelamin di Papua

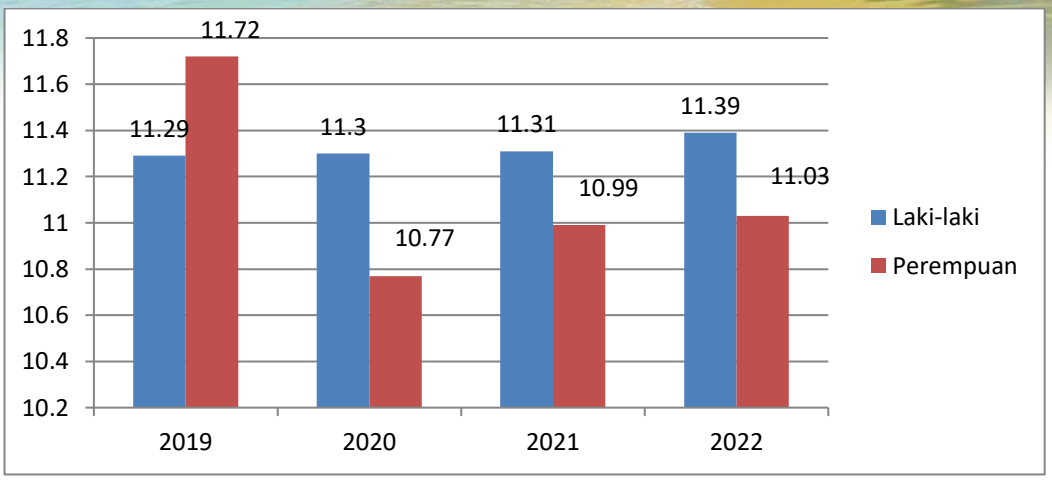

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022.

Grafik diatas menunjukan peningkatan rata – rata angka harapan lama sekolah (HLS) di Papua dari tahun 2019-2022. Tahun 2022 angka harapan lama sekolah laki-laki meningkat 0,8 poin dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan angka harapan lama sekolah perempuan juga meningkat 0,4 poin dibanding tahun 2021. Hal ini menunjukkan trent positif peningkatan kualitas sumber daya melalui sektor pendidikan.

Grafik 3.21 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
Menurut Jenis Kelamin secara Nasional

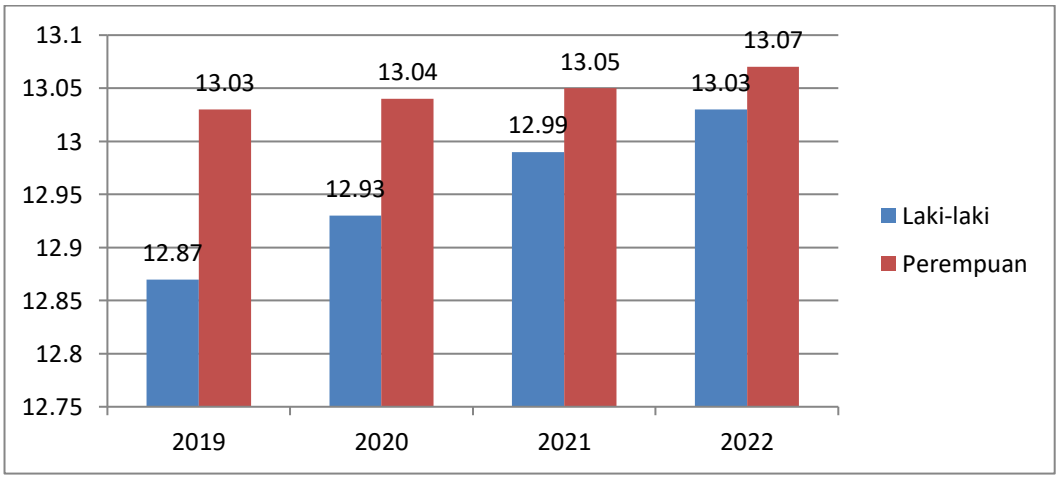

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022.

Secara nasional angka harapan lama sekolah (HLS) juga menunjukkan bahwa anak-anak laki-laki berusia 7 tahun memiliki harapan dapat

mengenyam pendidikan hingga 13.03 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan jenjang diploma. Anak – anak perempuan justru mempunyai harapan lebih lama sekolah yaitu sampai dengan 13,07 tahun atau lebih lama 0,4 bulan dibandingkan dengan anak laki-laki.

Grafik 3.22 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Papua Menurut Jenis Kelamin

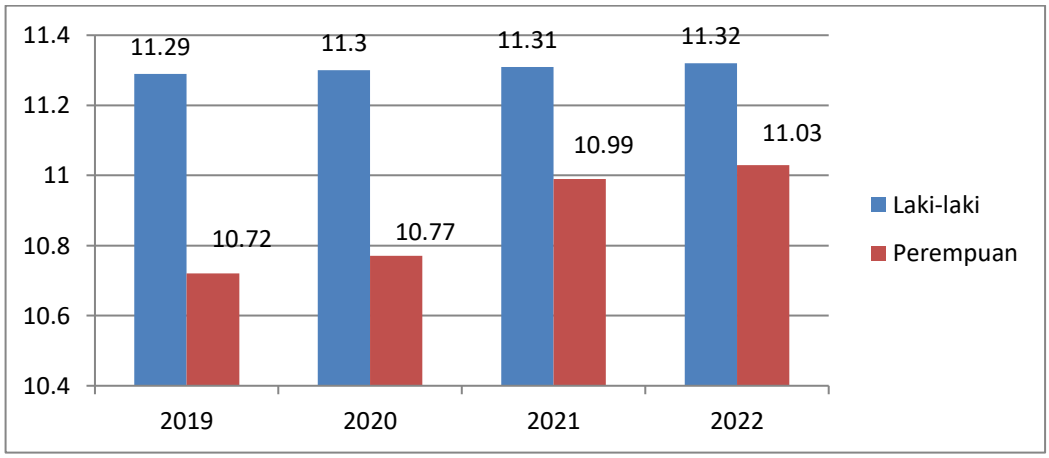

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Rata-rata lama sekolah di peroleh dengan membagi jumlah penduduk dikali lama pendidikan yang dihabiskan di bagi jumlah penduduk 15 tahun keatas yang sedang bersekolah/ telah berijazah. Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa rata – rata lama sekolah bagi perempuan adalah 5.97 atau setara kelas V semester III, sementara laki-laki sudah menempuh pendidikan 7,45 tahun masa sekolah atau setara kelas kelas VII. Dengan demikian pemerintah daerah dapat sasaran dan strategi dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah, antara lain : menyiapkan infrastruktur, membangun ruang kelas, menyiapkan tenaga guru, memberikan beasiswa, ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat afirmatif dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM di daerah.

Grafik 3.23 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Secara Nasional Menurut Jenis Kelamin

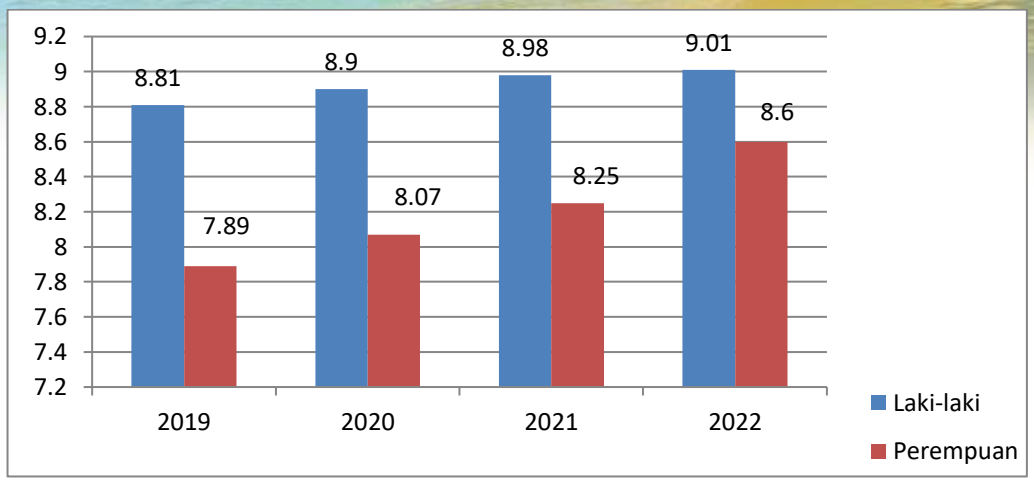

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022.

Demikian halnya dengan rata-rata lama sekolah (RLS) Papua, peningkatan Kualitas Sumber Daya secara nasional juga telah menjadi agenda tetap setiap tahunnya dalam program dan kegiatan, karena memasuki masa milenium dibutuhkan kualitas sumber daya manusia siap pakai dan berani dalam pengambilan keputusan agar tercipta masyarakat maju dan mandiri.

Grafik 3.24 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan
(Ribu/rupiah/orang/tahun) Menurut Jenis Kelamin di Papua

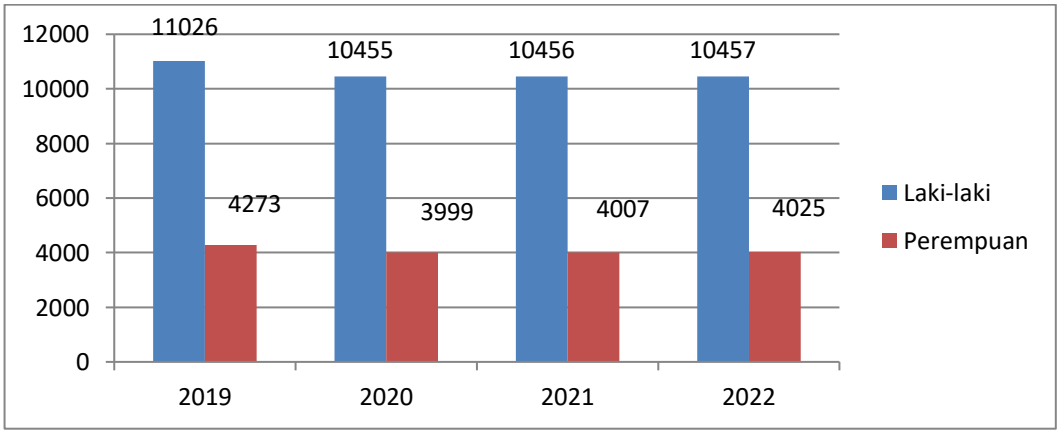

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022.

Meningkatnya rata – rata pengeluaran perkapita laki-laki dari 10456 juta rupiah pada tahun 2021 menjadi 10457 juta rupiah pada tahun 2022 atau naik 0,1 poin. Hal ini memberikan dampak positif kenaikan IPM/IPG di tahun

2022. Pengeluaran perkapita perempuan juga mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 4025 atau naik sebesar 0,18 poin dibandingkan rata – rata pengeluaran perkapita 2021.

Grafik 3.25 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu / rupiah/ orang/tahun) secara Nasional Menurut Jenis Kelamin

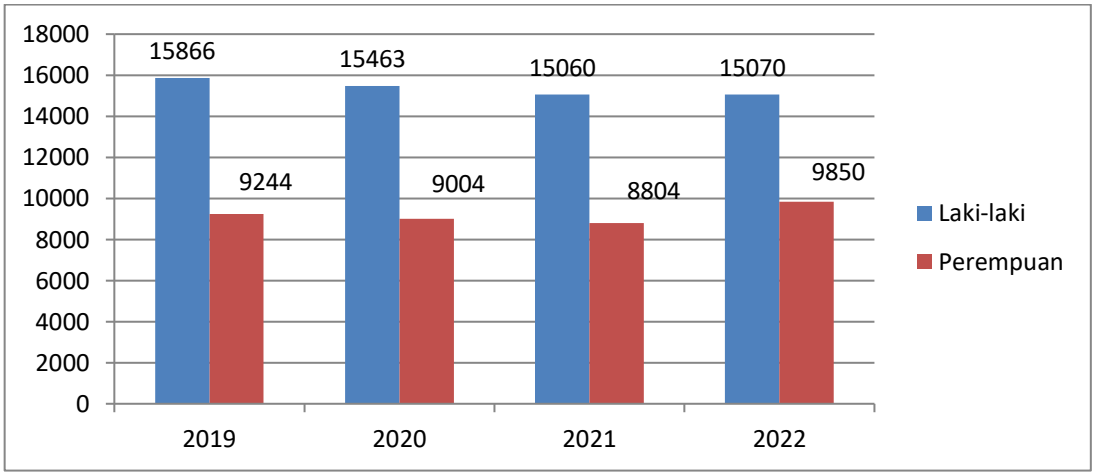

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022.

Dengan demikian dari 4 (empat) komposit IPG/IPM diatas, dapat disimpulkan bahwa : kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat secara umum mengalami peningkatan, sedangkan dari sisi pengeluaran perkapita juga mengalami peningkatan. Dengan naiknya pengeluaran perkapita yang lambat hendaknya diikuti dengan program pembangunan ekonomi kerakyatan dimulai dari yang berskala kecil termasuk program pemberantasan kemiskinan meskipun persentase kemiskinan cenderung turun namun sangat lambat, dan penggalakkan program padat karya serta meminimalisasi ketimpangan pembangunan di daerah.

Grafik berikut menggambarkan perkembangan IPG Papua dan IPG Nasional sebagai berikut :

Grafik 3.26 PERKEMBANGAN IPG PAPUA DAN IPG NASIONAL

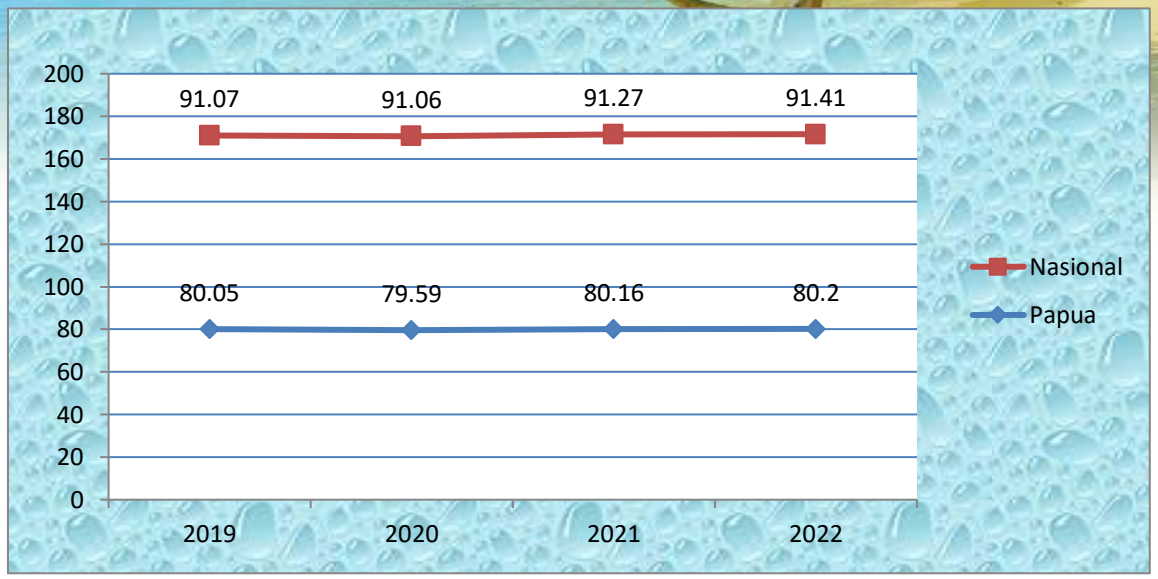

Sumber : Badan Pusat Statistik 2022.

Pada tahun 2022, IPG nasional mengalami kenaikan 0,14 point dari 91,27 tahun 2021 menjadi 91,41 di tahun 2022. Tahun 2019 Indeks Pembangunan Gender nasional mengalami peningkatan dengan capaian 91,07, kemudian menurun di tahun 2020 sebesar 0,1 poin namun di tahun 2021 terjadi kenaikan 0,21 poin. Naiknya pengeluaran perkapita juga merupakan salah satu factor berpengaruh terhadap capaian indicator kinerja IPG tahun 2022. Faktor berpengaruh lainnya adalah melambatnya penyakit pandemic covid-19 yang telah menguras perhatian dan membatasi ruang gerak masyarakat selama ini sehingga perputaran ekonomi agak lambat.

Meskipun pertumbuhan IPG Papua menunjukan peningkatan pada tahun 2019 (80,05) dan turun di tahun 2020 (79,59), namun di tahun 2021 kembali naik menjadi 79,69. Walaupun terjadi pemulihan capaian – capaian IPG di tahun-tahun sebelumnya, namun capaian IPG di tahun 2022 dapat dikatakan sangat berhasil, tahun 2022 yang menargetkan IPG telah mencapai 80,16. Hal Ini dipengaruhi oleh capaian IPG tingkat kabupaten dan kota. Semakin banyak Kabupaten Kota dengan capaian IPG yang jauh dari target maka semakin jauh capaian IPG Papua dari target yang diharapkan.

Adapun pertumbuhan IPG Kabupaten dan Kota tersirat dalam grafik berikut :

Grafik 3.27 Perkembangan IPG Kabupaten dan Kota di Papua Tahun 2019-2022

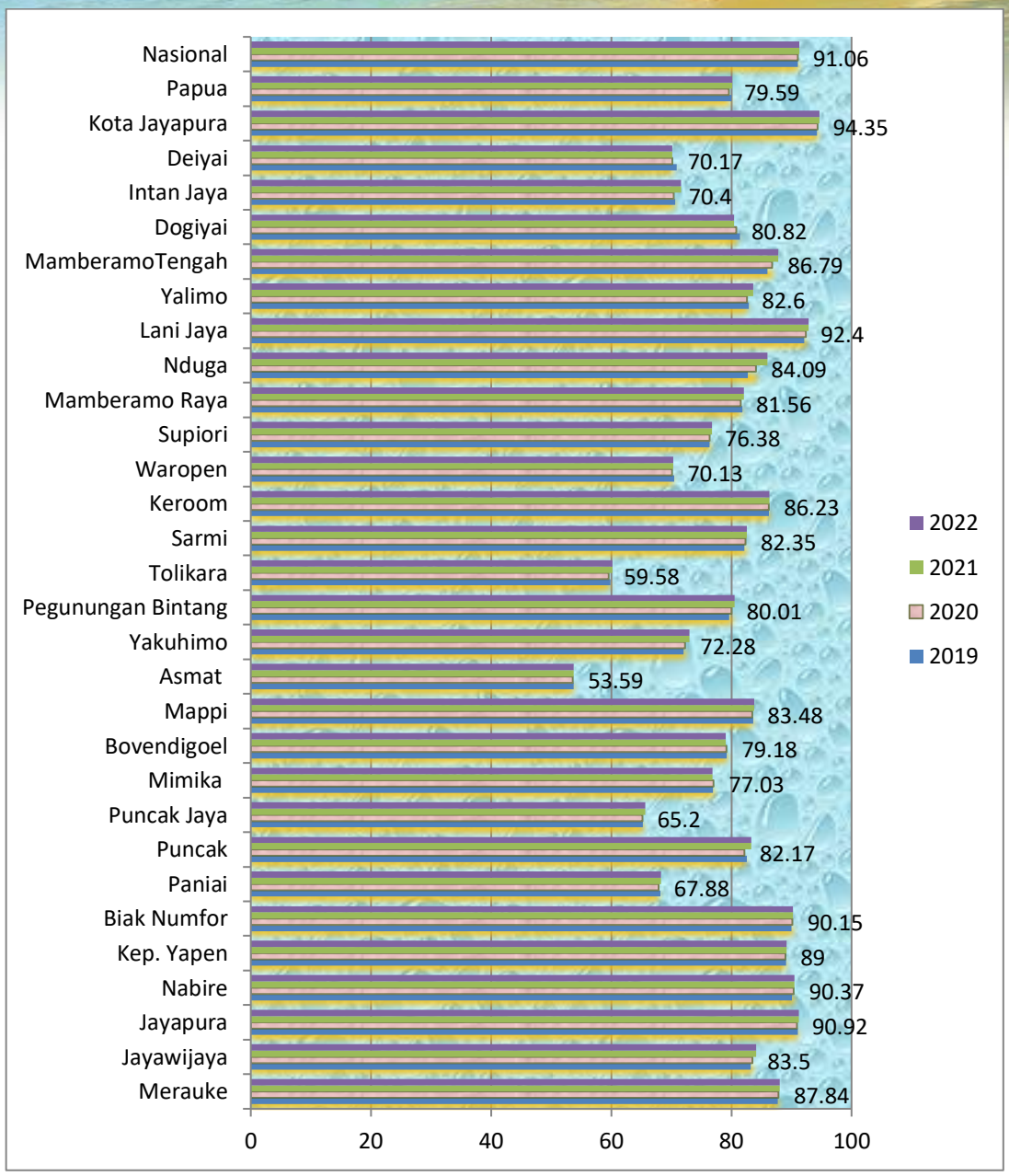

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan sebaran IPG kabupaten dan kota, terdapat 5 (lima) Kabupaten/Kota yang mempunyai nilai diatas rata – rata IPG Nasional diatas 90 mendekati 100, yaitu : Kota Jayapura 94,35, Lani Jaya 92,40, Kabupaten Jayapura 90,92, Nabire 90,37 dan Biak Numfor 90,15, dan sekitar 15 (lima belas) kabupaten yang juga memiliki nilai IPG diatas rata-rata IPG Papua antara lain : Yapen 89,00, Merauke 87,84, Mamberamo Tengah 86,79, Keroom 86,23, Nduga 84,09, Jayawijaya 83,50, Mappi 83,48, Sarmi 82,35,

Puncak 82,17, Mamberamo Raya 81,56, Dogiyai 80,82, Pegunungan Bintang 80,01, Bovendigoel 79,18, dan Mimika 77,03.

Meskipun demikian, capaian IPG suatu daerah tidak bermakna pembangunan manusia baik laki-laki maupun perempuan di daerah tersebut sudah tinggi. IPG diformulasikan sebagai rasio IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Nilai IPG yang tinggi bisa didapatkan dari daerah dengan IPM laki-laki dan IPM perempuan yang "sama-sama tinggi" dan "sama-sama rendah".

Pemberdayaan gender dalam pembangunan diukur melalui indeks komposit Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari Gender Empowerment Measure (GEM) yang dikembangkan UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu *keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan*. Meski sama- sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender yang dilihat pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi; sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Pencapaian indeks Pemberdayaan Gender Nasional dan pencapaian indeks Pemberdayaan Gender Papua dapat dilihat pada grafik 14 dibawah ini :

Grafik 3.28 Pertumbuhan IDG Nasional dan IDG Papua

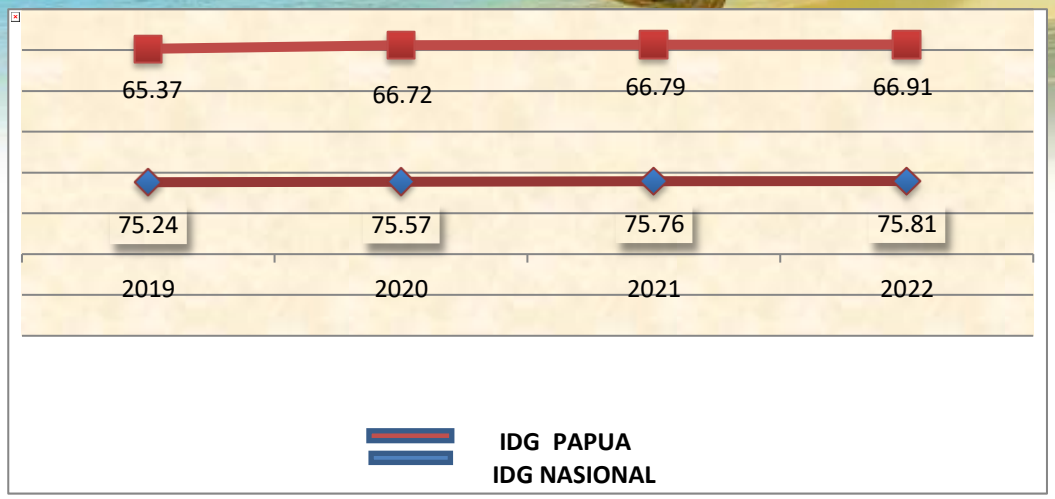

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinsosdukp3a 2022.

Posisi IDG Provinsi Papua pada tahun 2019 (80,05) mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 menjadi 79,59, pada tahun 2021 naik menjadi 79,69 dan di tahun 2022 juga naik menjadi 65,27 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukan ada kemajuan pencapaian IDG Papua terlihat dari banyaknya upaya – upaya pemerintah daerah dalam mendukung program-program pemberdayaan Gender secara berkesinambungan. Hal ini menjadi sinyal positif bagi pemerintah daerah bahwa secara umum, kebijakan responsif gender yang telah dilakukan telah berjalan cukup baik.

Penetapan target IDG tahun 2022 sebesar 64,47 mengacu pada capaian IDG tahun sebelumnya (2021) dan terealisasi 65,27 meningkat lebih tinggi dari target indicator kinerja. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan pencapaian IDG Papua.

Melengkapi data IDG Papua, grafik berikut menggambarkan perkembangan indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten/Kota di Papua sebagai berikut :

Grafik 3.29 Perkembangan IDG Kabupaten dan Kota di Papua Tahun 2019-2022

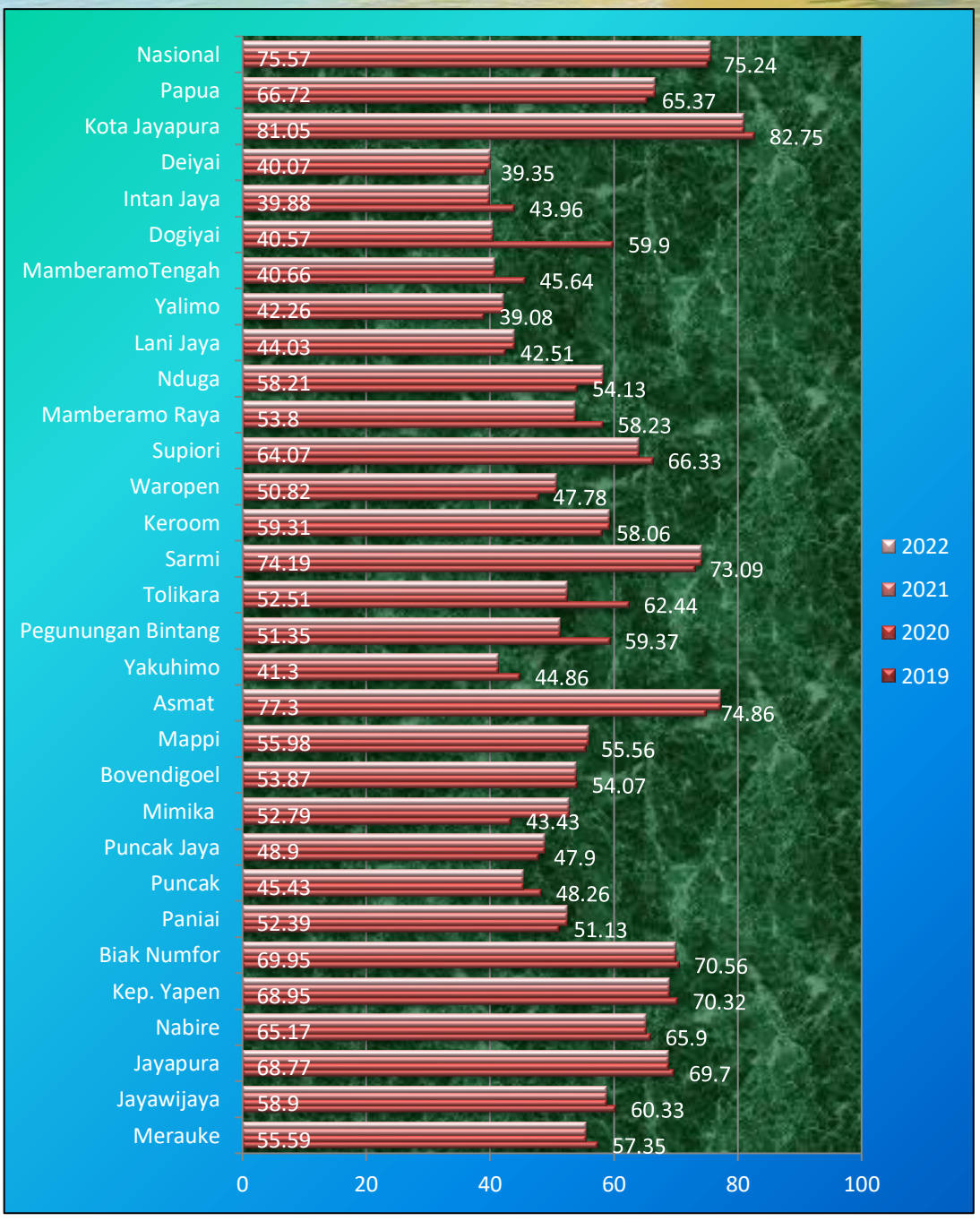

Sumber : PMBG tahun 2022.

Sejak 2019, IDG Indonesia secara nasional 75,24 kemudian meningkat lagi ditahun 2020 sebesar 75,57 atau sekitar 0,33 poin sedangkan tahun 2021 tidak ada perubahan sampai pada tahun 2022 tetap 75,57. Demikian halnya dengan peringkatan IDG 2019 Papua 80,05 dan pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 79,59 sedangkan untuk tahun 2021 tidak ada kenaikan

sampai dengan tahun 2022. Capaian IDG kabupaten dan kota sangat variatif ada kabupaten dan kota yang sudah dapat mencapai IDG Papua bahkan beberapa Kab.Kota yang memiliki capaian IDG diatas rata-rata nasional bahkan ada kabupaten berada di bawah rata-rata capaian IDG.

Grafik 3.30 Perkembangan Dimensi IDG Papua tahun 2019-2022

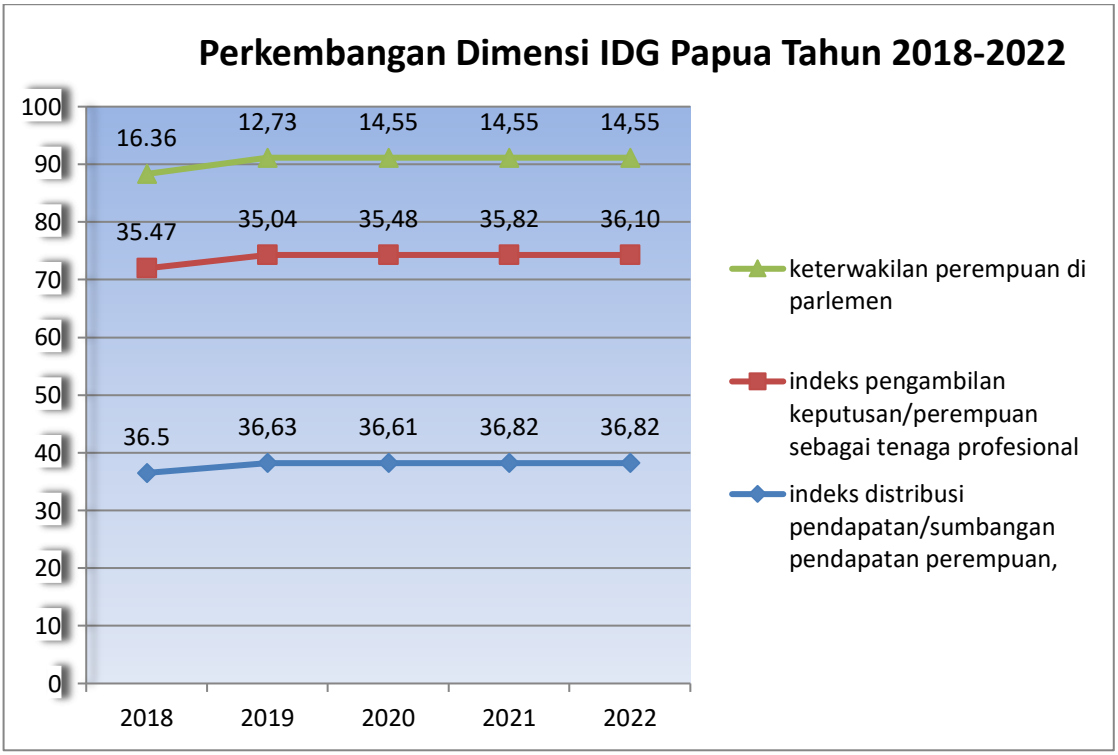

Sumber :PMBG 2019 dan Dinsosdukp3a 2022.

Berdasarkan grafik 15 dan grafik 16 menunjukan perkembangan indeks pemberdayaan gender (IDG) di Papua, dapat digambarkan bahwa peran perempuan sudah berkontribusi terhadap pembangunan baik secara ekonomi dan politik di daerah namun kelambatan pertumbuhan IDG disebabkan karena masih melekatnya budaya patriarkhi dimana peran laki-laki masih diutamakan dan peran perempuan hanya di area domestik/rumah tangga. Walaupun belum memperlihatkan peran perempuan secara utuh namun dengan adanya perkembangan teknologi perempuan saat ini mulai menentukan posisi pada bidang – bidang kerja sesuai keahlian yang dimiliki.

Dalam perhitungan IDG terlebih dahulu dihitung indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang equivalen dengan distribusi yang merata. Hasil yang di anggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing

kelompok Gender untuk semua komponen IDG dapat di lihat pada Grafik 17 Perkembangan Dimensi IDG. Yang di hitung menggunakan Rumus EDEP *(Equally Distributed Equivalent Persentage)* pada PMBG.

Ada 3 (tiga) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yaitu ;

I(par) : Indeks Keterwakilan Perempuan di Parlemen

I(DM) : Indeks Pengambilan Keputusan/Perempuan sebagai tenaga profesional

I(inc-dis) : Indeks Distribusi Pendapatan/Sumbangan Pendapatan Perempuan

$$IDG = \frac{(I_{(par)}+I_{(DM)}+I_{(inc\text{-}dis)}}{3}$$

$$IDG = \frac{14,55+36,10+36,82}{3}$$

IDG sama dengan indeks Keterwakilan Perempuan di Parlemen di tambah Indeks Pengambilan Keputusan/Perempuan sebagai tenaga profesional di tambah Indeks Distribusi Pendapatan/Sumbangan Pendapatan Perempuan di bagi tiga hasilnya 79,63 Akumulasi 79,63 Peran Perempuan sudah ada dari tiga Indeks yang dimaksud bukan saja di parlemen tetapi dari segi pemerintahan dan tenaga profesional juga sda ada.

Hal ini terlihat pada keterwakilan perempuan dalam kelembagaan politik Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua sebagaimana tersirat dalam grafik dibawah ini :

Grafik 3.31 Jumlah Anggota DPRD Kab/Kota Terpilah Gender

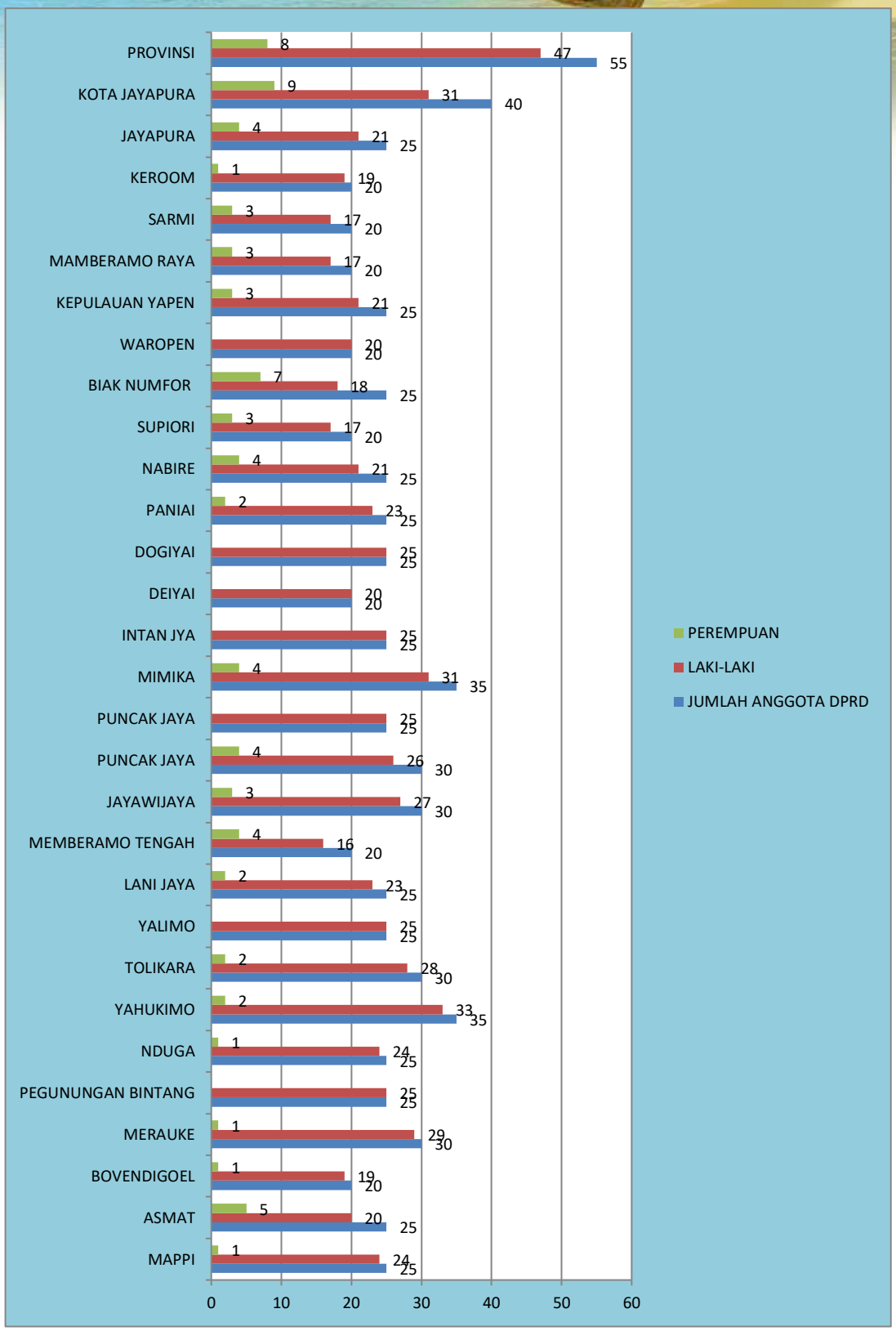

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Papua 2022

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa kesempatan berpolitik bagi perempuan hanya sekitar 10% dari 795 kursi yang tersedia dalam

kelembagaan politik atau perempuan hanya menduduki 78 kursi jika di bandingkan dengan laki-laki di tahun 2022, bahkan ada daerah yang belum memberikan peluang bagi perempuan dalam organisasi politik. Hal ini perlu di seriusi karena banyak perempuan papua yang mempunyai kemampuan berpolitik namun belum mendapat kesempatan yang sama untuk bersaing di kancah politik bersama dengan laki- laki pada presentase Parlemen. Perempuan yang menduduki kursi Parlemen masih jauh di bandingkan dengan laki-laki. Komposisi Perempuan dalam Kelembagaan Politik dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.32. Komposisi Perempuan Dalam Organisasi Politik di Papua

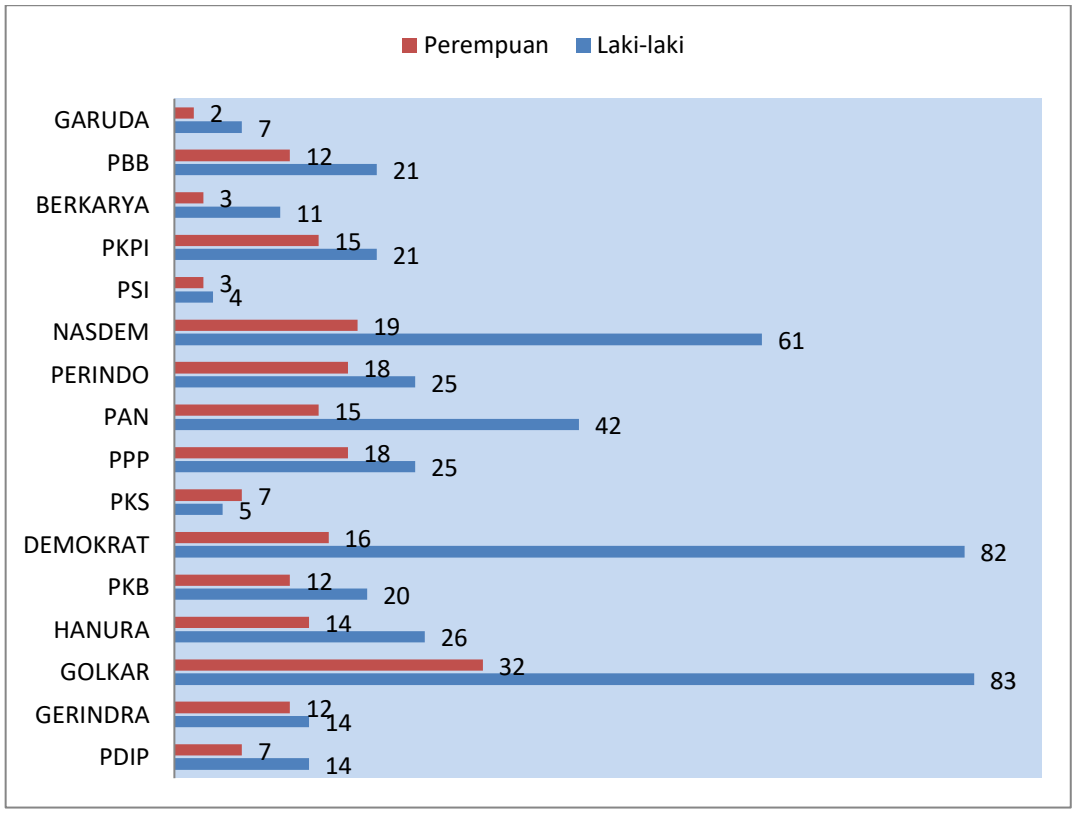

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Papua 2022.

Berdasarkan grafik diatas peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membuat terobosan – terobosan membuka peluang bagi perempuan antara lain melakukan MOU dengan KPU serta instansi teknis lainnya untuk menjaring potensi sumberdaya perempuan untuk mengisi kekosongan kursi perempuan dalam kelembagaan politik, termasuk memberikan peluang yang sama untuk menduduki jabatan – jabatan penting dalam struktur

Pemerintahan tentu dengan pertimbangan kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan. hal ini juga bisa disebabkan karena salah satu indikator Pembentuk IDG tidak langsung berpengaruh pada Pandemi Covid-19 yaitu persentase perempuan di parlemen. Indikator Perempuan yang menduduki Parlemen di dapatkan dari proses Pemilihan Umum (PEMILU) yang dilaksanakan 5 (lima) Tahun sekali dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Parlemen.

Tabel 3.85 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022
dari 26 Sasaran Strategis dari Pemerintah Provinsi Papua sesuai RPJMD Prov.Papua Tahun 2019-2023

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR
1	**Meningkatnya Aksesibiltas, Mutu dan Tata Kelola**	**217,949,329,950.00**	**204,572,584,717.38**	**93.86**	
					Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
					Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
					Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
					Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
2	**Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat**	**649,371,311,962.00**	**592,373,630,312.40**	**91.22**	
					Fasilitasi Keprotokolan
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
					Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
					Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
					Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR
3	**Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga**	**20,730,759,082.00**	**17,896,646,138.00**	**86.33**	
					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
					Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
4	**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
5	**Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan**	**699,848,050,608.00**	**645,602,224,171.76**	**92.25**	
					Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
6	**Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat**	**14,006,822,103.00**	**12,876,869,213.00**	**91.93**	
7	**Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi**	**0.00**			
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR
					Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8	**Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua**	**187,894,694,888.00**	**186,639,274,854.00**	**99.33**	Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus**) Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
9	**Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**7,389,370,038.00**	**7,372,325,225.00**	**99.77**	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
10	**Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah**	**65,262,334,198.00**	**58,723,301,295.00**	**89.98**	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan Inovasi dan Teknologi Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus**) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
11	**Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah**	**41,845,545,000.00**	**26,448,076,014.00**	**63.20**	Penyelenggaraan Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi
12	**Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas**	**31,575,058,621.00**	**28,879,296,985.88**	**91.46**	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR
13	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim**	**69,302,696,221.00**	**65,949,286,810.00**	**95.16**	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Perbenihan Tanaman Hutan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
14	**Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayaguna an potensi sumberdaya secara berkelanjutan**	**31,038,143,935.00**	**29,474,114,607.42**	**94.96**	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR
					Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
					Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
					Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
					Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
					Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
15	**Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja**	**2,816,547,942.00**	**2,800,075,742.00**	**99.42**	
					Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
					Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
					Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
					Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
16	**Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah**	**6,049,267,510.00**	**5,720,129,252.00**	**94.56**	
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
					Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR
					Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
17	**Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah**	**38,454,646,088.00**	**24,047,435,183.00**	**62.53**	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi
18	**Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten**	**423,132,600,120.00**	**161,354,843,717.11**	**38.13**	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
19	**Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah**	**21,192,672,939.00**	**19,726,944,028.47**	**93.08**	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
20	**Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman**	**405,983,343,760.00**	**371,568,275,271.17**	**91.52**	

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR
					Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
21	**Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung**	**27,604,431,306.00**	**27,350,905,770.00**	**99.08**	
					Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
					Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
					Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
					Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
					Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
					Pengelolaan Museum Provinsi
22	**Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP**	**3,049,884,866.00**	**2,964,130,756.00**	**97.19**	
					Pelaksanaan Otonomi Daerah
23	**Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan**	**11,616,178,719.00**	**11,483,082,693.00**	**98.85**	
					Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama
					Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan
					Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
24	**Meningkatnya bantuan sosial PMKS**	**1,645,595,993.00**	**1,643,955,833.00**	**99.90**	

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR
					Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	5,070,131,525.00	4,928,660,741.00	97.21	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
26	Meningkatnya Pengarusutama an Gender dalam	2,452,411,910.00	2,404,154,850.00	98.03	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
	ANGGARAN PRIORITAS IKU	2,985,281,829,284.00	2,512,800,224,180.59	84.17	
	BELANJA LANGSUNG	7,079,992,700,354.00	6,261,671,354,539.41	78.78	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,830,516,549,373.00	4,938,075,683,855.21	89.23	
	TOTAL BL + BTL	12,910,509,249,727.00	11,199,747,038,394.60	86.75	

Jumlah total anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun 2022 adalah Rp12.910.509.249.727,00 yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak langsung Rp5.830.516.549.373,00 dan Belanja Langsung Rp7.079.992.700.354,00. Dari anggaran belanja langsung tersebut, jumlah anggaran untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp2.985.281.829.284,00 atau 42,17 persen dari anggaran belanja langsung. Realisasi dari anggaran yang digunakan untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp2.512.800.224.180,59 dari realisasi belanja langsung atau 35,49 persen. Persentase realisasi anggaran untuk mencapai prioritas IKU dibandingkan dengan anggaran APBD untuk melaksanakan prioritas IKU adalah 35,49 persen. Penyerapan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU sebesar 84.17 persen tersebut terjadi karena tidak semua anggaran yang disiapkan untuk melaksanakan program prioritas IKU dapat terserap seluruhnya.

BAB IV

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Pemerintah Provinsi Papua telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan selaku penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Papua.

Tugas-tugas tersebut secara operasional telah dilaksanakan oleh Sekretariat, Biro, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua melalui kegiatan masing-masing satuan kerja dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan stratejik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua.

Akuntabillitas Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan dan dicapai dalam Tahun 2022 adalah :

Tabel 4.1 Rekapitulasi 26 Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022

Keterangan	Jumlah
➢ Sasaran stratejik yang dilaksanakan dengan kategori :	26 sasaran
>Kategori “Sangat Berhasil”	16 sasaran
>Kategori “Berhasil”	2 sasaran
>Kategori “Cukup Berhasil”	1 sasaran
>Kategori “Kurang Berhasil”	1 sasaran
>Kategori “Tidak Berhasil”	6 sasaran
➢ Realisasi belanja pelaksanaan IKU	**Rp2.512.800.224.180.59**
>Prosentase realisasi belanja IKU terhadap anggaran IKU	84,17%
➢ Realisasi Belanja Langsung	**Rp 4.540.436.532.702.60**
> Prosentase realisasi belanja langung terhadap anggaran belanja langsung	78.78%

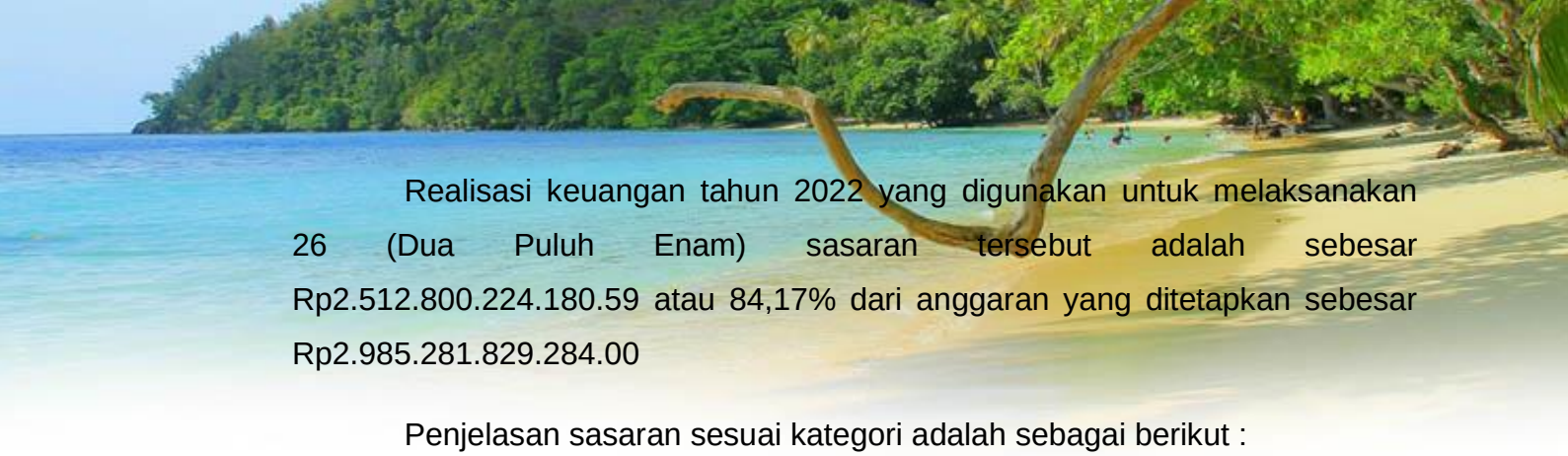

Realisasi keuangan tahun 2022 yang digunakan untuk melaksanakan 26 (Dua Puluh Enam) sasaran tersebut adalah sebesar Rp2.512.800.224.180.59 atau 84,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.985.281.829.284.00

Penjelasan sasaran sesuai kategori adalah sebagai berikut :

1. Kategori “Sangat Berhasil”, terdiri dari 16 (Enam Belas) Sasaran yaitu:
   1) Meningkatnya aksesibilitas, mutu dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan.
   2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
   3) Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga.
   4) Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi.
   5) Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan.
   6) Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat.
   7) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua.
   8) Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah.
   9) Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.
   10) Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
   11) Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah daerah dan akses bagi seluruh wilayah.
   12) Implementasi rencana tata ruang secara konsisten.
   13) Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah.
   14) Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman.
   15) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP.
   16) Meningkatnya pengarus utamaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak.

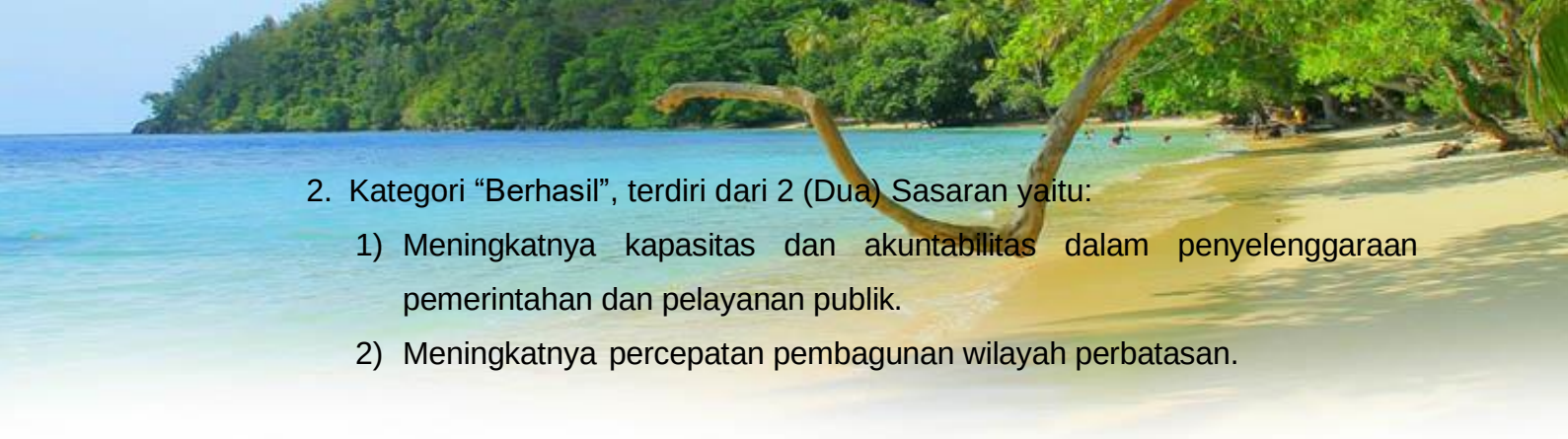

2. Kategori “Berhasil”, terdiri dari 2 (Dua) Sasaran yaitu:
    1) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
    2) Meningkatnya percepatan pembagunan wilayah perbatasan.

3. Kategori “Cukup Berhasil”, terdiri dari 1 (Satu) Sasaran yaitu:
    1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim.

4. Kategori “Kurang Berhasil”, terdiri dari 1 (Satu) Sasaran yaitu:
    1) Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelnjutan.

5. Kategori “Tidak Berhasil”, terdiri dari 6 (Enam) Sasaran yaitu:
    1) Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah.
    2) Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
    3) Meningkatnya daya saing dan realisasi inventasi pada sektor-sektor andalan daerah.
    4) Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung.
    5) Meningkatnya bantuan sosial Penanganan Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS).
    6) Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Secara umum masih dijumpai beberapa kendala yang perlu diatasi dalam pencapaian sasaran, yaitu:

1. Belum optimalnya Pemerintah Provinsi Papua dalam menentukan Target kinerja, pengukuran dan evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum dilaksanakan secara baik.

2. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dilingkungan SKPD antara lain :
    1) Keterbatasan kualitas SDM dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.
    2) Kurangnya pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan.
3. Adanya tuntutan kompetensi dalam pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan penempatan aparatur dalam jabatan. Hal ini menyebabkan kurangnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Kondisi geografis dan alam yang menghambat pelaksanaan sasaran dan indikator kinerja sasaran.

B. UPAYA PERBAIKAN

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai, maka Pemerintah Provinsi Papua akan terus mendorong pemangku kepentingan untuk selalu memperbaiki kualitas penyajian data dengan memperhatikan metode pengumpulan data yang akurat dan dpat dipertanggungjawabkan. Selain itu perlu ditingkatkan komitmen semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan isi Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani bersama antara Kepala SKPD dengan Gubernur sebagai Pimpinan Tertinggi di daerah. Dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua, perlu juga dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada seluruh SKPD.
2. Memperbaiki target kinerja yang ditetapkan dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi riel wilayah Papua.
3. Meningkatkan pemahaman pada seluruh pimpinan SKPD dan jajaran di bawahnya akan pentingnya penerapan SAKIP pada SKPD masing-masing sehingga mempermudah dalam mengawal kinerja SKPD terutama dalam mencapai kinerja yang ditetapkan sesuai Visi Misi SKPD dan Visi Misi Gubernur.
4. Meningkatkan pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan antar instansi yang terkait.
6. Mengutamakan penganggaran untuk melaksanakan program kerja yang mendukung indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan
7. Mendorong Kepala SKPD untuk memanfaatkan Hasil pengukuran capaian kinerja sebagai dasar pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (Punishment).

LAMPIRAN

GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2019 - 2023

BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2019

GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menentukan arah dan ukuran keberhasilan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Papua, perlu menetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang ...../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua;
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN ...../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Papua.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran berhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

Pasal 3

(1) IKU Provinsi merupakan pedoman kinerja yang digunakan oleh SKPD untuk :
   a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
   b. penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
   c. menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
   d. menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan
   e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

(2). IKU Provinsi ……./4

(2) IKU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

BAPPEDA, Inspektorat dan Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, berkewajiban melakukan :

a. monitoring atas penerapan IKU Provinsi dan SKPD; dan
b. monitoring dan evaluasi atas capaian IKU Provinsi dan SKPD untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Papua Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Oktober 2019

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 22 Oktober 2019
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP., M.Si
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

PEMERINTAH PROVINSI SETDA PAPUA

KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 26 Tahun 2019
Tanggal : 22 Oktober 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROVINSI PAPUA

PERIODE 2019 – 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
Misi 1:Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM					
1.	Meningkatnya Aksesibiltas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	$RLS = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} lama\ sekolah\ penduduk\ i$ **Keterangan :** RLS : Rata-rata Lama Sekolah pada umur a ditahun t Lama sekolah penduduk i : Lama sekolah penduduk ke-i pada suatu wilayah n : Jumlah penduduk $(i = 1,2,3, \dots, n$	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
		2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ **Keterangan :** HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a ditahun t E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i : Usia $(a, a+1, \dots, n)$ FK : Faktor koreksi pesantren	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

				$FK = \frac{jumlah\ santri\ sekolah\ dan\ mukim}{jumlah.penduduk\ usia\ 7\ tahun\ keatas} + 1$ $Rasio\ santri\ mukim = \frac{jumlah\ bermukim}{jumlah\ santri\ seluruhnya}$ $jumlah\ santri\ sekolah\ dan\ mukim = rasio\ santri\ mukim \times jumlah\ santri\ sekolah$	
		3.	Penduduk yang berusia > 15Tahun melek huruf	Jumlah penduduk usia >15 Tahun yang melek huruf / Jumlah penduduk X 100 %	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.	Angka Harapan Hidup	rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di Provinsi Papua	Dinas Kesehatan
3.	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	1.	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Jumlah atlet yang menerima penghargaan tingkat nasional / Jumlah seluruh Atlet dalam pembinaan X 100 %	Dinas Olahraga dan Pemuda
4.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Jumlah organisasi pemuda yang aktif / Jumlah seluruh organisasi pemuda X 100 %	Dinas Olahraga dan Pemuda
5.	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	1.	Cakupan daerah rawan pangan	Jumlah Kabupaten/Kota yg rawan pangan	Dinas Pertanian dan Pangan

		2.	Pengeluaran PerKapita yang Disesuaikan	Indeks harga yang diterima petani / Indeks harga yang dibayar petani	Dinas Pertanian dan Pangan
Misi 2 : Memantapkan Rasa Aman, Tentram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI					
1.	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Konflik yang tertangani / Jumlah konflik X 100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	1.	Nilai skor aspek kebebasan sipil	Permohonan Ijin yang diberikan / Jumlah Permohonan Ijin yang masuk X 100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2.	Nilai skor aspek hak-hak politik	Realisasi Hak-Hak Politik dalam UU OTSUS Papua	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3.	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Jumlah Lembaga Demokrasi yangmendapat Ijin dan Jumlah Lembaga Demokrasi yang terdaftar.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Misi 3 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan					
1.	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	1.	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	Rata-Rata Realisasi Program OTSUS (Fisik dan Keuangan) / Rata-Rata Target Pencapaian Program OTSUS X 100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.	Capaian Nilai SAKIP	Sesuai rumusan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah (SAKIP) oleh KEMENPAN dan RB RI	Biro Organisasi
		2.	Capaian Implementasi e-Government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	Target Sistem yang terintegrasi / Realisasi Sistem yang terimplementasi X 100 %	Dinas Komunikasih dan Informatika
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program,serta kegiatan pembangunan daerah.	1.	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program RKPD yang sesuai RPJMD Tahun berkenaan / Jumlah program RPJMD yg hrs dilaksanakan Tahun berkenaan X 100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.	1.	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Sesuai rumusan penilaian evaluasi LKPD oleh BPK RI	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daeerah
		2.	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah Realisasi PAD / Jumlah Realisasi Total Pendapatan Daerah X100 %	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Misi 4 : Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural dan Berkelanjutan					
1.	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1.	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	PDRB sektor Tanaman Pangan tahun ybs / Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs X 100 %	Dinas Pertanian dan Pangan
		2.	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	PDRB sub sektor perkebunan dan hasilnya tahun ybs / Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs X 100 %	Dinas Pertanian dan Pangan

		3.	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	PDRB sub sektor peternakan tahun ybs / Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs X 100 %	Dinas Pertanian dan Pangan
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksimitigasi perubahan iklim	1.	Indeks Kualitas Udara	IKU = 100 – [50/0,9 x (Ieu – 0,1)] Keterangan: IKU = indeks kualitas udara Ieu = indeks European union 0 – 50 = Baik 51 – 100 = Sedang 101 – 199 = Tidak sehat 200– 299 = Sangat tidak Sehat ≥ 300 = Berbahaya	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		2.	Indeks Kualitas Air	$IP = \sqrt{\frac{\left(C_i/L_{ij}\right)^2_{rata-rata} + \left(C_i/L_{ij}\right)^2_{maksimum}}{2}}$ Keterangan : Nilai relative = $\left(\frac{Ci}{Lij}\right)$ Ci = konsentrasi parameter air Lij = konsentrasi $0 \leq PI_j \leq 1{,}0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1{,}0 \leq PI_j \leq 5{,}0 \rightarrow$ cemar ringan $5{,}0 \leq PI_j \leq 10{,}0 \rightarrow$ cemar sedang $PI_j > 10{,}0 \rightarrow$ cemar berat	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

		3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKTL=100 –[(84,3–(TH x 100)] x $\frac{50}{54,3}$ Keterangan : IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		4.	Intensitas penurunan emisi	$\frac{\text{Jumlah Emisi CO2 tahun ybs}}{\text{PDRB thn ybs}}$ X 100 %	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan.	1.	Kontribusi sub Sektor perikanan terhadap PDRB	$\frac{\text{PDRB sub sektor Perikanan tahun ybs}}{\text{Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs}}$ X 100 %	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.	1.	Tingkat Kesempatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan kerja}}$ X 100 %	Dinas Perindagkop dan Tenaga Kerja
5.	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektoran dalam daerah.	1.	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	$\frac{\text{Nilai investasi PMDN tahun ybs-Nilai investasi PMDN tahun lalu}}{\text{Nilai investasi PMDN tahun lalu}}$ X 100 %	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

		2.	Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	Nilai investasi PMA tahun yang ybs- Nilai investasi PMA tahun lalu / Nilai investasi PMA tahun lalu	X 100 %	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
6.	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah.	1.	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi baik / Total Panjang Jalan Provinsi	X 100 %	DinasPekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
7.	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten.	1.	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	Jumlah Program RKPD / Jumlah Program Rencana Tataruang (RT)/ Rencana Wilayah (RW)	X 100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah.	1.	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	Jumlah sumber daya air yang termanfaatkan / Jumlah sumber daya air yang tersedia	X 100 %	DinasPekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

9.	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman.	1.	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik.	Penduduk yang menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan / Jumlah Penduduk yang ada	X 100 %	DinasKesehatan
		2.	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	Jumlah RT/KK yang mendapatkan layanan air bersih / Jumlah RT/KK di Provinsi Papua	X 100 %	DinasPekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Misi 5 : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu						
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung.	1.	Indeks Kampung Membangun	Jumlah Kampung Berkembang / Total Jumlah Kampung	X 100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP.	1.	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar Orang Asli Papua (OAP)	Rata-Rata Pemenuhan Kebutuhan Dasar OAP yaitu pada Empat (4) Sektor Utama dalam Undang-UndangOtonomi Khusus Papua (Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan Infrastruktur).		Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
3.	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan.	1.	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	(jumlah siswa SD X 6 tahun) + (jumlah Siswa SMP X 9 tahun) + (jumlah Siswa SMA/SMK/SLB X 12 tahun)) / jumlah Penduduk usia 9 tahun ke atasdi wilayah perbatasan		Badan Perbatasan dan Kerjasama

		2.	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di Provinsi Papua di wilayah perbatasan	Badan Perbatasan dan Kerjasama
		3.	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Y = p/q Y = Pengeluaran Perkapita Wilayah Perbatasan p = Pengeluaran Rumah Tangga sebulan Wilayah Perbatasn q = Jumlah anggota Rumah Tangga Wilayah Perbatasan	Badan Perbatasan dan Kerjasama
4.	Meningkatnya bantuan sosial PMKS.	1.	Cakupan Penyandang Masalah Kesejejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.	1.	Indeks Resiko Bencana(IRBI)	Jumlah Bencana yg tertangani di Provinsi Papua Jumlah Bencana yang terjadi di Provinsi Papua X 100 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah

6.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak.	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG diukur dengan menggunakan rasio IPG = IPM Perempuan / IPM Laki-Laki Hasil IPG semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki (angka 100 merupakan nilai rasio paling sempurna dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IDG = (I (par) + I (DM) + I (inc-dis)) / 3 Menjumlahkan Indeks keterwakilan perempuan dalam parlemen,indeks pengambilan keputusan dan indeks distribusi pendapatan dibagi 3	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

GUBERNUR PAPUA,

CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

PEMERINTAH PROVINSI SETDA PAPUA

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Jabatan : GUBERNUR PAPUA

Pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 22 Maret 2022

GUBERNUR PAPUA

LUKAS ENEMBE, SIP, MH

PERJANJIAN KINERJA PROVINSI PAPUA TAHUN 2022

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		*2*		*3*	*4*
1	Meningkatnya Aksesibiltas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.8
		2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.7
		3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	78.9
2	Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup	Tahun	68.8
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga		Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	95
4	Meningkat nya partisipasi pemuda dalam pembangun an daerah		Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	73.8
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	1	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kab./kota	7.0
		2	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp ribu per kapita	7495.8
6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	78.2
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	1	Nilai skor aspek kebebasan sipil	Skor	94.5
		2	Nilai skor aspek hak-hak politik	Skor	48.4
		3	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Skor	58.9

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		2		3	4
8	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua		Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	%	98.00
9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	Capaian Nilai SAKIP	Predikat	BB
		2	Capaian implementasi e-government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	%	90.00
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah		Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	Persen	95.0
11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	1	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP
		2	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	12.70
12	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	Persen	4.4
		2	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	3.7
		3	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	3.7

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		*2*		*3*	*4*
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	94.3
		2	Indeks Kualitas Air	Indeks	79.5
		3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	83.8
		4	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/ Rupiah	55265.4
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan		Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	Persen	10.20
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja		Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	98.09
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	1	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Triliun	62.67
		2	Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	Rp. Triliun	90.63
17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah		Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	50.00

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		*2*		*3*	*4*
18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten		Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	Persen	45.00
19	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah		Persentase pemanfaatan sumberdaya air	Persen	75.00
20	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	1	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	Persen	38.75
		2	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	Persen	44.04
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung		Indeks Desa Membangun	Indeks	50.16
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP		Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	Persen	70.19
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	1	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	Tahun	11.09
		2	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	Tahun	67.50
		3	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	13.12
24	Meningkatnya bantuan sosial PMKS		Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang per tahun	40

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		*2*		*3*	*4*
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	Sedang
26	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	79.90
		2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	64.47

Jayapura, 22 Maret 2022

GUBERNUR PAPUA

LUKAS ENEMBE, SIP, MH

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
INSPEKTORAT

Alamat : Jalan Soa Siu Dok II Jayapura Kode Pos 99115
Email : papuaitprov@gmail.com atau inspektorat.prov.papua@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Papua.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan yang terbatas Laporan Kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Jayapura, 31 Maret 2023

Plt. INSPEKTUR

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA INSPEKTORAT

Drs. ANGGIAT SITUMORANG, M.Si., Ak., CA., QIA., CFrA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI UTAMA
NIP. 19601229 198803 1 001

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
INSPEKTORAT

Alamat : Jalan Soa Siu Dok II Jayapura Kode Pos 99115
Email : papuaitprov@gmail.com atau inspektorat.prov.papua@gmail.com

Jayapura, 31 Maret 2023

Nomor : X.700/2/033/LHR-ITPROV
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Reviu Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022

Kepada
Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB)
Republik Indonesia
di -
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Surat Perintah Inspektur Provinsi Papua Nomor : 700/2/093/SP-ITPROV tanggal 28 Maret 2023 tentang Reviu Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022, kami telah melakukan reviu dengan hasil sebagai berikut :

1. DASAR REVIU

1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5) Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua;
6) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 5 tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
7) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023.
8) Surat Perintah Inspektur Provinsi Papua Nomor : 700/2/093/SP-ITPROV tanggal 28 Maret 2023 tentang Reviu Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022;

2. TUJUAN REVIU

Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dengan tujuan adalah :

1) Membantu penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2) Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi Kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

3. RUANG LINGKUP REVIU

Berdasarkan Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 5 tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah angka 1 huruf f dan g, Reviu dilakukan atas Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah yaitu :

1) Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah;
2) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir;
3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah/RJMD;

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional (Jika Ada);
5) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Peningkatan atau Penurunan Kinerja Tahun 2022 Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan;
6) Analisis Program/Kegiatan Tahun 2022 Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja;
7) Analisis Atas Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

4. HASIL REVIU

Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah kami laksanakan sebagai berikut :

1) Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah.

   Hasil analisis terhadap informasi akuntabilitas kinerja Provinsi Papua mengenai perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah diketahui terdapat 26 sasaran strategis dan 43 indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 dan termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 antara Kepala SKPD dan Gubernur Papua. Secara umum dari 43 indikator sasaran terdapat 24 (dua puluh empat) atau 55,81% indikator yang mencapai target dengan kategori "Sangat Berhasil", 5 (lima) atau 11,64 % indikator yang " Berhasil", 4 (empat) indikator yang mencapai target dengan kategori "Cukup Berhasil", 1 (Satu) indikator yang mencapai target dengan kategori "Kurang Berhasl" dan 9 (Sembilan) indikator yang mencapai target dengan kategori " Tidak Berhasil" .Hasil perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah skala ordinal penilaian yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah :

Tabel 1.1 Capaian Indikator

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE %
1	91 ≥	Sangat berhasil	24	55.79
2	76 ≥ 90	Berhasil	5	11.64
3	66 ≥ 75	Cukup berhasil	4	9.30
4	51 ≥ 65	Kurang berhasil	1	2.32
5	0 ≥ 50	Tidak berhasil	9	20.93
JUMLAH			**43**	**100**

1.2 Capaian Sasaran

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1	91 ≥	Sangat berhasil	16
2	76 ≥ 90	Berhasil	2
3	66 ≥ 75	Cukup berhasil	1
4	51 ≥ 65	Kurang berhasil	1
5	0 ≥ 50	Tidak berhasil	6
JUMLAH			**26**

Terdapat kesalahan perhitungan aritmatika pada penjelasan capaian kinerja sesuai dengan kategori, seharusnya seperti pada tabel di bawah ini

1.3 Capaian Sasaran

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PERSENTASE %
1	91 ≥	Sangat berhasil	16	62
2	76 ≥ 90	Berhasil	2	8
3	66 ≥ 75	Cukup berhasil	1	4
4	51 ≥ 65	Kurang berhasil	1	4
5	0 ≥ 50	Tidak berhasil	6	23
JUMLAH			**26**	**100**

2) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Dari hasil reviu terhadap laporan akuntabilitas diketahui bawa belum sepenuhnya informasi mengenai perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun

dimuat dalam penjelasan capaian sasaran dan capaian sasaran. Hal tersebut dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 2 Perbandingan Dengan Kinerja Tahun Lalu

NO	Informasi Perbandigan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	JUMLAH SASARAN INDIKATOR	PERSENTASE %
1	MENYAJIKAN INFORMASI PERBANDINGAN	43	100
2	TIDAK MENYAJIKAN INFORMASI PERBANDINGAN	0	0

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penjelasan capaian kinerja sasaran dan indikator telah menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah/RJMD.

Dari hasil reviu terhadap laporan akuntabilitas diketahui bahwa belum sepenuhnya informasi mengenai Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah/RJMD dimuat dalam penjelasan capaian sasaran dan capaian sasaran. Hal tersebut dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 3 Perbandingan Dengan RPJMD

NO	Informasi Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah/RJMD	JUMLAH SASARAN INDIKATOR	PERSENTASE %
1	MENYAJIKAN INFORMASI PERBANDINGAN	40	93.03
2	TIDAK MENYAJIKAN INFORMASI PERBANDINGAN	3	6,97

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional (Jika Ada).

Dari hasil reviu terhadap laporan akuntabilitas diketahui terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang memuat perbandingan dengan standar nasional yaitu sasaran ke 26 "Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak" dengan indikator sasaran "Indeks Pemberdayaan Gender".

5) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Peningkatan atau Penurunan Kinerja Tahun 2022 Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Dari hasil reviu terhadap laporan akuntabilitas diketahui irnformasi analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan belum sepenuhnya dimuat dalam penjelasan capaian sasaran dan capaian sasaran. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 Analisis Penyebab

NO	Informasisi Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	JUMLAH SASARAN INDIKATOR	PERSENTASE %
1	MENYAJIKAN INFORMASI	40	93.03
2	TIDAK MENYAJIKAN INFORMASI	3	6,97

6) Analisis Program/Kegiatan Tahun 2022 Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Dari hasil reviu terhadap laporan akuntabilitas diketahui bahwa analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum sepenuhnya dilakukan serta dimuat dalam penjelasan dari semua capaian sasaran dan indikator capaian sasaran.

7) Analisis Atas Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
Dari hasil reviu terhadap laporan akuntabilitas diketahui informasi analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya belum dimuat dalam penjelasan semua capaian sasaran dan capaian sasaran.

Sesuai hasil reviu yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas penyajian Laporan Kinerja Tahun 2022 yaitu :

1) Melakukan perhitungan ulang untuk memastikan hasil perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 pada capaian sasaran dan capaian indikator berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah;
2) Melengkapi data perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RJMD pada setiap indikator sasaran;
3) Melengkapi analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dan peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada setiap indikator sasaran;
4) Membuat analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada setiap indikator sasaran;
5) Membuat analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap indikator sasaran kemudian disajikan dalam penyampain akuntabilitas kinerja;
6) Agar menindaklanjuti hasil reviu Laporan Kinerja dalam penyusunan Laporan Kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

5. Tindak Lanjut Hasil Reviu

Dari hasil reviu terdapat hasil reviu Laporan Kinerja Tahun 2021 yang belum ditindaklanjuti dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 yaitu belum sepenuhnya menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Demikian disampaikan hasil reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021. Atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Plt. INSPEKTUR

Drs. ANGGIAT SITUMORANG, M.Si., Ak., CA., QIA., CFrA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI UTAMA
NIP. 19601229 198803 1 001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangungan Nasional RI /Kepala BAPPENAS di Jakarta;
3. Gubernur Papua di Jayapura;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Jayapura.

TABEL CAPAIAN KINERJA PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2022

TARGET, REALISASI dan CAPAIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA 2019, 2020, 2021 dan 2022
didasarkan pada INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) sesuai Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan IKU
sesuai Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Prov.Papua Tahun 2019-2023
dan PERJANJIAN KINERJA (PK) Gubernur Papua setiap Tahun Anggaran 2019-2022

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
				2019				2020				2021				2022			
1		2		7	8	9	10	11	12	13	14	11	12	13	14	11	12	13	14
1	Meningkatnya Aksesibiltas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan.	1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6.9	6.52	94.5	Tahun	7.2	6.69	92.92	Tahun	7.5	6,76	90,13	Tahun	7.8	7,02	90,00
		2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11	10.83	98.45	Tahun	11.2	11.08	98.95	Tahun	11.5	11,11	96,6	Tahun	11.7	11,14	95,21
		3	Penduduk yang berusia	%	75.9	76.79	101.17	%	76.9	78	101.43	%	77.9	78,89	101,27	%	78.9	92,04	116,65
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.		Angka Harapan Hidup	Tahun	66.6	65.65	99.38	Tahun	67.03	65.79	98,15	Tahun	68.1	65.93	96,81	Tahun	68.8	71.85	104.43
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga.		Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	40	86	215	Atlet	80	100	125	Atlet	85	93	109	Atlet	95	128	134
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah.		Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	70.3	16.98	24.15	persen	71.5	14.51	20.29	persen	72.06	14.75	20.31	persen	73.8	29.53	40.01
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan.	1	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kab./kota	11	25	44	jumlah kab./kota	10	22	45.45	jumlah kab./kota	9	7	128.57	jumlah kab./kota	7	7	100
		2	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp ribu per kapita	7191.8	92.5	1.28	Rp ribu per kapita	7291.7	7294	100.03	Rp ribu per kapita	7393.1	100.66	73.44	Rp ribu per kapita	7495.8	7545.3	100.66
6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat.		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	76.90	100.00	130.00	Indeks	77.30	57.50	74.38	Indeks	77.80	100.00	128.50	Indeks	78.20	100.00	127.80
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi.	1	Nilai skor aspek kebebasan sipil	skor	93.1	100	107.4	skor	93.6	100	107.4	skor	94	100	106.4	skor	94.5	100	105.8
		2	Nilai skor aspek hak-hak politik	skor	43.9	43.81	97.52	skor	45.3	51.16	99.79	skor	46.08	51.83	110.7	skor	48.4	62.3	128.7
		3	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	skor	55.5	57.05	102.79	skor	56.6	52.61	104.2	skor	57.07	50	86.7	skor	58.9	100	169.8
8	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua.		Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	%	90	92.07	102.3	%	93	95.85	103.06	%	95	97.8	102.95	%	98	97.8	99.79
9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	1	Capaian Nilai SAKIP	predikat	B	B	100	predikat	B	B	100	predikat	BB	B	70	predikat	BB	B	66.05
		2	Capaian implementasi e-government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	%	85	120	141.17	%	85	79,17	93,14	%	90	100	111.111	%	90	90	100
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah.		Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	%	80	100	125	%	85	100	117.65	%	90	100	111.111	%	95	100	105.26

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
				2019				2020				2021				2022			
1		2		7	8	9	10	11	12	13	14	11	12	13	14	11	12	13	14
11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.	1	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP	WTP	100	Opini	WTP	WTP	100	Opini	WTP	WTP	100	Opini	WTP	WTP	100
		2	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	9.49	13.83	145.73	%	10.46	9,92	94,84	%	11.52	13.3	115.45	%	12.7	21.3	182.41
12	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.	1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	%	3	2.69	89.52	%	3.4	2.62	77.06	%	3.08	2.42	63.68	%	4.4	2.28	51.82
		2	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	%	1.5	1.04	69.33	%	2.00	1.11	55.5	%	2.07	0.98	36.29	%	3.7	0.96	25.95
		3	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	%	1.5	1.03	68.67	%	2.00	78.28	94.31	%	2.07	0.85	31.48	%	3.7	0.85	22.43
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim.	1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92.30	NA	0	Indeks	92.90	90	97.82	Indeks	93.6	94.2	100.44	Indeks	94.3	95.32	103.89
		2	Indeks Kualitas Air	Indeks	78.20	NA	0	Indeks	78.70	77	97.84	Indeks	79.1	90	113.78	Indeks	79.5	55.07	70.60
		3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	80.40	92.64	115	Indeks	81.50	111	136.00	Indeks	82.7	111	134.22	Indeks	83.8	100	119.33
		4	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/rupiah	0.39	0.65	60	Ton CO2/rupiah	5.00	7.75	155.00	Ton CO2/rupiah	0.343	0.449	130.9	Ton CO2/rupiah	55265.4	N/A	N/A
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan.		Kontribusi sub Sektor perikanan Terhadap PDRB	%	6.27	5.38	85.81	%	7.37	5.07	68.79	%	8.67	4.5	51.9	%	10.2	4.36	42.75
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.		Tingkat Kesempatan Kerja	%	97.34	96.35	98.98	%	97.59	95.6	97.96	%	97.84	96.6	98.73	%	98.09	97.2	99.09
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah.	1	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan.	Rp. Triliun	56.36	42.45	75.32	Rp. Triliun	58.39	1.13	1.94	Rp. Triliun	60.49	3.34	5.52	Rp. Triliun	62.67	9.41	15.02
		2	Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	Rp. Triliun	77.65	503.64	648.6	Rp. Triliun	81.75	1.53	1.87	Rp. Triliun	86.08	2	2.32	Rp. Triliun	90.63	0.98	1.08
17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah.		Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap.	%	32	53.19	166.22	%	40	53,69	134.23	%	45	60,37	134.15	%	50	74.67	149.34
18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten.		Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	%	30	85	283	%	35	98	280	%	40	97.86	244.65	%	45	98.18	218.18
19	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah.		Persentase pemanfaatan sumberdaya air	%	60	100	166.67	%	65	100	153,85	%	70	75	107,14	%	70	75	107,14
20	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman.	1	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	%	35.22	35.02	99.43	%	36.36	33.09	91.01	%	37.54	40.31	107.3	%	37.54	40.31	107.3

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
				2019				2020				2021				2022			
1		2		7	8	9	10	11	12	13	14	11	12	13	14	11	12	13	14
		2	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	%	40.61	31.82	78.36	%	41.72	31.82	76.27	%	42.87	100	233.26	%	42.87	100	233.26
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung		Indeks Desa Membangun	Indeks	45.02	3.84	8.53	Indeks	46.67	3.84	8.53	Indeks	48.38	3.84	7.94	Indeks	48.38	3.84	7.94
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP		Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	%	62.4	76.41	126.5	%	64.9	89,58	138.03	%	67.49	97.54	146.37	%	67.49	97.54	146.37
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan.	1	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	Tahun	8.75	7.73	88.34	Tahun	9.47	7.98	84.27	Tahun	10.25	8.17	79.7	Tahun	10.25	8.17	79.7
		2	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	Tahun	66.04	65.33	98.92	Tahun	66.53	65.62	98.63	Tahun	67.01	65.88	98.31	Tahun	67.01	65.88	98.31
		3	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	10.8	8.97	83.06	Rp juta per kapita	11.52	9.11	79.08	Rp juta per kapita	12.3	8.85	71.95	Rp juta per kapita	12.3	8.85	71.95
24	Meningkatnya bantuan sosial PMKS		Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang per tahun	10	7.831	7.831	ribu orang per tahun	20	7.831	39.16	ribu orang per tahun	30	3.432	11.44	ribu orang per tahun	30	3.432	11.44
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.		Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	Tinggi	Rendah	Rendah	Kategori	Tinggi	Rendah	Rendah	Kategori	Sedang	Rendah	Rendah	Kategori	Sedang	Rendah	Rendah
26	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak.	1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	79.59	80.05	100.06	Indeks	79.69	79.59	99.87	Indeks	79.79	79.69	99.87	Indeks	79.79	79.69	99.87
		2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	62.91	70.68	112.35	Indeks	63.43	65.37	103.06	Indeks	63.95	65.27	102.06	Indeks	63.95	65.27	102.06

Sumber : Laporan Kinerja (LKj/LAKIP) Pemerintah Provinsi Papua 2019-2022 (Data Series).
Penanggungjawab Data : Subag.Peningkatan Kinerja Organisasi-Biro Organisasi Setda Provinsi Papua.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR BERITA Register No :

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT	

DARI : MENDAGRI
UNTUK : YTH. SDR GARING SDRI GUBERNUR u.b SEKDA TTK KMA
YTH. SDR GARING SDRI BUPATI GARING WALIKOTA u.b SEKDA TTK KMA
SELURUH INDONESIA TTK HBS
TEMBUSAN : MENTERI DALAM NEGERI SEBAGAI LAPORAN TTK

Tanggal/Waktu

Jumlah Perkataan

KLASIFIKASI : SEGERA
NOMOR : 000.10/398/BSKDN

MENINDAKLANJUTI SURAT MENDAGRI NO 002.6/3857/SJ TGL 06 JULI 2022 SERTA RADIOGRAM NO 080/3860/SJ TGL 06 JULI 2022 TTG PENGUKURAN DAN PENILAIAN INDEKS INOVASI DAERAH SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD* KURBUK IGA KURTUP 2022 DISAMPAIKAN SBB TTK DUA

AAA TTK PENGUKURAN DAN PENILAIAN INOVASI DAERAH THN 2022 TELAH DILAKUKAN SCR BERKESINAMBUNG MELALUI TAHAPAN PENJARINGAN KMA PENGUKURAN KMA PRESENTASI KEPALA DAERAH DAN VALIDASI LAPANGAN TTK KMA

BBB TTK HASIL PENILAIAN INOVASI DAERAH THN 2022 TELAH DITETAPKAN DLM KEPMENDAGRI NO 400.10.11-6301.A THN 2022 TTG INDEKS INOVASI DAERAH PROV KMA KAB KMA DAN KOTA THN 2022 SBGMN TERLAMPIR TTK KMA

CCC TTK PEMDA YG MELAPORKAN INOVASI DAERAH MELALUI APLIKASI INDEKS INOVASI DAERAH PD THN 2022 SEBANYAK 510 PEMDA DAN PEMDA YG TDK MELAPORKAN INOVASI DAERAH SEBANYAK 32 PEMDA TTK KMA

DDD TTK DAERAH DENGAN NILAI TERTINGGI DIBERIKAN PENGHARGAAN IGA DAN DITETAPKAN DGN KEPMENDAGRI NO 400.10.11-6302.A THN 2022 TTG PENERIMA PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH INOVATIF KURBUK *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD* KURTUP 2022 SBGMN TERLAMPIR TTK KMA

EEE TTK SEHUBUNGAN DGN HAL TSB KMA PENGUKURAN DAN PENILAIAN INDEKS INOVASI DAERAH THN 2023 AKAN SEGERA DI SAMPAIKAN MELALUI PEMBERITAHUAN RESMI TTK KMA

FFF TTK INFORMASI DAN KETERANGAN LBH LANJUT DPT HUB BADAN LITBANG KEMENDAGRI TELP 021-3923445 KMA NARAHUBUNG SDRI MEISYA MARDHATILLAH HP GARING WA 081291757043 KMA SDR R. KUS YOGA BIMASAKTI HP GARING WA 082226040715 KMA SDR ARZAD SECTIO HP GARING WA 081283909480 KMA SDR ALDO HARJUNANTO HP GARING WA 082138702516 TTK KMA

GGG TTK DUM TTK HBS

Tanggal Pembuatan: 30 Januari 2023

PENGIRIM : KEPALA BADAN
STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

NAMA : Dr. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd

TANDA TANGAN :

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

NO	Waktu/Pukul		Lalu Lintas	Paraf Operator
	Terima	Kirim		

Lampiran I RDG
Nomor : 000.10/398/BSKDN
Tanggal : 30 Januari 2023

INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2022 BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 400.10.11 – 6301.A TAHUN 2022 TENTANG INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2022

A. Kategori Provinsi

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1	Provinsi Sumatera Selatan	79,47	Sangat Inovatif
2	Provinsi Jawa Timur	72,82	Sangat Inovatif
3	Provinsi Jawa Tengah	71,32	Sangat Inovatif
4	Provinsi Sumatera Barat	70,49	Sangat Inovatif
5	Provinsi Jawa Barat	69,15	Sangat Inovatif
6	Provinsi Nusa Tenggara Barat	68,51	Sangat Inovatif
7	Provinsi Bali	64,37	Sangat Inovatif
8	Provinsi Lampung	60,90	Sangat Inovatif
9	Provinsi DKI Jakarta	60,51	Sangat Inovatif
10	Provinsi Nusa Tenggara Timur	59,76	Inovatif
11	Provinsi Sulawesi Selatan	55,43	Inovatif
12	Provinsi Sumatera Utara	54,36	Inovatif
13	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	53,53	Inovatif
14	Provinsi Kalimantan Barat	53,09	Inovatif
15	Provinsi Aceh	51,67	Inovatif
16	Provinsi Riau	50,94	Inovatif
17	Provinsi Jambi	50,45	Inovatif
18	Provinsi Banten	50,41	Inovatif
19	Provinsi DI Yogyakarta	50,34	Inovatif
20	Provinsi Kalimantan Timur	50,17	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
21	Provinsi Sulawesi Utara	49,58	Inovatif
22	Provinsi Bengkulu	48,57	Inovatif
23	Provinsi Gorontalo	48,19	Inovatif
24	Provinsi Kalimantan Tengah	47,82	Inovatif
25	Provinsi Papua Barat	46,57	Inovatif
26	Provinsi Sulawesi Barat	46,41	Inovatif
27	Provinsi Kalimantan Utara	46,37	Inovatif
28	Provinsi Kalimantan Selatan	45,62	Inovatif
29	Provinsi Sulawesi Tengah	45,55	Inovatif
30	Provinsi Kepulauan Riau	43,68	Inovatif
31	Provinsi Papua	42,43	Inovatif
32	Provinsi Sulawesi Tenggara	41,60	Inovatif
33	Provinsi Maluku	41,26	Inovatif
34	Provinsi Maluku Utara	33,11	Kurang Inovatif

B. Kategori Kabupaten

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
1	Kabupaten Banyuwangi	96,30	Sangat Inovatif
2	Kabupaten Bogor	87,59	Sangat Inovatif
3	Kabupaten Wonogiri	81,63	Sangat Inovatif
4	Kabupaten Tabalong	79,37	Sangat Inovatif
5	Kabupaten Situbondo	73,17	Sangat Inovatif
6	Kabupaten Temanggung	70,92	Sangat Inovatif
7	Kabupaten Sragen	70,82	Sangat Inovatif
8	Kabupaten Tanggamus	70,14	Sangat Inovatif
9	Kabupaten Pamekasan	69,95	Sangat Inovatif
10	Kabupaten Padang Pariaman	69,59	Sangat Inovatif
11	Kabupaten Indragiri Hilir	67,63	Sangat Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
12	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	67,04	Sangat Inovatif
13	Kabupaten Sampang	66,35	Sangat Inovatif
14	Kabupaten Lampung Barat	65,39	Sangat Inovatif
15	Kabupaten Malang	64,83	Sangat Inovatif
16	Kabupaten Blora	64,13	Sangat Inovatif
17	Kabupaten Pesawaran	63,92	Sangat Inovatif
18	Kabupaten Sumedang	63,21	Sangat Inovatif
19	Kabupaten Tegal	61,81	Sangat Inovatif
20	Kabupaten Bantul	60,95	Sangat Inovatif
21	Kabupaten Bangka	60,87	Sangat Inovatif
22	Kabupaten Aceh Jaya	60,49	Sangat Inovatif
23	Kabupaten Sidoarjo	60,25	Sangat Inovatif
24	Kabupaten Lampung Selatan	59,92	Inovatif
25	Kabupaten Rembang	59,60	Inovatif
26	Kabupaten Banyumas	59,10	Inovatif
27	Kabupaten Bangka Tengah	59,08	Inovatif
28	Kabupaten Kendal	59,00	Inovatif
29	Kabupaten Hulu Sungai Utara	58,91	Inovatif
30	Kabupaten Lumajang	58,84	Inovatif
31	Kabupaten Jember	58,72	Inovatif
32	Kabupaten Sumbawa Barat	58,64	Inovatif
33	Kabupaten Lamongan	58,56	Inovatif
34	Kabupaten Subang	58,50	Inovatif
35	Kabupaten Ngawi	58,43	Inovatif
36	Kabupaten Mesuji	58,34	Inovatif
37	Kabupaten Sleman	58,31	Inovatif
38	Kabupaten Aceh Tengah	58,28	Inovatif
39	Kabupaten Batang	58,28	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
40	Kabupaten Pekalongan	58,19	Inovatif
41	Kabupaten Pati	58,11	Inovatif
42	Kabupaten Bondowoso	58,09	Inovatif
43	Kabupaten Muara Enim	57,94	Inovatif
44	Kabupaten Dharmas Raya	57,84	Inovatif
45	Kabupaten Balangan	57,57	Inovatif
46	Kabupaten Boyolali	57,42	Inovatif
47	Kabupaten Bireuen	57,41	Inovatif
48	Kabupaten Aceh Tamiang	57,41	Inovatif
49	Kabupaten Sukabumi	57,02	Inovatif
50	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	56,90	Inovatif
51	Kabupaten Pringsewu	56,83	Inovatif
52	Kabupaten Tulangbawang	56,63	Inovatif
53	Kabupaten Grobogan	56,55	Inovatif
54	Kabupaten Magetan	56,53	Inovatif
55	Kabupaten Takalar	56,53	Inovatif
56	Kabupaten Tana Tidung	56,48	Inovatif
57	Kabupaten Bandung	56,43	Inovatif
58	Kabupaten Trenggalek	56,38	Inovatif
59	Kabupaten Empat Lawang	56,37	Inovatif
60	Kabupaten Way Kanan	56,19	Inovatif
61	Kabupaten Demak	56,18	Inovatif
62	Kabupaten Ogan Komering Ilir	56,17	Inovatif
63	Kabupaten Bulungan	56,17	Inovatif
64	Kabupaten Tuban	56,10	Inovatif
65	Kabupaten Wonosobo	56,10	Inovatif
66	Kabupaten Semarang	56,09	Inovatif
67	Kabupaten Lombok Tengah	56,08	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
68	Kabupaten Purworejo	56,00	Inovatif
69	Kabupaten Poso	55,99	Inovatif
70	Kabupaten Gunung Kidul	55,96	Inovatif
71	Kabupaten Bangka Selatan	55,88	Inovatif
72	Kabupaten Kulon Progo	55,87	Inovatif
73	Kabupaten Morowali	55,84	Inovatif
74	Kabupaten Kutai Kartanegara	55,83	Inovatif
75	Kabupaten Pasuruan	55,73	Inovatif
76	Kabupaten Klaten	55,71	Inovatif
77	Kabupaten Blitar	55,51	Inovatif
78	Kabupaten Sukoharjo	55,44	Inovatif
79	Kabupaten Bengkulu Utara	55,42	Inovatif
80	Kabupaten Lombok Barat	55,42	Inovatif
81	Kabupaten Sanggau	55,39	Inovatif
82	Kabupaten Cirebon	55,27	Inovatif
83	Kabupaten Mojokerto	55,25	Inovatif
84	Kabupaten Badung	55,16	Inovatif
85	Kabupaten Kebumen	55,01	Inovatif
86	Kabupaten Bojonegoro	54,96	Inovatif
87	Kabupaten Bintan	54,88	Inovatif
88	Kabupaten Sumbawa	54,77	Inovatif
89	Kabupaten Tapin	54,76	Inovatif
90	Kabupaten Tangerang	54,70	Inovatif
91	Kabupaten Manggarai Barat	54,65	Inovatif
92	Kabupaten Mandailing Natal	54,61	Inovatif
93	Kabupaten Klungkung	54,59	Inovatif
94	Kabupaten Barito Utara	54,58	Inovatif
95	Kabupaten Belitung Timur	54,57	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
96	Kabupaten Ciamis	54,50	Inovatif
97	Kabupaten Kampar	54,49	Inovatif
98	Kabupaten Maluku Tengah	54,32	Inovatif
99	Kabupaten Luwu Timur	54,28	Inovatif
100	Kabupaten Nganjuk	54,23	Inovatif
101	Kabupaten Garut	54,13	Inovatif
102	Kabupaten Dompu	54,11	Inovatif
103	Kabupaten Lampung Timur	53,91	Inovatif
104	Kabupaten Lebak	53,88	Inovatif
105	Kabupaten Gorontalo	53,82	Inovatif
106	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	53,76	Inovatif
107	Kabupaten Karo	53,69	Inovatif
108	Kabupaten Ogan Komering Ulu	53,46	Inovatif
109	Kabupaten Pacitan	53,41	Inovatif
110	Kabupaten Sijunjung	53,41	Inovatif
111	Kabupaten Bandung Barat	53,40	Inovatif
112	Kabupaten Pelalawan	53,39	Inovatif
113	Kabupaten Lampung Utara	53,21	Inovatif
114	Kabupaten Solok Selatan	53,14	Inovatif
115	Kabupaten Soppeng	53,02	Inovatif
116	Kabupaten Nagekeo	52,80	Inovatif
117	Kabupaten Bangkalan	52,68	Inovatif
118	Kabupaten Banjar	52,53	Inovatif
119	Kabupaten Cilacap	52,47	Inovatif
120	Kabupaten Minahasa Tenggara	52,39	Inovatif
121	Kabupaten Pakpak Bharat	52,35	Inovatif
122	Kabupaten Bulukumba	52,34	Inovatif
123	Kabupaten Magelang	52,21	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
124	Kabupaten Paser	52,16	Inovatif
125	Kabupaten Bekasi	52,14	Inovatif
126	Kabupaten Tanah Laut	52,12	Inovatif
127	Kabupaten Kotawaringin Barat	52,08	Inovatif
128	Kabupaten Belitung	51,98	Inovatif
129	Kabupaten Kota Baru	51,82	Inovatif
130	Kabupaten Buleleng	51,78	Inovatif
131	Kabupaten Kudus	51,73	Inovatif
132	Kabupaten Pesisir Selatan	51,62	Inovatif
133	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	51,58	Inovatif
134	Kabupaten Kubu Raya	51,58	Inovatif
135	Kabupaten Ponorogo	51,46	Inovatif
136	Kabupaten Rejang Lebong	51,32	Inovatif
137	Kabupaten Ogan Ilir	51,20	Inovatif
138	Kabupaten Majalengka	51,20	Inovatif
139	Kabupaten Sumenep	50,63	Inovatif
140	Kabupaten Mamuju Tengah	50,56	Inovatif
141	Kabupaten Tapanuli Utara	50,55	Inovatif
142	Kabupaten Purwakarta	50,54	Inovatif
143	Kabupaten Banyu Asin	50,43	Inovatif
144	Kabupaten Tasikmalaya	50,42	Inovatif
145	Kabupaten Labuhanbatu Utara	50,40	Inovatif
146	Kabupaten Kediri	50,37	Inovatif
147	Kabupaten Probolinggo	50,36	Inovatif
148	Kabupaten Rokan Hulu	50,36	Inovatif
149	Kabupaten Tanah Datar	50,27	Inovatif
150	Kabupaten Deli Serdang	50,17	Inovatif
151	Kabupaten Pasaman	50,06	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
152	Kabupaten Sukamara	49,86	Inovatif
153	Kabupaten Bone	49,80	Inovatif
154	Kabupaten Sekadau	49,79	Inovatif
155	Kabupaten Karang Asem	49,64	Inovatif
156	Kabupaten Luwu Utara	49,62	Inovatif
157	Kabupaten Halmahera Timur	49,52	Inovatif
158	Kabupaten Banggai	49,45	Inovatif
159	Kabupaten Gunung Mas	49,40	Inovatif
160	Kabupaten Tebo	49,31	Inovatif
161	Kabupaten Tulungagung	49,27	Inovatif
162	Kabupaten Ketapang	48,74	Inovatif
163	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	48,65	Inovatif
164	Kabupaten Kerinci	48,55	Inovatif
165	Kabupaten Kuantan Singingi	48,42	Inovatif
166	Kabupaten Gresik	48,40	Inovatif
167	Kabupaten Bantaeng	48,31	Inovatif
168	Kabupaten Pemalang	48,00	Inovatif
169	Kabupaten Brebes	47,94	Inovatif
170	Kabupaten Sambas	47,80	Inovatif
171	Kabupaten Pandeglang	47,56	Inovatif
172	Kabupaten Manggarai	47,56	Inovatif
173	Kabupaten Lima Puluh Kota	47,47	Inovatif
174	Kabupaten Jembrana	47,41	Inovatif
175	Kabupaten Karanganyar	47,31	Inovatif
176	Kabupaten Boalemo	47,22	Inovatif
177	Kabupaten Aceh Barat	47,21	Inovatif
178	Kabupaten Indramayu	47,14	Inovatif
179	Kabupaten Purbalingga	47,12	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
180	Kabupaten Tana Toraja	47,10	Inovatif
181	Kabupaten Jombang	47,04	Inovatif
182	Kabupaten Karimun	46,97	Inovatif
183	Kabupaten Dairi	46,90	Inovatif
184	Kabupaten Sumba Timur	46,88	Inovatif
185	Kabupaten Serdang Bedagai	46,66	Inovatif
186	Kabupaten Samosir	46,64	Inovatif
187	Kabupaten Labuhanbatu	46,61	Inovatif
188	Kabupaten Parigi Moutong	46,52	Inovatif
189	Kabupaten Kaimana	46,52	Inovatif
190	Kabupaten Kepahiang	46,49	Inovatif
191	Kabupaten Gianyar	46,49	Inovatif
192	Kabupaten Jepara	46,44	Inovatif
193	Kabupaten Lombok Utara	46,42	Inovatif
194	Kabupaten Pinrang	46,39	Inovatif
195	Kabupaten Musi Rawas	46,38	Inovatif
196	Kabupaten Nias Barat	46,37	Inovatif
197	Kabupaten Sorong	46,14	Inovatif
198	Kabupaten Barru	46,13	Inovatif
199	Kabupaten Belu	46,08	Inovatif
200	Kabupaten Bungo	45,95	Inovatif
201	Kabupaten Musi Banyuasin	45,79	Inovatif
202	Kabupaten Halmahera Selatan	45,76	Inovatif
203	Kabupaten Malaka	45,40	Inovatif
204	Kabupaten Humbang Hasundutan	45,34	Inovatif
205	Kabupaten Batanghari	45,27	Inovatif
206	Kabupaten Nunukan	45,16	Inovatif
207	Kabupaten Kutai Barat	45,13	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
208	Kabupaten Bone Bolango	44,85	Inovatif
209	Kabupaten Kolaka Utara	44,81	Inovatif
210	Kabupaten Siak	44,70	Inovatif
211	Kabupaten Lombok Timur	44,66	Inovatif
212	Kabupaten Bolaang Mongondow	44,57	Inovatif
213	Kabupaten Karawang	44,54	Inovatif
214	Kabupaten Kepulauan Sangihe	44,45	Inovatif
215	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	44,39	Inovatif
216	Kabupaten Aceh Utara	44,26	Inovatif
217	Kabupaten Madiun	44,24	Inovatif
218	Kabupaten Bengkalis	44,17	Inovatif
219	Kabupaten Lingga	44,17	Inovatif
220	Kabupaten Berau	44,08	Inovatif
221	Kabupaten Mamasa	43,84	Inovatif
222	Kabupaten Lampung Tengah	43,78	Inovatif
223	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	43,75	Inovatif
224	Kabupaten Polewali Mandar	43,67	Inovatif
225	Kabupaten Sikka	43,36	Inovatif
226	Kabupaten Tabanan	43,34	Inovatif
227	Kabupaten Muna	43,29	Inovatif
228	Kabupaten Timor Tengah Utara	43,20	Inovatif
229	Kabupaten Batu Bara	42,99	Inovatif
230	Kabupaten Sinjai	42,96	Inovatif
231	Kabupaten Seluma	42,85	Inovatif
232	Kabupaten Pasaman Barat	42,83	Inovatif
233	Kabupaten Bombana	42,73	Inovatif
234	Kabupaten Asahan	42,67	Inovatif
235	Kabupaten Maluku Tenggara	42,65	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
236	Kabupaten Luwu	42,38	Inovatif
237	Kabupaten Kolaka	42,28	Inovatif
238	Kabupaten Lamandau	42,01	Inovatif
239	Kabupaten Ngada	41,96	Inovatif
240	Kabupaten Sumba Tengah	41,96	Inovatif
241	Kabupaten Banjarnegara	41,77	Inovatif
242	Kabupaten Mukomuko	41,54	Inovatif
243	Kabupaten Tanah Bumbu	41,49	Inovatif
244	Kabupaten Gorontalo Utara	41,46	Inovatif
245	Kabupaten Kaur	41,29	Inovatif
246	Kabupaten Serang	41,14	Inovatif
247	Kabupaten Tulangbawang Barat	41,12	Inovatif
248	Kabupaten Konawe Kepulauan	40,97	Inovatif
249	Kabupaten Kepulauan Meranti	40,95	Inovatif
250	Kabupaten Nias	40,92	Inovatif
251	Kabupaten Indragiri Hulu	40,89	Inovatif
252	Kabupaten Wajo	40,79	Inovatif
253	Kabupaten Aceh Singkil	40,61	Inovatif
254	Kabupaten Jeneponto	40,46	Inovatif
255	Kabupaten Bengkulu Tengah	40,24	Inovatif
256	Kabupaten Kepulauan Mentawai	40,19	Inovatif
257	Kabupaten Toraja Utara	40,10	Inovatif
258	Kabupaten Pesisir Barat	40,01	Inovatif
259	Kabupaten Bima	39,87	Inovatif
260	Kabupaten Sumba Barat Daya	39,60	Inovatif
261	Kabupaten Pulau Morotai	39,57	Inovatif
262	Kabupaten Sidenreng Rappang	39,52	Inovatif
263	Kabupaten Majene	39,44	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
264	Kabupaten Cianjur	39,26	Inovatif
265	Kabupaten Selayar	39,26	Inovatif
266	Kabupaten Halmahera Tengah	39,23	Inovatif
267	Kabupaten Natuna	39,16	Inovatif
268	Kabupaten Halmahera Barat	38,83	Inovatif
269	Kabupaten Agam	38,76	Inovatif
270	Kabupaten Kupang	38,76	Inovatif
271	Kabupaten Buton Utara	38,47	Inovatif
272	Kabupaten Bengkulu Selatan	37,95	Inovatif
273	Kabupaten Kotawaringin Timur	37,56	Inovatif
274	Kabupaten Bengkayang	37,41	Inovatif
275	Kabupaten Kayong Utara	37,19	Inovatif
276	Kabupaten Aceh Besar	37,11	Inovatif
277	Kabupaten Pidie Jaya	37,11	Inovatif
278	Kabupaten Buton Tengah	37,02	Inovatif
279	Kabupaten Keerom	36,91	Inovatif
280	Kabupaten Bangli	36,51	Inovatif
281	Kabupaten Banggai Laut	36,51	Inovatif
282	Kabupaten Seram Bagian Timur	36,42	Inovatif
283	Kabupaten Rote Ndao	36,11	Inovatif
284	Kabupaten Seram Bagian Barat	35,90	Inovatif
285	Kabupaten Gayo Lues	35,72	Inovatif
286	Kabupaten Bener Meriah	35,71	Inovatif
287	Kabupaten Barito Timur	35,70	Inovatif
288	Kabupaten Langkat	35,60	Inovatif
289	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	35,41	Inovatif
290	Kabupaten Sumba Barat	35,22	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
291	Kabupaten Pohuwato	34,48	Kurang Inovatif
292	Kabupaten Sabu Raijua	33,98	Kurang Inovatif
293	Kabupaten Aceh Barat Daya	33,97	Kurang Inovatif
294	Kabupaten Tapanuli Selatan	33,84	Kurang Inovatif
295	Kabupaten Anambas	33,28	Kurang Inovatif
296	Kabupaten Minahasa Selatan	33,12	Kurang Inovatif
297	Kabupaten Lahat	33,01	Kurang Inovatif
298	Kabupaten Malinau	33,00	Kurang Inovatif
299	Kabupaten Nabire	32,59	Kurang Inovatif
300	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	32,44	Kurang Inovatif
301	Kabupaten Nagan Raya	31,90	Kurang Inovatif
302	Kabupaten Toba	31,79	Kurang Inovatif
303	Kabupaten Kapuas	31,72	Kurang Inovatif
304	Kabupaten Solok	31,63	Kurang Inovatif
305	Kabupaten Buru	31,52	Kurang Inovatif
306	Kabupaten Rokan Hilir	30,51	Kurang Inovatif
307	Kabupaten Muna Barat	29,56	Kurang Inovatif
308	Kabupaten Kepulauan Talaud	29,53	Kurang Inovatif
309	Kabupaten Jayapura	29,26	Kurang Inovatif
310	Kabupaten Pulang Pisau	28,90	Kurang Inovatif
311	Kabupaten Pidie	28,79	Kurang Inovatif
312	Kabupaten Penajam Paser Utara	28,40	Kurang Inovatif
313	Kabupaten Banggai Kepulauan	28,40	Kurang Inovatif
314	Kabupaten Musi Rawas Utara	28,24	Kurang Inovatif
315	Kabupaten Nias Utara	27,58	Kurang Inovatif
316	Kabupaten Lebong	27,41	Kurang Inovatif
317	Kabupaten Konawe Selatan	27,20	Kurang Inovatif
318	Kabupaten Wakatobi	26,30	Kurang Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
319	Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	26,01	Kurang Inovatif
320	Kabupaten Jayawijaya	25,77	Kurang Inovatif
321	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	25,70	Kurang Inovatif
322	Kabupaten Tojo Una-Una	23,50	Kurang Inovatif
323	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	22,40	Kurang Inovatif
324	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	22,10	Kurang Inovatif
325	Kabupaten Landak	20,52	Kurang Inovatif
326	Kabupaten Halmahera Utara	20,44	Kurang Inovatif
327	Kabupaten Sigi	19,72	Kurang Inovatif
328	Kabupaten Katingan	19,20	Kurang Inovatif
329	Kabupaten Merangin	18,80	Kurang Inovatif
330	Kabupaten Seruyan	18,27	Kurang Inovatif
331	Kabupaten Pangandaran	17,60	Kurang Inovatif
332	Kabupaten Minahasa	16,70	Kurang Inovatif
333	Kabupaten Barito Kuala	16,50	Kurang Inovatif
334	Kabupaten Toli-Toli	16,20	Kurang Inovatif
335	Kabupaten Maros	16,00	Kurang Inovatif
336	Kabupaten Enrekang	15,10	Kurang Inovatif
337	Kabupaten Konawe	14,90	Kurang Inovatif
338	Kabupaten Konawe Utara	14,70	Kurang Inovatif
339	Kabupaten Padang Lawas Utara	14,50	Kurang Inovatif
340	Kabupaten Tapanuli Tengah	14,20	Kurang Inovatif
341	Kabupaten Murung Raya	14,20	Kurang Inovatif
342	Kabupaten Kapuas Hulu	14,00	Kurang Inovatif
343	Kabupaten Buton	14,00	Kurang Inovatif
344	Kabupaten Teluk Wondama	13,80	Kurang Inovatif
345	Kabupaten Mamuju Utara	12,90	Kurang Inovatif
346	Kabupaten Buru Selatan	12,90	Kurang Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
347	Kabupaten Barito Selatan	12,60	Kurang Inovatif
348	Kabupaten Gowa	12,60	Kurang Inovatif
349	Kabupaten Timor Tengah Selatan	12,50	Kurang Inovatif
350	Kabupaten Merauke	12,50	Kurang Inovatif
351	Kabupaten Simalungun	11,70	Kurang Inovatif
352	Kabupaten Minahasa Utara	11,70	Kurang Inovatif
353	Kabupaten Aceh Selatan	11,00	Kurang Inovatif
354	Kabupaten Padang Lawas	11,00	Kurang Inovatif
355	Kabupaten Mempawah	11,00	Kurang Inovatif
356	Kabupaten Teluk Bintuni	10,70	Kurang Inovatif
357	Kabupaten Maluku Barat Daya	10,70	Kurang Inovatif
358	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	10,40	Kurang Inovatif
359	Kabupaten Sintang	9,50	Kurang Inovatif
360	Kabupaten Alor	9,10	Kurang Inovatif
361	Kabupaten Buol	8,30	Kurang Inovatif
362	Kabupaten Sarolangun	8,20	Kurang Inovatif
363	Kabupaten Fakfak	7,50	Kurang Inovatif
364	Kabupaten Mahakam Ulu	5,80	Kurang Inovatif
365	Kabupaten Buton Selatan	5,80	Kurang Inovatif
366	Kabupaten Aceh Timur	5,60	Kurang Inovatif
367	Kabupaten Manggarai Timur	5,40	Kurang Inovatif
368	Kabupaten Aceh Tenggara	4,10	Kurang Inovatif
369	Kabupaten Kuningan	3,80	Kurang Inovatif
370	Kabupaten Manokwari Selatan	3,30	Kurang Inovatif
371	Kabupaten Sarmi	3,10	Kurang Inovatif
372	Kabupaten Mamuju	2,80	Kurang Inovatif
373	Kabupaten Muaro Jambi	1,80	Kurang Inovatif
374	Kabupaten Flores Timur	1,80	Kurang Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
375	Kabupaten Kepulauan Aru	1,20	Kurang Inovatif
376	Kabupaten Biak Numfor	1,20	Kurang Inovatif
377	Kabupaten Supiori	1,20	Kurang Inovatif
378	Kabupaten Bangka Barat	0,80	Kurang Inovatif
379	Kabupaten Kepulauan Sula	0,80	Kurang Inovatif
380	Kabupaten Simeulue	0,40	Kurang Inovatif
381	Kabupaten Ende	0,40	Kurang Inovatif
382	Kabupaten Melawi	0,40	Kurang Inovatif
383	Kabupaten Kutai Timur	0,40	Kurang Inovatif
384	Kabupaten Deiyai	0,40	Kurang Inovatif
385	Kabupaten Nias Selatan	0	Tidak Dapat Dinilai
386	Kabupaten Lembata	0	Tidak Dapat Dinilai
387	Kabupaten Donggala	0	Tidak Dapat Dinilai
388	Kabupaten Manokwari	0	Tidak Dapat Dinilai
389	Kabupaten Sorong Selatan	0	Tidak Dapat Dinilai
390	Kabupaten Raja Ampat	0	Tidak Dapat Dinilai
391	Kabupaten Kepulauan Yapen	0	Tidak Dapat Dinilai
392	Kabupaten Paniai	0	Tidak Dapat Dinilai
393	Kabupaten Puncak Jaya	0	Tidak Dapat Dinilai
394	Kabupaten Mimika	0	Tidak Dapat Dinilai
395	Kabupaten Boven Digoel	0	Tidak Dapat Dinilai
396	Kabupaten Mappi	0	Tidak Dapat Dinilai
397	Kabupaten Asmat	0	Tidak Dapat Dinilai
398	Kabupaten Yahukimo	0	Tidak Dapat Dinilai
399	Kabupaten Pegunungan Bintang	0	Tidak Dapat Dinilai
400	Kabupaten Tolikara	0	Tidak Dapat Dinilai
401	Kabupaten Waropen	0	Tidak Dapat Dinilai
402	Kabupaten Mamberamo Raya	0	Tidak Dapat Dinilai

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
403	Kabupaten Tambrauw	0	Tidak Dapat Dinilai
404	Kabupaten Maybrat	0	Tidak Dapat Dinilai
405	Kabupaten Memberamo Tengah	0	Tidak Dapat Dinilai
406	Kabupaten Yalimo	0	Tidak Dapat Dinilai
407	Kabupaten Lanny Jaya	0	Tidak Dapat Dinilai
408	Kabupaten Nduga	0	Tidak Dapat Dinilai
409	Kabupaten Puncak	0	Tidak Dapat Dinilai
410	Kabupaten Dogiyai	0	Tidak Dapat Dinilai
411	Kabupaten Intan Jaya	0	Tidak Dapat Dinilai
412	Kabupaten Pulau Taliabu	0	Tidak Dapat Dinilai
413	Kabupaten Kolaka Timur	0	Tidak Dapat Dinilai
414	Kabupaten Morowali Utara	0	Tidak Dapat Dinilai
415	Kabupaten Pegunungan Arfak	0	Tidak Dapat Dinilai

C. Kategori Kota

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
1	Kota Mojokerto	70,78	Sangat Inovatif
2	Kota Pekanbaru	70,57	Sangat Inovatif
3	Kota Bekasi	66,26	Sangat Inovatif
4	Kota Mataram	64,95	Sangat Inovatif
5	Kota Bengkulu	64,00	Sangat Inovatif
6	Kota Cimahi	62,85	Sangat Inovatif
7	Kota Surabaya	62,60	Sangat Inovatif
8	Kota Jambi	62,22	Sangat Inovatif
9	Kota Padang Panjang	62,04	Sangat Inovatif
10	Kota Semarang	60,79	Sangat Inovatif
11	Kota Serang	60,56	Sangat Inovatif
12	Kota Sukabumi	60,33	Sangat Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
13	Kota Tangerang Selatan	59,88	Inovatif
14	Kota Yogyakarta	59,29	Inovatif
15	Kota Surakarta	59,26	Inovatif
16	Kota Tegal	59,17	Inovatif
17	Kota Sawah Lunto	58,98	Inovatif
18	Kota Pare-Pare	58,89	Inovatif
19	Kota Manado	58,81	Inovatif
20	Kota Banjarmasin	58,55	Inovatif
21	Kota Kendari	57,28	Inovatif
22	Kota Singkawang	57,18	Inovatif
23	Kota Bandar Lampung	57,17	Inovatif
24	Kota Bima	57,17	Inovatif
25	Kota Probolinggo	56,98	Inovatif
26	Kota Blitar	56,88	Inovatif
27	Kota Palopo	56,51	Inovatif
28	Kota Bogor	56,48	Inovatif
29	Kota Denpasar	55,68	Inovatif
30	Kota Palembang	55,52	Inovatif
31	Kota Bontang	55,45	Inovatif
32	Kota Solok	55,42	Inovatif
33	Kota Pontianak	55,10	Inovatif
34	Kota Ternate	54,96	Inovatif
35	Kota Palu	54,95	Inovatif
36	Kota Pariaman	54,41	Inovatif
37	Kota Madiun	53,96	Inovatif
38	Kota Pekalongan	53,96	Inovatif
39	Kota Balikpapan	53,88	Inovatif
40	Kota Kediri	53,86	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
41	Kota Bitung	53,77	Inovatif
42	Kota Magelang	53,45	Inovatif
43	Kota Tangerang	53,23	Inovatif
44	Kota Palangka Raya	53,19	Inovatif
45	Kota Makassar	53,09	Inovatif
46	Kota Tidore Kepulauan	52,80	Inovatif
47	Kota Pasuruan	52,48	Inovatif
48	Kota Pagar Alam	51,92	Inovatif
49	Kota Gorontalo	51,47	Inovatif
50	Kota Bukittinggi	51,41	Inovatif
51	Kota Batu	51,35	Inovatif
52	Kota Bandung	51,27	Inovatif
53	Kota Kotamobagu	50,94	Inovatif
54	Kota Pangkal Pinang	50,21	Inovatif
55	Kota Metro	49,88	Inovatif
56	Kota Lubuklinggau	49,67	Inovatif
57	Kota Depok	48,74	Inovatif
58	Kota Banda Aceh	48,42	Inovatif
59	Kota Tebing Tinggi	48,40	Inovatif
60	Kota Padang	48,18	Inovatif
61	Kota Batam	47,50	Inovatif
62	Kota Gunungsitoli	47,22	Inovatif
63	Kota Salatiga	47,11	Inovatif
64	Kota Tomohon	46,80	Inovatif
65	Kota Tanjung Pinang	46,71	Inovatif
66	Kota Sungai Penuh	46,50	Inovatif
67	Kota Tarakan	46,44	Inovatif
68	Kota Banjarbaru	46,01	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
69	Kota Samarinda	45,44	Inovatif
70	Kota Banjar	44,56	Inovatif
71	Kota Malang	44,55	Inovatif
72	Kota Payakumbuh	44,47	Inovatif
73	Kota Medan	44,04	Inovatif
74	Kota Kupang	43,24	Inovatif
75	Kota Cirebon	41,41	Inovatif
76	Kota Dumai	41,03	Inovatif
77	Kota Padangsidimpuan	40,56	Inovatif
78	Kota Ambon	40,10	Inovatif
79	Kota Tanjung Balai	39,72	Inovatif
80	Kota Langsa	39,21	Inovatif
81	Kota Tasikmalaya	38,70	Inovatif
82	Kota Sibolga	38,20	Inovatif
83	Kota Jayapura	37,27	Inovatif
84	Kota Prabumulih	37,18	Inovatif
85	Kota Cilegon	37,06	Inovatif
86	Kota Subulussalam	35,60	Inovatif
87	Kota Sabang	28,18	Kurang Inovatif
88	Kota Tual	27,92	Kurang Inovatif
89	Kota Bau-Bau	15,30	Kurang Inovatif
90	Kota Pematang Siantar	14,10	Kurang Inovatif
91	Kota Lhokseumawe	10,60	Kurang Inovatif
92	Kota Binjai	10,00	Kurang Inovatif
93	Kota Sorong	0	Tidak Dapat Dinilai

Lampiran II RDG
Nomor : 000.10/398/BSKDN
Tanggal : 30 Januari 2023

PENERIMA PENGHARGAAN IGA 2022 BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 400.10.11 – 6302.A TAHUN 2022 TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH INOVATIF (*INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD*) 2022

A. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI PROVINSI TERINOVATIF

NO	PROVINSI	SKOR
(1)	(2)	(3)
1.	Provinsi Jawa Timur	80,790
2.	Provinsi Jawa Tengah	80,107
3.	Provinsi Sumatera Selatan	79,855
4.	Provinsi Jawa Barat	77,432
5.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	76,560
6.	Provinsi Sumatera Barat	75,614
7.	Provinsi Bali	73,363

B. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI KABUPATEN TERINOVATIF

NO	KABUPATEN	SKOR
(1)	(2)	(3)
1.	Kabupaten Banyuwangi	92,977
2.	Kabupaten Bogor	83,334
3.	Kabupaten Wonogiri	82,276
4.	Kabupaten Tabalong	81,910
5.	Kabupaten Sragen	78,696
6.	Kabupaten Temanggung	77,478
7.	Kabupaten Situbondo	77,336
8.	Kabupaten Padang Pariaman	76,099
9.	Kabupaten Indragiri Hilir	75,978
10.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	75,554
11.	Kabupaten Pamekasan	75,286
12.	Kabupaten Tanggamus	73,192

C. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI KOTA TERINOVATIF

NO	KOTA	SKOR
(1)	(2)	(3)
1.	Kota Mojokerto	77,530
2.	Kota Pekanbaru	76,782
3.	Kota Surabaya	75,078
4.	Kota Bekasi	74,951
5.	Kota Cimahi	74,103
6.	Kota Mataram	74,080
7.	Kota Semarang	73,813
8.	Kota Padang Panjang	73,098
9.	Kota Jambi	72,896
10.	Kota Bengkulu	72,668
11.	Kota Serang	71,284
12.	Kota Sukabumi	69,315

D. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI DAERAH TERTINGGAL TERINOVATIF

NO	DAERAH TERTINGGAL	SKOR
(1)	(2)	(3)
1.	Kabupaten Sumba Timur	65,008
2.	Kabupaten Lombok Utara	60,785
3.	Kabupaten Sorong	60,644
4.	Kabupaten Nias Barat	60,400

E. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI DAERAH PERBATASAN TERINOVATIF

NO	DAERAH PERBATASAN	SKOR
(1)	(2)	(3)
1.	Kabupaten Bintan	67,549
2.	Kabupaten Sanggau	67,042
3.	Kabupaten Sambas	65,606
4.	Kota Batam	64,588
5.	Kabupaten Karimun	63,996

SIWO PWI Beri Penghargaan Kepada Gubernur Papua dan Sekum KONI Papua

Penulis
Redaksi
-
7 Februari 2022
332

0

Gubernur Papua, Lukas Enembe

JAYAPURA (PT) – Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dan Sekretaris Umum (Sekum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua mendapat penghargaan Inisiator Olahraga Indonesia 2022 dari Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia (SIWO PWI).

Penghargaan kepada kedua tokoh Papua itu akan diserahkan tepat pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Siwo PWI Pusat akan memberikan penghargaan INISIATOR OLAHRAGA INDONESIA 2022 kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Sekum KONI Papua sebagai bentuk apresiasi terhadap mereka yang berprestasi terbaik, memiliki kepedulian dan mengabdikan diri di bidang olahraga,"ungkap Ketua SIWO PWI Pusat, Aagwa Ariwangsa dalam rilis yang diterima Papua Today.com, Senin (7/2).

Ariwangsa mengatakan, penetapan kedua tokoh Papua itu diambil oleh SIWO PWI Pusat merupakan hasil dari pengamatan oleh tim keabsahan dan keputusan Dewan Juri Panitia Pelaksana "Inisiator Olahraga 2022".

"Semoga dengan penghargaan ini Gubernur Papua semakin termotivasi dalam memberikan yang terbaik untuk kejayaan dan kaharuman nama bangsa dan negara Indonesia melalui bidang olahraga,"imbuh Ari (panggilan akrabnya).

Penghargaan kepada Gubernur Lukas Enembe dan Sekum KONI Papua ini, lanjut Ari, juga dilatarbelakangi atas pengabdian keduanya dalam mendorong prestasi olahraga dan sukses dalam penyelenggaraan PON XX. Serta berhasil membawa kontingen Papua berada di posisi 4 nasional.

Bahkan, Gubernur Papua dinilai mampu menjawab tantangan dan berhasil menggelar PON XX Tahun 2021 di masa pandemi Covid-19.

Sedangkan Sekum KONI Papua sukses membawa kontingen Papua berhasil meraih 93 medali emas, 66 perak dan 102 perunggu. Pencapaian ini luar biasa, karena Papua juara pertama diluar pulau Jawa.

"Kita mengamati dengan baik dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber atas upaya-upaya Gubernur Papua dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan PON di masa pandemi Covid-19 yang sangat sulit. Sedangkan Sekum KONI adalah tokoh muda Papua yang sukses mengantarkan Papua ke posisi 4 besan PON. Ini pencapaian luar biasa sepanjang PON, Papua mampu juara pertama di luar pulau Jawa. Papua menggeser Sumatera, Kalimantan, Bali dan Sulawesi yang selama ini menduduki posisi 5 besar PON,"jelasnya.

Ketua SIWO PWI Pusat menyampaikan bahwa kedua tokoh Papua tersebut termasuk tokoh populer dibidang olahraga karena dalam kurun waktu 4 tahun terakhir berhasil mendapatkan penghargaan dari PWI secara berturut-turut.

"Kami berharap bapak Gubernur dan pak Sekum KONI Papua bisa hadir untuk menerima langsung penghargaan ini,"pinta Ari yang pada PON XX Papua bersama Ketua PWI Pusat, Atal S Depari memantau langsung penyelenggaraan iven nasional itu dan mengamati langkah-langkah KONI Papua dalam strategi kontingen Papua memenangi setiap pertandingan di PON XX. (ist/nald)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Papua bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas

Dipindai dengan CamScanner

efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Papua. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Papua, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Papua menyajikan realisasi Belanja Daerah senilai Rp11,45 triliun. Dari nilai tersebut, diantaranya terdapat realisasi belanja senilai Rp1,57 triliun yang melampaui anggaran induk dengan rincian yaitu Belanja Barang dan Jasa senilai Rp403,70 miliar, Belanja Hibah senilai Rp437,44 miliar, Belanja Bantuan Sosial senilai Rp27,54 miliar, Belanja Modal senilai Rp566,11 miliar, dan Belanja Tidak Terduga senilai Rp141,02 miliar.

Atas pelampauan realisasi belanja tersebut Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Anggaran Perubahan sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, namun penetapan peraturan gubernur tersebut tidak melalui persetujuan bersama DPRP dan pengesahan Menteri Dalam Negeri serta pelaksanaan dan substansi belanja tersebut tidak sepenuhnya memenuhi kriteria antara lain yaitu keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan penyesuaian yang diperlukan terhadap pelampauan realisasi belanja tersebut dan dampaknya terhadap penyajian belanja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Papua tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dipindai dengan CamScanner

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 01.B/LHP/XIX.JYP/05/2023 tanggal 10 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jayapura, 10 Mei 2023
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Papua
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN
PROVINSI PAPUA

Dr. Martuama Saragi S.T., M.M., CSFA
Register CSFA Nomor R.0123.2022

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor : B/737/RB.06/2022
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022

6 Desember 2022

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
di

Jayapura

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Papua. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menekankan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Papua tahun 2022 adalah **59,49** dengan kategori "**CC**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	**Komponen Pengungkit**			
	I. Pemenuhan	20,00	11,96	11,97
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,31	4,67
	III. Reform	30,00	14,30	14,09
Total Komponen Pengungkit		**60,00**	**30,57**	**30,73**

No	Komponen penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
B.	**Komponen Hasil**			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,52	7,62
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,76	8,70
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,06	8,22
4.	Kinerja Organisasi	10,00	4,05	4,22
Total Komponen Hasil		**40,00**	**26,39**	**28,76**
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		**100,00**	**56,96**	**59,49**

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit.

2. Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Provinsi Papua, sebanyak 8 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	2021	2022	Sumber Data
1.	ASN Profesional	0-100	26,48	25,91	BKN
2.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	1,8	1,88	Kementerian PANRB
3.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	67,93	75,60	LKPP
4.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,24	3,25	Kementerian PANRB
5.	Kapabilitas APIP	0-5	2	2	BPKP
6.	Maturitas SPIP	0-5	2	2	BPKP
7.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	44,72	32,45	ORI
8.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	36,6	47,38	ANRI

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat 6 (enam) indikator yang meningkat yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Kualitas Pelayanan Publik, Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP dan Kualitas Pengelolaan Arsip. Sedangkan terdapat 2 (dua) indikator yang mengalami penurunan yaitu penilaian ASN profesional dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

3. Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi yang telah kami sampaikan pada tahun sebelumnya, diantaranya:
   a. Telah berusaha meningkatkan pelaksanaan internalisasi reformasi birokrasi pada seluruh anggota organisasi dan unit kerja dengan melakukan kegiatan bimbingan teknis untuk peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah dan pertemuan rutin antar perangkat daerah maupun tim RB untuk menyampaikan progres pelaksanaan reformasi birokrasi;

b. Pemerintah Provinsi Papua telah berkoordinasi dengan Kantor Regional IX BKN Jayapura dalam pelaksanaan *assessment* dan hasilnya dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan;
c. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa telah mengalami peningkatan;
d. Telah Saat ini sedang dalam proses upaya peningkatan level kapabilitas APIP dan maturitas SPIP.

4. Selain tindak lanjut tersebut, Pemerintah Provinsi Papua juga telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya sebagai berikut:
   a. Dalam peningkatan manajemen perubahan telah dilakukan upaya:
      - Penetapan agen perubahan pada beberapa perangkat daerah namun belum seluruh PD menetapkan agen perubahan sebagai salah satu roda penggerak perubahan di masing-masing perangkat daerah dan agen perubahan yang telah ditetapkan pada beberapa Perangkat Daerah (PD) belum menyusun rencana aksi dari masing-masing program perubahan yang akan mereka lakukan;
      - Sosialisasi dan internalisasi budaya kerja maupun reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai, namun belum mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi atau media sosial dalam menginformasikan capaian-capaian positif dari implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Papua;
   b. Penerapan tata kelola SPBE belum maksimal, hal tersebut tergambar dari indeks SPBE Pemerintah Provinsi Papua yaitu 1,88 kategori cukup;
   c. Perencanaan kinerja belum terbangun dengan baik, khususnya di PD, hal ini disebabkan oleh penjenjangan kinerja yang belum disusun untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi;
   d. *Assessment* telah dilakukan terhadap seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, namun masih belum dilakukan *assesment* terhadap seluruh pegawai dan hasil *assessment* belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi;
   e. Dalam pelayanan publik belum ada kebijakan sistem kompensasi kepada penerima layanan, bila menerima layanan tidak sesuai standar;
   f. Dalam peningkatan pengawasan telah dilakukan upaya;
      - Pembangunan Zona Integritas pada beberapa perangkat daerah, namun belum ada Unit kerja/PD yang memperoleh predikat WBK/WBBM;
      - Penetapan kebijakan benturan kepentingan, WBS dan pengendalian gratifikasi, namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan-kebijakan tersebut;

5. Terkait komponen hasil, menunjukan bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Papua memperoleh nilai dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	66,05	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	87,00	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	82,24	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5	Survei Internal Organisasi	0-100	72,84	SPI Internal oleh KPK

Selain hal tersebut, komponen hasil juga mencakup penilaian atas capaian penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 dan penghargaan-penghargaan lain yang diterima.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Melakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 area pembangunan reformasi birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasi atau sosialisasikan terhadap seluruh pegawai ;
2. Menunjuk individu atau tim yang mempunyai kapasitas dalam mendorong perubahan pada organisasi untuk menjadi agen perubahan pada seluruh PD, sehingga perubahan budaya kinerja dapat diwujudkan.sampai dengan tingkat PD. Disamping itu, agen perubahan yang telah ditetapkan menyusun rencana kerja agen perubahan yang terukur, sehingga perubahan yang dilakukan dapat dimonitoring dan dievaluasi secara berkala;
3. Mengoptimalkan media komunikasi yang ada untuk menyampaikan informasi capaian-capaian yang berkaitan dengan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
4. Melakukan Regulatory Impact Analysis (RIA) agar dapat menjamin efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang telah disusun;
5. Meningkatkan penerapan manajemen SPBE di Pemerintah Provinsi Papua, dan memastikan arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi Papua sesuai dengan arsitektur SPBE Nasional;
6. Melakukan reviu penjenjangan kinerja berdasarkan PermenPANRB No. 89 tahun 2021 sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah dapat selaras dan akan mendukung dalam pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi;

7. Melaksanakan *assessment* kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi serta memetakan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal;
8. Menyusun kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima layanan apabila menerima layanan tidak sesuai standar dan menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat;
9. Meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas, sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, melalui berbagai inovasi, sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat unit kerja;
10. Melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan pengawasan internal dan integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dengan menyusun laporan implementasi masing-masing kebijakan pengawasan internal dan integritas.

Demikian laporan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami mengharapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Papua.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan :

PENGHARGAAN

Kepada :

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

atas prestasinya dalam :

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

dengan predikat nilai

Jakarta, 06 Desember 2022

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

ABDULLAH AZWAR ANAS

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor : B/807/AA.05/2022 6 Desember 2022
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
di
Jayapura

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Papua Sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Papua. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil *(result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Provinsi Papua telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

a. Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah (PD) telah dilakukan dan telah memberikan rekomendasi perbaikan implementasi yang detail untuk peningkatan implementasi SAKIP yang lebih baik;

b. Telah memiliki ukuran kinerja untuk jenjang PD, penjenjangan kinerja telah dicoba untuk diselaraskan antar jenjang pada PD. Hal ini terlihat dari dokumen perjanjian kinerja pada PD yang mengaitkan kinerja satu jenjang diatasnya;

c. Telah melakukan pembinaan implementasi SAKIP kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua untuk peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan nilai **66,05** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja yang **"baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,26
2.	Pengukuran Kinerja	30	16,89
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,20
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,70
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**66,05**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**

Hasil evaluasi tahun 2022 "**tidak diperbandingkan**" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Papua tahun 2022 sebagai berikut:

1) **Perencanaan kinerja**

Pemerintah Provinsi Papua telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja dan dokumen lainnya baik pada tingkat PD. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya:

- Masih terdapat indikator kinerja yang dapat diturunkan ke tingkat PD, hal ini untuk memastikan penjenjangan kinerja yang sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan organisasi;
- Penjenjangan/*cascading* kinerja pada level Pemda dan PD perlu diuji apakah telah mengacu pada PermenPANRB No. 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja. Penjenjangan kinerja tersebut perlu dilakukan untuk memastikan keselarasan kinerja dari tingkat organisasi sampai dengan kinerja individu;
- Identifikasi kinerja *crosscutting* belum dilakukan secara menyeluruh dan menyentuh aspek implementasi yang efektif dan efisien.

2) **Pengukuran Kinerja**

Pemerintah Provinsi Papua dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan rencana aksinya kepada seluruh perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya:

- Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berkala sebagai referensi pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan program atau kegiatan belum optimal;
- Belum seluruh PD mengunggah rencana aksinya sehingga belum didapat informasi pemanfaatannya terhadap pengukuran capaian kinerja. Pengukuran rencana aksi masih lebih kepada realisasi anggaran namun belum memberikan umpan balik perencanaan.

3) **Pelaporan Kinerja**

Pemerintah Provinsi Papua telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat pemda maupun tingkat Perangkat Daerah (PD). Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan PD. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya:

- Laporan kinerja pada level PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai di antaranya tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Hal tersebut terlihat pada laporan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan dari belum adanya informasi tentang pemanfaatan rekomendasi pada rencana aksi tahun berikutnya. Hal tersebut terlihat pada seluruh rencana aksi PD yang diunggah dalam aplikasi ESR.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Provinsi Papua telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah (PD), laporan hasil evaluasi tersebut telah memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya:

- Evaluasi atas program baru sebatas pada pelaksanaan program dan penyerapan anggaran, belum mengarah kepada hasil program dan dampak program;
- Hasil evaluasi internal belum seluruhnya ditindaklanjuti dengan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada perencanaan selanjutnya;
- Perlu memanfaatkan hasil evaluasi internal kinerja menjadi dasar *reward* dan *punishment* sehingga mendorong peningkatan implementasi SAKIP.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyusun penjenjangan/*cascading* kinerja pada level Pemda dan PD mengacu pada PermenPANRB No. 89 Tahun 2021, mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) pencapaian kinerja;
2. Melakukan identifikasi kinerja *crosscutting* secara menyeluruh dan memanfaatkanya dalam penetapan perjanjian kinerja;
3. Mendorong seluruh PD untuk menyusun dan mengunggah rencana aksi, serta meningkatkan pemanfaatannya sebagai media monitoring dan evaluasi kinerja;

4. Meningkatkan kualitas evaluasi internal sehingga memberikan umpan balik perbaikan perencanaan;
5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada level PD sehingga mampu memberikan informasi yang memadai tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Meningkatkan pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan dan pada rencana aksi tahun berikutnya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, dan pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua serta menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Papua.

Jakarta 14/12/2022, Untuk pertama kalinya sejak tahun 2014 Provinsi Papua mengikuti Monitorng dan Evaluasi Keterbukaan Informasi (MONEV-KI) mendapat Predikat Provinsi Informatif pada Tahun2022.

Kepala Dinas KOMINFO Papua, Jeri Agus Yudinato, S.Kom menegaskan Ini merupakan proses yang cukup panjang dalam memperbaiki kinerja pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Provinsi Papua serta komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah dalam Hal ini Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe, SIP, MH mendorong pejabat dibawahnya mulai dari Sekeratarsi daerah selaku Atasan Pejabat Pengeola Informasi dan Dokumentasi (PPID Utama), PPID Utama yang saat ini secara ex-officio di Jabat oleh Kepala Dinas KOMINFO, atasan PPID Pelaksana (para Kepala SKPD) untuk mengelola Informasi dan Dokumentasi secara terbuka/transparan sesuaiketentuanyangada.

MONEV-KI Tahun 2022, terjadi lonjakan partisipasi Badan Publik sangat signifikan, Badan Publik yang mengikuti sebanyak 372 seuruh Indonesai terdiri dari: Kementerian/Lembaga, BUMN, Perguruang Tinggi Negeri, Pemerintah Provinsi dan Partai Politik dengan hasil penilaian meliuti: Kurang Informatif, Cukup Informatif, Menuju Informati dan Informatif. MONEV-KI Tahun 2022 mengambil tema DIGITALISASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK DALAM MASA RECOVERY COVID-19. Aspek penilaiannnya meliputi Inovasi Pelayanan Informasi yang berkesinambungan meliputi Keterbaruan Inovasi, Penggunaan Teknologi dan Informasi, Kemanfaatan Inovasi, Keunikan dan Aksestabilitas dan Strategi badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi itu sendiri secara berkesinambungan. Penilaian juga dilakukan klarifikasi oleh Tim Penilai yang terdiri Komisioner Informasi Pusat, Akademisi, Praktisi ataupun Organisasi Masyarakat yang memiliki kompetensi dibidang keterbukaanInformasi.

Keberhasilan Tahun 2022 ini merupakan pemicu semangat bagi provinsi papua untuk mempertahankan dan meningkat kinerjanya dalam mengelola Keterbukaan Informasi pada lingkup Pemerintahan sehingga Publik / Masyarakat bisa terlayani dengan baik dan kinerja Pemerintahlebihtransparansesuaiketentuanyangberlaku.

Peda penganugerahan Tahun 2022 dihadiri langsung oleh Menteri POLHUKAM RI, beberapa Gubernur, Pejabat Eselon I di tingkat Kementerian, Rektor, Pimpinan BUMN, Pimpinan Partai Politik dan untuk Gubernur Papua diwakili oleh Kepala Dinas KOMINFO Papua. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor : B/567/PP.02/2022 22 Desember 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022**

Yth.
Gubernur Papua
di
Tempat.

Bersama ini kami informasikan kepada Bapak/Ibu bahwa pada tahun 2022 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik pada tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dengan hasil sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1035 Tahun 2022.

Sebagai rekomendasi perbaikan dari hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan, berikut kami sampaikan hal dimaksud untuk dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti pada **Lampiran I**.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :

DIAH NATALISA
Deputi Bidang Pelayanan Publik
NIP. 196311151988102001

Tembusan:
1. Menteri PANRB;
2. Pimpinan unit yang dievaluasi.

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 220119IWQR

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran I

Nomor : B/567/PP.02/2022

Tanggal : 22 Desember 2022

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

TAHUN 2022

Instansi : Pemerintah Provinsi Papua
Unit Kerja : DPMPTSP
Capaian Indeks : 3,27 (B-)

NO	ASPEK	REKOMENDASI
1.	Kebijakan Pelayanan	1. Perlu dipastikan kembali format penyusunan dan publikasi dokumen Standar Pelayanan agar sesuai dengan ketentuan Permenpan RB no 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, serta dalam proses pembuatan standar pelayanan tersebut dilakukan pendokumentasian baik terkait arsip administratif kegiatan, catatan/notulensi hasil pembahasan maupun rekaman foto kegiatan. 2. Perlu dipastikan kembali Forum Konsultasi Publik diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Permenpan RB no 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, serta dalam proses penyelenggaraan FKP dilakukan pendokumentasian baik terkait arsip administratif kegiatan catatan/notulensi hasil pembahasan maupun rekaman foto kegiatan. 3. Perlu dipastikan kembali kelengkapan dari pernyataan “Maklumat Pelayanan” serta sarana dan media publikasinya 4. Perlu dipastikan kembali melakukan Survey Kepuasan Masyarakat, minimal sesuai dengan ketentuan Permenpan RB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, baik dari sisi komponen instrumen maupun waktu pelaksanaan survei, dengan memanfaatkan berbagai sarana/media yang sedapat mungkin memudahkan bagi masyarakat pengguna layanan untuk mengisi survei. Dalam proses penyelenggaraan survei dilakukan

		pendokumentasian baik terkait arsip administratif kegiatan catatan/notulensi hasil pembahasan maupun rekaman foto kegiatan. 5. Standar Pelayanan, hasil FKP, dan hasil SKM agar ditindaklanjuti dan dilakukan monev atas pelaksanaan tindak lanjut tersebut.
2.	Profesionalisme SDM	1. Jam/waktu pelayanan yang telah ditentukan agar dipenuhi oleh UPP, baik waktu/jam layanan di kantor maupun di luar kantor. 2. Perlu dipastikan agar kode etik yang ada tetap up to date dengang melakukan monev dan jika perlu dilakukan penyesuaian dengan masalah kondisi kekinian. 3. Perlu dipastikan ada apresiasi pada pegawai berkinerja baik serta diiringi pemberian penghargaan yang sesuai dengan kondisi kekinian, dan ada tindakan mentoring/*coaching* pada pegawai yang kinerjanya kurang baik. 4. Perlu dipastikan dilakukan evaluasi berkala untuk menjaga kualitas profesonalisme SDM
3.	Sarana Prasarana	Perlu dipastikan perawatan yang baik atas sarana dan prasarana yang tersedia sehingga kondisinya selalu dalam keadaan optimal dan memberi kenyamanan bagi para pengguna layanan
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	1. Perlu dipastikan kebaruan data dalam kondisi yang selalu terkini (*up to date*) 2. Perlu dipastikan perawatan jaringan elektronik maupun internet, agar sistem informasi yang tersedia selalu dalam keadaan siap pakai (*on line*) sehingga dapat diakses oleh pengguna layanan
5.	Konsultasi dan Pengaduan	1. Perlu dipastikan agar semua saluran konsultasi dan pengaduan yang tersedia selalu dalam keadaan aktif (*on*), sehingga dapat diakses oleh pengguna layanan 2. Perlu dipastikan masyarakat yang memberikan pengaduan mendapatkan informasi tindak lanjut dari pengaduan yang disampaikan, dengan bukti-bukti tindaklanjut yang dilakukan. Dalam proses tindak lanjut pengaduan agar dilakukan pendokumentasian baik terkait arsip administratif kegiatan tindak lanjut maupun rekaman foto kegiatan tindak lanjut.
6.	Inovasi	1. Perlu dipastikan pada setiap inovasi yang dilakukan dapat memberikan dampak manfaat bagi pengguna

		layanan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi pada setiap inovasi yanhg dihasilkan 2. Dalam proses inovasi agar dilakukan pendokumentasian baik terkait arsip administratif inovasi, catatan/notulensi hasil pembahasan inovasi maupun rekaman foto kegiatan inovasi, yang menggambarkan kondisi sebelum inovasi dan kondisi sesudah inovasi.

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

TAHUN 2022

Instansi : Provinsi Papua
Unit Kerja : Samsat
Capaian Indeks : 3,22 (B-)

NO	ASPEK	REKOMENDASI
1.	Kebijakan Pelayanan	1. Perlu dilakukan evaluasi terhadap standar pelayanan dengan melibatkan unsur masyarakat 2. Perlu ditambah media publikasi dalam hal penyebarluasan standar pelayanan (komponen *service delivery*) 3. Survey kepuasan masyarakat agar dapat disesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 4. Laporan hasi SKM sebaiknya juga berisikan informasi tindaklanjut SKM
2.	Profesionalisme SDM	Perlu adanya program untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan (contoh: penghargaan bagi pegawai, coaching, team building, dll)
3.	Sarana Prasarana	1. Dapat disediakan tempat penitipan jaket dan helm 2. Dapat ditambahkan petugas parkir 3. Dapat ditambahkan kanopi untuk tempat parkir 4. Dapat ditambahkan CCTV untuk meningkatkan keamanan parkir 5. Ruang tunggu dapat ditambahkan sarana *charging* gawai, 6. Dapat ditambahkan pendingin ruangan di ruang tunggu 7. Dapat ditambahkan sarana wifi di ruang tunggu 8. Dapat ditambahkan monitoring kebersihan secara berkala

		9. Dapat ditambahkan (petugas pemandu, petugas yang mampu berbahasa isyarat) 10. Dapat ditambahkan monitoring APAR secara berkala 11. Dapat ditambahkan jalur evakuasi /titik kumpul 12. Dapat ditambahkan CCTV untuk penjagaan keamanan ruang tunggu 13. Dapat ditambahkan bahan cetak informasi layanan 14. Dapat ditambahkan register tamu (manual/elektronik)
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	1. Dapat ditambahkan pengelolaan aduan melalui SP4N Lapor 2. Dapat ditambahkan penggunaan sistem informasi untuk penyebarluasan informasi ke masyarakat (contoh: *website*, media sosial, dll)
5.	Konsultasi dan Pengaduan	1. Dapat ditambahkan fasilitas sarana & prasarana konsultasi dan pengaduan 2. Dapat ditambahkan rekapitulasi aduan dan tindaklanjutnya
6.	Inovasi	Dapat dilakukan inovasi untuk semakin meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat